



# MERETAS BATAS



*"BERGERAK  
BERSAMA  
MEMBENTUK  
PETA  
MASA DEPAN"*



TEMPO  
INSTITUTE

# **MERETAS BATAS**

## **“BERGERAK BERSAMA MEMBENTUK PETA MASA DEPAN”**

**Tim Penulis dan Editor:**

Qaris Tajudin, Yosep Suprayogi, Yos Rizal, Purwanto Setiadi, Sapto Yunus,  
Tulus Wijanarko, Khairul Anam



# **MERETAS BATAS**

## **“BERGERAK BERSAMA**

## **MEMBENTUK PETA MASA DEPAN”**

### **Penerbit:**

Tempo Institute  
Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, RT 3 RW 5, Grogol Utara,  
Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota  
Jakarta 12210  
Tempo-Institute.org

### **Kerja Sama:**

Tempo Institute bekerja sama dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan  
Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

### **Cetakan Pertama:**

Pertama, September 2024

### **Tim Penulis dan Editor:**

Qaris Tajudin, Yosep Suprayogi, Yos Rizal, Purwanto Setiadi, Sapto Yunus, Tulus  
Wijanarko, Khairul Anam

### **Editor Foto:**

Jati Mahatmaji

### **Desainer dan Tata Letak:**

Abadi

### **Ilustrasi Sampul:**

Adhya Ranadireksa

### **ISBN:**

978-623-93613-5-8



## MENEMBUS BATAS

Bagaimana telepon seluler bisa mengancam industri pertanian? Kenapa budaya gotong-royong bisa mengganggu suplai pekerja?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin tidak bisa dijawab oleh analisis ekonomi yang hanya berfokus pada angka-angka. Seberapa lama pun kita memelototi data statistik, jawabannya tidak akan bisa kita temukan.

Sering, ketika berbicara tentang ekonomi, kita memakai kacamata kuda saat melihat angka-angka statistik. Kita seolah-olah tidak peduli bahwa ekonomi hanyalah satu dari sekian banyak aktivitas manusia. Memisahkan ekonomi dari aktivitas lainnya hanya akan membuat kita kehilangan konteks. Akibatnya, banyak pertanyaan tak terjawab, termasuk kedua pertanyaan di atas.

Buku ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan menjebol semua sekat yang memisahkan ekonomi dari sektor-sektor lain, seperti politik, sosial, budaya, dan agama, termasuk pendidikan, yang menjadi fokus penting dalam penelitian yang tercantum di buku ini.

Terus terang, kami dari Tempo Institute sempat bertanya-tanya saat diminta membantu menuliskan kembali hasil penelitian yang dilakukan 20 perguruan tinggi vokasi di seluruh Indonesia ini. Pertanyaan terbesar adalah kenapa sebuah direktorat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan penelitian tentang ekosistem ekonomi. Bukankah sudah banyak lembaga lain—baik pemerintah maupun swasta—yang melakukan hal ini? Belum lagi sejumlah akademisi yang rutin melakukan hal serupa.

Kuncinya terletak pada *angle* atau sudut pandang. Sebuah warung soto yang sama bisa di-*review* oleh belasan penulis kuliner, tapi setiap tulisan bisa berbeda, bergantung pada *angle* atau sudut pandang yang diambil setiap penulisnya.

Penelitian yang dilakukan Direktorat Mitras DUDI di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek ini memiliki sudut pandang yang sangat spesifik, yaitu bagaimana pendidikan vokasi bisa berkontribusi dengan potensi ekonomi di setiap daerah; bagaimana lembaga pendidikan bisa merespons kebutuhan tenaga terampil di dunia industri. Pendeknya, antara ekonomi dan pendidikan itu *nyambung*. Hal ini didasari kesadaran

bahwa masih banyak ditemukan ketidakersambungan di antara keduanya: pendidikan ke barat, padahal ekonomi mengarah ke timur.

Untuk bisa *nyambung*, sekat antara pendidikan dan ekonomi harus dirobohkan. Dan keajaiban kemudian terjadi. Saat satu sekat roboh, sekat lain juga ikut tumbang. Sekat-sekat yang memisahkan agama, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya juga berhasil luruh. Hal itulah yang kemudian membuat hasil penelitian di 27 provinsi ini bisa melihat permasalahan dengan lebih holistik. Sekat-sekat yang selama ini muncul akibat ego sektoral tak terlihat dalam penelitian ini. Para peneliti menggelar puluhan diskusi terfokus dengan ribuan narasumber dari berbagai sektor untuk melihat permasalahan lebih utuh.

Dan hasilnya sungguh mengejutkan. Banyak temuan yang selama ini tak tampak dalam analisis ekonomi bermunculan dalam penelitian ini. Di banyak daerah yang sektor pertaniannya kuat, misalnya, ditemukan banyak keluhan tentang tersendatnya proses regenerasi. Anak-anak muda tak lagi mau turun ke sawah, ladang, atau perkebunan karena dianggap tidak keren. Belum lagi kendala sinyal di sejumlah perkebunan yang membuat mereka memilih tak menggerakkan kaki. Di daerah lain, budaya gotong-royong yang seharusnya positif justru memanjakan angkatan kerja muda, sehingga menurunkan etos kerja dan determinasi mereka.

Contoh menarik lainnya adalah bagaimana Bali, yang selama ini diasumsikan didominasi pariwisata, ternyata memperoleh pendapatan terbesarnya justru dari sektor pertanian. Di Nusa Tenggara Timur, pariwisata Labuan Bajo yang memesona itu ternyata memberikan dampak pada terpinggirkannya orang lokal dari pusat ekonomi karena harga tanah yang meroket dan hanya dapat dibeli investor besar.

Hal-hal seperti itu turut dipotret dalam penelitian ini, meski data-data kuat dan angka-angka statistik disertakan. Penelitian ini berhasil menghidupkan angka-angka mati-mengembalikan sisi kemanusiaan dalam wajah ekonomi. Ekonomi bukan sekadar angka. Di dalamnya ada wajah manusia yang harus diwakili.

**Tim Penulis Tempo Institute**

## MEMOTRET POTENSI

Dalam banyak pidato di berbagai kesempatan sering dikatakan bahwa pendidikan vokasi harus mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja, selaras dengan kebutuhan zaman, menghasilkan lulusan siap kerja, kompeten, dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan hal itu, tentu sudah banyak hal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Vokasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Di antaranya adalah mendekatkan pendidikan vokasi dengan dunia kerja.

Beragam program serta kebijakan yang mendorong kolaborasi antara satuan pendidikan vokasi dengan industri diluncurkan dengan anggaran yang tidak sedikit. Cara ini efektif mengingat kini sudah banyak praktik baik kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri yang kita kenal dengan DUDI. Namun apabila ditanya apakah sudah cukup, tentu jawabannya belum.

Kemitraan hanyalah sebuah cara (*tools*), bukan tujuan. Kemitraan yang berkelanjutan akan membentuk sistem yang aktor-aktor di dalamnya saling berinteraksi, saling tergantung, dan saling menguntungkan secara terus-menerus. Inilah yang kemudian disebut dengan ekosistem.

Dalam ekosistem itu yang berperan bukan hanya para aktor pendidikan. Semua pihak diharapkan memberikan kontribusi, mulai dari aktor pendidikan, dunia industri, para penggerak ekonomi, pemerintah, dan lain sebagainya. Sekat-sekat yang selama ini membuat mereka tak bertemu harus diruntuhkan agar semua bisa bergerak bersama dalam pembangunan ekonomi.

Oleh sebab itu, mau tak mau pendidikan vokasi harus menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi daerah. Pendidikan vokasi bukan bagian terpisah, tapi satu kesatuan dengan elemen ekonomi lainnya. Hanya dengan demikian pendidikan vokasi tidak mengira-ngira sendiri kebutuhan dunia kerja di masa mendatang. Program studi apa yang dibuka di suatu daerah, seperti apa kurikulumnya, keterampilan apa yang harus diajarkan, semuanya dirancang untuk pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Dari kesadaran itulah maka Direktorat Jenderal Vokasi bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggelar Program Pengu-

atan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah. Tujuan utama program ini adalah agar pendidikan vokasi relevan dengan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi daerah.

Ada tiga hal penting yang menjadi tulang punggung program ini. Pertama, strategi untuk menyelaraskan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kebutuhan pasar kerja. Fokusnya adalah pada keterampilan lokal yang unik sesuai dengan karakteristik daerah, serta jenis pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan di masa depan. Semua ini dirancang dengan mengacu pada potensi ekonomi daerah yang menjadi target, sehingga lulusan pendidikan vokasi memiliki keahlian yang relevan.

Kedua, meningkatkan jumlah dan kualitas riset terapan yang berakar pada kekuatan dan potensi daerah, sehingga inovasi benar-benar berlandaskan pada keunggulan lokal.

Terakhir, partisipasi dan keterlibatan Pemerintah Daerah, DUDI dan para pemangku kepentingan lainnya. Mereka diharapkan lebih berkomitmen dalam mendukung kebijakan dan program prioritas pendidikan vokasi di daerah, dengan harapan terciptanya sinergi yang lebih baik dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif penting lainnya.

Program yang didanai oleh LPDP ini ingin memotret potensi ekonomi setiap daerah dan menjadikan pendidikan vokasi sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari potret itu. Kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada LPDP karena telah memberikan kepercayaan kepada satuan pendidikan vokasi untuk mengerjakan riset yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh insan vokasi. Mereka yang selama ini kental akan aktivitas di bengkel dan *workshop*, diminta untuk berjibaku mengadakan pertemuan dan diskusi dengan berbagai pihak.

Ada dua “pisau bedah” yang dipakai oleh para peneliti dari puluhan lembaga pendidikan vokasi ini, yaitu metode *foresight* dan *system dynamics*.

*Foresight* digunakan untuk melihat masa depan. Gambarannya lebih mirip seperti mesin waktu, dibanding teropong. Saat menggunakan teropong kita hanya pasif melihat perubahan yang terjadi di masa depan. Sedangkan dengan mesin waktu *foresight* kita tidak hanya meneropong masa depan, tapi ikut aktif mempengaruhinya, mendesainnya, membenutuknya.

*Foresight* adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu pembuat kebijakan menghadapi isu-isu kompleks dengan pemahaman

mendalam tentang peluang dan tantangan masa depan.

Kekuatan utamanya terletak pada pendekatan yang partisipatif. Peneliti tidak hanya merangkum gagasan-gagasan masa depan melalui ruang tertutup dan tembok tinggi, melainkan membuka ruang diskusi seluas mungkin, termasuk dengan kelompok yang berseberangan. Setiap skenario atau gagasan yang dibentuk juga didasarkan bukan hanya pada keinginan individu ataupun kelompok melainkan hasil dari kesepakatan bersama.

Sedangkan pendekatan *system dynamics* digunakan untuk memahami masalah kompleks melalui pemodelan. Ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan tiruan dari dunia nyata. Metode ini menekankan pentingnya model yang memiliki banyak titik kontak dengan kenyataan, di mana perbandingan berulang dengan dunia nyata menjadikan model tersebut lebih kokoh.

Semua hal inilah yang membuat program ini menjadi salah satu terobosan yang berhasil membuktikan bahwa kemitraan *pentahelix* (satuan pendidikan vokasi, industri, pemerintah, komunitas, dan media massa) bukan merupakan istilah semata, melainkan menjadi suatu aktivitas yang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya.

Selama setahun penelitian ini dilakukan dengan melibatkan ribuan orang. Kini manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh satuan pendidikan vokasi secara lembaga, tetapi juga secara individu dari insan vokasi. Siapa sangka dosen-dosen di perguruan tinggi vokasi beberapa ditunjuk menjadi tim pakar perencanaan daerah di tingkat provinsi. Jumlah kemitraan dengan industri pun meningkat pesat bahkan terjadi pengimbasan ke satuan pendidikan vokasi lainnya, baik di PTV, SMK, dan LKP. Melalui ekosistem kemitraan, hubungan antar-pemangku kepentingan daerah semakin mesra karena sudah tidak ada sekat-sekat pembatas lagi.

**Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi**

## MELIHAT DARI SEMUA SUDUT

*Triple Helix*, begitulah konsep kolaborasi yang dicetuskan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff pada 1995. Ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan industri, sebuah konsep yang cukup mudah dipahami namun memiliki banyak dinamika dalam implementasinya. Terlebih konsep *triple helix* mengalami perkembangan menjadi *penta helix*, di mana aktor yang terlibat dalam kolaborasi semakin banyak, seperti halnya Program Penguatan Kemitraan Ekosistem Untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah. Program ini diinisiasi oleh Direktorat Mitras DUDI, Ditjen Vokasi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sejak 2021, LPDP bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah berkolaborasi melalui Program Riset Keilmuan Terapan Dalam Negeri dalam rangka mendukung penguatan ekosistem pendidikan vokasi sebagai upaya dukungan dalam menghasilkan produk nyata yang dapat dihilirkan kepada masyarakat.

Pada 2023, LPDP kembali berkolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek melaksanakan program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah untuk mendorong kolaborasi antara satuan pendidikan vokasi dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan arah pembangunan dan pengembangan industri di daerah/wilayah. Perjanjian kerja sama antara LPDP dengan Ditjen Vokasi telah ditetapkan pada 23 Juni 2023 dengan komitmen kerja sama ini bersifat *multiyears* (tiga tahun) dengan komitmen pendanaan sebesar Rp 55 miliar yang dibagi menjadi tiga tahun pendanaan sbb:

- A. Tahun 2023 sebesar Rp15 miliar.
- B. Tahun 2024 sebesar Rp 20 miliar, dan
- C. Tahun 2025 sebesar Rp 20 miliar.

Program penguatan ekosistem ini memiliki tantangan tersendiri, pasalnya program yang disusun merupakan program dengan sistem konsorsium (kumpulan perguruan tinggi vokasi) yang mitra kerjanya berbasis *penta helix* (pemerintah, perguruan tinggi vokasi, industri, komunitas, dan media). Betapa tidak, sistem konsorsium sendiri memiliki tingkat

kompleksitas yang tinggi dalam menyamakan ritme kerja, tujuan yang akan dicapai, hingga harus menurunkan ego masing-masing anggota tim.

Namun, seiring berjalannya waktu, program ini telah menunjukkan *progress* sesuai dengan yang diharapkan, berkat pendampingan yang dilakukan oleh tim *Project Management Officer* (PMO) dalam hal ini tim Mitras Dudi, juga keterlibatan tim pakar yang terus memberikan masukan, saran dan *coaching* kepada seluruh tim konsorsium serta dukungan kuat dari LPDP. Walau dinamika pada setiap tim tetap saja ada, namun masih dalam koridor yang dapat diselesaikan secara internal.

Kami melihat program yang telah disusun ini merupakan program yang sangat baik karena memberikan manfaat baik pada level daerah hingga nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pada tahun pertama Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah berorientasi pada riset untuk menghasilkan *policy brief* yang disintesis dari *workforce planning* dan *innovation planning*. Hasil dari *policy paper* tersebut tidak sebatas berupa naskah kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga merupakan model ekosistem untuk mengembangkan kluster inovasi berbasis potensi daerah. Pada tahun kedua dan ketiga fokus program adalah pada implementasi riset terapan untuk menghasilkan inovasi yang selaras dengan pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan temuan dan analisis pada riset tahun pertama.

Sebagai penutup, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Indonesia tahun 2020-2024 yang mendukung Daya Saing dan Produktivitas SDM di antaranya SDM Vokasi, yang selama ini dinilai masih terjadinya *mismatch* antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karenanya LPDP turut memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam pemberian pendanaan riset bagi insan vokasi yang berada pada seluruh perguruan tinggi vokasi di Indonesia.

## **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)**

## “VOKASI DAN EKONOMI DALAM KONTEKS REGIONAL LOKAL EKONOMI INDONESIA”

Vokasi, sebagai bentuk pendidikan yang lebih terfokus pada penguasaan keterampilan praktis dan keahlian teknis, memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi regional dan lokal. Program vokasi dirancang dengan tujuan utama untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai, artinya lulusan pendidikan ini langsung dapat berkontribusi di dunia kerja tanpa memerlukan pelatihan tambahan yang panjang.

Fokus utama program vokasi adalah memberikan keterampilan praktis dan pengetahuan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan mampu langsung beradaptasi dengan tuntutan lapangan kerja. Di Indonesia, berbagai sektor seperti manufaktur, jasa, pariwisata, pertanian, dan teknologi terus berkembang pesat, menciptakan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan terampil di berbagai bidang. Oleh karena itu, program vokasi menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan keterampilan yang diperlukan oleh sektor-sektor ini.

Selain itu, program vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi daerah. Setiap daerah memiliki sektor ekonomi unggulan yang berbeda-beda, seperti pertanian di wilayah pedesaan, perikanan di wilayah pesisir, atau pariwisata di kawasan wisata. Dengan menawarkan program vokasi yang spesifik dan relevan dengan potensi lokal, lulusan pendidikan vokasi dapat langsung berkontribusi dalam mengembangkan industri di daerah mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dari luar daerah. Integrasi antara vokasi dan kebutuhan lokal menjadi strategi penting dalam memperkuat ekonomi daerah yang berbasis potensi sumber daya setempat.

Selanjutnya, peningkatan produktivitas melalui program vokasi juga

diiringi dengan peningkatan efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri setempat dapat bekerja lebih cepat, efektif, dan mampu mengurangi biaya pelatihan tambahan bagi perusahaan. Dalam jangka panjang, ini mendorong daya saing ekonomi daerah di pasar nasional maupun internasional. Daya saing ini tercipta karena tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik ekonomi daerah mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memperkuat kemandirian ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Di Indonesia, yang memiliki keragaman geografis dan sosial yang sangat luas, program vokasi memainkan peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja. Keragaman geografis Indonesia menyebabkan perbedaan besar dalam potensi ekonomi dan karakteristik pasar tenaga kerja di tiap daerah. Wilayah-wilayah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua memiliki kebutuhan tenaga kerja yang sangat variatif, tergantung pada potensi ekonomi yang dimiliki, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri manufaktur dan teknologi. Sebagai contoh, wilayah Jawa lebih didominasi oleh sektor industri dan manufaktur, sementara wilayah Kalimantan dan Sumatera lebih berfokus pada sektor perkebunan dan tambang. Program vokasi hadir untuk memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap daerah, membantu menciptakan tenaga kerja yang relevan dan berkualitas sesuai dengan potensi ekonomi daerah.

Peran program vokasi ini semakin krusial jika melihat data mengenai kesenjangan antara jumlah lulusan pendidikan formal dan kebutuhan pasar tenaga kerja di berbagai wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5,86%. Angka ini bervariasi di berbagai daerah, dengan daerah perkotaan seperti DKI Jakarta mencatatkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Salah satu penyebab utama kesenjangan ini adalah ketidakcocokan antara keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan spesifik industri di daerah tersebut. Lulusan dari sistem pendidikan formal sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi tuntutan teknis dan praktis dunia kerja. Program vokasi yang fokus pada pelatihan berbasis keterampilan praktis dapat membantu menjembatani kesenjangan ini dengan membe-

rikan kompetensi yang lebih sesuai dengan permintaan industri di tingkat lokal maupun regional.

Selain itu, program vokasi juga berperan dalam mendukung penyebaran kesempatan kerja yang lebih merata di seluruh Indonesia. Daerah-daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur atau akses pendidikan, seperti wilayah Indonesia bagian timur, memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor ekonomi lokal yang berbasis sumber daya alam. Namun, minimnya tenaga kerja terampil di daerah tersebut menjadi salah satu tantangan utama. Data BPS 2022 menunjukkan bahwa wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah, tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga masih rendah, mengindikasikan kurangnya akses terhadap pelatihan yang relevan. Oleh karena itu, dengan memperkuat program vokasi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal, Indonesia dapat meminimalkan kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan pasar kerja di berbagai wilayah. Ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh penjuru negeri.

Ekonomi regional dan lokal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, kondisi sosial-budaya, serta kebijakan pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, mulai dari wilayah yang berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri manufaktur dan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi program vokasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing wilayah. Misalnya, daerah pesisir yang kaya akan sumber daya laut membutuhkan program vokasi yang mendukung industri perikanan dan kelautan, sementara daerah perkotaan yang tumbuh cepat mungkin lebih membutuhkan keahlian di bidang teknologi, manufaktur, atau jasa.

Kolaborasi antara institusi vokasi dan industri lokal menjadi kunci penting dalam meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia kerja. Melibatkan industri setempat dalam perumusan kurikulum dan modul pendidikan atau pelatihan di program vokasi adalah langkah strategis untuk memastikan relevansi penguasaan keterampilan dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. Ketika industri terlibat langsung dalam proses ini, kurikulum yang dihasilkan akan lebih menyesuaikan dengan standar dan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga lulusan vokasi dapat langsung diserap oleh pasar tenaga kerja lokal. Misalnya, di sektor

manufaktur yang berkembang di daerah Jawa Barat, kerja sama antara sekolah vokasi dan industri otomotif telah berhasil meningkatkan jumlah lulusan yang siap kerja. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di sektor industri mencapai 70%, lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA umum. Kolaborasi seperti ini memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang sesuai, tetapi juga memahami teknologi dan prosedur yang digunakan di industri setempat, sehingga proses adaptasi di tempat kerja menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain mempercepat penyerapan tenaga kerja, keahlian yang dibangun melalui program vokasi juga dapat menjadi pendorong utama inovasi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru. Ketika lulusan memiliki keterampilan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah, mereka tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi wirausaha. Misalnya, di sektor perikanan di Sulawesi Selatan, lulusan pendidikan vokasi yang terampil dalam teknologi pengolahan hasil laut tidak hanya mengisi lowongan pekerjaan di industri, tetapi juga menciptakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Menurut data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tahun 2021, kontribusi UKM terhadap PDB Indonesia mencapai 60%, dan sebagian besar UKM ini berasal dari sektor-sektor ekonomi lokal yang didukung oleh keterampilan vokasional. Inovasi yang dihasilkan oleh lulusan vokasi ini dapat membantu memperkuat daya saing daerah dan membuka peluang ekonomi baru yang relevan dengan dinamika perkembangan ekonomi setempat.

**Dewa Gede Karma Wisana**  
**(Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,**  
**Universitas Indonesia)**

## DAFTAR ISI

PENGANTAR <b>TIM PENULIS</b>	iii	PROVINSI KEPULAUAN RIAU:	57
PENGANTAR <b>DITJEN VOKASI</b>	v	<b>DI BAWAH BAYANG-BAYANG</b>	
PENGANTAR <b>LPDP</b>	viii	<b>BATAM</b>	
PENGANTAR <b>LD FEB UI</b>	x	PROVINSI BENGKULU:	71
DAFTAR ISI	xiv	<b>MENGUNGKIT PERTUMBUHAN</b>	
PROVINSI ACEH:	1	<b>SUMBER DAYA PESISIR</b>	
<b>SENARAI PENCAPAIAN</b>		PROVINSI SUMATERA SELATAN:	85
<b>DAN MASA DEPAN DI NEGERI</b>		<b>AGAR NAIK KELAS</b>	
<b>SAMAN</b>		<b>KE EKONOMI SEKUNDER</b>	
PROVINSI SUMATERA UTARA:	13	PROVINSI BANGKA BELITUNG:	99
<b>TANPA SAWIT</b>		<b>TUAH TULAH TIMAH BANGKA</b>	
<b>SUMATERA UTARA BISA APA?</b>		PROVINSI LAMPUNG:	111
PROVINSI SUMATERA BARAT:	29	<b>BERGERAK KELUAR</b>	
<b>MEMBIDIK SASARAN BARU:</b>		<b>DARI 'CANGKANG LAMA'</b>	
<b>EKONOMI BERBASIS WISATA</b>		PROVINSI BANTEN:	125
PROVINSI RIAU:	45	<b>PADA INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	
<b>DARI YANG FANA KE</b>		<b>TANAH JAWARA BERSANDAR</b>	
<b>BERKELANJUTAN</b>		PROVINSI JAWA BARAT:	139
		<b>DARI PERKEBUNAN</b>	
		<b>HINGGA INDUSTRI</b>	
		<b>PENGOLAHAN</b>	
		PROVINSI JAWA TENGAH:	155
		<b>PRIMADONA BARU</b>	
		<b>BERNAMA KAWASAN INDUSTRI</b>	



PROVINSI D.I. YOGYAKARTA: **171**  
**BUKAN SEKADAR  
TEMPAT PELESIRAN**

PROVINSI JAWA TIMUR: **185**  
**KLUSTER DAN DAYA EKONOMI  
DI UJUNG TIMUR JAWA**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT: **197**  
**PARIWISATA,  
CANTIK SAJA TIDAK CUKUP**

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: **221**  
**DARI SAWIT HINGGA LIGNIT**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: **233**  
**BERKAH TAMBANG  
DAN PERKEBUNAN**

PROVINSI KALIMANTAN UTARA: **243**  
**NIAT EKONOMI HIJAU  
DI TEPI NEGERI**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: **255**  
**NGALAP BERKAH  
IBU KOTA NUSANTARA**

PROVINSI BALI: **267**  
**MEMBANGUN DENGAN  
BERTUMPU  
PADA KESELARASAN**

PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR: **281**  
**GELIAT EKOSISTEM WISATA**

PROVINSI SULAWESI BARAT: **293**  
**MODAL MEMAJUKAN  
LUMBUNG LAUT  
DAN LADANG SUBUR**

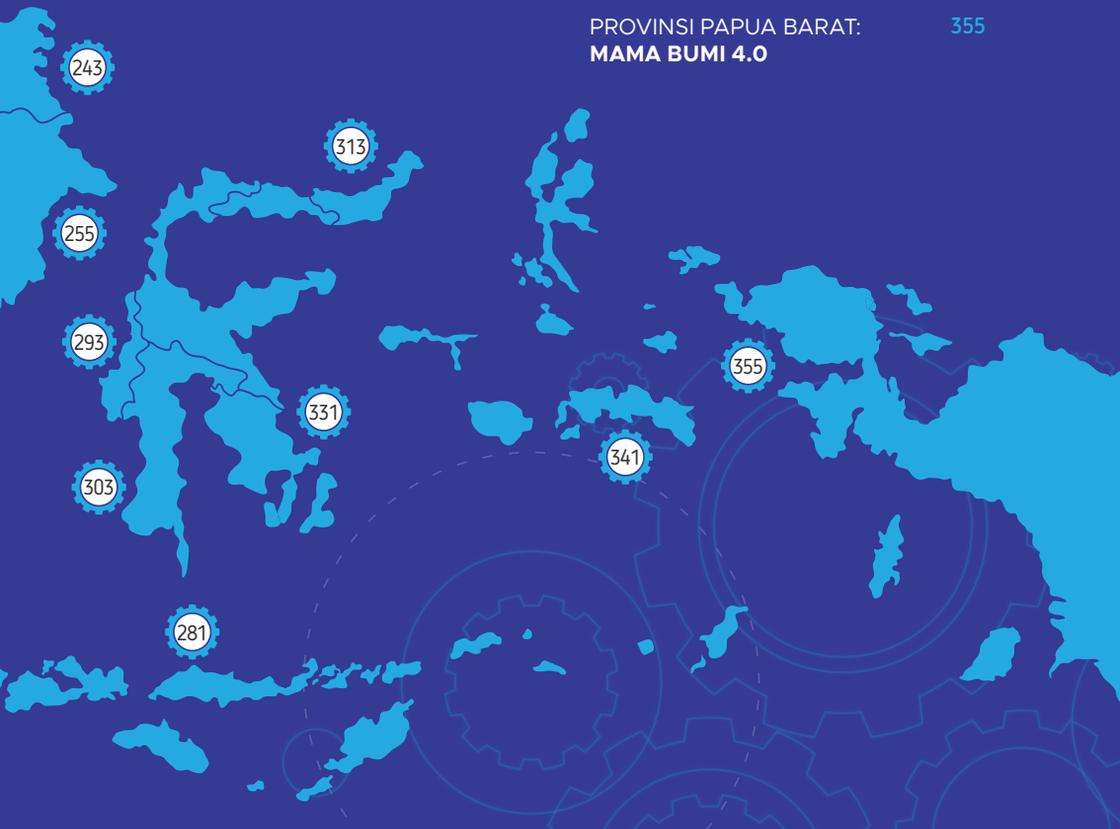
PROVINSI SULAWESI SELATAN: **303**  
**DEMI SEBUAH 'HUB'  
YANG LEBIH DINAMIS**

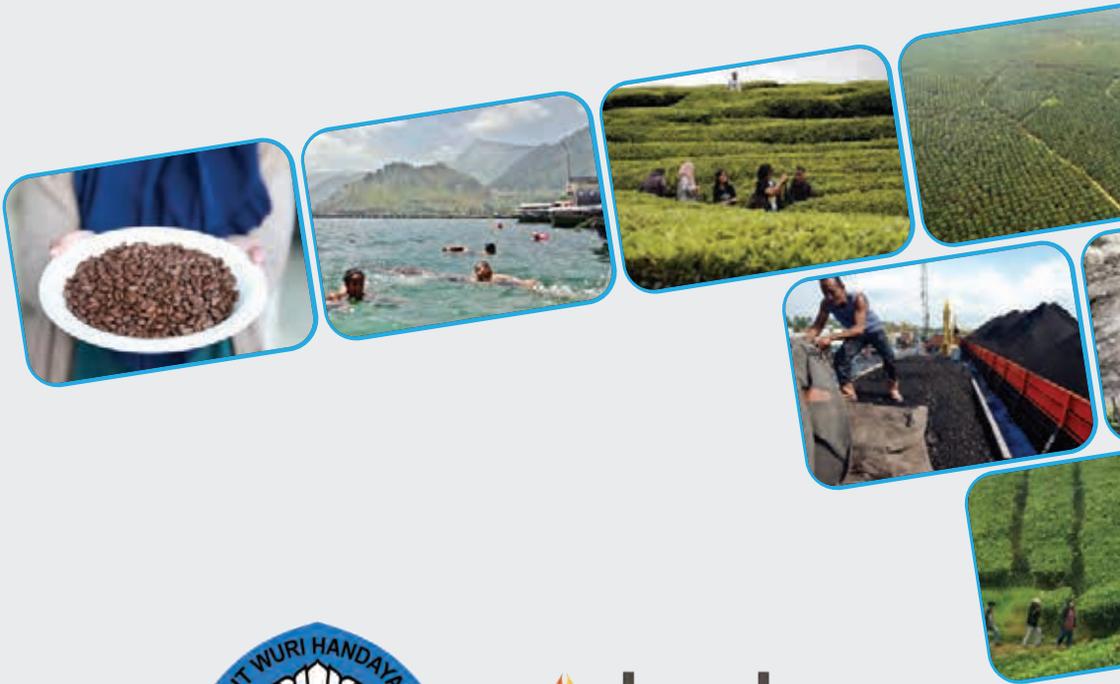
PROVINSI SULAWESI UTARA: **313**  
**RAYUAN PROVINSI KELAPA**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA: **331**  
**MENGEREK NEGERI ANGGREK**

PROVINSI MALUKU: **341**  
**MENGAUK PERUBAHAN  
DI BUMI SERIBU PULAU**

PROVINSI PAPUA BARAT: **355**  
**MAMA BUMI 4.0**





lembaga pengelola dana pendidikan









PROVINSI ACEH:

# SENARAI PENCAPAIAN DAN MASA DEPAN DI NEGERI SAMAN

**TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH ACEH:**

**Ketua:** *Sariyusda (Politeknik Negeri Lhokseumawe)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Lhokseumawe: *Indra Mawardi, Saifuddin, Busra, Muhammad Hatta, Warli Manya Sari, Dzulmy Wahyudy, M. Syukron Al Hamdani, Zulkarnaini*
2. Politeknik Aceh: *Mahmud*
3. Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat: *Haimi Adriansyah, Politeknik Aceh Selatan, Ihsan (Politeknik Aceh Selatan)*

*Aceh memiliki potensi dan keunggulan di bidang pertanian, pertambangan, perikanan, dan pariwisata. Komoditas kopi, kelapa sawit, hingga nilam sedang menapaki cerita jaya. Energi hidro dan panas bumi siap menyongsong di masa depan.*

Duduk dan nikmati secangkir kopi di kedai kopi di sudut kota mana pun di seujur Nanggroe Aceh Darussalam: dari kawasan Ulee Kareng di Banda Aceh, Meulaboh di pesisir pantai barat, hingga kawasan sejuk Tanah Gayo di Dataran Tinggi Bukit Barisan. Hirup aroma kopi yang menguar, cecap rasanya yang eksotis, dan nikmati atraksi baristanya.

Saksikan bagaimana sang barista membuat kopi tarik yang mengucur dari saringan kain di ujung tangan kanan ke cangkir kopi di ujung tangan kiri. Gayung kopi serupa ibrik dari Turki terus mengisinya tanpa henti. Seperti tengah mengulang lintasan sejarah kopi yang tumbuh di Aceh sejak awal 1800-an, ia membuat lintasan tarikan kopi itu sebelum menuangkannya menjadi kopi hitam atau kopi sanger-*cappuccino* khas Aceh.

Amati pula sensasi *kopi khop*, kopi dengan cangkir yang ditelungkupkan tanpa tumpah sama sekali. Pelaut Aceh punya majas hiperbol tentang kopi telungkup ini: “Bahkan ditinggal melaut pun *kopi khop* masih tetap hangat.”

Ya, Aceh adalah negeri seribu kedai kopi. Mudah sekali menemukan warung kopi di sudut-sudut gampong atau desa: dari kedai Solong di Simpang Tujuh Ulee Kareng yang kondang hingga kedai Seladang di tengah kebun kopi di Kabupaten Bener Meriah; dari kedai kopi tradisional hingga kafe kopi kekinian; dari yang menyuguhkan beragam pertunjukan seni sampai yang menawarkan edukasi memetik ceri merah langsung dari kebun kopi.

Di Aceh, warung kopi bukanlah sekadar tempat *nongkrong* atau meluangkan waktu. Kedai kopi adalah ruang publik, tempat beruluk salam, juga berbagi pikiran, bahkan tempat tekad besar ditambatkan sebelum berangkat berjihad. Pahlawan nasional Teuku Umar pernah berucap sebelum wafat pada 1899: “*Beungoh singoh geutanyoe jep kopi di keudee Meulaboh atawa ulon akan syahid*” (“Besok pagi kita akan minum kopi di kedai Meulaboh atau aku akan syahid”).

Tak cuma menjadi denyut pergerakan, *keudee* juga menjadi denyut nadi ekonomi Aceh. Di Ta-

nah Gayo, perkebunan kopi adalah perkebunan rakyat. Setiap keluarga rata-rata memiliki dua hektare kebun kopi. Begitu produktifnya, produksi kopi arabika mereka menyumbang sepertiga produksi kopi arabika di seluruh Indonesia.

*Outlook Kopi* Kementerian Pertanian pada 2022 menyebutkan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah di kawasan Gayo menyumbang total lebih dari 96 persen “ekonomi kopi” di Serambi Mekah. Angka ini sudah cukup melentingkan Gayo ke jajaran terdepan produksi kopi arabika terbesar di Asia.

Sertifikat Indikasi Geografis yang didapat kopi Gayo pada 2010 dan sertifikasi *fair trade* dari Uni Eropa kemudian membuat kopi dari Aceh itu cepat diterima di Eropa dan belahan dunia lainnya. Para petani kopi pun menerima harga premium untuk kopi yang mereka ekspor. Koperasi petani kopi juga bermunculan. Ini membuat posisi tawar mereka kian kuat di pasar internasional.

Kisah unggul kopi Aceh, salah satu komoditas pertanian dan perkebunan yang memutar roda ekonomi provinsi ini, mengemuka dalam penelitian yang terkait dengan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah. Sebanyak sebelas peneliti yang tergabung dalam konsorsium empat perguruan tinggi vokasi di

Aceh terlibat dalam program ini.

Dalam tinjauan ke depan (*foresight*), para peneliti memasukkan kopi dan tentu saja kelapa sawit, karet, kakao, serta komoditas rempah, seperti pala, cengkik, serai wangi, dan nilam yang diolah menjadi minyak asiri, sebagai sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dapat menjadi basis untuk inovasi dan pengembangan.

Pada kopi, rencana pengembangan yang mesti didorong adalah meningkatkan nilai tambah dengan mengembangkan industri pengolahan kopi modern (antara lain industri pengolahan kopi kemasan) dan menyinergikan dunia kopi (dari kebun, proses pasca panen, *roastery*, hingga industri) dengan dunia pariwisata yang mendatangkan devisa.

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 mencanangkan pengembangan 4 kawasan strategis di provinsi yang memiliki 18 kabupaten dan 5 kota itu. Salah satu yang akan dipercepat adalah kawasan agrowisata yang tersebar di 17 kabupaten dan kota serta inovasi di bidang agroindustri.

Pada rempah, cerita jaya lebih dulu hadir di Tanah Rencong. Jika melongok ke abad ke-17 dan ke-18, Aceh tak bisa dipisahkan dari kebesaran sejarah jalur rempah. Berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang masuk Selat Mala-



*Biji kopi gayo. Dok TEMPO/Rully Kesuma*

ka, yang merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia, Aceh pernah tercatat sebagai produsen lada terbesar yang menyuplai kebutuhan lada ke berbagai penjuru dunia melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat-selatan hingga pesisir timur.

Dua dari 20 titik jalur rempah Nusantara berada di tanah Serambi Mekah. Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam tercatat menjadi sentra perdagangan aneka rempah, terutama lada, yang dikenal sebagai komoditas paling dicari saat itu.

Semangat menjadi “episentrum rempah” itulah yang kini dibangkitkan kembali. Memang bukan lagi lada yang menjadi

primadona. Komoditas rempah seperti pala, cengkik, serai wangi, dan juga nilam yang diolah menjadi minyak asiri kini mengisi posisi “episentrum” itu.

Minyak asiri dari kawasan Aceh Selatan, misalnya, dikenal sebagai bahan baku dengan kualitas terbaik untuk industri parfum, minyak esensial, dan aromaterapi. Menurut penelitian, minyak nilam Aceh mengandung 30-34 persen *patchouli* alkohol dengan rendemen 3 persen, yang menjadikannya nilam terbaik di dunia.

Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Gayo Lues, Aceh Jaya, dan Aceh Besar merupakan daerah yang cocok bagi pengembangan industri pengolahan nilam. Dikenal

sebagai pemasok utama minyak nilam—sekitar 90 persen dari perdagangan internasional—Aceh bisa menghasilkan sekitar 1,3 juta ton per tahun, dengan nilai sekitar US\$ 50 juta.

Berikutnya, sektor unggulan perkebunan yang tak habis sepanjang mata memandang di wilayah pantai barat adalah kelapa sawit. Tanaman perkebunan ini terbesar di Aceh berdasarkan volume, luas, serta nilai ekonominya. Luasnya lebih dari 242 ribu hektare, yang dikelola masyarakat, dengan produksi tahunan lebih dari 444 ribu ton pada 2020.

Jumlah pabrik minyak kelapa sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) di Aceh mencapai lebih dari 60. Sebagai sumber utama pasokan produk makanan dan bahan bakar nabati, industri kelapa sawit masih memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar, antara lain dengan mendorong pembangunan pabrik CPO dan produk turunannya.

• • •

Data produk domestik regional bruto (PDRB) Aceh menunjukkan ekonomi Aceh triwulan I-III pada 2023 dibanding triwulan I-III pada 2022 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 4,24 persen. Pertumbuhan signifikan terjadi di sektor perdagangan sebesar 8,47 persen, konstruksi 8,24 persen, jasa lainnya 7,82 persen, dan penyedia akomodasi dan

makan-minum serta transportasi pergudangan masing-masing sebesar 7,81 persen.

Sementara itu, berdasarkan struktur PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III tahun 2023, perekonomian masih didominasi pertanian. Nilainya sebesar 29,41 persen. Berikutnya menyusul perdagangan dan reparasi otomotif (14,68 persen), konstruksi (9,48 persen), administrasi pemerintahan (8,88 persen), serta penggalian dan pertambangan (8,42 persen). Peran kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 70,87 persen.

Bagaimana dengan pariwisata? Apa yang terjadi? Masih istimewaakah sebutan “Serambi Mekah” bagi Aceh jika tak mampu mengundang orang ramai datang dan menyelami peradaban Islam yang masuk pertama kali ke Indonesia melalui Peureulak dan Samudera Pasai? Apakah Aceh telah memacu wisata religi? Bagaimana pula kekayaan sejarah, sastra dan budaya, adat, juga alam Aceh yang disebut pujangga Hamzah Fansuri, “*wiruh* angkasamu. *Nantiasa* asyik tiada kala jemu”?

Bukan hanya Sabang, kota paling barat Indonesia, dengan pantai berpilin-pilinnnya yang indah dan tiada jemu. Datanglah ke wilayah pegunungan di jantung Aceh, tempat tari Saman dan seni didong lahir dan masih menancap-

kan daya magisnya.

Di desa adat Gunung Tunyang di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, misalnya, pertunjukan didong masih rutin digelar. Di sini dua grup didong (didong jalu) beranggotakan masing-masing 15 orang bersahutan, melempar pantun, berdendang, menepuk bantal atau alat tabuh apa saja yang ada, menciptakan musik dari entakan kaki, dan melemparkan humor-humor segar sembari tak lupa menyelipkan pesan-pesan syiar Islam.

Pada tari saman, pesan-pesan agama yang kental terasa mengena di tengah tepukan “seribu tangan” pada tarian indah itu.

Kota Banda Aceh punya Masjid Raya Baiturrahman, yang menjadi ikon hadirnya peradaban Islam di Aceh. Lalu ada kompleks makam Sultan Iskandar Muda, Syiah Kuala, dan Masjid Baiturrahim Ulee Lheue, di samping Museum Tsunami Aceh.

Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh mencatat jumlah kunjungan wisatawan pada 2023 sebesar 382 ribu di kota itu. Angka ini meningkat 16,41 persen dari tahun sebelumnya dan masih teratas dibandingkan daerah lain. Tapi Kota Banda Aceh baru memikat kurang dari 10 persen wisatawan mancanegara. Setelah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Utara menempati posisi kedua dengan 303 ribu pelancong,

lalu Kota Sabang dengan 251 ribu wisatawan. Wilayah barat, tengah, dan selatan menyusul kemudian.

Tim peneliti melihat, dengan payung qanun dan predikat keistimewaannya, Aceh semestinya bisa menggenjot wisata religi dan wisata halalnya. Banyaknya peninggalan peradaban Islam, terutama di bekas Kerajaan Samudera Pasai, Aceh Utara, juga di Banda Aceh, diharapkan menggerakkan pemerintah membuat *roadmap* pengembangan pariwisata yang bisa menyandingkan prinsip syariah dan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, fasilitas wisata, pemasaran yang lebih agresif, dan pengembangan ekonomi kreatif menjadi kebutuhan yang mendasak. Perubahan *mindset* bahwa tempat wisata hanya warisan atau peninggalan yang mesti dijaga dengan prinsip-prinsip qanun menjadi “aset peradaban” bernilai ekonomi membutuhkan strategi yang tepat. Perlu transisi ekonomi dari yang berbasis sumber daya menjadi berbasis jasa.

Di Kecamatan Samudera di Aceh Utara dengan artefak kejayaan Kerajaan Samudera Pasai, sebagai gambaran, sampai saat ini masih didominasi aktivitas ziarah ke makam-makam raja (Sultan Malikussaleh dan lain-lain) serta kunjungan ke museum dan monumen. Pelajar-pelajar sekolah pun menjadikannya obyek *study tour*.

No	Kawasan	Kabupaten/Kota	Potensi Daerah
1	Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) terdiri dari 6 kabupaten kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banda Aceh dan sekitarnya;</li> <li>2. Langsa dan Sekitarnya;</li> <li>3. Aceh Tenggara dan sekitarnya;</li> <li>4. Aceh Selatan dan sekitarnya;</li> <li>5. Aceh Barat Daya dan sekitarnya</li> </ol>	Industri, Perikanan, Sejarah, Pariwisata, Perkebunan, Industri, Perdagangan dan Pertanian, Pertambangan dan Energi, Kelautan, Perikanan
2	Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Aceh Besar</li> <li>2. Kabupaten Aceh Jaya</li> <li>3. Kabupaten Aceh Selatan</li> <li>4. Kabupaten Aceh Singkil</li> <li>5. Kabupaten Aceh Tamiang</li> <li>6. Kabupaten Aceh Tengah</li> <li>7. Kabupaten Aceh Timur</li> <li>8. Kabupaten Bener Meriah</li> <li>9. Kabupaten Bireuen</li> <li>10. Kabupaten Gayo Lues</li> <li>11. Kabupaten Nagan Raya</li> <li>12. Kabupaten Pidie</li> <li>13. Kabupaten Pidie Jaya</li> <li>14. Kabupaten Semeulue</li> <li>15. Kota Sabang</li> <li>16. Kota Subulussalam</li> </ol>	Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan, Pariwisata, Pendidikan dan Pembangunan, Kelautan dan Perikanan & Minyak dan Gas, Hutan Produksi, Perindustrian, Pertambakan dan Sawah, Perdagangan dan Jasa, Pertanian Tanaman Pangan & Kehutanan
3	Kawasan Ekonomi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aceh Utara</li> <li>2. Kota Lhokseumawe</li> </ol>	Pertanian, Perdagangan, Industri, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
4	Kawasan situs sejarah		

Tabel 1. Pembagian empat kawasan strategis Provinsi Aceh sesuai dengan potensi pengembangan wilayah

**SUMBER:** Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033

Padahal, di masa lalu, Samudera Pasai dan Peureulak menjadi pusat penyebaran agama Islam pertama di Indonesia. Pedagang dari seluruh dunia berdatangan ke kerajaan ini. Maka upaya menggaet wisatawan dari dunia Islam masa kini tentu memerlukan strategi pemasaran dan penataan obyek yang lebih memikat—seperti penyusunan kembali artefak, pembuatan miniatur atau ruang visualisasi masa lalu kesultanan, *merchandising*, festival budaya,

dan kerja kreatif lainnya.

Aceh juga memiliki potensi pariwisata alam yang menakjubkan—bukan hanya wisata *heritage*—seperti pantai-pantai indah, gunung-gunung yang megah, dan warisan budaya yang kaya. Inovasi dalam pengembangan ekowisata berbasis konservasi alam dan lingkungan, penggunaan teknologi untuk promosi pariwisata, serta pengembangan atraksi wisata yang berkelanjutan dapat menjadi langkah penting dalam mening-

katkan sektor ini.

Melalui pengembangan daerah berbasis kawasan, Aceh dapat mendayagunakan potensi dan keunggulan di bidang pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Saat ini (2023), sektor jasa akomodasi serta makanan dan minuman memberikan kontribusi 7,81 persen bagi perekonomian. Ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata dan kuliner di Aceh sebenarnya cukup berkembang selama 2022-2023.

Ke depan, kontribusi itu diharapkan lebih besar dengan pola pengembangan seperti dirumuskan dalam RTRWA, yaitu berupa kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan strategis pariwisata, serta kawasan strategis dan khusus.

• • •

Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, telah ditetapkan empat kawasan strategis sesuai dengan potensi pengembangan wilayah. Pembagiannya seperti pada tabel 1.

Dari keempat kawasan tersebut, Aceh dengan jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta jiwa itu disebut memiliki potensi dan keunggulan di bidang pertanian, pertambangan, perikanan, dan pariwisata.

Khusus di sektor energi, Aceh memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbaru-

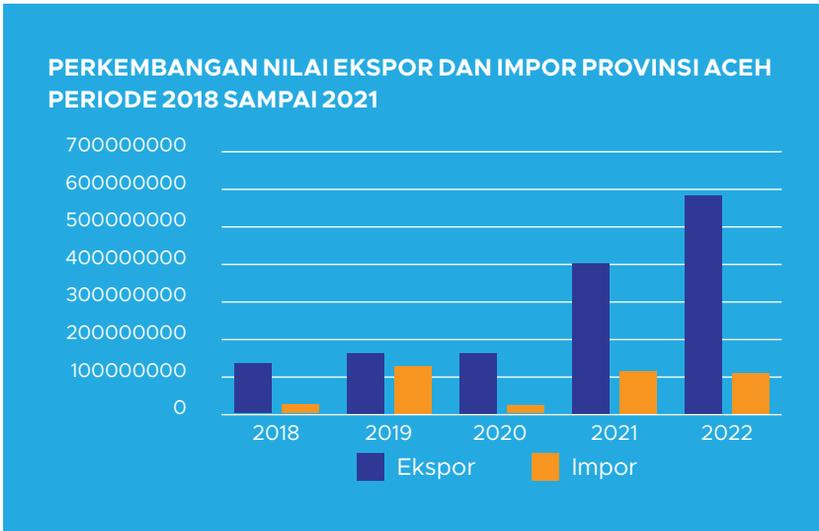
kan, terutama energi hidro dan energi panas bumi. Inovasi dalam pengembangan teknologi energi terbarukan, investasi dalam infrastruktur, dan pengembangan kebijakan yang mendukung energi bersih dapat menjadi langkah penting.

Untuk energi hidro, Aceh ke depan akan memiliki tiga pembangkit listrik tenaga air (PLTA)–dalam status konstruksi. Ada 38 titik pembangunan PLTA yang tersedia, dengan total kapasitas diperkirakan 2.173 MW. Di Nagan Raya saat ini juga sedang dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dengan kapasitas 2x5 MW.

Sementara untuk energi panas bumi terdapat 17 titik potensi panas bumi di Aceh dengan perkiraan kapasitas sekitar 1.115 MWe yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Saat ini pasokan listrik di Aceh masih mengandalkan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Nagan Raya dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Arun, Aceh Utara.

Mengenai bahan bakar mineral, komoditas ini masih menjadi andalan utama Aceh. Sampai 2021, komoditas minyak dan gas bumi menyumbang 50 persen lebih penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal lain yang menjadi catatan: terus membaiknya perekonomian Aceh setelah pandemi



SUMBER: BPS

disokong oleh peningkatan ekspor. Total volume ekspor Aceh pada 2021 sebesar 9.612,62 juta kilogram dengan nilai mencapai US\$ 402 juta. Komoditas utama ekspor Aceh adalah bahan bakar mineral.

Data pada info grafik menunjukkan perkembangan nilai ekspor dan impor Aceh sejak 2018 sampai 2021.

Lalu, keseimbangan beberapa variabel makro dan pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Aceh mengalami perbaikan. Merujuk pada data BPS tahun 2023, indeks IPM Provinsi Aceh pada 2022 mencapai 72,80, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehat-

an, pendidikan maupun pengeluaran per kapita.

Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4 persen per tahun di Negeri *Bungong Jeumpa* itu juga sangat didorong oleh sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sumbangan terbesar dihasilkan dari sektor perdagangan, konstruksi, dan jasa. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 6,72 persen. Sektor ini dominan menjadi pilihan pekerjaan yang ada di Aceh.

Pada pertanian dan industri pertanian, Nanggroe Aceh Darussalam masih bertumpu. Tinggal inovasi-inovasi yang mendongkrak pertumbuhan dan pengembangan kawasan investasi Aceh yang perlu digalakkan ke depan.

## VOKASI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN

Pemerintah Aceh melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 telah menetapkan empat kawasan strategis: kawasan pusat perdagangan dan distribusi, kawasan agrowisata, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan situs sejarah. Kawasan-kawasan itu dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pembangunan kawasan demi berkembangnya potensi dan keunggulan ekonomi provinsi yang meliputi bidang pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata itu memerlukan tenaga-tenaga kerja terampil. Sayangnya, ada kesenjangan dan ketidakselarasan antara pendidikan—termasuk pendidikan vokasi—yang melahirkan tenaga-tenaga terdidik dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Kesenjangan itu kian melebar jika tidak ada upaya strategis dari pemerintah daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih di bawah pertumbuhan nasional, tingkat pengangguran yang masih tinggi, investasi yang masih rendah, penurunan angka

kemiskinan yang lambat, dan daya saing daerah yang masih rendah bisa menjadi kendala.

Karena itu, sinergi pendidikan vokasi dengan DUDI dan pemangku kepentingan daerah merupakan aspek penting dalam memajukan pendidikan yang responsif. Keselarasan kerja sama di antara semua pemangku kepentingan akan meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan vokasi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Saat ini, Provinsi Aceh punya enam perguruan tinggi vokasi, 220 sekolah menengah kejuruan, 18 balai latihan kerja, serta 202 lembaga kursus dan pelatihan. Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri atas 18 kabupaten, 5 kota, 289 kecamatan, 817 mukim, dan 6.497 gampong.

Tim peneliti merekomendasi perlunya penyusunan kebijakan perencanaan ketenagakerjaan dalam tiga tahap: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, landasan pendidikan vokasi perlu diperkuat dengan antara lain

*Digitalisasi akan melancarkan inovasi dan hilirisasi industri di sektor industri berbasis agro, berbasis bahan tambang dan mineral, serta berbasis minyak dan gas bumi. Hilirisasi akan menciptakan multiplier effect yang menguntungkan dan menciptakan nilai tambah di semua lini.*

regulasi yang pro-vokasi, selain diperlukan penguatan *database* pendidikan vokasi dan sumber daya manusia pendidikan vokasi. Regulasi pendidikan vokasi itu harus sejalan dengan regulasi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh.

Aceh perlu mendorong tumbuhnya sentra ekonomi dan kawasan industri serta mentransisikan ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi berbasis manufaktur, sehingga nilai tambah yang dihasilkan tinggi dan lapangan kerja terbuka lebar.

Sedangkan penguatan *database* akan menjadi sumber perencanaan dalam penguatan pendidikan vokasi. Ketidaktersediaan data yang memadai menyebabkan perencanaan menjadi bias, bahkan tidak tepat. Pemetaan potensi

akan sangat penting, baik pemetaan potensi pendidikan vokasi, potensi ekonomi, maupun potensi keunggulan daerah.

Program jangka menengah berupa penguatan jaringan kolaborasi atau *link and match* di antara pemangku kepentingan (*pentahelix*). *Link and match* sangat penting agar lulusan dapat terserap dengan baik. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian pada penguatan kapasitas peserta didik dengan *soft skill* dan sertifikasi kompetensi pemagangan pada industri untuk mendapatkan pengalaman kerja.

Sementara itu, pengembangan ekosistem ekonomi digital perlu ditempuh dalam jangka panjang. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, pemerintah perlu mendorong transformasi ekonomi digital dengan mengalokasikan semua sumber daya—membuat peta jalan pengembangan ekonomi digital yang jelas, komprehensif, dan terstruktur.

Digitalisasi akan melancarkan inovasi dan hilirisasi industri di tiga sektor, yakni industri berbasis agro, berbasis bahan tambang dan mineral, serta berbasis minyak dan gas bumi. Hilirisasi akan menciptakan *multiplier effect* yang menguntungkan dan menciptakan nilai tambah di semua lini.



LANGKAT

MEDAN

BINJAI

SERDANG

MEDAGAI

DELI

SERDANG

TEBING

TINGGI

BATU BARA

KARO

PEMATANG

Siantar

TANJUNG

BALAI

DAIRI

SIMALUNGUN

ASAHAN

PAKPAK

BHARAT

SAMOSIR

LABUHAN BATU

UTARA

HUMBANG

HASUNDUTAN

TOBA

SAMOSIR

LABUHAN BATU

BATU

TAPANULI

UTARA

LABUHAN BATU

SELATAN

TAPANULI

TENGAH

TAPANULI

SELATAN

PADANG LAWAS

UTARA

SIBOLGA

PADANG

SEDEMPUAN

PADANG LAWAS

NIAS

UTARA

GUNUNGSITOLI

NIAS

BARAT

NIAS

SELATAN

MANDAILING NATAL



# PROVINSI SUMATERA UTARA: **TANPA SAWIT** **SUMATERA UTARA** **BISA APA?**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH SUMATERA UTARA:**

**Ketua:** *Surya Dharma (Politeknik Negeri Medan)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Negeri Medan: *Dewi Cormala Sari, Rahmawaty, Indri Dithisari, Ulfa Hasnita*
2. Sekolah Vokasi Universitas Sumatera Utara: *Gustanto, Beby Kendida Hasibuan, Jane Melita Keliat*
3. Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia: *Jenny Elisabeth, Edward MH Sijabat, Aldon MHP. Sinaga*
4. AMIK Polibisnis: *Evri Ekadiansyah, Donni Nasution*

*Pertanian menyumbang produk domestik bruto tertinggi di Sumatera Utara. Namun denyut provinsi ini diatur kelapa sawit. Komoditas hortikultura lainnya, juga potensi pariwisata, tak boleh diabaikan.*

Sumatera Utara adalah “si paling” di Pulau Sumatera. Penduduknya paling banyak, 15,5 juta jiwa pada 2024 menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Tidak hanya terpadat, wilayahnya juga paling makmur. Hampir seperempat (23,25 persen) produk domestik regional bruto (PDRB) Pulau Sumatera disumbang Sumatera Utara pada 2023—lebih besar daripada sumbangan Riau (22,71 persen), yang kaya minyak bumi dan sawit.

Lalu di mana sumber-sumber perekonomian Sumatera Utara? Di atas kertas, perekonomian Sumatera Utara pada 2023 menghasilkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp 1.051 triliun atau 5,12 persen terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan lapangan usaha, penyumbang terbesarnya rupanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang mencapai 23,58 persen. Angka ini tak mengejutkan bagi provinsi yang menjadi salah satu lumbung pertanian Sumatera dan sudah ratusan tahun memiliki perkebunan skala besar tersebut. Misalnya perkebunan tembakau di Deli yang ada sejak 1864, perke-

bunan kopi pada 1890, dan perkebunan kelapa sawit pertama pada 1911 di Tanah Hitam Ulu.

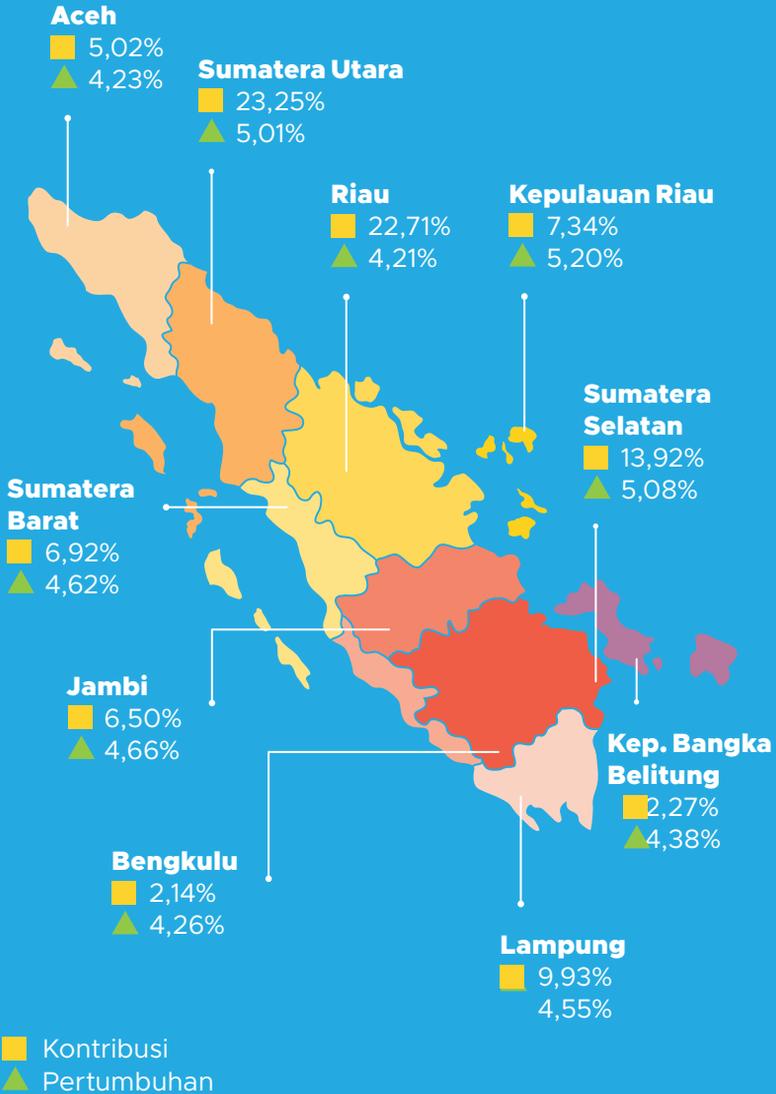
Menjadi penyumbang PDRB tertinggi di Sumatera Utara, sektor pertanian juga paling banyak menyerap tenaga kerja. Ada 2,424 juta orang atau 35,43 persen dari total sebanyak 7,35 juta orang angkatan kerja yang mengadu nasib di sektor pertanian pada 2020.

Sementara itu, berdasarkan wilayah, penyumbang PDRB terbesar untuk Sumatera Utara adalah kota metropolitannya, Medan, sebesar 28,99 persen. Kontribusi Medan ini jauh di atas Deli Serdang, yang hanya 13,3 persen, dan Langkat (5,37 persen), bahkan gabungan kawasan Kepulauan Nias dan Dataran Tinggi Sumatera Utara.

Kok, bisa, kontribusi PDRB terbesar berasal dari pertanian, tapi wilayah yang paling banyak menyumbang PDRB malah perkotaan yang tak punya sumber-sumber pertanian? Rupanya, jawabannya ada pada kelapa sawit. Komoditas ini masuk subsektor perkebunan di sektor pertanian.

Sawitlah yang menyyetir hampir seluruh perekonomian Sumate-

### PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB MENURUT PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2023



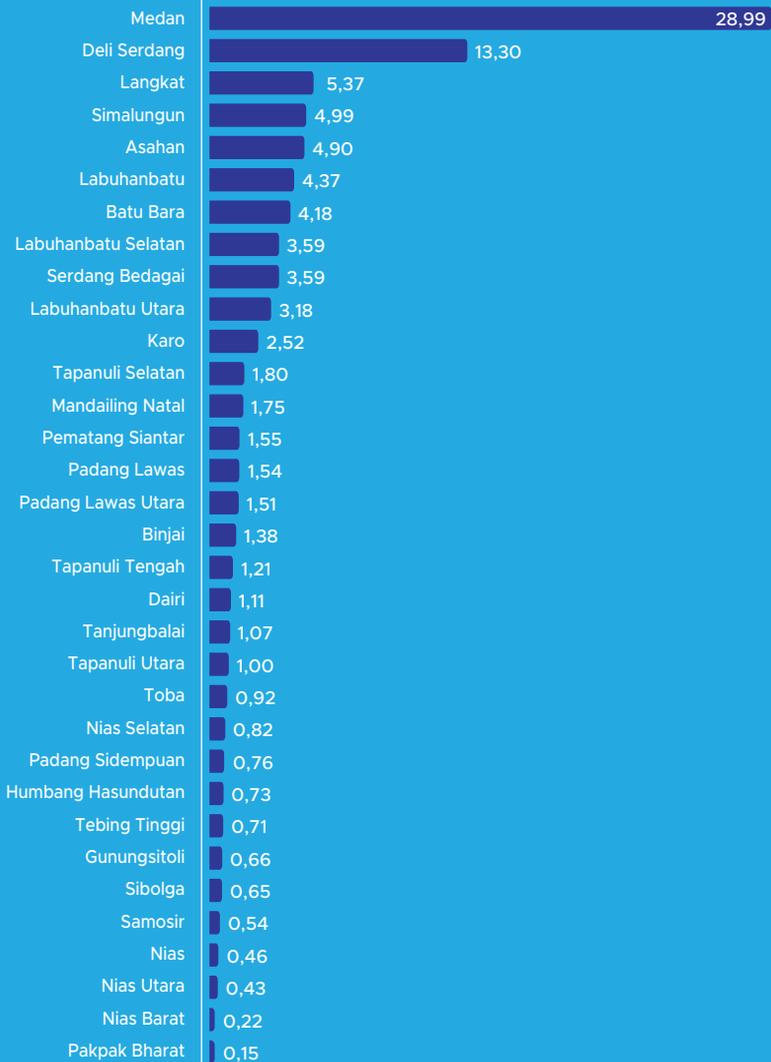
SUMBER: BPS

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,87	5,05	3,02	22,04	22,98	23,59
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,92	2,69	3,46	1,25	1,21	1,17
C.	Industri Pengolahan	1,43	1,98	3,44	19,53	19,13	18,44
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	4,81	2,16	0,11	0,11	0,10
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,62	2,17	2,89	0,10	0,09	0,09
F.	Konstruksi	2,18	3,02	6,41	13,46	13,23	13,20
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,62	6,56	5,81	18,91	18,99	19,08
H.	Transportasi dan Pergudangan	-3,63	12,92	13,12	4,17	4,54	5,05
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,81	7,26	10,22	2,05	2,04	2,11
J.	Informasi dan Komunikasi	6,51	7,60	7,80	2,34	2,33	2,30
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	3,81	5,50	2,97	2,97	2,88
L.	Real Estate	2,50	4,52	3,20	5,11	4,88	4,66
M,N.	Jasa Perusahaan	-0,14	8,77	6,68	1,03	1,05	1,06
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,08	-0,74	1,93	3,54	3,17	3,00
P.	Jasa Pendidikan	3,05	5,13	7,39	1,86	1,77	1,75
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,25	4,82	6,43	0,99	0,95	0,94
RS, TU	Jasa Lainnya	1,43	8,65	9,55	0,54	0,55	0,58
PDRB		2,61	4,73	5,01	100,00	100,00	100,00

Tabel 2. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

SUMBER: BPS

## KONTRIBUSI PDRB KOTA/ KABUPATEN DI SUMATERA UTARA PADA 2023 (PERSEN)



SUMBER: BPS

## PERTUMBUHAN PDRB SUMATERA UTARA MENURUT LAPANGAN USAHA 2023 (PERSEN)



SUMBER: BPS

ra Utara di semua lini. Sebab, selain mendongkrak sektor pertanian di hulu dan industri pengolahan hilir, rantai bisnis sawit mendorong sektor perdagangan, konstruksi, dan transportasi, yang banyak berpusat di Medan. Pada 2023, sebagai contoh, sektor transportasi tumbuh paling tinggi, sebesar 13,12 persen, berkat meningkatnya industri berbasis sawit.

Maka, jika dirunut dari hulu ke hilir, kontribusi akumulasi sektor pertanian, pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan transportasi, yang banyak digerakkan kelapa sawit, mencapai 74,3 persen dalam PDRB Sumatera Utara pada 2023.

Riau boleh menjadi produsen sawit terbesar, tapi industri pengolahan kelapa sawit justru menjamur di Sumatera Utara. “Selain industri minyak goreng dan margarin, industri produk oleokimia dan biofuel ada di Sumatera Utara,” kata Surya Dharma, pengajar Politeknik Negeri Medan, yang memimpin tim peneliti potensi ekonomi Sumatera Utara.

Temuan Surya Dharma dan tim seirama dengan paper Teguh Wahyono berjudul “Peranan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Pembangunan Regional dari Segi Ekonomi Makro: Studi Kasus Sumatera Utara”, yang terbit di War-



**SUMBER:** BPS

ta PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) pada 2004. Menurut Teguh, pada 2002, subsektor perkebunan menyumbang Rp 10,04 triliun atau 39,78 persen pada PDRB sektor pertanian. Pada 2003, nilai produksi kelapa sawit di Sumatera Utara menurut harga berlaku adalah Rp 10,15 triliun, dengan kontribusi terhadap perkebunan sebesar

87 persen, terhadap pertanian 37 persen, dan terhadap PDRB Sumatera Utara 11 persen.

Satu dekade sejak paper itu, kelapa sawit dan rantai bisnisnya terus berkembang di Sumatera Utara. Berdasarkan catatan BPS pada 2022, terdapat 237 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Jumlah pabrik-



*Danau Toba di Desa Tongging, Karo, Sumatera Utara. Dok TEMPO/Dian Triyuli Handoko*

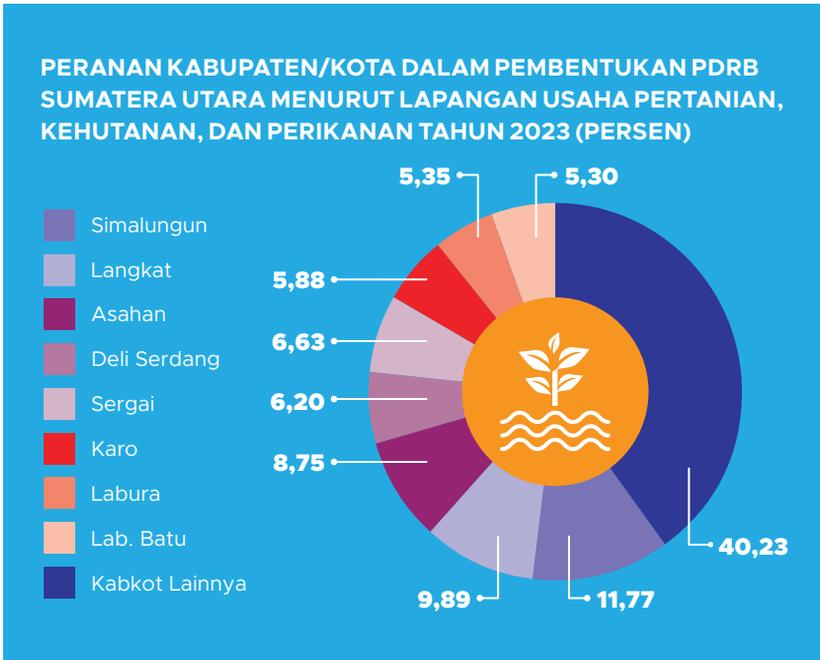
nya juga mencapai ratusan. Dan pertumbuhan komoditas ini akan terus meningkat seiring dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di Kabupaten Batu Bara, yang akan menjadi sentra industri pengolahan berbasis kelapa sawit dan turunannya.

Kawasan industri ini diyakini membutuhkan banyak tenaga kerja, khususnya dalam bidang kimia, permesinan, otomasi, logistik, pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, dan bidang-bidang lain yang relevan dengan produk turunan kelapa sawit. Tak hanya itu, hadirnya Pelabuhan Kuala Tanjung

yang akan menunjang kawasan industri ini juga dipercaya memerlukan banyak sekali tenaga kerja dalam bidang logistik maritim.

Namun, selain sawit dan turunannya yang terus tumbuh itu, pariwisata dan tanaman hortikultura lain, seperti kopi, rupanya terus berkembang. Toba, misalnya, telah ditetapkan pemerintah menjadi destinasi pariwisata superprioritas.

Dalam beberapa tahun belakangan, investasi sektor akomodasi dan makanan-minuman terus bertumbuh di kawasan tersebut. Tentu itu membutuhkan pasokan



SUMBER: BPS

tenaga kerja, yang tak hanya terampil secara teknis, tapi juga luwes dalam hal nonteknis—sesuatu yang amat penting dalam industri pariwisata—agar sektor ini bisa meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Utara. Kendati masih rendah, sektor ini toh terus tumbuh, dari kontribusi hanya 2,05 persen menjadi 2,11 persen pada PDRB Sumatera Utara tahun 2023.

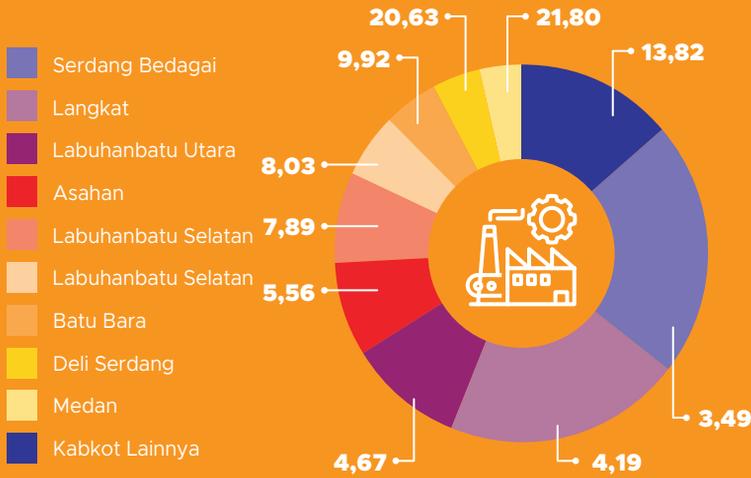
...

Memahami perekonomian Sumatera Utara sebetulnya cukup dengan melihat empat bentang kawasan: Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Kepulauan Nias.

Berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka serta menjadi jalur darat utama perdagangan antarpulau, Pantai Timur punya kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Utara. Pada 2023, kontribusinya mencapai 74,64 persen. Di kawasan ini ada Kota Medan sebagai metropolitan, Deli Serdang sebagai penyangga metropolitan, serta Asahan dan Labuhanbatu Utara, dua kabupaten dengan produksi sawit terbesar di Sumatera Utara.

Di sinilah ketimpangannya. Tiga kawasan lain, yang bukan area perkotaan dan perkebun-

**PERANAN KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBENTUKAN PDRB SUMATERA UTARA MENURUT LAPANGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN TAHUN 2023 (PERSEN)**



**SUMBER:** BPS

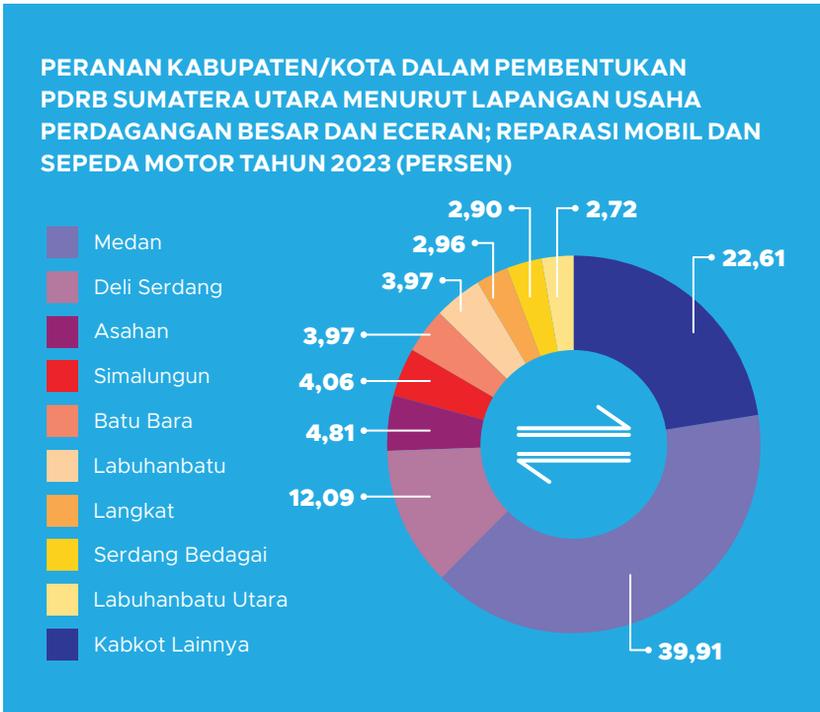
an besar, hanya berkontribusi di bawah 15 persen terhadap PDRB Sumatera Utara. Pantai Barat, misalnya, meski sama-sama dataran rendah dan dekat dengan pesisir-Samudra Hindia-seperti Pantai Timur, kontribusi PDRB-nya cuma 9,23 persen. Kabupaten atau kota yang mencakup kawasan ini termasuk Kota Sibolga, Mandailing Natal, dan Padangsidimpuan.

Perekonomian di Dataran Tinggi justru lebih baik. Ditopang pariwisata dan produk hortikultura-serta akses yang lebih dekat dengan metropolitan Medan-daerah seperti Toba, Dairi, dan

Karo menyumbang 13,53 persen terhadap PDRB Sumatera Utara. Sedangkan Kepulauan Nias, daerah paling kecil dan paling jarang penduduknya, seperti sudah bisa ditebak, menyumbang kontribusi terkecil, hanya 2,6 persen.

Dan jika diteropong lebih dalam, berdasarkan Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha 2023, Simalungun (Dataran Tinggi) serta Langkat dan Asahan (Pantai Timur) masih menjadi kontributor pertanian terbesar bagi Sumatera Utara.

Sementara itu, industri



**SUMBER:** BPS

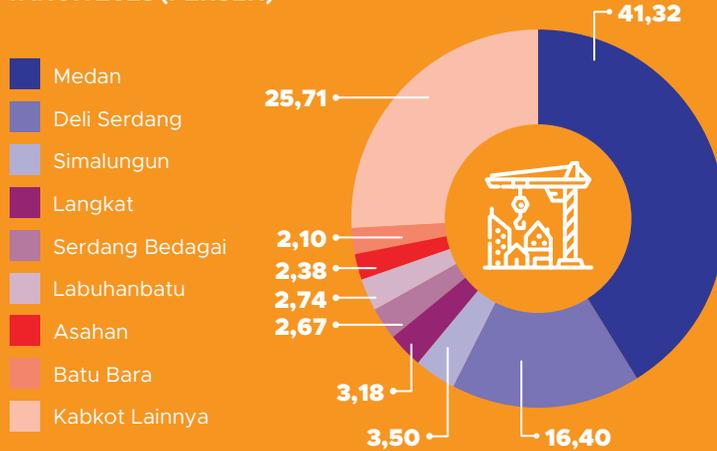
pengolahan banyak terkonsentrasi di Kota Medan dan Deli Serdang. Dari 1.256 usaha industri besar dan sedang yang ada di Sumatera Utara pada 2019 saja, 714 usaha bermukim di kedua wilayah tersebut (56,85 persen). Kontribusi kedua daerah tersebut mencapai 42,43 persen dari total nilai tambah industri pengolahan di Sumatera Utara pada 2023.

Kabupaten Batu Bara menyusul di tempat ketiga (9,92 persen), berkat keberadaan industri logam dasar skala nasional, yaitu PT Inalum. Dari nilai tambah industri

logam dasar di Sumatera Utara pada 2023 yang sebesar Rp 16,71 triliun, Batu Bara menyumbang 44,19 persen.

Dan karena Medan serta Deli Serdang mendominasi industri pengolahan, sudah dapat ditebak bahwa sektor perdagangan dan konstruksi juga berpusat di sini. Sebanyak 39,91 persen nilai tambah sektor perdagangan diciptakan Kota Medan. Menyusul kemudian Deli Serdang sebesar 12,09 persen. Adapun di sektor konstruksi, kontribusi Medan mencapai 41,32 persen dan Deli Serdang 16,4 persen.

**PERANAN KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBENTUKAN PDRB SUMATERA UTARA MENURUT LAPANGAN USAHA KONSTRUKSI TAHUN 2023 (PERSEN)**



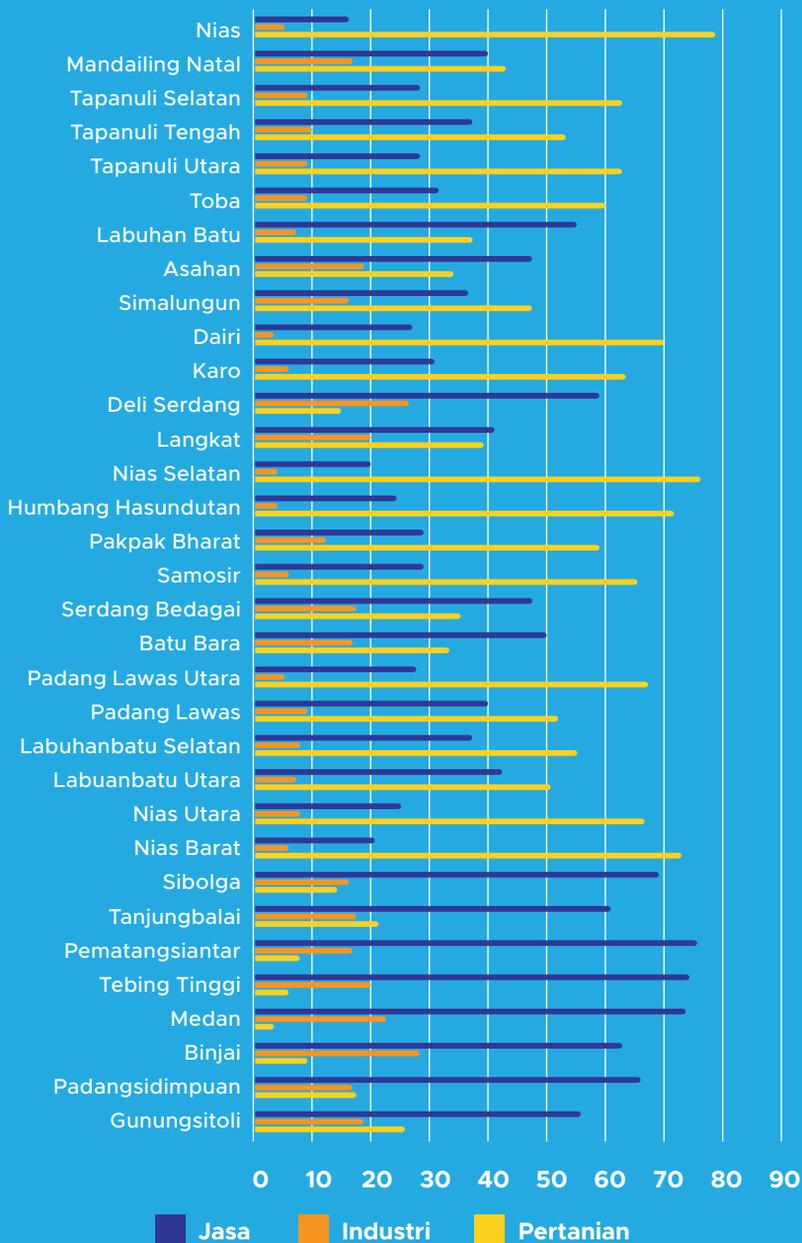
**SUMBER:** BPS

Namun, jika mengintip persentase penduduk yang bekerja di kelompok lapangan usaha, ada beberapa kawasan yang punya potensi besar. Kawasan Kepulauan Nias dan Dataran Tinggi, misalnya, punya potensi besar di pertanian. Di antaranya Nias Selatan, Nias Barat, Humbang Hasundutan, dan Dairi.

Adapun beberapa wilayah di Dataran Tinggi (Toba), Pantai Barat (Sibolga), dan Pantai Timur (Deli Serdang, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Medan) kuat dan berpotensi di sektor jasa. Sedangkan sektor industri tetap jagoan di Pantai Timur (Kota Binjai, Medan, dan Deli Serdang).

Dengan memahami potensi setiap daerah, baik dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun daya dukung infrastruktur, semestinya wilayah-wilayah tersebut dapat meningkatkan kemakmurannya. Apalagi jika ditopang tenaga kerja yang pas dengan kebutuhan lapangan usaha. Industri jadi tak kesusahan mendapatkan pekerja, sementara orangnya juga tak kepayahan mencari nafkah. Maka dibutuhkan satu tarikan napas antara pendidikan vokasi—baik dari level menengah maupun tinggi—dan kebutuhan tenaga kerja di setiap daerah.

**PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA  
MENURUT KELOMPOK LAPANGAN USAHA DI SUMATERA UTARA  
PADA TAHUN 2021**



SUMBER: BPS

## AGAR 975 SMK DAN 70 VOKASI LEBIH BERMAKNA

Perkebunan kelapa sawit dan turunannya kini menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Sumatera Utara. Dari kebun, industri ini mengalir sampai pengolahan minyak sawit dan minyak inti sawit untuk produk pangan (oleopangan), bahan kimia (oleokimia), dan biodiesel atau *biofuel*. Tak aneh, pemerintah pusat mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei untuk memajukan industri pengolahan kelapa sawit di Sumatera Utara—selain karet.

Sektor potensial lainnya di Sumatera Utara adalah pariwisata. Pemerintah telah menetapkan kawasan wisata Danau Toba sebagai destinasi wisata superprioritas nasional dengan membentuk Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT), satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Badan ini berperan menyinkronkan dan mengoordinasi pemangku kepentingan, terkait dengan bisnis investasi dan industri pariwisata, antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat Danau Toba.

Maka, untuk mengoptimalkan dua potensi besar tersebut, industri sawit dan pariwisata, serta sektor lain yang akan di-

pengaruhi kemajuan keduanya, dibutuhkan ekosistem *pentahelix* yang menyambungkan peran pemerintah daerah, perguruan tinggi atau akademisi, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), media, serta masyarakat.

Sumatera Utara sangat membutuhkan kerja sama ini karena perkembangan industri membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, inovatif, dan kreatif, SDM adalah tombak daya saing ekonomi. Apalagi, berdasarkan masukan dunia usaha dan industri Sumatera Utara, keterampilan dasar (*hard skill*) yang paling banyak dibutuhkan adalah pemasaran dan media, koordinasi dan manajemen waktu, *artificial intelligence*, pemrograman, serta *design and customer experience*. Sedangkan *soft skill* yang paling dibutuhkan di antaranya berpikir kreatif, berpikir analitis, komunikatif, dan mampu menyelesaikan masalah. Dan semua itu, sayangnya, belum banyak dimiliki lulusan sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK) hingga diploma/sarjana di Sumatera Utara.

Hal tersebut bisa terjadi karena kurikulum pendidikan belum *nyambung* dengan kebutuhan dan



*Kegiatan belajar mengajar kampus Vokasi Universitas Sumatera Utara. Dok Universitas Sumatera Utara*

perkembangan DUDI. Selain itu, sebaran DUDI tidak selaras dengan sebaran SMK dengan keahlian tertentu. Misalnya, di daerah tertentu yang dibutuhkan adalah *skill* pariwisata, tapi suplai lulusan malah sektor pertanian.

Sebetulnya kinerja sekolah vokasi di Sumatera Utara dalam menghasilkan lulusan yang siap diserap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2010, tingkat pengangguran lulusan sekolah vokasi tercatat sembilan persen. Dari total 6,027 juta tenaga kerja, 12,59 persen merupakan lulusan sekolah vokasi. Sedekade kemudian, pada 2020, tingkat pengangguran vokasi menurun menjadi 7,38 persen, dengan proporsi 17,14

persen dari total tenaga kerja merupakan lulusan sekolah vokasi.

Namun gerak positif tersebut semestinya bisa tumbuh lagi. Sebab, pekerja lulusan sekolah menengah pertama (SMP) hingga Agustus 2023 masih tinggi, mencapai 19,05 persen. Sedangkan gabungan lulusan SMA dan SMK mencapai 43,36 persen.

Arah tersebut sudah ada. Per semester genap 2023/2024, Sumatera Utara tercatat memiliki 975 SMK dan 70 sekolah vokasi. Modal itu tinggal diselaraskan dengan potensi ekonomi yang dimiliki provinsi ini dan kebutuhan DUDI, yang kadang lebih cepat dari prediksi.



PASAMAN

PASAMAN  
BARAT

LIMA PULUH  
KOTA

BUKIT  
TINGGI

PAYAKUMBUH

AGAM

PADANG  
PARIAMAN

TANAH  
DATAR

PARIAMAN

PADANG  
PANJANG

SIJUNJUNG

SAWAHLUNTO

PADANG

SOLOK

DHARMASRAYA

KEPULAUAN  
MENTAWAI

SOLOK  
SELATAN

PESIRIS SELATAN



# PROVINSI SUMATERA BARAT: **MEMBIDIK SASARAN BARU: EKONOMI BERBASIS WISATA**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH SUMATERA BARAT:**

**Ketua:** *Nurul Fauzi (Politeknik Negeri Padang)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Negeri Padang: *Amy Fontanella, Yuhefiza, Ranti Komala Dewi, Mukhlis, Ihsan Lumasa Rimra, Reza Nandika, Dony Marzuki, Yosi Yosinta, Friza Gustia Ningsih, Irdi Rosita*
2. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh: *Ramaiyulis, Iis Ismawati, Salvia, Devi Kumala Sari, Nova Sillia*
3. Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang: *Bambang Heriyadi, Wawan Purwanto, Rahmiati, Dian Adhetya Arif, Harizona Aulia Rahman, Dodi Vionanda, Feri Ferdian*

*Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat memang masih di bawah tiga lapangan usaha lain, tapi pertumbuhannya paling cepat. Sangat potensial menjadi penyokong ekonomi daerah.*

Pernahkah Anda menikmati rendang jamur khas Sumatera Barat? Bagaimana dengan rendang telur? Pernah juga merasakan kelezatannya? Jika belum, jangan berkecil hati, karena sepertinya kedua hidangan itu tak sekondang rendang daging sapi. Ya, selama ini, kebanyakan dari kita mungkin hanya terbiasa menikmati dahsyatnya rendang daging sapi, karena kedua jenis rendang yang disebut terdahulu kurang familiar di benak kita.

Namun, kelak, dalam waktu dekat kita akan segera akrab dengan pilihan rendang telur atau jamur itu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) saat ini tengah berancang-ancang mendorong kedua jenis kuliner itu agar lebih populer. Bukan hanya rendang telur dan jamur, jenis kuliner lain yang masih belum dikenal luas juga akan dipromosikan ke dunia luar.

Rendang telur dan jamur tak akan pernah kekurangan bahan baku. Sebab, wilayah Kabupaten Limapuluh Kota akan menjadi sentra produksinya. Di sana, banyak lahan yang ditanami jamur

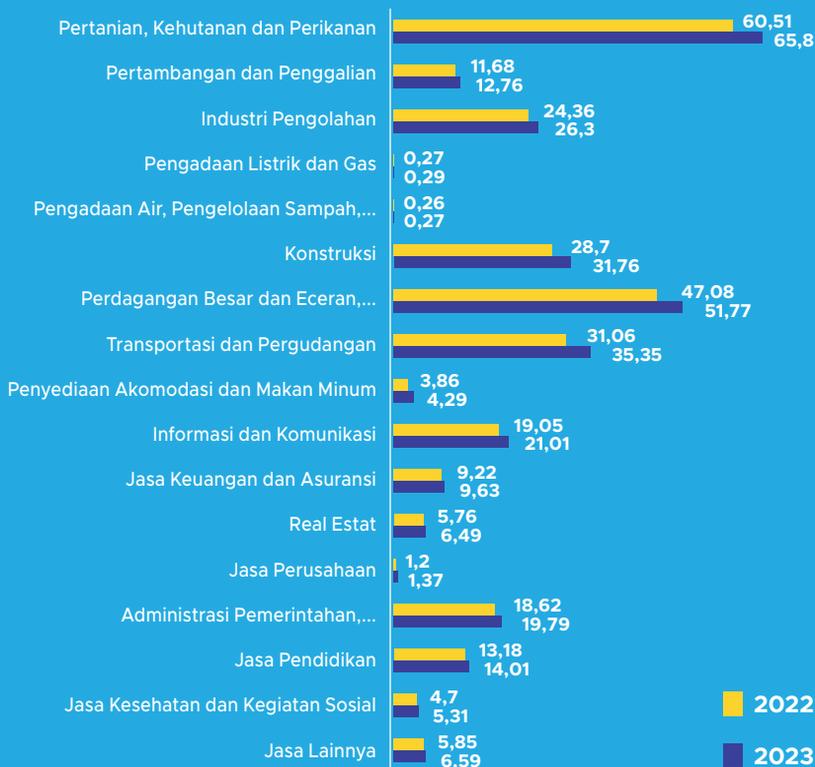
dan juga banyak peternak ayam—baik pedaging maupun petelur—sehingga produksi rendangnya akan lancar. Wilayah ini memang sudah lama menjadi pemasok kedua bahan itu ke Sumbar, bahkan ke Riau.

Selama ini, sebenarnya rendang telur sudah menjadi ikon kuliner Limapuluh Kota, tapi dari segi industri masih belum menonjol, terutama karena kemasannya masih tradisional dan dinilai kurang menarik. Sementara itu, rendang jamur tidak seawet rendang daging, jadi kurang menarik minat pelancong, misalnya, untuk mencangkinya sebagai oleh-oleh.

Namun diyakini, dengan beberapa terobosan perbaikan dari segi kemasan dan promosi, kedua hidangan kuliner itu bisa naik kelas menjadi hidangan yang digemari secara luas. Para turis juga akan ringan hati menjadikannya sebagai buah tangan setelah menjelajahi Ranah Minang.

Para pemangku kepentingan industri wisata di Sumbar saat ini memang terus berbenah. Bidang kuliner dan beberapa sektor lain akan dioptimalkan agar bisa

## STRUKTUR PDRB SUMATERA BARAT (ADHB DALAM TRILIUN RUPIAH)



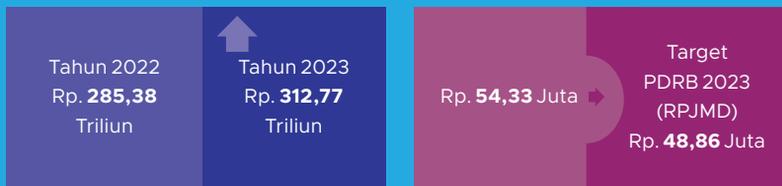
### STRUKTUR PDRB

#### PDRB Sumatera Barat

Atas Dasar Harga Berlaku

#### PDRB per kapita 2023

Atas Dasar Harga Berlaku



SUMBER: BPS

mendukung kemajuan industri pelancongan di Ranah Minang. Ya, sektor ini memang bakal digenjut serius untuk menjadi bintang baru kemajuan ekonomi daerah.

Pertimbangannya, sektor wisata mengalami pertumbuhan sangat cepat beberapa tahun terakhir. Memang, secara statistik, sumbangan sektor wisata untuk produk domestik regional bruto (PDRB) tak sebesar lapangan usaha lain. Tapi masa depan bidang wisata diperkirakan bakal cerah karena akan menyangkut banyak aspek bisnis.

• • •

Dalam PDRB, terlihat dari struktur perekonomian Sumatera Barat 2020, ada tiga lapangan usaha yang mendominasi: pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusinya masing-masing 22,38 persen. Berikutnya usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (15,76 persen). Lalu ada usaha transportasi dan pergudangan di cakupan 10,44 persen. Sumbangan ketiga lapangan usaha tersebut menunjukkan struktur perekonomian Sumbar adalah daerah agraris yang ditunjang dan terkait dengan struktur perdagangan dan jasa transportasi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, ada lima

sektor yang ditetapkan dan diprediksi masih menjadi penunjang perekonomian, yakni pertanian, perdagangan, pariwisata, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Pada 2022, lapangan usaha pertanian tumbuh 3,52 persen meski dua tahun sebelumnya negeri ini dihantam pandemi.

## Sektor Pertanian

Produksi berbagai komoditas unggulan mengalami peningkatan dalam rentang 2019-2020. Pada 2020, produksi padi mencapai 2.934.836 ton setelah dilakukan peningkatan luas tanam dan luas panen. Saat itu, penyaluran pupuk bersubsidi juga kian lancar, di samping ada penyaluran alat mesin pertanian.

Produksi jagung 2020 mencapai 935.716 ton (naik dibanding 920.131 ton pada 2019) setelah ada pengembangan kawasan jagung seluas 208 hektare pada 24 kelompok tani di empat kabupaten di Sumatera Barat.

Produksi tanaman hortikultura juga meningkat pada 2020, yang mencapai 56.227 ton. Komoditas yang bertambah adalah manggis, cabai, dan lain-lain. Cabai, misalnya, meningkat menjadi 654 ton. Hal ini disebabkan oleh adanya pembinaan dan bantuan benih cabai di daerah-daerah sen-



*Perkebunan Teh Solok di Sumatera Barat. Fachri Hamzah*

tra dan penyangga.

Demikian juga bawang merah, yang pada 2020 mencatat produksi sebanyak 154.014 ton. Hal ini disebabkan oleh penggunaan varietas bawang merah unggul, yakni SS Sakato, yang dilepas Kementerian Pertanian. Varietas ini sangat bagus dikembangkan di Sumatera Barat.

### **Sektor Perdagangan**

Juara pertumbuhan untuk sektor unggulan pada 2022 diraih perdagangan, yang sukses mematok cakupan sebesar 5,6 persen. Pendorong utama pertumbuhannya adalah meningkatnya penjualan di pasar tradisional dan modern.

Sejak 2016 hingga 2020, sektor ini selalu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di daerah. Persentasenya pada 2016 sebesar 14,29 persen dan menjadi 15,76 persen pada 2020. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan daerah.

### **Sektor Pariwisata**

Sepanjang 2016-2020, pariwisata di Sumatera Barat tampil cukup cerah karena selalu terjadi peningkatan kunjungan wisatawan. Namun, ketika merebak

wabah Covid-19, grafiknya mulai turun. Baik wisatawan mancanegara maupun Nusantara mulai membatasi perjalanan. Tentu ini juga terjadi di seluruh dunia.

Ibaratnya, saat itu turis yang masuk melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur bisa dihitung dengan jari. Pelancong yang masuk lewat bandara, misalnya, hanya sebanyak 10.875 orang pada 2020. Bandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai 61.131 orang. Mereka berasal dari Malaysia (81,2 persen), Australia (2,72 persen atau 296 orang), dan Cina (2,34 persen atau 255 orang).

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membenahi destinasi wisata, kesiapan masyarakat, serta sarana dan prasarana pendukung, juga melakukan promosi. Selain itu, pemerintah daerah mendukung event tahunan berskala internasional, seperti Tour de Singkarak (2009-2019 dan belum berlanjut lagi). Tak ketinggalan, kuliner serta budaya Minangkabau terus diperkenalkan di pentas internasional.

Bidang penyediaan akomodasi dan makan-minum masih menjadi kontributor terbesar untuk sektor pariwisata sampai 2020. Bahkan, setelah pandemi, sumbangannya juga masih paling

banyak, di angka 15,8 persen. Ini terjadi berkat peningkatan permintaan hotel untuk kegiatan instansi dan liburan masyarakat.

Namun, karena bidang penyediaan akomodasi dan makan-minum ini masih lemah dibanding sektor lain, seperti pertanian dan transportasi, sumbangannya belum terlihat besar untuk PDRB. Angkanya hanya berkisar 1,2 sampai 1,4 persen.

Dalam statistik juga terlihat bahwa sektor transportasi dan pergudangan serta sektor konstruksi masih menjadi andalan daerah. Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan terjadi karena adanya peningkatan volume penumpang angkutan. Selain itu, aktivitas pergudangan dan perusahaan logistik meningkat.

Adapun konstruksi tumbuh 2,51 persen lebih disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas setelah dilakukan revitalisasi jalan, pasar, dan jembatan. Selain itu, banyak pembangunan jalan dan perumahan baru di berbagai lokasi.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, dalam RPJMD 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan arah prioritas pembangunan yang terkait dengan sektor unggulan dilakukan dengan cara sebagai

berikut.

- a. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agrobisnis;
- b. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
- c. Pengembangan kemaritiman dan kelautan;
- d. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi, dan investasi;
- e. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

## Mendorong Pariwisata

Konsorsium melakukan uji tipologi Klassen dan analisis LQ 2011-2023. Hasilnya, pertanian ada di kuadran 1, yakni sektor yang maju dan tumbuh pesat. Sedangkan di kuadran 2 alias area yang masih dapat berkembang dan maju pesat terdapat sektor pariwisata.

Data juga menunjukkan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum, termasuk pariwisata, tumbuh paling pesat (15,8 persen) dibanding bidang lain, meski kontribusinya ke PDRB tak sebesar pertanian, misalnya.

Hal itu juga terkonfirmasi pada figur ekonomi setiap kabupaten. Di daerah-daerah, sektor

pertanian memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi, tapi sektor pariwisata adalah yang tumbuh paling cepat.

Jadi konsorsium berpendapat ada dua penggerak utama ekonomi Sumatera Barat ke depan. Yang pertama adalah ekonomi berbasis pariwisata dengan sektor penunjang yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkearifan lokal. Sedangkan penggerak satunya adalah value kearifan lokal dengan bersandar pada filosofi yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Minang, yakni adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Lalu apa yang diidentifikasi sebagai sektor penunjang pariwisata tersebut? Setidaknya ada tiga yang ditetapkan, yakni pertanian, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Ya, pertanian tetap akan mengambil peran penting dalam ekonomi ranah Minang, hanya kali ini menjadi pendorong kemajuan pariwisata.

Selain itu, ada peluang besar untuk mengembangkan wisata halal, justru karena latar belakang kultur dan sosiologis masyarakat Sumbar yang religius. Dengan akar karakter seperti itu, konsorsium menekankan wisata bisa dikembangkan secara unik dan khas, yang berbeda misalnya dengan wisata di Bali atau Yog-

akarta. Wisatawan yang disasar dari rumpun Melayu, yakni dari negeri-negeri jiran, seperti Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, dan Brunei Darussalam, yang memiliki ikatan historis dengan Sumatera Barat.

## **Pertanian Menunjang Pariwisata**

Ada dua potensi di bidang pertanian yang menunggu digarap serius untuk menjadi pendorong pariwisata, yakni hortikultura/agrowisata dan hilirisasi produk. Sumbar amat kaya dengan komoditas hortikultura, antara lain stroberi di daerah Agam, tanaman gambir (Limapuluh Kota), kebun buah (Lembah Anai), kebun teh dan kebun kopi (Solok), serta kebun sayur organik (Agam dan Padang Pariaman).

Basis untuk mengoptimalkan potensi kawasan agrowisata rata-rata sangat kuat. Ada agrowisata yang menawarkan pemandangan memesona, sementara di tempat lain menyimpan keunikan yang khas.

Di kebun teh Solok, misalnya, tersaji panorama perkebunan yang khas dan indah. Selain itu, di sana para pengunjung berkesempatan menyimak proses pengolahan dari daun teh hingga tersaji sebagai minuman yang menyegarkan.

Di Malalak, Agam, saat ini tengah dikembangkan wisata perkebunan rempah dan herbal. Malalak selama ini memang dikenal sebagai penghasil kayu manis. Hanya, saat ini belum banyak orang di luar Sumbar yang mengetahui hal itu.

Pernah dengar gambir? Nah, komoditas dari sektor kehutanan/perkebunan ini juga bisa dijadikan unggulan. Gambir adalah tanaman endemik lokal. Dari gambir ini bisa diturunkan beragam produk, seperti obat-obatan dan kosmetik. Sayangnya, saat ini masih ada masalah di level distribusi karena ada penguasaan oleh kelompok tertentu.

Ada lagi yang unik, yakni agrowisata peternakan sapi di Padang Mengatas, Limapuluh Kota (New Zealand-nya Sumbar), dan juga di Solok. Di Solok, pengunjung bisa belajar bagaimana mengolah susu sapi menjadi keju, es krim, atau yoghurt. Kebanyakan agrowisata memang arahnya lebih kental edukasi selain tempat piknik.

Kawasan agrowisata lain tentu saja menawarkan keunikan masing-masing. Tapi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan adalah mengintegrasikan semua potensi itu dengan unsur penunjang. Saat ini, simpul antara industri wisata dengan sektor

penunjang belum kuat. Kedua lapangan usaha itu masih berjalan secara parsial.

Salah satu upaya memperkuat simpul itu adalah memperbaiki sisi hilirisasi produk pertanian. Disadari, kualitas dan kelas produk olahan hasil pertanian di Sumbar masih perlu ditingkatkan. Dari sisi kualitas, misalnya, bagaimana caranya agar rendang jamur bisa seawet rendang daging. Sebab, kalau rendang itu cepat basi seperti selama ini, turis akan ogah menentengnya sebagai oleh-oleh.

Soal naik kelas, salah satunya, bisa dilakukan dengan memperbaiki kemasan (packaging). Saat ini, masih banyak produk olahan yang dikemas ala kadarnya sehingga belum memikat wisatawan.

Harus diakui, Sumatera Barat memang surga kuliner. Beragam hidangan tersedia dan cukup memanjakan lidah siapa saja. Tapi para penikmat piknik lebih suka menyantap hidangan itu di tempat dan belum tergerak membawa pulang sebagai oleh-oleh. Pahalanya, ya, karena belum diolah sebagai pilihan oleh-oleh yang memudahkan pelancong.

Misalnya, di Danau Maninjau, ada makanan yang enak dari bahan ikan rinuak. Di Danau Singkarak juga ada ikan endemik ikan bilih. Jenis hidangan ini sangat

## METODE PERHITUNGAN SLQ DAN DLQ

### 4 Pengkombinasian SLQ dan DLQ

Hasil pengkategorian lapangan usaha yang termasuk sektor basis dengan SLQ dikombinasikan dengan perkembangan/potensi pengembangan masing masing lapangan usaha DLQ dengan penyajian ke dalam 4 kuadran

#### Kuadran 1

Lapangan Usaha  
Merupakan Sektor Basis  
dan memiliki potensi  
pengembangan lebih cepat

#### Kuadran 2

Lapangan Usaha Bukan  
Merupakan Sektor  
Basis tapi memiliki  
pengembangan lebih cepat

#### Kuadran 3

Lapangan Usaha  
Merupakan Sektor Basis  
tetapi tidak memiliki potensi  
pengembangan lebih cepat

#### Kuadran 4

Lapangan Usaha Bukan  
Merupakan Sektor Basis  
dan tidak memiliki potensi  
pengembangan lebih cepat

SUMBER: BPS

## SEKTOR UNGGULAN SUMATERA BARAT SEPULUH TAHUN TERAKHIR (2014-2023)

### Kuadran 1

- A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- P Jasa Pendidikan

### Kuadran 2

- B Pertambangan dan Penggalian
- D Pengadaan Listrik dan Gas
- F Konstruksi
- I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- L Real Estate

### Kuadran 3

- E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- H Transportasi dan Pergudangan
- J Informasi dan Komunikasi
- Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

### Kuadran 4

- C Industri Pengolahan
- K Jasa Keuangan dan Asuransi
- M,N Jasa Perusahaan
- R,S,T,U Jasa Lainnya

SUMBER: BPS

potensial menjadi oleh-oleh favorit. Ikannya kecil-kecil dan bisa digoreng atau diolah dengan cara beragam. Sayangnya, hidangan ikan bilih saat ini kurang diolah dan dikemas secara optimal sehingga belum menggerakkan wisatawan untuk menjadikannya sebagai buah tangan.

Kota Malang bisa ditunjuk sebagai contoh destinasi wisata yang mampu melakukan pengemasan produk kuliner dengan ciamik. Berbagai macam buah yang diolah menjadi keripik dikemas secara apik sehingga sangat “oleh-oleh-able”. Modus seperti inilah yang bisa menjadi rujukan Sumbar untuk melakukan hal yang sama.

Saat ini, dari Sumbar, baru keripik balado yang kerap dicangking pelancong sebagai oleh-oleh. Padahal banyak komoditas lain yang bisa juga di-keripik-kan. Misalnya rambutan, yang banyak sekali di Sijunjung, dan pisang di Agam. Tapi semua itu kebanyakan baru diusahakan sektor rumah tangga dan belum berkembang ke skala lebih besar. Maka kemasaannya pun masih ala kadarnya.

## **Ekonomi Kreatif**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi kreatif yang potensial di Sumbar adalah ke-

rajinan tangan, fashion, kuliner, e-commerce, industri film/media, dan konten kreator. Konsorsium menambahkan cabang pertunjukan seni yang juga bisa digarap optimal. Tapi lapangan usaha itu sekarang juga belum terintegrasi dengan pariwisata.

Meski demikian, ada beberapa daerah yang mulai mencoba menatanya agar lebih baik. Di Kabupaten Tanah Datar, misalnya, ada program Satu Nagari Satu Event. Jadi perkembangan ekonomi kreatif saat ini masih bergantung pada inisiatif kepala daerah masing-masing.

Pendekatan lain bisa dengan mengembangkan desa wisata, seperti yang sudah berjalan di Desa Kubu Gadang, Kabupaten Padang Panjang, dan desa wisata Nyarai di Padang Pariaman. Desa wisata Gadang bahkan pernah mendapat penghargaan tingkat nasional. Sudah pasti, jika ini bisa dioptimalkan di wilayah lain, akan menarik karena setiap nagari tentu punya keunikan tersendiri.

## **Membangun Integrasi**

Dari aspek-aspek penunjang pariwisata itu, sayang sekali, semuanya masih seperti jalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi. Semua pemangku kepentingan di sektor wisata juga mengakui kea-

daan ini. Jadi kini disadari bahwa ke depan harus ada integrasi antarlini demi mendukung kemajuan pariwisata Sumatera Barata.

Unsur penunjang lain adalah meningkatkan infrastruktur yang menghubungkan antarwilayah. Untuk kawasan yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi, aspek ini sangat penting. Dan itu menjadi PR besar untuk pengembangan pariwisata di Sumatera Barat.

### **Peluang Pariwisata Halal**

Pariwisata halal juga tengah dielus-elus untuk dikembangkan Sumatera Barat, mengingat latar belakang kultural kawasan ini. Pemerintah provinsi sudah mengatur hal ini dalam sebuah peraturan daerah pada 2020. Sumbar dicanangkan sebagai pusat wisata halal Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Target ini akan dicapai menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2045.

Wisata halal yang berbasis pada ungkapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ini akan menjadi keunikan bagi Sumbar. Adat Minangkabau identik dengan Islam—tak terpisahkan.

Saat ini, bentuk wisata halal itu masih diikhtiarkan karena upaya pelibatan pemuka agama dan niniak mamak masih ter-

batas. Padahal, dalam struktur kepemimpinan, masyarakat Minangkabau bersandar pada ajaran tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin alias kepemimpinan harus menguatkan niniak mamak, pemuka agama, dan cerdik pandai. Jadi, misalkan pariwisata dikelola desa atau wilayah dan didukung pemerintah daerah, pelibatan niniak mamak atau pemuka agama masih relatif terbatas. Jadi bentuk pariwisata halal berbasis budaya Minangkabau masih dalam pencarian.

• • •

Membangun ekonomi berbasis wisata sepertinya adalah “jalan ninja” yang tepat bagi Provinsi Sumatera Barat. Kawasan ini memiliki bentangan alam yang khas dan memesona: laut, kepulauan, pegunungan, perkebunan teh, danau, geopark, dan lain-lain. Dengan semua faktor penunjang yang sangat potensial, dari pertanian, kuliner, hingga kreativitas warganya, ibaratnya sudah ada kuda-kuda kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Tentu saja sejumlah pekerjaan rumah yang saat ini masih bercokol harus segera diatasi. Jika itu terlaksana dengan tepat, tuas gas seperti ditarik kencang dan ekonomi daerah bakal ngacir cepat.

Ayo, gas!

## DRIVER UNTUK KETENAGAKERJAAN DAN PERENCANAAN INOVASI

Dari hasil analisis data, terdapat dua *driver of change* potensial terhadap perencanaan ketenagakerjaan (*workforce planning*) di Sumatera Barat. Kedua *driver* itu adalah dimensi ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi (maju) dan dimensi sosial, yaitu kompetensi lulusan vokasi (kompeten).

Untuk perencanaan inovasi berbasis potensi daerah (*innovation planning*), terdapat dua *driver of change* utama yang ditemukan, yaitu dimensi pengembangan ekonomi berbasis pariwisata beserta sektor penunjangnya yang terintegrasi berkelanjutan, sementara yang kedua adalah dimensi value pariwisata berbasis kearifan lokal, yakni *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK).

Berdasarkan dua *driver of change* yang ditemukan pada kondisi ketenagakerjaan dan rencana inovasi berbasis potensi daerah tersebut, disusun serangkaian skenario dan *roadmap*. Untuk perencanaan ketenagakerjaan, terdapat empat skenario:

1. Padi manjadi jaguang maupiah;
2. Rang mudo mananguang rindu;
3. Biduak tirih pandayuang patah;

4. langang di nan rami.

Untuk perencanaan inovasi berbasis potensi daerah (*innovation planning*), juga terdapat empat skenario:

1. Sumbar tagak tali;
2. Sumbar kama ka dibao;
3. Sumbar sasek aia;
4. Sumbar diasak urang lalu.

Berdasarkan skenario di atas, disusun dua *roadmap*, masing-masing di bidang ketenagakerjaan dan perencanaan inovasi berbasis potensi daerah. Untuk ketenagakerjaan dan sinergi satuan pendidikan vokasi, terdapat rencana jangka pendek dengan tema Vokasi Menginisiasi.

Ada tiga strategi yang diusulkan: (a) inisiasi menyusun *workforce planning*, (b) inisiasi menyusun *innovation planning*, dan (c) inisiasi membangun komunikasi yang cair dengan semua *stakeholder* ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi di Sumatera Barat.

Untuk rencana jangka menengah, dengan tema Vokasi Satu Persepsi, ada empat strategi: (a) satu persepsi solusi melalui serangkaian riset terapan, (b) satu persepsi melalui sinkronisasi kegiatan semua satuan pendidikan dan pelatihan vokasi di Sumbar,



Bisnis makanan warung nasi kapau di Sumatera Barat. Dok TEMPO/Aditia Noviansyah

(c) satu persepsi melalui pelem-bagaan TKDV di semua kabupa-ten/kota di Sumatera Barat, dan (d) satu persepsi upaya bersama untuk penguatan *branding* dan *image* pendidikan dan pelatihan vokasi di Sumatera Barat.

Untuk jangka panjang, tema yang diambil adalah Vokasi Kuat Menguatkan Sumatera Barat, yang akan dilakukan dengan dua strategi, yaitu (a) vokasi kuat melalui peningkatan efektivitas fungsi TKDV dan (b) vokasi me- nguatkan melalui keterlibatan SPV sebagai aktor utama pembangun- an Sumatera Barat.

Sementara itu, untuk peren- canaan inovasi berbasis potensi daerah juga telah disusun *road- map* untuk jangka pendek melalui strategi (a) peningkatan daya sa-

ing serta (b) penguatan kebijakan dan regulasi. Untuk jangka mene- ngah, juga terdapat dua strategi, yaitu (a) peningkatan investasi dan akses permodalan serta (b) penguatan kelembagaan dan tata kelola.

Adapun untuk jangka pan- jang, strategi: adalah (1) im- plementasi pariwisata berbasis ABS-SBK dan (2) penguatan in- frastruktur pendukung pariwisata. Strategi-strategi tersebut juga te- lah diturunkan ke dalam serang- kaian rekomendasi dan rencana aksi berupa riset terapan untuk menyinergikan semua satuan pen- didikan vokasi dengan potensi dan program unggulan pembangunan Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.



DUMAI

ROKAN  
HILIR

BENGKALIS

KEPULAUAN  
MERANTI

ROKAN  
HULU

SIAK

PEKANBARU

KAMPAR

PELALAWAN

INDRAGIRI  
HILIR

Kuantan  
Singingi

INDRAGIRI  
HULU



PROVINSI RIAU:

# DARI YANG FANA KE BERKELANJUTAN

**TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH RIAU:**

**Ketua:** *M. Alkadri Perdana (Politeknik Negeri Bengkalis)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Bengkalis: *Akmal Indra, Gunawan, Faisal Ananda, Nurul Fahmi, Elvi Rahmi, Umi Masitah, Hardiyanto, Try Aditia*
2. Politeknik Caltex Riau: *Zainal Arifin Renaldo, Mona Elviyenti, Anggy Trisnadoli*
3. Politeknik Kampar: *Muhammad Ridwan, Andri Nofiar, Fina Nasari*

*Riau pernah menjadi penghasil minyak bumi nomor satu. Setelah produksinya menurun, giliran minyak nabati yang ditumbuhkan bersama segala ekonomi yang berasal dari tanah. Demi keberlanjutan.*

*Cities that never sleep*—kota-kota yang tak pernah tidur. Pelalawan di Provinsi Riau tidak berada dalam daftar kota ini. Tapi, di salah satu bagian di kabupaten ini, di tempat bernama Riau Kompleks, sudah ada yang tak pernah tidur.

Gejalanya terlihat seperti ini: bank-bank buka sampai malam (mengingat pada tagar sebuah bank dulu, *Citi never sleeps*); warung-warung makan mengabaikan jam dinding; orang-orang lalu-lalang tanpa melihat posisi matahari dan bulan.

Penyebabnya adalah industri yang berdegup kencang dari ibu kota Kabupaten Pelalawan itu, Pangkalan Kerinci. Di sana ada pabrik bubur kertas (*pulp*) berkapasitas 4 juta ton per tahun, pabrik kertas berkapasitas 1,15 juta ton per tahun, pabrik *viscose rayon* berkapasitas 300 ribu ton per tahun, dan pabrik kertas kemasan berkapasitas 1,2 juta ton per tahun.

Seperti kebanyakan kota industri baru, Pangkalan Kerinci pada mulanya hanya kampung kecil. Ia terpencil. Jaraknya ke Pekanbaru sekitar 124 kilometer. Perlu empat-lima jam menuju ibu kota

Riau itu karena melewati jalan yang masih tanah kuning.

Pada 1993, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), bagian dari APRIL Group, salah satu unit bisnis Royal Golden Eagle (RGE), membangun pabrik bubur kertas di Pangkalan Kerinci. Ketika itu, di sana hanya terdapat sekitar 200 keluarga. Mata pencarian warga sebagian besar di sektor pertanian dan perkebunan tradisional. Ada juga yang menjadi nelayan. Saat itu, Pangkalan Kerinci juga masih menjadi bagian dari Kabupaten Kampar.

Pada 1995, RAPP memulai produksi bubur kertasnya, diikuti produksi kertas tiga tahun kemudian. Pada 1999, Kabupaten Kampar dipecah menjadi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Pangkalan Kerinci dipilih menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Dua dekade kemudian, jalan menuju Pekanbaru sudah diluruskan, menjadi tinggal 60 kilometer, yang bisa ditempuh paling lama 1 jam 30 menit. Populasi penduduk di Pangkalan Kerinci juga membengkak menjadi lebih dari 200 ribu jiwa.

Adapun Riau Kompleks telah menjadi kompleks terintegrasi terbesar di dunia. Selain pabrik, di dalam kompleks dengan total investasi Rp 100 triliun itu terdapat pusat pembibitan dan penelitian untuk keperluan produksi perusahaan. Sekitar 14 ribu orang bekerja di kompleks ini. Di sana juga tinggal lebih dari 10 ribu penghuni.

Perekonomian Pangkalan Kerinci melesat berkat industri ini. Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengungkapkan, operasionalisasi APRIL Group sepanjang 2016-2022 telah berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Riau sebesar Rp 245,6 triliun. Dalam skala nasional, efek *multiplier* operasionalnya bahkan berkontribusi dalam penambahan produk domestik bruto sebesar Rp 484,3 triliun selama periode ini.

Namun pusat industri di Riau bukan hanya Pangkalan Kerinci. Lainnya adalah Dumai, yang sudah moncer jauh sebelum Pangkalan Kerinci.

Dianggap sebagai daerah tanpa potensi minyak bumi oleh Belanda pada masa pra-kemerdekaan, perut bumi Riau-waktu itu tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau-ternyata berlimpah emas

hitam ini. Sejak mulai dieksploitasi pada 1952 hingga 2021, total minyak mentah yang diangkat dari empat blok PT Chevron Pacific Indonesia saja telah menembus 12 miliar barel. Melalui Dumai, minyak itu diekspor ke seluruh dunia, sehingga Dumai sempat menjadi pelabuhan ekspor minyak terbesar di Asia Tenggara, yang sanggup melayani kapal tanker berbobot 150 ribu ton.

Tapi minyak bumi itu fana. Meski begitu, roda bisnis di Dumai tidak surut. Kota ini membanjing setir. Dumai kini merupakan pelabuhan ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) raksasa. Pada 2019 saja, dari pelabuhan ini dikirim 4,751 juta ton CPO ke seluruh dunia.

CPO merupakan produk yang berkelanjutan jika ditata dengan baik. Komoditas ini, bersama industri kertas, menjadi andalan Riau, yang bertekad bertransformasi dari industri ekstraktif yang fana ke yang berkelanjutan.

Analisis dengan metodologi *foresight*, dengan metode *horizon scanning*, yang dilakukan untuk pembuatan laporan ini mengungkap sejumlah potensi dan keunggulan untuk pengembangan sektor industri yang *sustainable* di wilayah Provinsi Riau. Modalnya adalah letak geografis yang strategis, berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, serta berada

di jalur perdagangan internasional Selat Malaka.

Kajian ini mengungkap Riau kaya dengan kluster unggulan untuk dikembangkan, bukan hanya sawit dan *pulp*. Salah satu yang menonjol adalah kluster perdagangan. Kluster ini berada di Kota Pekanbaru, yang diidentifikasi sebagai kluster perdagangan utama. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru memegang peran strategis dalam dinamika ekonomi dan perdagangan regional.

Kota ini menikmati keuntungan dari pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk keberadaan bandar udara internasional yang telah beroperasi sejak 1984. Pekanbaru juga menawarkan berbagai fasilitas komersial, seperti mal dan hotel berbintang tiga hingga lima. Kota ini juga menjadi pusat administrasi dan keuangan, dengan infrastruktur yang terus berkembang, aksesibilitas dan konektivitas yang memadai, serta menjadi titik temu utama bagi inovasi, teknologi, dan pendidikan.

Hasil identifikasi sektor unggulan di bidang perdagangan di wilayah Kota Pekanbaru menemukan potensi lapangan usaha itu adalah retail dan distribusi, *e-commerce*, pusat belanja dan mal, *hospitality* dan MICE, jasa keuangan, properti dan *real estate*, serta pelayanan teknologi infor-

masi dan komunikasi yang mendukung operasi bisnis.

Kluster potensial berikutnya adalah kluster industri. Bersama Pangkalan Kerinci di Pelalawan dan Lubuk Gaung di Dumai, dua kawasan industri utama telah berkembang di provinsi ini, yaitu Tanjung Buton di Siak dan Tenayan Raya di Pekanbaru.

Perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Lubuk Gaung terutama berfokus pada pengolahan buah/biji kelapa sawit. Mereka memproduksi minyak kelapa sawit dan inti sawit. Produk turunannya meliputi CPO, minyak goreng, oleokimia, dan biodiesel. Dalam lima tahun terakhir, industri baru, khususnya di bidang oleokimia, telah tumbuh di kawasan ini.

Oleokimia adalah sektor yang mengubah minyak kelapa sawit dan fraksi minyaknya menjadi produk turunan seperti asam lemak, ester, alkohol lemak, dan surfaktan. Produk-produk itu digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembuatan sabun, detergen, kosmetik, pelumas, dan plastik. Oleokimia kelapa sawit, yang merupakan bagian penting dari rantai nilai kelapa sawit, menambah nilai ekonomi dan diversifikasi produk dari minyak kelapa sawit mentah.

Kota Dumai, dengan akses ke pelabuhan internasional yang tidak jauh dari Selat Melaka dan jalan tol sepanjang 131,5 kilometer ke



*Perkebunan kelapa sawit di Pelalawan, Riau. Dok TEMPO/STR/Riyan Nofitra*

Kota Pekanbaru, memiliki potensi besar dalam kegiatan ekspor dan impor. Kehadiran Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dumai di Desa Pelintung, *refinery* hasil minyak bumi yang dikelola Pertamina, serta pelabuhan bongkar-muat ekspor dan impor memberikan dampak signifikan terhadap diversifikasi lapangan usaha di Kota Dumai.

Berbagai jenis lapangan usaha telah berkembang di kota tersebut sebagai hasil dari infrastruktur industri dan logistik. Pengembangan berbagai lapangan usaha itu tidak hanya meningkatkan perekonomian Kota Dumai, tapi juga membuka banyak peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Ini adalah

contoh bagaimana pengembangan industri dapat berdampak positif pada ekonomi lokal dan masyarakat di sekitarnya.

Namun maskotnya adalah kluster perkebunan. Provinsi Riau memiliki luas area perkebunan 3,7 juta hektare, dengan 426,6 ribu hektare di antaranya adalah perkebunan kelapa dan kelapa sawit. Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar dikenal sebagai pusat perkebunan sawit terbesar di provinsi ini, sementara Kabupaten Indragiri Hilir menjadi penghasil kelapa terbesar.

Perkebunan kelapa sawit dan kelapa di Riau telah menjadi dua sektor penting dalam agrobisnis yang menawarkan beragam peluang pekerjaan dan lapangan

usaha. Pekerjaan ini meliputi penanaman, pemeliharaan, dan panen kelapa sawit dan kelapa serta manajemen perkebunan. Selain itu, ada peluang di bidang pengolahan dan produksi-pabrik didirikan untuk mengolah buah kelapa sawit dan kelapa menjadi produk akhir berupa minyak kelapa sawit, minyak kelapa, kopra, atau produk turunan lainnya.

Perdagangan internasional, termasuk ekspor produk kelapa sawit dan kelapa serta impor bahan atau mesin yang diperlukan untuk pengolahan, juga menjadi bagian penting dari industri ini. Sementara itu, upaya keberlanjutan dan lingkungan, termasuk sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) untuk kelapa sawit dan sertifikasi serupa untuk kelapa, serta inisiatif konservasi, menjadi prioritas dalam operasionalisasi perkebunan.

Inovasi dalam pengembangan produk turunan kelapa dan kelapa sawit, seperti makanan, kosmetik, dan energi terbarukan, menciptakan peluang untuk industri kecil hingga menengah. Implementasi teknologi terkini dalam operasionalisasi perkebunan dan pengolahan, termasuk penggunaan *drone* untuk pemantauan lahan dan otomasi dalam proses pengolahan, juga menjadi bagian penting dari industri ini. Pengembangan konsep agroturisme di perkebunan kelapa

sawit dan kelapa, yang menawarkan pengalaman edukatif bagi pengunjung tentang proses budi daya hingga pengolahan, menjadi peluang yang dapat dikembangkan pula.

Kluster berikutnya adalah pertanian. Di kluster ini ada Kabupaten Kampar, yang memiliki berbagai subsektor pertanian dan tanaman pangan, termasuk padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Dengan luas tanam padi sawah mencapai 6.150 hektare dan produksi gabah sebesar 29.665,90 ton, sektor ini memainkan peran penting dalam ekonomi lokal.

Pertanian modern menawarkan berbagai peluang, dari pemanfaatan teknologi pertanian, seperti sistem irigasi otomatis, sensor tanah, dan *drone* pertanian, hingga transisi ke metode pertanian organik dan berkelanjutan, yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan nilai jual produk pertanian.

Diversifikasi produk juga menjadi bagian penting dari pertanian modern. Dengan akses yang lebih baik ke informasi dan pasar global, petani dapat mempertimbangkan pilihan untuk menanam tanaman hias dan sayuran eksotis atau bahkan mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian mereka.

Koneksi global melalui internet telah membuka peluang baru bagi petani untuk menjual produk mereka di pasar internasional. Mereka dapat memanfaatkan platform *e-commerce* untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia, yang memungkinkan mereka mendiversifikasi pendapatan dan meningkatkan daya saing.

Inovasi produk pertanian juga menjadi bagian penting dari pertanian modern. Misalnya, pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan siap konsumsi atau produk makanan khas daerah dapat membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing.

Tidak boleh dilupakan pula kluster perikanan di Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan Rokan Hilir, yang menjadi tiga pusat utama perikanan. Kabupaten Kampar, khususnya, memiliki potensi perikanan yang sangat tinggi. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau mengakui bahwa budi daya ikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar adalah yang terbaik di Riau, bahkan masuk jajaran budi daya ikan terbaik di tingkat nasional. Sekitar 70 persen produksi ikan budi daya di Riau dihasilkan Kabupaten Kampar.

Sementara itu, Kabupaten Bengkalis memiliki sentra budi daya udang dengan luas lahan 100 hektare yang terus berkembang. Hasil panen udang telah diekspor

ke Malaysia dan Singapura.

Ada beberapa peluang investasi dalam sektor perikanan ini. Salah satunya pengembangan budi daya, baik tambak maupun kolam. Menurut data Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, pemanfaatan sektor perikanan mencapai 902,48 hektare, yang terbagi atas budi daya kolam seluas 863,48 hektare dan budi daya keramba/jaring apung seluas 39 hektare.

Setiap tahun, produksi ikan terus meningkat. Hal ini membuka peluang investasi benih sebanyak 75.870.852 ekor dan pakan seberat 62.039 ton. Setiap tahun, peluang investasi benih diperkirakan mencapai 80.491.387 ekor dan pakan mencapai 68.203 ton. Di bidang pengolahan hasil perikanan, ada peluang untuk berinvestasi melalui diversifikasi produk olahan.

Peluang investasi juga ada di bidang usaha ikan asap dan industri pembuatan filet ikan patin. Dengan ketersediaan bahan baku sebesar 27.888.000 ton per tahun di Kabupaten Kampar, peluang ini dapat dimanfaatkan. Kecamatan Kampar menjadi lokasi utama dengan produksi ikan patin terbanyak, yang mencapai 8.904.000 ton atau 31,93 persen, diikuti Kecamatan XIII Koto Kampar sebanyak 4.536.000 ton atau 16,26 persen, Kecamatan Kuok sebanyak 3.024.000 ton atau 10,84 persen, Kecamatan Salo sebanyak

2.520.000 ton, dan Kecamatan Kampar Timur sebanyak 2.016.000 ton.

Secara keseluruhan, hasil analisis mengungkapkan, yang paling berperan dalam perekonomian adalah industri berbasis sumber daya alam (SDA) non-ekstraktif, yakni pertanian/perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor ini tumbuh 3,75 persen pada 2023. Angkanya memang kalah jauh dibanding pertumbuhan sektor konstruksi (15,89 persen). Tapi sektor SDA non-ekstraktif itu mengambil peran 26,6 persen dalam struktur perekonomian Riau, sedangkan konstruksi hanya berperan sebesar 10,23 persen.

Namun kajian ini juga mengungkap, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tecermin dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan naiknya indeks pembangunan manusia (IPM), turunnya tingkat kesenjangan, turunnya tingkat pengangguran terbuka, dan makin rendahnya tingkat kemiskinan.

Di Riau, indikator-indikator itu memang baik, tapi beberapa di antaranya jomplang. Misalnya, dari aspek pengeluaran penduduk, masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi. Pada Maret 2022, 40

persen penduduk berpengeluaran rendah hanya menikmati 21,73 persen kue ekonomi, sedangkan 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mampu meraup 42,35 persen. Adapun mereka yang berpenghasilan menengah mampu menikmati sebanyak 35,93 persen.

Skor IPM kabupaten/kota di Riau juga menunjukkan masih adanya disparitas pembangunan. Kota-kota dengan IPM yang lebih tinggi memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan kesempatan, sementara kota-kota lain masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

• • •

Kajian ini juga mengungkap ada ancaman yang harus diantisipasi. Yang paling mengancam adalah pemanasan bumi, yang memicu krisis iklim. Soalnya, Riau rentan terhadap bencana lingkungan. Setiap musim hujan, Riau dengan empat sungai besarnya—Indragiri, Kampar, Rokan, dan Siak—selalu banjir. Di musim kemarau, Riau, yang memiliki luas lahan gambut 4,9 juta hektare, rentan terbakar.

Pembangunan di Riau juga sensitif politik. Anda tahu, kan, berapa banyak pemimpin daerah di Riau yang dipenjara karena kasus korupsi?

Akar korupsi itu—ini yang

menantang—adalah nilai-nilai hidup. Kajian ini menemukan, salah satu hal yang mendorong praktik korupsi pejabat di Riau adalah kecenderungan berfoya-foya.

Dimensi nilai Melayu Riau lainnya tak kalah penting, karena menyulitkan tenaga kerja asli Riau untuk masuk ke perusahaan. Itu adalah karakter orang Melayu yang dianggap pemalas, pemalu, dan beretos kerja rendah.

Ada pula warga yang tak percaya bahwa pendidikan bisa mengangkat ekonomi keluarga. Di Pulau Bengkalis dan Pulau Meranti, misalnya, ada pandangan bahwa sekolah tidak membuat lulusannya memperoleh keahlian atau pekerjaan yang memadai. Walhasil, banyak anak hanya lulus sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah atas/kejuruan. Lalu, karena Kota Bengkalis dekat dengan Malaysia, anak-anak itu merantau untuk menjadi buruh kasar di negeri jiran.

Ancaman juga datang dari otomatisasi di era Revolusi Industri 4.0. Meskipun memiliki efek ganda dengan kemungkinan menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas, revolusi industri ini juga mengancam sekitar 14 persen pekerjaan dengan risiko tinggi akibat otomatisasi. Jumlah pekerja pada sektor operator dan perakitan mesin yang menunjukkan

penurunan mungkin merupakan respons terhadap otomatisasi dan perubahan teknologi di dunia industri.

Untuk itu, Riau bisa membidik kebutuhan lapangan kerja di tiga sektor lapangan usaha yang memiliki potensi serapan kerja tinggi, yakni perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel; pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan; serta angkutan, pergudangan, dan komunikasi. Pengembangan kompetensi tenaga kerja di sektor ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diketahui, tingkat pengangguran terbuka di Riau mencapai 4,23 persen pada 2023.

Pada saat yang sama, perlu ada peningkatan kualitas tenaga kerja, mengingat lapangan pekerjaan yang terbuka tidak lagi sebagai tenaga kasar dan buruh. Para pekerja sudah harus mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan pada level yang lebih baik. Terlebih prospek ekonomi ke depan di dunia akan lebih terkait dengan kemajuan dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Bagaimana rupa industri berkelanjutan di Riau ketika memanfaatkan teknologi era 4.0? Pasti memesonakan.

Demikianlah Riau, yang memilih meninggalkan yang fana menuju yang berkelanjutan.

## VOKASI UNTUK RIAU 4.0

Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor industri perkebunan, pertanian, perikanan, dan perdagangan yang berkelanjutan. Namun perlu ada solusi yang inovatif untuk mengatasi tantangan, seperti disparitas pembangunan, “budaya” korupsi, politik, dan ancaman otomatisasi di era Revolusi Industri 4.0.

Kajian oleh konsorsium perguruan tinggi vokasi (PTV) di Riau untuk pemetaan dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja mengungkap sejumlah peran yang dapat diambil PTV dan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk mengatasi tantangan tersebut dan memberikan kontribusi signifikan pada ekosistem perekonomian Provinsi Riau. Peran PTV dan SMK itu di antaranya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam hal ini, PTV/SMK dapat membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Ini termasuk pelatihan dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan (AI), yang penting untuk dikuasai di era Industri 4.0.

PTV/SMK juga dapat berperan dalam pengurangan tingkat pengangguran dengan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan

industri lokal. Fokus ini relevan di Riau, yang tingkat pengangguran terbukanya mencapai 4,23 persen pada 2023.

Peran lain PTV/SMK adalah mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan, misalnya dalam pengembangan produk turunan kelapa/kelapa sawit, seperti biodiesel dan oleokimia.

Peran-peran di atas membuat PTV/SMK dapat memberikan kontribusi signifikan pada ekosistem perekonomian Provinsi Riau dan membantu memastikan provinsi ini dapat bertransisi dari industri ekstraktif yang fana ke industri yang berkelanjutan. Untuk memaksimalkan kontribusi lembaga pendidikan vokasi pada ekosistem Riau 4.0, berikut ini kebijakan yang perlu dilakukan.

Pemerintah perlu lebih banyak berinvestasi dalam pendidikan vokasi untuk memastikan PTV/SMK memiliki sumber daya dan sarana yang dibutuhkan bagi pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi.

Lembaga pendidikan vokasi harus bekerja sama dengan industri untuk memastikan kurikulum dan program pelatihannya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Pemerintah dan lembaga



*Proses pemilahan sebelum kelapa sawit diolah menjadi minyak sawit. Dok TEMPO/Ayu Ambong*

pendidikan vokasi harus bekerja sama mempromosikan pendidikan vokasi sebagai pilihan karier yang

baik, selain menyediakan bantuan keuangan pendidikan untuk siswa vokasi.





# PROVINSI KEPULAUAN RIAU: **DI BAWAH BAYANG-BAYANG BATAM**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH KEPULAUAN RIAU:**

**Ketua:** *Sudra Irawan (Politeknik Negeri Batam)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Negeri Batam: *Yeni Rokhayati, Hendra Saputra, Noper Ardi, Dwi Amalia Purnamasari, Hanifah Widiastuti, Sapto Wiratno Satoto, Erikson Togatorop, Himawan Mochtoha, Widya Putri Ramadhani, Rizky Widi Pratama, Yulfiana Harini, Rhanna Mariwa, Sugi Hapni Delima, Riyadi Aprayuda*
2. Politeknik Bintang Cakrawala: *Henricus Yayan Setyanto, Hary Jocom*
3. Politeknik Pariwisata Batam: *Frangky Silitonga, Agung Edy Wibowo, Syafruddin Rais*

*Ada 1.350 nusa di Kepulauan Riau. Tapi 70 persen denyut ekonominya masih berpusat di Pulau Batam. Padahal pulau-pulau lain menyimpan potensi yang siap meledak.*

Sebagai salah satu pulau terdepan Indonesia, Natuna rasanya tak punya masalah berarti. Orang-orangnya hidup serba cukup. Mau mendapat uang tinggal melaut. Hasil tangkapan dari samudra bisa langsung dijual ke warga sekitar. Jika mau repot dan ingin mendapat harga lebih baik, mereka tinggal menjualnya ke pengepul yang siap mengirimnya ke restoran-restoran di Pulau Batam.

Kalau mau mendapat uang lebih banyak lagi, seperti orang-orang di Pulau Sedanau, yang masih masuk administrasi Natuna, mereka bisa membesarkan napoleon. Saban bulan, kapal-kapal dari Hong Kong datang membeli ikan karang supermahal itu. Harganya bisa satu juta rupiah per kilogram. “Jadi warga Natuna bilang tidak perlu ada pabrik ikan dan semacamnya. Setiap hari mereka sudah mendapat uang dari laut,” kata Yeni Rokhayati, peneliti dari Politeknik Negeri Batam, yang sehari-hari bermukim dan meneliti potensi ekonomi di Natuna. “Mau ada pengembangan sumur migas pun, toh, tak berdampak langsung ke masyarakat Natuna”.

Begitulah kehidupan di pu-

lau. Selagi bisa makan tiap hari, hidup sudah layak untuk disyukuri. Padahal Natuna, dan pulau-pulau lain di Kepulauan Riau, menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa besar dari sumber daya alamnya. Tapi, sampai hari ini, statistik ekonomi provinsi kepulauan itu sangat bergantung pada Batam, pulau yang dikosongkan dan kemudian disulap menjadi zona perdagangan bebas guna menarik investasi dari luar negeri. Semestinya, dengan pertumbuhan Batam, ia bisa menjadi pasar bagi hasil produksi pulau-pulau sekitarnya.

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terdiri atas dua kota dan lima kabupaten. Kota Tanjungpinang menjadi ibu kota provinsi, sementara Batam menjadi pusat perekonomian. Adapun lima kabupaten, yaitu Karimun, Bintan, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas, menjadi daerah penyangga yang serba-tanggung.

Jarak antara Natuna dan Tanjungpinang, misalnya, mencapai 440 kilometer, mirip dengan jarak Natuna-Batam. Ketiganya dipisahkan Laut Cina Selatan. Dengan kondisi ini, dengan jaringan logistik yang jauh dan mahal, ra-



*Jembatan Barelang. Yogi Eka Sahputra*

sanya sulit bagi Batam atau Tanjungpinang mengandalkan Natuna sebagai penyuplai hasil laut. Padahal Natuna, selain memiliki potensi sumur gas yang melimpah, punya hasil kelautan yang mumpuni. “Selama ini, Natuna menyuplai ikan kualitas baik ke Batam. Karena pasar Batam maunya ikan segar, mau tak mau mengirimnya pakai pesawat, jadi mahal,” ujar Yeni. Dengan menggunakan pesawat, tentu volume perdagangannya tak sebanyak jika menggunakan kapal laut.

Hal itulah yang membuat ketimpangan begitu terasa antara Batam dan kota lain atau kabu-

paten di Kepulauan Riau. Batam melaju sederas investasi yang masuk ke sana. Sedangkan kabupaten di sekitarnya tak bisa ikut menikmati kemajuan Batam karena dipisahkan laut. Jalur pelayaran logistik yang efisien belum dapat menyambungkan kepulauan ini.

Ketimpangan ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kepri pada 2023 mencapai Rp 331,89 triliun. Kota Batam menyumbang Rp 216,097 triliun atau 65 persen. Sementara PDRB per kapita Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku pada

Kepulauan Riau	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)		
	2021	2022	2023
Provinsi Kepulauan Riau	14.122	14.469	14.998
Kabupaten Karimun	11.879	12.304	12.756
Kabupaten Bintan	14.393	14.739	14.882
Kabupaten Natuna	14.711	14.834	15.409
Kabupaten Lingga	11.938	12.134	12.485
Kabupaten Kepulauan Anambas	11.950	12.137	12.495
Kota Batam	18.034	18.506	18.990
Kota Tanjungpinang	15.439	15.864	16.213

Tabel 3. Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) Provinsi Kepulauan Riau, 2021-2023

SUMBER: BPS

2023 hanya Rp 154,18 juta, PDRB Kota Batam jauh di atasnya, Rp 171,9 juta. Hal ini berimbang pada pengeluaran per kapita yang timpang. Pengeluaran per kapita Kota Batam mencapai Rp 18.990.000, jauh di atas Kabupaten Lingga, yang hanya Rp 12.485.000.

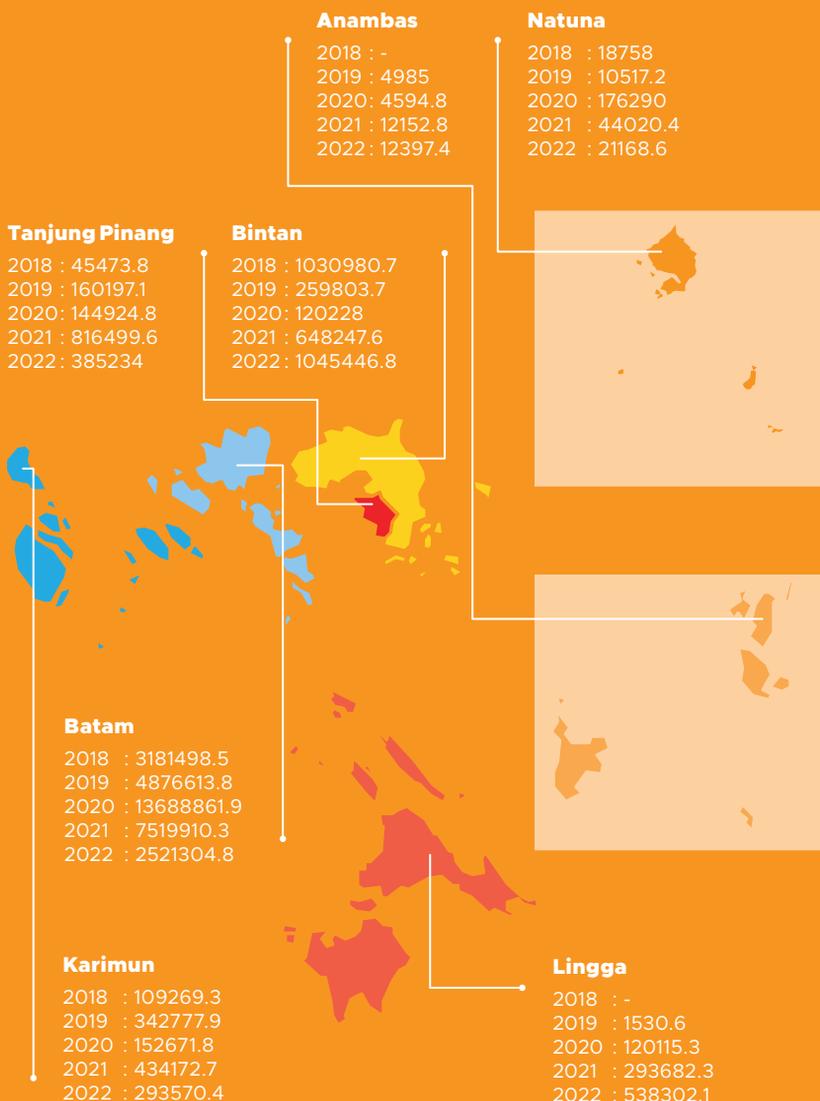
Sejak awal, pemerintah berusaha mengembangkan Kepri sebagai daerah tujuan investasi di bidang manufaktur, logistik, galangan kapal, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ini terjadi terutama pada Batam. Sedangkan daerah lain ditopang perikanan serta pertanian.

Dominasi Batam terhadap perekonomian Kepri juga tampak dari sumber pertumbuhan ekonomi kepulauan tersebut. Pada 2023, ekonomi Kepri tumbuh 5,2 persen. Dari sektor lapangan usaha,

yang memberikan andil tertinggi terhadap pertumbuhan adalah konstruksi, sebesar 1,99 persen, disusul industri pengolahan (1,03 persen), informasi dan komunikasi (0,67 persen), serta jasa akomodasi dan makan-minum (0,51 persen).

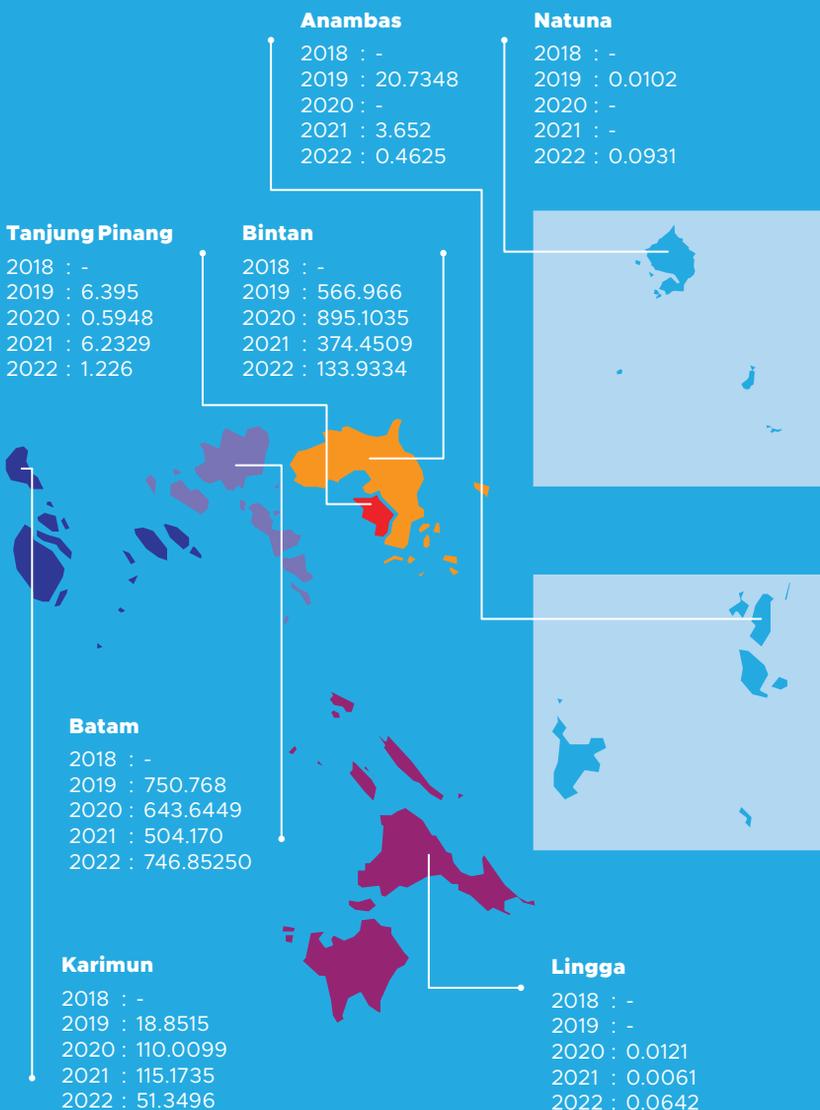
Ini adalah sektor-sektor yang “berasal” dari Batam, zona perdagangan bebas tempat berdirinya pabrik-pabrik pembuatan barang berorientasi ekspor. Di sana, proyek konstruksi bangunan dan infrastruktur datang silih berganti, guna menunjang investasi. Dengan tumbuhnya investasi dan perdagangan, sektor informatika dan pariwisata juga turut bergeliat. Sedangkan sektor yang cukup besar potensinya hanya menyumbang andil kecil, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,03

## REALISASI INVESTASI DALAM NEGERI KEPULAUAN RIAU (RP JUTA)



**SUMBER:** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau

## REALISASI INVESTASI ASING DI KEPULAUAN RIAU (US\$ JUTA )



**SUMBER:** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau

persen).

Dengan penduduk Kota Batam mencapai 1,1 juta jiwa pada 2020—bandingkan dengan Kota Tanjungpinang, yang hanya berpenduduk 234 ribu pada 2023 berdasarkan data BPS—semesinya Batam bisa menjadi pasar yang besar bagi sektor pertanian dan perikanan Kepri. Namun hal itu belum kunjung kejadian. Kota dan kabupaten hanya bisa menonton Batam dari jauh.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kepri juga masih bergantung pada Batam. Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi pada 2023 adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB), alias belanja barang modal, sebesar 8,72 persen. Ini kebanyakan berasal dari industri di Batam. Itu disusul kemudian oleh pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P), sebesar 6,77 persen. Sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) pada 2023 hanya tumbuh 4,17 persen. Belanja modal juga punya andil tertinggi terhadap PDRB Kepri, mencapai 3,45 persen, disusul PK-RT 1,66 persen, dan PK-P 0,3 persen.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih menjurus pada kekawatiran: Bagaimana jika perekonomian Batam ambrol? Apakah potensi ekonomi yang tidak berhubungan dengan zona perdagangan bebas Batam dapat berkembang?

Apakah sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata benar-benar punya potensi di Kepri? Apakah ada peluang wilayah kepulauan yang berjauhan itu dapat dikembangkan menjadi satu koridor yang saling mendukung?

Dua puluh peneliti dari Politeknik Negeri Batam, Politeknik Bintan Cakrawala, dan Politeknik Pariwisata Batam menelusuri potensi ekonomi kepulauan tersebut lewat studi literatur dan diskusi kelompok terpumpun dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, kamar dagang dan industri, serta pelaku usaha, dan terjun ke tengah-tengah masyarakat. Mereka mengidentifikasi, ada 31 inovasi yang dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi Kepulauan Riau. Di antaranya pusat oleh-oleh khas Kepri, pembuatan tepung ubi berstandar industri, pembuatan minyak kelapa berstandar industri, teknologi pembenihan ikan napoleon, pusat penampungan ikan di setiap kecamatan, pengalengan ikan alias industrialisasi perikanan, pembuatan garam skala industri, penguatan sistem pelayanan berbasis elektronik, dan pengembangan pariwisata terpadu.

• • •

Berkat status kawasan perdagangan bebas yang disandang selama 24 tahun terakhir, Batam menjadi destinasi investasi yang

No	Lapangan Usaha	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.689
2	Pertambangan dan Penggalian	37.035
3	Industri Pengolahan	132.035
4	Pengadaan Listrik, Gas	3.557
5	Pengadaan Air	322
6	Konstruksi	67.462
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30.076
8	Transportasi dan Pergudangan	6.768
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.301
10	Informasi dan Komunikasi	9.334
11	Jasa Keuangan	8.823
12	Real Estate	3.640
13	Jasa Perusahaan	10,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.886
15	Jasa Pendidikan	4.416
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.578
17	Jasa lainnya	994
PDRB		331.889

Tabel 4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (Miliar Rupiah)

SUMBER: BPS

paling menonjol di Kepulauan Riau. Kendati beberapa wilayah lain, seperti Bintan dan Karimun, juga telah menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, daya pikatnya dalam menarik investasi, baik asing maupun dalam negeri, belum mampu menandingi Batam.

Daerah lain di Kepri bisa saja mengejar kemajuan Batam, terutama dalam hal infrastruktur. Namun sulit untuk menyamai atau setidaknya mendekati kualitas sumber daya manusia Batam.

Kualitas ini ditunjukkan de-

ngan indeks pembangunan manusia (IPM). Dibanding daerah lain di Kepri, IPM Batam jauh di atas. IPM Kota Batam pada 2022 mencapai 81,67 atau masuk 10 besar nasional, jauh di atas Kepri, yang hanya 78,48 poin.

Karena itu, daerah lain di Kepri dapat meniru langkah Kota Batam untuk meningkatkan IPM dengan menjalankan beberapa kebijakan. Di antaranya, pertama, investasi pada infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar seperti transportasi, jaringan jalan,

air bersih, dan sanitasi. Ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup penduduk.

Kedua, pengembangan sektor ekonomi, yaitu diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor baru yang berkelanjutan, termasuk pariwisata dan pertanian modern, yang dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk.

Ketiga, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Ini mencakup pembangunan sekolah dan rumah sakit baru, pelatihan guru dan tenaga kesehatan, serta program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan.

Keempat, pengembangan sumber daya manusia, yaitu melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasional, dan program-program yang meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Terakhir, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, yaitu fokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta perbaikan infrastruktur perkotaan.

• • •

Untuk mengidentifikasi eko-

nomi unggulan di suatu daerah atau wilayah, tengok saja PDRB berdasarkan lapangan usaha. Itu adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu.

Dalam 13 tahun terakhir, tidak banyak perubahan pada PDRB Kepulauan Riau. Industri pengolahan masih menjadi sektor yang paling dominan menopang pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Setelah itu, menyusul sektor konstruksi, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, baru sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Selain lewat PDRB, cara untuk mengenali potensi suatu daerah adalah dengan *analisis location quotient* (LQ), pendekatan kuantitatif yang membandingkan peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional. Ada juga metode *shift share*, yaitu membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas.

Berdasarkan data perekonomian Kepri periode 2016-2021, sektor unggulan ada pada industri pengolahan. Sektor potensial ada di pertambangan dan penggalian serta daur ulang. Sedangkan sek-

tor berkembang ada di informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan. Adapun sektor pertanian dan perikanan, yang sebetulnya punya potensi besar, berdasarkan analisis tiga metode tersebut, masuk kategori sektor terbelakang.

Mengapa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masuk kelompok terbelakang kendati punya potensi besar? Jawabannya agaknya adalah karena minimnya jaringan logistik antarpulau. Sumber pertanian ada di Kabupaten Lingga dan Karimun, sementara pusat perikanan terdapat di Natuna dan Anambas. Namun pasar terbesarnya justru di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang. Tanpa jaringan logistik yang memadai, mustahil bagi empat kabupaten tersebut dapat bersaing dengan bahan pangan yang berasal dari Jawa dan Sumatera daratan.

Ketiadaan pusat logistik dan industrialisasi hasil alam ini membuat beberapa praktik ilegal terus bertahan di Kepri. Misalnya penjualan hasil perikanan di tengah laut (*transshipment*). Hasil tangkapan nelayan tak pernah diolah dalam skala besar karena belum ada industrinya di darat.

Secara mikro, potensi pengembangan Kepri tersebar di banyak sektor. Di Natuna, misalnya, ada potensi pasar telur ayam yang besar, pengolahan tepung terigu untuk bahan baku kerupuk atom

dan kerupuk ikan, pembenihan ikan napoleon, serta sentra penampungan ikan tangkapan nelayan. Di Anambas, ada potensi proses pemanenan cengkih yang lebih modern dan pengalengan ikan. Di Lingga, ada potensi pengembangan minyak kelapa, modernisasi pengolahan ikan teri, pengolahan pasir kuarsa, pengolahan garam di Pulau Sebayang, serta pengembangan udang vaname. Di Bintan, ada peluang mengembangkan ternak ulat *maggot* karena melimpahnya sisa makanan dari perhotelan di Bintan.

Dan hampir semua daerah di Kepulauan Riau punya potensi pariwisata, seperti wisata bahari Pulau Benan dan Pulau Berhala di Lingga serta *landscape* alam Selat Lampa dan *sport tourism* di Natuna. Peluang-peluang tersebut dapat dikembangkan dalam tiga tahap, yaitu jangka pendek (setahun), jangka menengah (tiga tahun), dan jangka panjang (lima tahun).

• • •

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebetulnya sudah memahami kesenjangan yang terjadi antara Batam dan kabupaten-kabupaten di Kepri. Sepanjang 2016-2021, arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepri berupaya mempercepat pengurangan kesenjangan tersebut. Caranya dengan meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia, produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata.

Tampak arah kebijakan tersebut telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan wilayah Kepri. Namun kebijakan itu seharusnya lebih ditekankan pada (1) pengembangan sektor prioritas, (2) peningkatan pendidikan dan pelatihan, (3) kemitraan dengan industri, serta (4) pemberdayaan masyarakat.

Pertama, dalam hal pengembangan sektor prioritas, Kepri mesti berfokus pada sektor pariwisata, perikanan, dan industri. Tiga sektor ini punya potensi kuat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Dengan mengarahkan investasi dan sumber daya ke sektor-sektor ini, niscaya akan ada peningkatan signifikan dalam pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kedua, peningkatan pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan sangat penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dukungan terhadap program-program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan permintaan pasar tenaga kerja lo-

kal akan membantu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja.

Ketiga, kemitraan dengan industri. Kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan merupakan strategi yang sangat efektif untuk memastikan pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri. Kerja sama dalam merancang kurikulum, menyediakan program magang, dan memfasilitasi transfer keterampilan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan tenaga kerja yang kompeten.

Terakhir, pemberdayaan masyarakat. Promosi kewirausahaan dan pembangunan usaha kecil-menengah adalah langkah yang penting untuk menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberian pelatihan, akses ke modal, dan dukungan teknis lainnya dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dan penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara efektif, transparan, dan partisipatif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan. Hanya dengan demikian, tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai di Kepulauan Riau.

## IDENTIFIKASI MANUSIA DAN POTENSI KEPRI

Sebagai daerah yang bertumpu pada industri pengolahan, Kepulauan Riau, terutama Batam dan Bintan, membutuhkan pasokan tenaga kerja berkualitas. Tak hanya itu, beberapa kabupaten di sekitarnya juga perlu tenaga kerja yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing agar tidak terlalu ketinggalan dari Batam dan Bintan sebagai motor pertumbuhan provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2021-2026 telah mengidentifikasi masalah dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, dua sektor yang berkaitan langsung dengan pasokan tenaga kerja berkualitas itu. Masalah utamanya adalah kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja tidak *nyambung*.

Lulusan pendidikan kejuruan banyak yang tidak dapat terserap dunia kerja karena kompetensinya tidak klop. Masih banyak tenaga kerja yang hanya memiliki kualifikasi dasar. Sedangkan pasar makin membutuhkan manusia-manusia terampil, khususnya di sektor unggulan seperti manufaktur, galangan kapal, dan fab-

rikasi. Kondisi tersebut diperparah kenyataan bahwa angka putus sekolah di Kepri masih relatif tinggi.

Hal ini membuat tingkat pengangguran terbuka Kepulauan Riau masih cukup tinggi, mencapai 6,94 persen pada Februari 2024—tertinggi kedua, setelah Banten (7,02 persen). Padahal realisasi investasi di Kepri hingga kuartal pertama 2024 ada di nomor 19 dari 38 provinsi.

Tingginya industri pengolahan di Batam dan Bintan sebenarnya turut menggerakkan sektor-sektor lain. Setidaknya ada lima sektor yang potensial meledak jika dikelola dengan tepat. Ke-

*Optimalisasi pengembangan Kepri antara lain bisa ditempuh dengan mengoptimalkan koordinasi antarunsur pentahelix, yaitu satuan pendidikan, dunia usaha dan industri, pemerintah daerah, komunitas, asosiasi, dan media massa.*

limanya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sektor itu adalah logistik (Batam, Karimun, Natuna), pariwisata (Bintan, Batam, Tanjungpinang, Lingga, Natuna, Anambas), perikanan (Karimun, Natuna, Lingga, Anambas), pertanian (Lingga), serta ekonomi kreatif dan digital (Batam).

Maka, untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Kepri, perlu upaya komprehensif, dari peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, hingga penguatan sistem informasi pasar kerja. Insentif dan kebijakan yang mendukung retensi SDM di Kepri juga perlu dioptimalkan.

Dan yang tak kalah penting adalah merapatkan kesenjangan antarwilayah di Kepri. Jarak Batam dan Bintan yang lebar dengan kabupaten lain di Kepri sangat kentara di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.

Kabupaten yang berupa pulau tampak terlambat mengejar kemajuan Batam dan Bintan. Infrastrukturnya serba-terbatas, baik infrastruktur antarwilayah, seperti pelabuhan dan bandara, maupun infrastruktur dalam daerahnya sendiri, seperti jalan raya. Ini tentu saja menghambat perge-

rakan penduduk dan barang, yang berujung pada terlambatnya pembangunan dan melebarnya kesenjangan.

Untuk itu, upaya pemerataan pembangunan di Kepri mesti mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi setiap wilayahnya, termasuk untuk pengembangan SDM-nya. Misalnya, salah satu potensi besar Kepri adalah sektor maritim. Pelabuhan-pelabuhan di kawasan ini kurang memadai sehingga koneksi antarpulau dan pengembangan industri berbasis sumber daya kelautannya masih minim.

Optimalisasi pengembangan Kepri antara lain bisa ditempuh dengan mengoptimalkan koordinasi antarunsur *pentahelix*, yaitu satuan pendidikan, dunia usaha dan industri, pemerintah daerah, komunitas, asosiasi, dan media massa. Pemerintah daerah, misalnya, mesti mengetahui potensi wilayahnya. Mereka kemudian perlu mendengarkan kebutuhan dunia usaha dan industri, komunitas, dan asosiasi. Dari situ, satuan pendidikan merencanakan pendidikan yang dapat menyuplai kebutuhan tenaga kerja dunia usaha dan industri. Maka ujungnya akan menghasilkan *workforce planning* (identifikasi SDM) dan *innovation planning* (identifikasi potensi) yang pas.



MOKU-MOKU

BENGKULU  
UTARA

LEBONG

REJANGLEBONG

BENGKULU  
TENGAH

KEPAHIANG

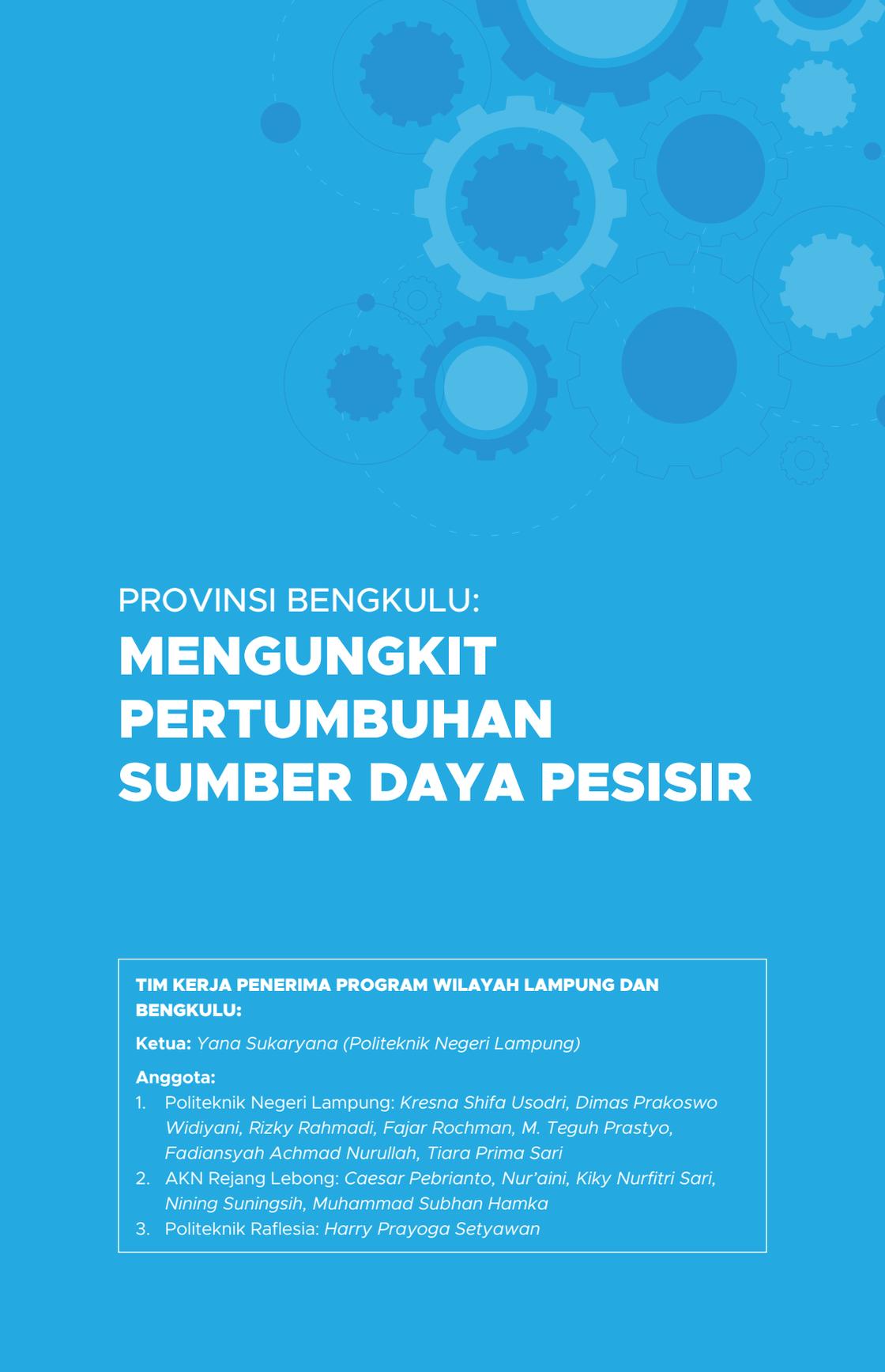
BENGKULU

SELUMA

BENGKULU  
SELATAN

KAUR

PULAU  
ENGGANO



# PROVINSI BENGKULU: **MENGUNGKIT PERTUMBUHAN SUMBER DAYA PESISIR**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH LAMPUNG DAN BENGKULU:**

**Ketua:** *Yana Sukaryana (Politeknik Negeri Lampung)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Negeri Lampung: *Kresna Shifa Usodri, Dimas Prakoswo Widiyani, Rizky Rahmadi, Fajar Rochman, M. Teguh Prastyo, Fadiansyah Achmad Nurullah, Tiara Prima Sari*
2. AKN Rejang Lebong: *Caesar Pebrianto, Nur'aini, Kiky Nurfitri Sari, Nining Suningsih, Muhammad Subhan Hamka*
3. Politeknik Raflesia: *Harry Prayoga Setyawan*

*Bengkulu memiliki keunggulan wilayah pesisir yang panjang dan luas. Tak cuma kuat di sektor pertambangan dan perkebunan sawit, karet, serta kopi, pemerintah provinsi perlu pula mengintegrasikan sektor pariwisata dengan potensi sumber daya pesisir.*

Apa yang terlintas dalam ingatan setiap kali ditanyai tentang hal yang paling dikenal dari Provinsi Bengkulu? Tiga yang paling sering disebut: bunga padma raksasa atau lebih populer dengan nama raflesia (*Rafflesia arnoldi*), Benteng Marlborough, dan Rumah Pengasingan Bung Karno.

Bunga raflesia pertama kali ditemukan di Bengkulu Selatan pada 1818. Bengkulu pun mendapat julukan “Bumi Raflesia”. Dua yang terakhir terletak di Kota Bengkulu, ibu kota provinsi ini. Ketiganya merupakan mata kunjungan pariwisata provinsi terkecil di Pulau Sumatera itu.

Berburu waktu mekar raflesia yang pendek menjadi salah satu tujuan wisatawan yang ingin mengabadikan peristiwa langka itu. Bunga yang termasuk tumbuhan endemik di Sumatera itu, terutama bagian selatan (Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan), hanya mekar selama tiga-empat hari. Raflesia juga tumbuh tanpa akar dan daun, juga tidak memiliki batang.

Sementara itu, kunjungan ke Benteng Marlborough dan ke

Rumah Pengasingan Bung Karno terhitung sebagai wisata sejarah. Benteng Marlborough, yang dibangun pada 1714-1719, adalah benteng pertahanan peninggalan Inggris. Sedangkan Rumah Pengasingan Bung Karno, dengan luas bangunan 162 meter persegi, pernah ditinggali sang Proklamator selama era pra-kemerdekaan (1938-1942). Di sini pula Bung Besar bertemu dengan Fatmawati.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mencatat bahwa sembilan kabupaten dan satu kota di Bengkulu memiliki lebih dari 500 destinasi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata buatan. Wisata alam paling banyak ditemukan di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Sedangkan wisata sejarah terbanyak di Kota Bengkulu.

Apakah bertebarnya lokasi wisata di seujur Bengkulu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang besar bagi provinsi yang juga memiliki salah satu pantai terpanjang di Sumatera itu? Tim peneliti Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Po-

tensi Daerah di Wilayah Lampung dan Bengkulu memaparkan fakta pengamatan berkaitan dengan seluruh potensi wilayah.

Tim ini beranggotakan 13 peneliti dari tiga perguruan tinggi vokasi di Lampung dan Bengkulu. Mereka telah menggelar diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan dari sepuluh instansi daerah, mitra perguruan tinggi, serta mitra dunia usaha dan industri.

Dari data produk domestik regional bruto (PDRB) Bengkulu tahun 2022 berdasarkan lapangan usaha, sektor pariwisata masuk industri pengolahan dengan subsektor industri makanan dan minuman. Satu lagi pariwisata terakomodasi pada jasa lainnya—di sini tiga jasa bergabung: jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pariwisata. Industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 8,78 persen, sementara jasa lainnya sebesar 14,43 persen.

Persentase itu terhitung besar meski masih di bawah sektor unggulan, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang memberikan sumbangan tertinggi, yaitu 22,23 persen, serta menyerap tenaga kerja terbesar. Subsektor unggulan di bidang perkebunan adalah tanaman kelapa sawit, karet, dan kopi, lalu peternakan sapi, kambing, dan ayam serta perikanan

an tangkap dan budi daya.

Menyusul setelah pertanian adalah perdagangan besar dan eceran (16,25 persen), jasa lainnya (14,43), dan konstruksi (9,81 persen). Berikutnya adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (9,41 persen), industri pengolahan (8,78 persen), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (4,23 persen), serta transportasi dan pergudangan (3,49 persen).

Kendati memberikan kontribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha pada kisaran 8 persen (mengambil dari sektor industri pengolahan), pembangunan di bidang pariwisata dinilai masih belum menjanjikan. Jumlah wisatawan mancanegara masih kurang dari sepersepuluh wisatawan domestik (data BPS 2005-2013).

Lamanya waktu menginap pada data 2021-2023 juga rata-rata masih satu-dua hari, tepatnya 1,26 hari. Ini masih lebih kecil dibanding tetangganya di selatan, yaitu Provinsi Lampung, juga tetangganya di utara, yakni Sumatera Barat, dan di timur: Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.

Keunggulan Kota Bengkulu, dengan luas dua pertiganya merupakan pesisir, juga Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan,

agaknya yang menjadi penggerak utama sektor ini. Salah satu daya tarik Kota Bengkulu bagi turis mancanegara dan domestik adalah pantai yang mempunyai garis yang membentang sepanjang 7 kilometer dan lebar sekitar 500 meter: Pantai Panjang.

Pantai Panjang, yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia di sisi barat, juga Pantai Tapak Paderi dan Pantai Zakat, menjadi kawasan yang unggul dalam sistem pengembangan ekonomi Bengkulu. Tak mengherankan jika potensi ekonomi yang cepat tumbuh ini ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2012-2032.

Panorama pantai, ombak yang banyak dimanfaatkan untuk berselancar, juga *sport center* yang tersedia untuk kegiatan olahraga seperti voli pantai dan jogging, antara lain, kelebihan Pantai Panjang. Fasilitas restoran, kafe, penginapan, area bermain, dan pusat belanja melengkapinya. Begitu pula akses yang mudah dengan transportasi umum—dapat ditempuh sejauh 3 kilometer dari pusat Kota Bengkulu.

Dengan potensi, fasilitas, dan akses yang dimiliki, pemerintah daerah tinggal melangkah pada pengembangan ekowisata. Untuk menciptakan ekosistem

yang mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dilakukan secara berkelanjutan, pembangunan ekowisata jelas memerlukan perencanaan yang matang.

Pekerjaan besar lainnya adalah mengintegrasikan sektor pariwisata dengan potensi sumber daya pesisir serta lautan yang besar dan beragam. Potensi ini bisa menjadi satu sentra produksi baru daerah.

Di Kota Bengkulu, misalnya, terdapat komoditas andalan wilayah pesisir, seperti ikan hasil tangkapan dan pohon kelapa. Kota ini punya agroindustri berbasis sumber daya pesisir, di antaranya industri pengolahan ikan kering, gula kelapa, kelapa parut, santan kelapa, dan ikan goreng *crispy* siap santap dalam kemasan.

Beberapa agroindustri tersebut sudah lama berkembang di Kota Bengkulu secara turun-temurun dengan teknologi tradisional yang dikuasai masyarakat. Mereka memanfaatkan alat-alat pengolahan sederhana yang juga mudah didapat.

Namun, jika diidentifikasi secara saksama, Kota Bengkulu perlu kembali mendeskripsikan dengan jelas apa saja agroindustri unggulannya. Ini lantaran masih sedikitnya kajian yang mengidentifikasi secara komparatif kekuatan dan kelemahan antar-agroindustri tersebut.



*Pekerja melakukan bongkar muat ikan beku. Tempo/Tony Hartawan*

Sebagai contoh, berdasarkan survei Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (2015), dapat diketahui bahwa sebagian besar produk olahan, yaitu ikan kering/asin, sudah memiliki kualitas yang cukup baik, tapi pengemasan produknya masih sangat kurang diperhatikan. Sebagian besar produk dijual dalam bentuk curah, walaupun sebagian sudah melalui proses sortasi dan *grading*.

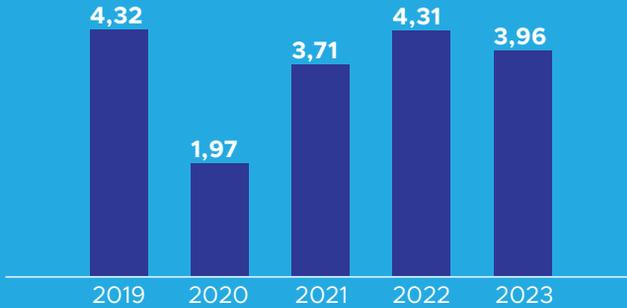
Agroindustri merupakan kegiatan dengan ciri meningkatkan nilai tambah, menghasilkan produk yang dapat dipasarkan, digunakan, atau dimakan, meningkatkan daya simpan, serta menambah pendapatan dan keuntungan produsen. Sifat kegiatannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mem-

perbaiki pemerataan pendapatan, dan mempunyai kapasitas yang cukup besar untuk menarik pembangunan di wilayah pesisir.

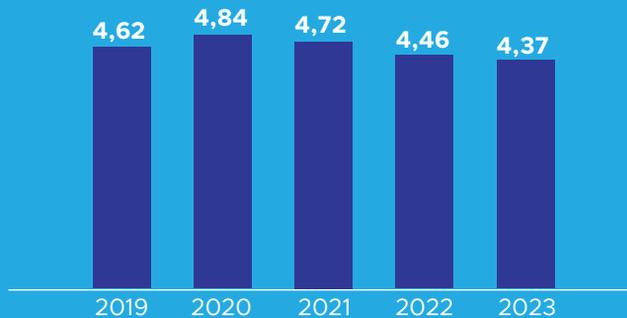
Pengembangan agroindustri dalam era globalisasi diharuskan mampu memunculkan keunggulan kompetitif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta bertumpu pada sumber daya lokal agar terwujud sistem yang berkelanjutan. Usaha mikro dan kecil di wilayah pesisir, yang masih merupakan usaha tradisional, selanjutnya juga mulai menyentuh aspek teknologi dan manajerial.

Dari hasil analisis terhadap potensi sumber daya wilayah pesisir yang digelar Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu memiliki potensi sumber daya berupa

### TREN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BENGKULU PERIODE 2019- 2023 (PERSEN)



### TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI BENGKULU PERIODE 2019- 2023 (PERSEN)



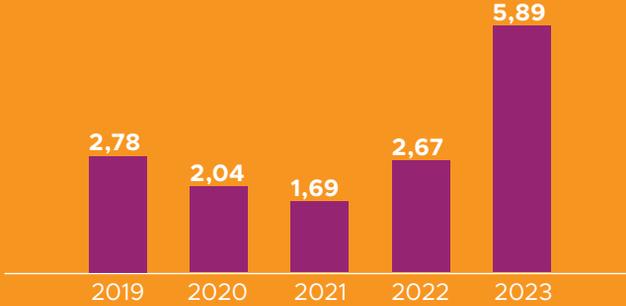
**SUMBER:** BPS

komoditas ikan nila, ikan gurami, ikan patin, ikan lele, ikan bandeng, udang windu, dan hasil perikanan tangkap. Tapi hanya komoditas ikan nila, ikan gurami, ikan patin, ikan bandeng, dan hasil perikanan tangkap yang memiliki keunggulan daya saing, sedangkan komoditas udang windu tak memiliki keunggulan daya saing.

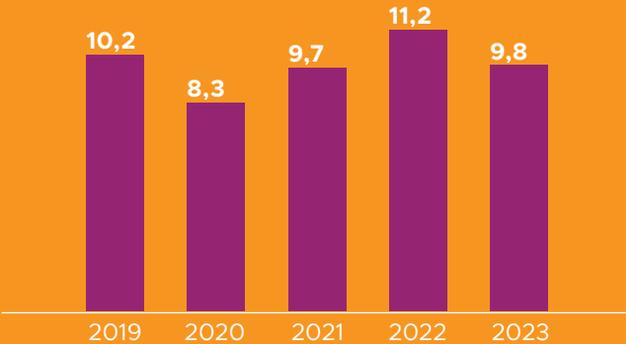
Untuk hasil perikanan tang-

kap di laut, BPS (data 2020) memaparkan bahwa produksi ikan tangkap setahun mencapai volume lebih dari 68 ribu ton, dengan nilai lebih dari Rp 2,5 triliun. Dua tahun berikutnya, volumenya meningkat menjadi 72 ribu ton, dengan nilai Rp 2,7 triliun. Sekitar separuh produksi itu dihasilkan Kota Bengkulu (Rp 1,3 triliun), disusul Mukomuko (Rp 825 miliar) dan Bengkulu Uta-

**INFLASI PROVINSI BENGKULU  
PERIODE 2019- 2023 (PERSEN)**



**INVESTASI PROVINSI BENGKULU  
PERIODE 2019- 2023 (TRILIUN)**



**SUMBER:** BPS

ra (195 miliar).

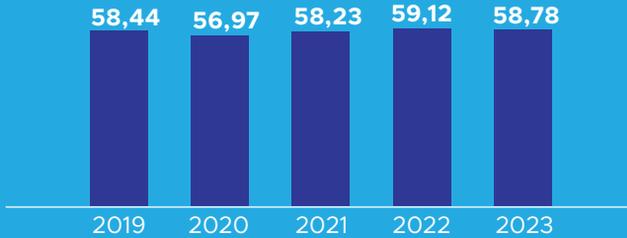
Sumber daya perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan perairan umum daratan, oleh masyarakat Kota Bengkulu dimanfaatkan antara lain sebagai (1) sumber mata pencarian mayoritas masyarakat pesisir, sekaligus sebagai bahan makanan utama, (2) penunjang pembangunan ekonomi

daerah, dan (3) faktor pendukung untuk berbagai aktivitas rekreasi pantai bagi masyarakat.

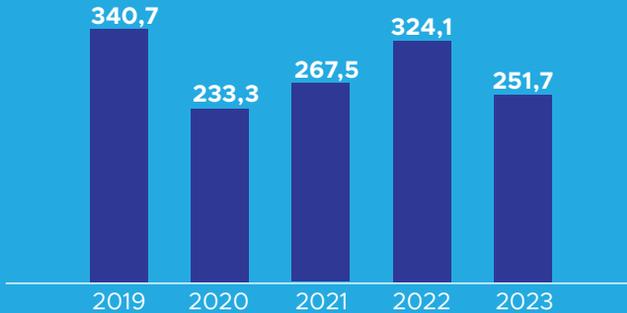
• • •

Berpenduduk 2,1 juta jiwa (2020), Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Kendati pada 2020 terjadi kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, Bengkulu masih

### KONSUMSI RUMAH TANGGA PROVINSI BENGKULU PERIODE 2019- 2023 (PERSEN)



### EKSPOR PROVINSI BENGKULU PERIODE 2019- 2023 (JUTA)



**SUMBER:** BPS

mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun itu: 1,97 persen. Ini lebih baik dibanding banyak provinsi, yang mencatatkan pertumbuhan negatif pada saat pandemi.

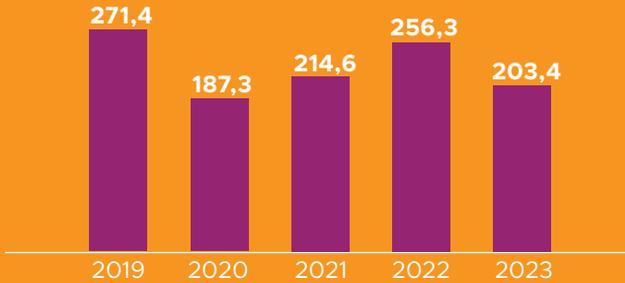
Pascapandemi, ekonomi pun menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan positif pada 2021 (3,71 persen) dan pada 2022 (4,31 persen). Namun angka mutakhir data BPS tahun 2019-2023 justru menunjukkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada

triwulan III 2023 dibanding periode sebelumnya (3,96 persen).

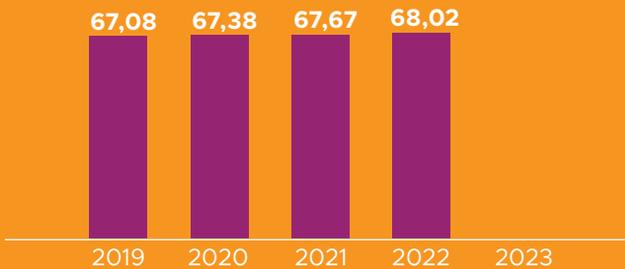
Data lengkap pertumbuhan, inflasi, investasi, ekspor dan impor hingga indeks pembangunan manusia Bengkulu dapat dilihat pada infografis.

Data kecenderungan perlambatan ekonomi seperti yang tampak pada tabel di atas semestinya menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan daerah (baik pemerintah daerah, masyarakat, ma-

**IMPOR PROVINSI BENGKULU  
PERIODE 2019- 2023 (JUTA)**



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI BENGKULU  
PERIODE 2019- 2023**



**SUMBER:** BPS

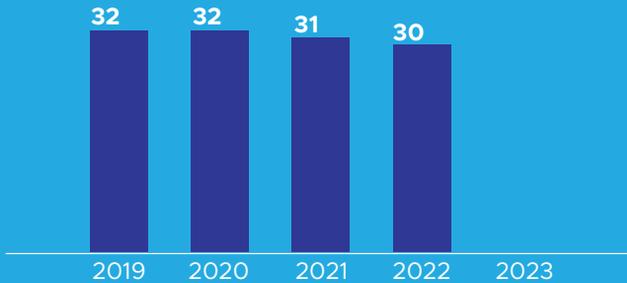
upun swasta) untuk memperkuat kembali strategi pembangunan di wilayah ini. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mengungkit kembali pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

Peningkatan peran dan keterlibatan mereka dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi, membangun kapasitas, serta menyediakan sumber daya yang memadai. Melalui

implementasi pendekatan *pentahelix* (*academic, business, community, government, dan media*) sebagai suatu model ekosistem, para pemangku kepentingan pembangunan ekonomi di Bengkulu bisa berkolaborasi.

Pada bidang pertanian, misalnya, inovasi-inovasi yang datang dari lembaga, peneliti, atau bahkan petani daerah lain bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bersama. Petani dari Kabupaten

## PERINGKAT DAYA SAING DAERAH PROVINSI BENGKULU DARI 34 PROVINSI



**SUMBER:** BPS

Selama, Bengkulu, bisa menjadi contoh. Mereka berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menanam padi dengan sistem organik. Saat ini, sekitar 70 persen dari 6,5 ribu hektare tanaman padi mereka sudah organik dan rutin panen dua kali setahun.

Mereka juga membuat biosaka sebagai *booster* pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan sekaligus perlindungan berbasis ekologi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Biosaka, yang merupakan ramuan larutan tumbuhan (daun kelor, daun sirsak, daun sambiloto, dan lain-lain), ditemukan Muhamad Anshar, petani Blitar.

Sepanjang 2022, produksi padi di Bengkulu pun meningkat 19 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau 7,02 persen menjadi

290 ribu ton GKG dibanding tahun 2021. Luas panennya mencapai 58,6 ribu hektare, meningkat 5,31 persen dibanding tahun 2021. Kabupaten Seluma salah satu penyumbang terbesar.

Selain padi, komoditas pertanian unggulan Kabupaten Seluma adalah kopi, kelapa sawit, cangkang sawit, dan manggis. Kabupaten lain, seperti Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara–seluruhnya delapan dari sembilan kabupaten dan satu kota—merupakan penghasil utama sawit dan cangkang sawit.

Yang menarik, menurut data BPS, cangkang sawit menyumbang 10,91 persen dari total hasil ekspor Bengkulu. Cangkang sawit biasanya dimanfaatkan sebagai agregat ringan dalam beton, *biochar*, dan karbon aktif untuk pengembangan

pupuk, sensor untuk mendeteksi polutan, pengisi dalam matriks polimer, serta sebagai material konstruksi. Limbah cangkang sawit juga bisa dibuat menjadi briket atau komposit serat untuk suku cadang knalpot atau sepatbor kendaraan bermotor.

Bengkulu juga terkenal dengan produksi jeruk kalamansi atau jeruk kasturi. Jeruk kalamansi diproduksi secara besar-besaran di Bengkulu untuk dijual dalam hasil olahan bernama sirop kasturi. Permulaan budi daya jeruk kasturi ditandai dengan pencahangan gerakan “satu desa satu produk” atau *one village one product* (OVOP) oleh Wakil Presiden Boediono pada 2009. Jeruk kasturi juga dapat dijumpai di Bali dengan nama limau kesturi.

Meski menjadi lapangan usaha dan penyerap tenaga kerja terbesar di Bengkulu, sektor pertanian menyumbang pertumbuhan perekonomian sebesar 2,77 persen sampai triwulan III 2023. Angka itu lebih rendah daripada sektor gas dan listrik (5,41 persen) serta pertambangan (4,38 persen).

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan lima potensi pertambangan dan energi terbesar di Bengkulu adalah batu bara, emas, pasir besi, batu apung, dan bentonit. Hasil produksi batu bara tercatat lebih dari 4,3 juta ton (2013).

Penemuan deposit emas sebenarnya sudah terjadi sejak paruh kedua abad ke-19 di daerah Rejang Lebong, ketika Belanda mengambil alih kekuasaan Inggris di Bengkulu. Sejak itu, Rejang Lebong menjadi pusat penambangan emas hingga abad ke-20. Kegiatan penambangan di wilayah itu dihentikan setelah deposit emas dinyatakan habis. Penambangan di daerah lain pun muncul.

Jika Provinsi Bengkulu ingin pertumbuhan ekonominya menemukan titik balik dan kembali menanjak, koordinasi dan komunikasi di antara pemangku kepentingan harus makin kuat. Kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi juga mesti meningkat. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat pun perlu rajin mempromosikan kemitraan.

Provinsi ini sebenarnya memiliki moto yang jika diterapkan di semua bidang kehidupan di Bengkulu akan menggerakkan seluruh potensi daerah. Moto itu adalah “*Sekundang setungguan seiyo sekato*” (seberat apa pun pekerjaan, jika dikerjakan bersama dan seia sekata, akan terasa ringan). Pada hasil tambang atau pada hasil bumi, di pedalaman atau di pesisir, semua memerlukan langkah bersama.

## MENGUBAH TANTANGAN MENJADI HARAPAN

Integrasi sektor pertanian dan pariwisata. Itulah langkah yang akan ditempuh Provinsi Bengkulu—yang secara geografis berada pada garis pantai potensial di Pulau Sumatera serta berada pada kawasan Bukit Barisan—dalam mengelola potensi daerah.

Pengintegrasian tak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan daya tarik pariwisata, tapi juga menciptakan sinergi di antara kedua sektor melalui konsep agro-ekowisata yang inovatif. Pengembangan sektor pertanian di sini melalui penerapan pertanian presisi dan berkelanjutan.

Inisiatif itu tentu harus dimulai dengan meletakkan fondasi yang meliputi pemetaan potensi dan pelatihan dasar, kemudian berkembang menjadi implementasi proyek percontohan, ekspansi program, dan konsolidasi inovasi. Akhir yang diharapkan adalah mencapai tahap kepemimpinan regional dalam agro-ekowisata berkelanjutan.

Semua unsur di provinsi mesti bergandengan tangan: pemerintah sebagai regulator kebijakan, dunia pendidikan khususnya pendidikan vokasi sebagai penyuplai tenaga kerja, dunia usa-

ha dan industri sebagai penyerap lulusan, serta media massa dan masyarakat. Dengan begitu, akan terbentuk ekosistem kemitraan *link and match* di semua lini.

Tim peneliti menemukan sejumlah tantangan yang mesti diatasi. Saat ini, misalnya, angkatan kerja yang berpendidikan sekolah dasar ke bawah di provinsi mencapai 38 persen dalam lima tahun terakhir. Sedangkan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi penyumbang pengangguran vokasi tertinggi dengan angka menyentuh 7,36 persen.

Jumlah SMK di Bengkulu mencapai 113 sekolah. Sedangkan jumlah perguruan tinggi vokasi masih terbatas (sembilan), di antaranya Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong dan Politeknik Raflesia.

Di bidang ekologi/lingkungan, tantangannya berupa alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan. Saat ini, tercatat luas lahan persawahan telah menyusut drastis, menyisakan hanya sekitar 45 ribu hektare.

Gempa yang kerap terjadi juga memengaruhi program yang kerap sudah direncanakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Ge-

*Kendati penuh tantangan, program kemitraan vokasi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten harus jalan terus. Dalam jangka pendek, hal yang akan dilakukan adalah pelatihan petani dan pemandu wisata lokal hingga pengembangan kurikulum khusus di sekolah kejuruan dan perguruan tinggi.*

ofisika mencatat, hingga Maret 2023, telah terjadi lebih dari seribu kali gempa di Bengkulu.

Kendati penuh tantangan, program kemitraan vokasi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten harus jalan terus. Dalam jangka pendek, hal yang akan dilakukan adalah pelatihan petani dan pemandu wisata lokal hingga pengembangan kurikulum khusus di sekolah kejuruan dan perguruan tinggi.

Fenomena munculnya komunitas petani muda yang tertarik pada teknologi pertanian memberikan harapan. Target utama pada fase ini adalah mengidentifikasi lima lokasi potensial ekowisata serta melatih 100 petani dan 50 pemandu wisata lokal.

Dalam jangka menengah, dua destinasi ekowisata percon-

tohan akan dikembangkan, sementara sistem pertanian presisi diimplementasikan di lima desa. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk mendorong adopsi teknologi pertanian dan mengembangkan sistem monitoring dampak lingkungan.

Program “Agro-Eco-Tourism” Bengkulu juga perlu diluncurkan untuk memperkuat *branding* daerah. Kurikulum sekolah kejuruan direvisi dengan memasukkan ekowisata dan pertanian presisi. Pusat riset khusus didirikan. Lalu sistem *traceability* produk pertanian diimplementasikan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Target utama di fase ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan secara signifikan.

Di tahap akhir (fase konsolidasi dan inovasi), yaitu pada 2028-2029, Bengkulu akan berfokus pada konsolidasi capaian dan mendorong inovasi lebih lanjut. Pengembangan produk turunan pertanian bernilai tinggi menjadi prioritas. Program inkubasi *startup* agro-ekowisata diluncurkan untuk mendorong inovasi lokal. Zona ekonomi khusus agro-ekowisata juga dibentuk.

Dengan memadukan teknologi pertanian presisi, praktik berkelanjutan, dan pengalaman wisata yang unik, Bengkulu berpotensi menjadi model pengembangan ekonomi berkelanjutan.



MUSI RAWAS  
UTARA

MUSI RAWAS

LUBUK LINGGAU

EMPAT  
LAWANG

LAHAT

PAGAR  
ALAM

MUSI BANYUASIN

BANYUASIN  
PALEMBANG

PRABUMULIH  
MUARA  
ENIM

OGAN  
ILIR

OGAN KOMERING ILIR

OGAN  
KOMERING ULU  
TIMUR

OGAN  
KOMERING ULU

OGAN  
KOMERING ULU  
TSELATAN



# PROVINSI SUMATERA SELATAN: **AGAR NAIK KELAS KE EKONOMI SEKUNDER**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG:**

**Ketua:** *Ade Silvia Handayani (Politeknik Negeri Sriwijaya)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Negeri Sriwijaya: *Zakaria, Sari Lestari Zainal R, Rita Martini, Arfan Hasan, Nyayu Latifah Husni, Leni Novianti, Marieska Lupikawati, Martha Aznury, Umul Salamah*
2. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung: *Irwan, Eko Sulisty, Ramli, Sukanto, Juanda, Ocsirendi, Indah Riezky Pratiwi, Olan Ramdani, Sri Wilatika Ayuni*
3. Politeknik Akamigas Palembang: *Lina Rianti, STIKES Hesti Wira Sriwijaya, Mayor CKM Aris Teguh*
5. AK Dharma Bhakti Bangka: *Martinus Buulolo*

*Perekonomian Bumi Sriwijaya masih bertumpu pada batu bara dan minyak bumi. Sawit mulai menggantikan karet sebagai komoditas perkebunan terbesar. Industri pempek dan wisata alam menyimpan potensi besar.*

*Terpesona aku melihat wajahnya  
Tatkala aku duduk di dekatnya  
Sebiduk seiring kali menyebrang  
Berperahu ke sebrang Sungai Musi*

Alfian Harahap, pelantun *Se-malam di Cianjur*, memopulerkan lagu *Sebiduk di Sungai Musi* itu pada 1991. Tapi, bagi orang Sumatera Selatan, *Sebiduk di Sungai Musi* tak hanya tentang lagu, tapi juga peribahasa yang menggambarkan konsep kebersamaan, kerja sama, dan persatuan. Setiap orang yang berada di atas biduk harus bekerja sama agar selamat dan sejahtera melewati Sungai Musi.

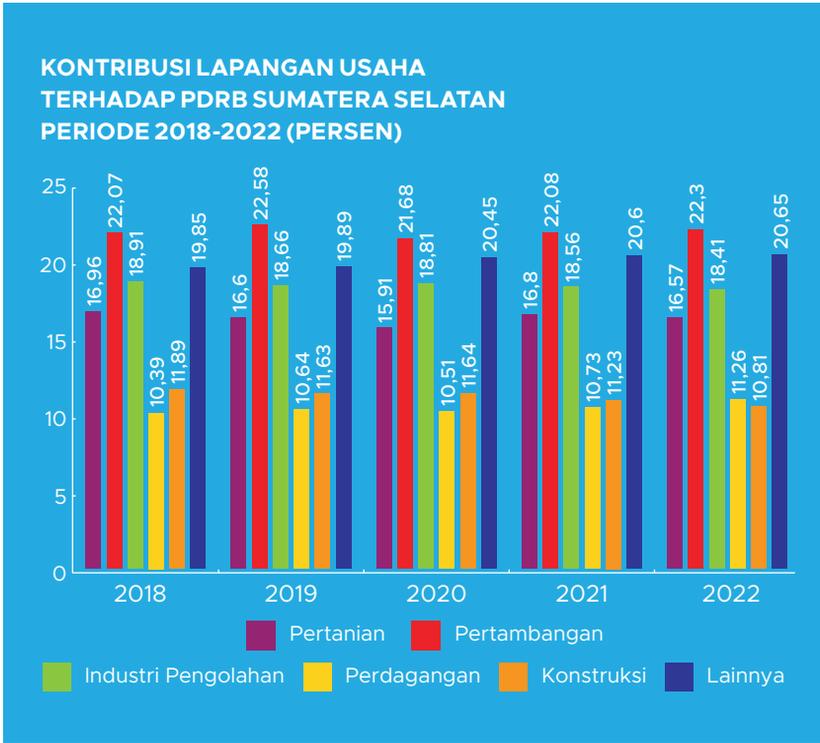
Membentang sepanjang 720 kilometer dari Bukit Barisan di Bengkulu sampai Selat Bangka, Sungai Musi adalah identitas Sumatera Selatan. Selama ratusan tahun, Musi menjadi jalur utama perdagangan kawasan pedalaman dengan dunia luar.

Dan sampai hari ini, Musi masih menjadi urat nadi perekonomian Sumatera Selatan. Musi adalah salah satu jalur terpenting untuk mengangkut batu bara dari pedalaman Sumatera Selatan di Lahat dan Muara Enim menuju jalur pelayaran internasional di Selat

Malaka atau Selat Bangka. “Jalur sungai ini sangat tergantung oleh debit air,” kata Ade Silvia Handayani dari Politeknik Negeri Sriwijaya. “Kalau pasang, tongkang batu bara bisa lewat. Kalau surut, berhenti semua”.

Sumatera Selatan sebetulnya punya Jalur lain untuk mengeluarkan batu bara dari asalnya ke daerah yang membutuhkan, yaitu kereta api. Tapi jalur ini hanya melayani batu bara milik PT Bukit Asam. Batu bara Bukit Asam diangkut dari Muara Enim menuju Tarahan, Lampung, sebelum berlayar ke Jawa.

Peran Musi makin krusial karena perekonomian Sumatera Selatan sendiri masih sangat bergantung pada sektor primer sebagai kontributor terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Sepanjang 2018-2022, 35 persen PDRB Sumatera Selatan berasal dari sektor pertambangan-penggalan dan pertanian, kehutanan, serta perikanan. Pertambangan sangat ringkih terhadap gejolak harga global, semen-



SUMBER: BPS

tar pertanian terombang-ambing oleh kondisi perubahan iklim.

Bahkan, hingga 2023, peran pertambangan dan penggalian atas dasar harga berlaku pada produk domestik bruto Sumatera Selatan masih yang tertinggi, mencapai 26,61 persen. Dari angka itu, subsektor tambang batu bara menyumbang 15 persen sendiri, jauh di atas subsektor minyak bumi dan gas, yang terus turun dan tinggal 5,89 persen.

PDRB Bumi Sriwijaya atas dasar harga berlaku pada 2023 sendiri sebesar Rp 629,1 triliun.

Dengan angka itu, sumbangan Sumatera Selatan terhadap PDRB Pulau Sumatera 13,92 persen.

Peran pertambangan jauh di atas industri pengolahan, yang berada di tempat kedua (17,84 persen), serta pertanian, kehutanan, perikanan di tempat ketiga (13,1 persen). Dan untuk laju pertumbuhan 2023, pertambangan (7,89 persen) hanya kalah dibanding penyediaan akomodasi dan makan-minum (pariwisata), sebesar 13,14 persen.

Situasi pada 2023 itu rupanya telah berlangsung lama. Se-

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,91	3,82	2,15	14,71	13,08	13,10
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,47	6,28	7,89	21,03	27,71	26,61
C.	Industri Pengolahan	2,18	4,39	3,69	19,09	17,48	17,84
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,76	1,46	4,40	0,15	0,13	0,13
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-4,69	0,66	0,33	0,12	0,10	0,10
F.	Konstruksi	-0,02	1,27	3,55	11,92	10,67	10,69
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79	10,37	7,60	13,47	12,98	13,45
H.	Transportasi dan Pergudangan	-2,20	11,63	7,48	2,12	2,21	2,46
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,43	14,67	13,14	1,81	1,77	1,91
J.	Informasi dan Komunikasi	6,04	8,12	6,35	3,21	2,91	2,90
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,19	-0,60	4,60	2,38	2,08	2,07
L.	Real Estate	5,81	5,23	4,28	3,24	2,90	2,87
M,N.	Jasa Perusahaan	0,60	2,90	2,03	0,13	0,11	0,11
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,70	3,73	2,77	2,46	2,43
P.	Jasa Pendidikan	6,57	2,24	2,23	2,37	2,06	2,03
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,63	4,15	-0,02	0,70	0,63	0,60
RS, TU	Jasa Lainnya	0,93	2,05	1,95	0,80	0,71	0,69
PDRB		3,58	5,23	5,08	100	100	100

Tabel 5. Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Sumatera Selatan pada 2023 (persen)

SUMBER: BPS



Alat berat bongkar muat batu bara. TEMPO/Tony Hartawan

tidaknya, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), selama lima tahun terakhir (2019–2023), ekonomi Sumatera Selatan tak hanya bertumpu pada pertambangan dan pertanian, tapi pada lima kategori lapangan usaha. Di tempat pertama ada pertambangan dan penggalian, lalu industri pengolahan. Berikutnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lalu ada perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor. Nomor lima konstruksi. Kelima lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 81,69 persen bagi perekonomian Sumatera Selatan pada 2023.

Namun, kendati masih mendominasi perekonomian Sumatera Selatan, peran sektor pertambang-

an terhadap PDRB rupanya menurun. Ini karena turunnya subsektor minyak bumi dan gas alam. Padahal subkategori batu bara tumbuh 19,3 persen pada 2023. Pertumbuhan subsektor ini sebetulnya bisa lebih tinggi lagi, tapi terkendala oleh kapasitas angkut kereta api batu bara dari Muara Enim ke Tarahan (PT Bukit Asam).

Sempat menurun bertahun-tahun, kontribusi pertanian berangsur pulih. Lapangan usaha ini sempat anjlok karena berkurangnya luas lahan pertanian—terutama pada subsektor perkebunan karet dan hortikultura. Komoditas karet mulai tergusur di pasar global. Produk seperti sandal, karet gelang, dan ban mobil tak lagi bergantung pada karet alam.

Lapangan Usaha per Sub Kategori		Distribusi PDRB ADHB per Sub Kategori (Persen)		
		2022	2023	Pertumbuhan (penurunan)
<b>A.</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>13,08</b>	<b>13,10</b>	<b>0,02</b>
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	8.84	8.99	
	a. Tanaman Pangan	1.93	1.93	
	b. Tanaman Hortikultura	0.93	0.91	
	c. Tanaman Perkebunan	4.43	4.60	
	d. Peternakan	1.27	1.27	
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.28	0.29	
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.47	1.45	
	3. Perikanan	2.78	2.66	
<b>B.</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>27.71</b>	<b>26.61</b>	<b>(1,1)</b>
	1. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	6.99	5.89	
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	15.83	15.90	
	3. Pertambangan Bijih Logam	0.00	0.00	
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4.89	4.82	
<b>C.</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>17.48</b>	<b>17.84</b>	<b>0,36</b>
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	3.37	3.56	
	2. Industri Makanan dan Minuman	8.72	9.00	
	3. Industri Pengolahan Tembakau	0.00	0.00	
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.03	0.03	
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	0.00	0.00	
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0.17	0.16	
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1.26	1.27	
	8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	1.36	1.32	
	9. Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	2.08	2.00	(0,08)
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	0.26	0.26	
	11. Industri Logam Dasar	0.01	0.01	
	12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.11	0.11	
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan	0.00	0.00	
	14. Industri Alat Angkutan	0.02	0.02	
	15. Industri Furnitur	0.03	0.03	
	16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.06	0.05	
<b>D.</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
	1. Ketenagalistrikan	0.11	0.11	
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.01	0.02	
<b>E.</b>	<b>Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	
<b>F.</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>10.67</b>	<b>10.69</b>	
<b>G.</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>12.98</b>	<b>13.45</b>	
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.77	1.73	
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	11.21	11.73	

H.	Transportasi dan Pergudangan	2.21	2.46	
	1. Angkutan Rel	0.18	0.22	
	2. Angkutan Darat	1.04	1.08	
	3. Angkutan Laut	0.07	0.07	
	4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	0.09	0.09	
	5. Angkutan Udara	0.62	0.79	
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0.20	0.20	
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.77	1.91	0,14
	1. Penyediaan Akomodasi	0.20	0.22	
	2. Penyediaan Makan Minum	1.57	1.69	
J.	Informasi dan Komunikasi	2.91	2.90	
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.08	2.07	
	1. Jasa Perantara Keuangan	1.37	1.37	
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	0.50	0.49	
	3. Jasa Keuangan Lainnya	0.21	0.21	
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	
L.	Real Estat	2.90	2.87	
M,N.	Jasa Perusahaan	0.11	0.11	
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.46	2.43	
P.	Jasa Pendidikan	2.06	2.03	
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.63	0.60	
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0.71	0.69	
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	

Tabel 6. Perubahan Kontribusi Sub Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Sumatera Selatan, 2022-2023 (persen)

SUMBER: BPS

Produksi Tanaman Perkebunan Sumatera Selatan (ton)					
Karet			Kelapa Sawit		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
896.000	1.206.192	997.303	658.612	3.449.202	3.361.940

Tabel 7. Perbandingan Produksi Karet dan Sawit di Sumatera Selatan (2021-2023)

SUMBER: BPS

Luas Tanaman Perkebunan Sumatera Selatan (hektare)					
Karet			Kelapa Sawit		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
-	1.237.168	1.232.205	-	1.230.966	1.254.613

Tabel 8. Perbandingan Produksi Karet dan Sawit di Sumatera Selatan (2021-2023)

SUMBER: BPS

## PDRB KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN (PERSEN)



SUMBER: BPS

Dampaknya, harga getah karet terus merosot. Sedangkan biaya perawatan kebun dan upah tani tak ikut turun. Sepanjang 2023, delapan pabrik pengolahan karet di Sumatera Selatan tutup gerbang.

Walhasil, banyak petani karet mengganti tanamannya menjadi sawit. Sawit jauh lebih menguntungkan dibanding tanaman lain. Kenaikan produksi sawit ini membuat kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB, yang pada 2022 hanya 4,43 persen, naik menjadi 4,6 persen pada 2023.

Selain pertanian, yang ikut moncer adalah lapangan usaha industri makanan dan minuman,

dari hanya berkontribusi 8,72 persen pada 2022 menjadi 9 persen pada 2023. Juga lapangan usaha industri kertas dan barang dari kertas, dari 1,26 ke 1,27 persen. Sementara itu, subsektor akomodasi naik dari 0,20 ke 0,22 persen dan subsektor makan-minum dari 1,57 ke 1,69 persen. Dua subsektor itu tak lain adalah indikator pertumbuhan sektor pariwisata.

• • •

Memahami sebaran perekonomian di Sumatera Selatan cukup dengan melihat sektor yang paling dominan dalam PDRB. Sumber migas, misalnya, hanya ada di Prabumulih, Muara Enim, Musi Banyu-

PDRB Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan (Miliar Rupiah)	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Ogan Komering Ulu	15730.26	17613.75	19019.37
Ogan Komering Ilir	31236.04	34239.34	37395.24
Muara Enim (2)	69569.67	113577.46	118517.51
Lahat	19635.54	27834.48	29288.89
Musi Rawas	20412.49	22342.12	23526.55
Musi Banyuasin (3)	72643.72	82431.54	85771.07
Banyuasin	30992.96	34442.77	37439.52
OKU Selatan	9530.24	10328.50	11090.39
OKU Timur	16243.46	17832.84	19464.92
Ogan Ilir	12048.82	13250.92	14250.81
Empat Lawang	5391.04	5837.97	6302.90
Penukal Abab Lematang Ilir	7527.14	8194.74	8719.08
Musi Rawas Utara	7744.00	8548.51	9067.07
Palembang (1)	162032.80	179106.80	194569.60
Prabumulih	8345.93	9208.50	9834.13
Pagar Alam	3001.94	3255.93	3490.53
Lubuk Linggau	7030.47	7687.85	8233.71

Tabel 9. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/ Kota (Miliar Rupiah), 2021-2023

**SUMBER:** BPS

asin, Lahat, dan Ogan Komering Ulu. Sedangkan sumber batu bara makin terbatas lagi, hanya di Muara Enim dan Lahat.

Adapun sumber perkebunan karet berada di Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, serta Muara Enim. Seperti karet, sawit banyak tersebar di daerah yang mirip-mirip, yaitu Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Musi Rawas. Kenaikan sawit inilah yang paling banyak menopang pertumbuhan subkategori perkebunan menjadi 5,04 persen pada 2023, ketika subsektor tanaman pangan anjlok 0,52 persen.

Dengan melihat sebaran sumber penghidupan itu, tak ayal, kabupaten atau kota yang paling besar perannya terhadap PDRB Sumatera Selatan adalah Palembang, sebagai ibu kota provinsi, serta Muara Enim, yang kaya batu bara dan sawit, baru Musi Banyuasin, yang punya banyak migas dan sawit. Pada 2022, tiga daerah tersebut menyumbang 62,33 persen PDRB Sumatera Selatan.

Bertahun-tahun masih terjebak dengan perekonomian primer, Sumatera Selatan punya peluang melakukan industrialisasi. Bukit Asam, misalnya, sedang menco-

Sebaran Produksi Karet (Ton)	2021	2022	2023
Musi Banyuasin	208.212	213.466	211.416
Ogan Komering Ilir	143.429	190.872	193.083
Muara Enim	-	173.228	173.441
Musi Rawas	126.202	127.864	122.021
Banyuasin	101.661	103.894	103.890
Pali	4.354,35	43.731	60.375
Ogan Komering Ulu Timur	-	38.500	40.456
Musi Rawas Utara	149.848	14.1541	28.308
Lahat	20.150	26.195	24.588

Tabel 10. Sebaran Produksi Karet di Sumatera Selatan dalam Ton (2021-2023)

SUMBER: BPS

Sebaran Produksi Kelapa Sawit (Ton)	2021	2022	2023
Musi Banyuasin	432.589	1.044.703	945.004
Banyuasin	52.985	569.345	530.137
Musi Rawas	98.025	427.076	456.181
Ogan Komering Ilir	-	370.215	393.777
Musi Rawas Utara	37.476	304.992	301.656
Muara Enim	-	222.405	223.103
Lahat	19.100	164.614	159.882
Pali	160	118.558	125.540
Ogan Komering Ulu	3.298	113.749	113.956

Tabel 11. Sebaran Produksi Kelapa Sawit di Sumatera Selatan dalam Ton (2021-2023)

SUMBER: BPS

ba mengembangkan arang yang terbuat dari batu bara. Jika inovasi ini berhasil, akan terjadi satu bentuk pengolahan bahan mentah yang cukup efisien dan dapat menyerap banyak tenaga kerja serta tidak bergantung hanya pada pasar energi listrik.

Sementara itu, industrialisasi di produk komoditas perkebunan rupanya telah jalan lebih jauh. Sejak 2016, banyak muncul investasi pada pengolahan kayu menjadi bubur kertas. Salah satunya pe-

main besar, PT OKI Pulp & Paper Mills, yang tergabung dalam APP Sinar Mas.

Industri kertas rasanya dapat mengisi kemunduran industri karet di Sumatera Selatan—yang turun kontribusinya terhadap PDRB menjadi tinggal 2 persen. Pada 2023, kontribusi industri kertas tumbuh menjadi 1,27 persen terhadap PDRB dibanding pada 2022 (1,26 persen).

Selain itu, potensi besar ada pada industri makanan dan mi-

numan. Pada 2022, subsektor ini baru berperan 8,72 persen terhadap PDRB, tapi setahun kemudian menjadi 9 persen. Moncernya industri ini antara lain ditopang pertumbuhan makanan pempek, yang berkat digitalisasi bisa menembus pasar nasional secara lebih cepat.

Namun tantangan industri pempek ini ada pada bahan bakunya. Bahan baku makanan ini secara turun-temurun adalah ikan air tawar jenis belida dan gabus. Belida kini masuk kategori dilindungi. Sedangkan gabus susah dibudidayakan. Dan jika terus diburu, bukan mustahil gabus juga ikut lenyap dan tinggal patung seperti ikan belida/belido di Palembang. Walhasil, untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku, terpaksa sejumlah industri pempek Palembang akhirnya beralih ke ikan laut seperti tenggiri.

Selain itu, pariwisata Sumatera Selatan menyimpan potensi yang tak kalah cemerlang. Bukan hanya pariwisata berbasis sejarah dan kuliner yang banyak tersebar di Palembang, pelesiran alam pun banyak bertebaran di Sumatera Selatan. Misalnya Danau Ranau di Ogan Komering Ulu, danau terbesar kedua di Sumatera (setelah Toba), serta gunung-gemunung dan air terjun di Pagar Alam. Potensi ini hanya perlu dipoles sedikit dengan infrastruktur jalan yang lebih baik.

Di sektor pertanian, ada kopi Sumatera Selatan, yang agaknya hanya butuh bantuan jaringan infrastruktur yang memadai untuk melancarkan distribusinya dari kebun hingga ke cangkir pelanggan. Sebab, Sumatera Selatan telah menjadi penghasil kopi terbesar nasional. Sebanyak 26 persen produksi kopi Indonesia berasal dari Bumi Sriwijaya. Kopi-kopi tersebut dihasilkan dari 267.200 hektare kebun kopi. Namun popularitas dan penetrasi pasar kopi dari Sumatera Selatan masih kalah dibandingkan dengan kopi dari daerah lain, seperti Lampung, yang bahkan bukan produsen kopi terbesar.

Dan jangan lupa kelapa, pohon kehidupan Sumatera Selatan. Di tangan orang Bugis yang merantau ke Banyuasin, tanaman ini dapat mengubah gambut menjadi kebun kelapa yang tumbuh subur. Kini, Sumatera Selatan menjadi produsen kelapa terbesar keempat nasional.

Namun kelapa masih menjadi ekonomi primer alias dijual mentah ke luar pulau dan luar negeri. Harganya cuma Rp 2.000 sebutir. Padahal, jika kelapa diolah, harganya bisa berlipat. Ia bisa menjadi minyak goreng kelapa, nata *de coco*, *virgin coconut oil*, dan briket. Kini produk tersebut banyak yang *made in Cina*, Vietnam, dan Thailand. Padahal Indonesia juga bisa.

## EKONOMI PRIMER TINGGI, PENGANGGURAN TERDIDIK NAIK

Sumatera Selatan masih menghadapi masalah yang juga dijumpai sejumlah provinsi di Indonesia, yaitu perekonomian terlalu bergantung pada sektor primer.

Hal tersebut membuat tenaga kerja banyak terserap ke sektor informal. Per Agustus 2023, angkanya mencapai 62,97 persen dari total tenaga kerja. Sebanyak 44,71 persen berada di sektor pertanian dan 39,68 persen tenaga kerja merupakan lulusan sekolah dasar ke bawah.

Angka itu tidak banyak berubah dalam lima tahun terakhir (2018-2022). Lebih dari separuh angkatan kerja di Sumatera Selatan berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada 2022. Bahkan, pada 2023, hanya 11,39 persen dari total penduduk bekerja yang merupakan lulusan pendidikan tinggi, yaitu diploma ke atas, sementara lulusan sekolah menengah atas hanya 24 persen dan sekolah menengah kejuruan 7,91 persen.

Itu sebabnya, menurut Badan Pusat Statistik (2022), Sumatera Selatan masih menghadapi tingginya tingkat pengangguran terdidik. Pendidikan tinggi belum menjadi jaminan seseorang mendapat pekerjaan. Bahkan pendidik-

an tinggi bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk masuk pasar tenaga kerja.

Sebab, orang dengan pendidikan tinggi umumnya enggan bekerja di sektor ekonomi informal. Mereka biasanya ingin bekerja di sektor formal atau sektor ekonomi produktif. Padahal ketersediaan lapangan kerja di sektor-sektor itu sangat terbatas.

Inilah masalah yang dihadapi daerah yang masih mengandalkan ekonomi primer. Dalam kurun lima tahun terakhir (2018-2022), lebih dari 35 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Sumatera Selatan berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian.

Pada 2022, 62,33 persen PDRB Sumatera Selatan disumbang hanya oleh tiga kabupaten dan kota, yaitu Palembang, yang merupakan ibu kota provinsi; Mura Enim, sebagai penghasil batu bara; dan Musi Banyuasin, sebagai penghasil minyak bumi dan gas.

Untuk itu, Sumatera Selatan harus keluar dari ketergantungan ekonomi primer ini. Tidak harus keluar betul dari tiga sektor tersebut, setidaknya provinsi ini mengembangkannya sampai menjadi



Industri pengolahan pempek Palembang. Dok TEMPO/ Melly Anne

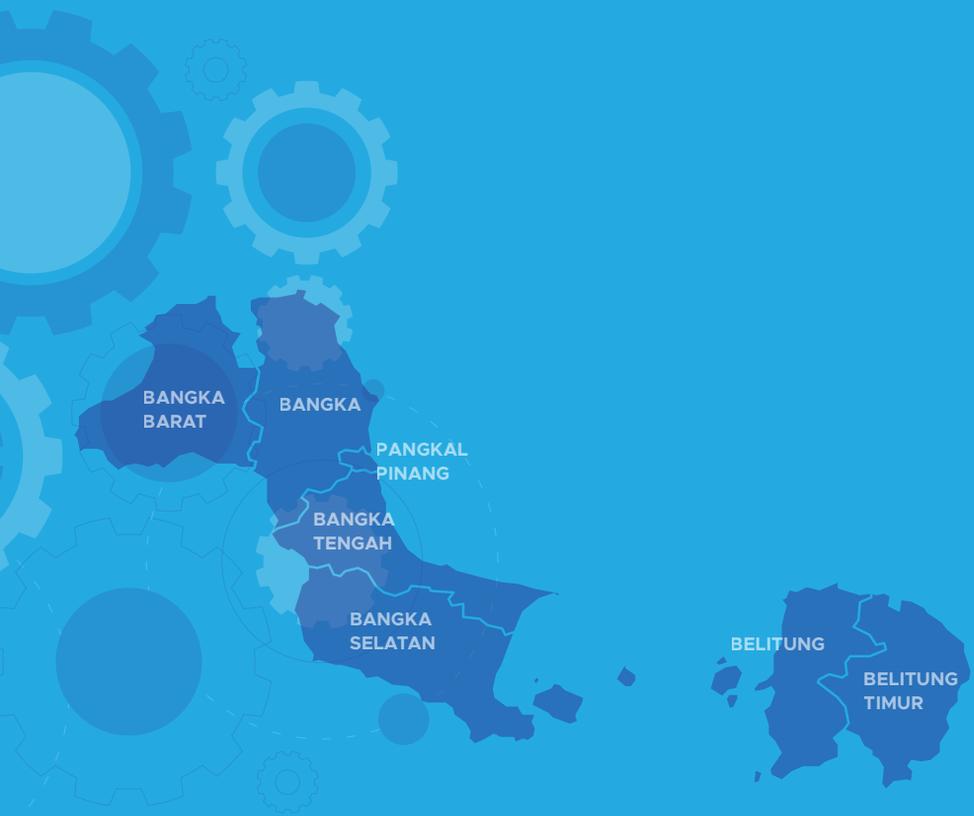
industri olahan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, ada 322 sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah provinsi ini. Bahkan telah ada SMK yang mengusung kurikulum berdasarkan potensi ekonomi wilayahnya. Di antaranya SMK Negeri 1 Jarai (kurikulum kopi), SMKN 1 Belido Darat (nanas), SMKN 1 Tanjung Lago dan SMKN 1 Indralaya Selatan (perikanan), serta SMKN 1 Gelumbang (pertanian). Sedangkan jumlah perguruan tinggi vokasi di Sumatera Selatan telah mencapai 24 akademi, 10 politeknik, dan 1 akademi komunitas per 1 Desember 2023. Ini satu modal cukup untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terampil sesuai dengan sektor ekonomi potensial.

Namun, berdasarkan masuk-

an industri dan dunia usaha di Sumatera Selatan, *soft skill* dan *hard skill* lulusan sekolah kejuruan dan vokasi tersebut rupanya belum selaras dengan kebutuhan industri. Kesenjangan *soft skill* itu antara lain kemampuan komunikasi (yang kurang efektif), kerja sama tim, pemecahan masalah, keterampilan beradaptasi, dan etos kerja.

Sekolah kejuruan dan vokasi harus mendengarkan kebutuhan industri dan dunia usaha ini. Sementara itu, pemerintah juga perlu memperhatikan pengembangan ekonomi sesuai dengan keunggulannya—keluar dari jeratan ekonomi primer—agar tersedia lebih banyak lapangan kerja formal bagi kelompok terdidik, agar Sumatera Selatan bisa segera lekas melompat ke ekonomi sekunder.



BANGKA  
BARAT

BANGKA

PANGKAL  
PINANG

BANGKA  
TENGAH

BANGKA  
SELATAN

BELITUNG

BELITUNG  
TIMUR



# PROVINSI BANGKA BELITUNG: TUAH TULAH TIMAH BANGKA

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG:**

**Ketua:** *Ade Silvia Handayani (Politeknik Negeri Sriwijaya)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Negeri Sriwijaya: *Zakaria, Sari Lestari Zainal R, Rita Martini, Arfan Hasan, Nyayu Latifah Husni, Leni Novianti, Marieska Lupikawati, Martha Aznury, Umul Salamah*
2. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung: *Irwan, Eko Sulisty, Ramli, Sukanto, Juanda, Ocsirendi, Indah Riezky Pratiwi, Olan Ramdani, Sri Wilatika Ayuni*
3. Politeknik Akamigas Palembang: *Lina Rianti, STIKES Hesti Wira Sriwijaya, Mayor CKM Aris Teguh*
5. AK Dharma Bhakti Bangka: *Martinus Buulolo*

*Dugaan kasus korupsi timah membuat pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tinggal sikok persen. Sektor pertanian seperti lada, kelapa sawit, dan karet perlu diperkuat lagi. Jangan lupakan Laskar Pelangi.*

Sebelum film *Laskar Pelangi* tayang di layar lebar pada 2008, orang kebanyakan hanya mengenal Bangka Belitung sebagai pulau timah dan lada. Maklum saja, Bangka Belitung sudah mulai menambang timah 313 tahun lalu atau pada 1711—walaupun boleh jadi tambang timah pertama di Bangka bisa lebih tua dari itu, karena bukti penambangan timah di dunia pertama kali ditemukan di Eropa dan Cina pada Zaman Perunggu atau tahun 3000 sebelum Masehi.

Status Bangka Belitung yang kaya timah itu membuat Indonesia menjadi salah satu eksportir timah terbesar di dunia. Saat ini nomor dua setelah Cina. Saban tahun, Indonesia mengeksport 100 ribu ton lebih timah. Sebanyak 90 persennya dihasilkan Bangka dan Belitung.

Sementara itu, untuk urusan lada putih, merica sudah menjadi komoditas rempah yang penting di Bangka Belitung sejak 1880, menurut beberapa catatan sejarah. Para penambang etnis Cina-lah yang menyemai tanaman itu di sekitar lubang tambang mereka. Pemerintah kolonial Hindia Belanda

mewajibkan lada ditanam paling dekat 1,5 kilometer dari pertambangan timah.

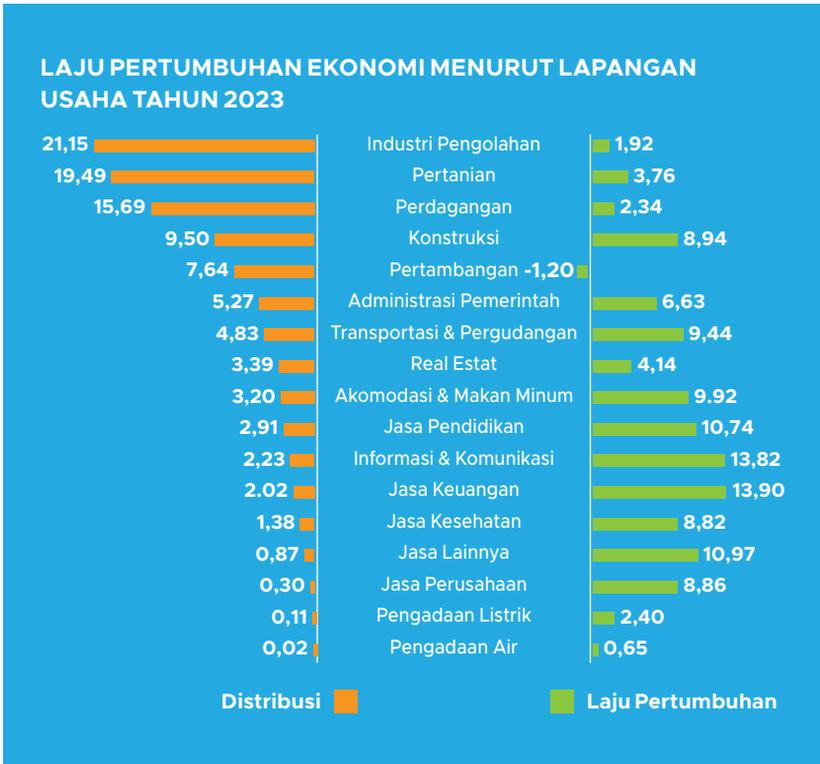
Baru menanam lada pada abad ke-19, Bangka belakangan justru melampaui Lampung, yang notabene menjadi lokasi pertama budi daya lada skala perkebunan.

Sejumlah varietas lada Bangka berasal dari Lampung, seperti Lampung daun lebar dan Lampung daun kecil. Lampung sendiri sudah membudidayakan lada sejak abad ke-17.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian memperluas sentra produksi lada ke Bangka dan Belitung pada abad ke-19. Pada 1930-an, berkat penanaman intensif lada di Lampung dan Bangka itu, Hindia Belanda menjadi eksportir lada nomor satu di dunia. Sebagian besar lada yang diekspor, 65 persen, berasal dari Bangka.

Posisi Bangka sebagai penghasil lada terbesar berlanjut setelah Indonesia merdeka. Pada 2016, menurut catatan Badan Pusat Statistik, ketika produksi lada Lampung tinggal 14.854 ton, Bangka Belitung masih menghasilkan 31.408 ton atau terbesar nasional.

Kini, setelah bertahun-tahun



SUMBER: BPS

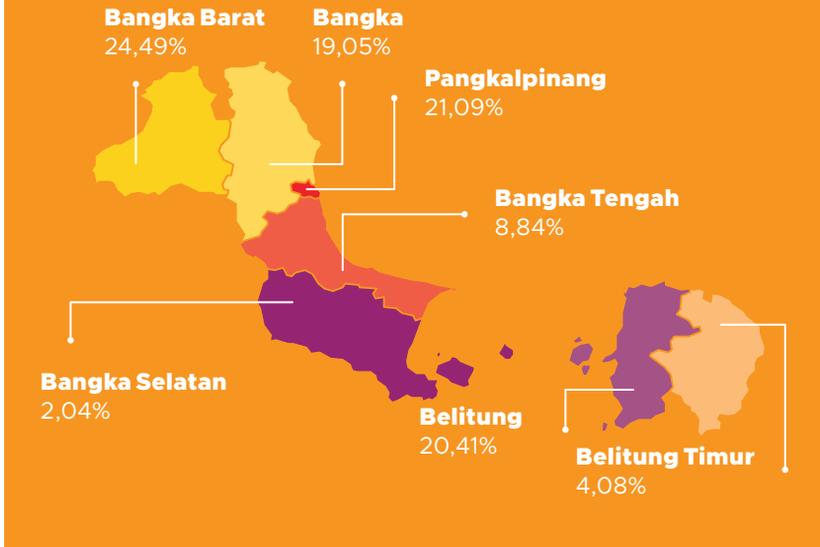
bertumpu pada timah dan lada, Bangka Belitung belakangan menikmati pertumbuhan ekonomi baru dari pariwisata. Ini tak lepas berkat *Laskar Pelangi*, film berlatar Pulau Belitung yang mengisahkan perjuangan sepuluh anak desa yang bersekolah di sebuah SD Muhammadiyah yang serba-terbatas. Menceritakan kisah menyentuh, secara tepat film ini juga mempromosikan keindahan Pulau Belitung. Salah satunya pantai berpasir putih berair biru dengan batu-batu raksasa menahan ombak alami

serta *spot* malamun terbaik, Pantai Laskar Pelangi.

Setelah film itu tayang, kontribusi sektor pariwisata Bangka Belitung, yang masuk lapangan usaha akomodasi dan makan-minum, berangsur naik. Pada 2007, setahun sebelum *Laskar Pelangi* muncul, kontribusi pariwisata, yang dulunya masuk subsektor perhotelan dan restoran, baru 1,28 persen. Pada 2023, kontribusinya naik menjadi 3,2 persen.

Namun keindahan alam Bangka Belitung rupanya belum

**PERSENTASE JUMLAH PERUSAHAAN  
DI PROVINSI BANGKA BELITUNG  
BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA**



**SUMBER:** BPS

mampu mengangkat derajatnya dari ketergantungan terhadap timah, yang telah berlangsung ratusan tahun. Ketika kasus dugaan korupsi timah meledak pada kuartal pertama 2024, ekonomi Bangka Belitung langsung rontok. Aktivitas pertambangan timah berhenti. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada triwulan pertama 2024 tinggal *sikok* persen. Tepatnya 1,01 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan keempat 2023, angka itu berkontraksi (minus) 7,24 persen.

Data kuartal berikutnya dipastikan lebih merah karena, sete-

lah Kejaksaan Agung menangkap orang-orang yang diduga terlibat korupsi tersebut pada Maret 2023, penambangan hingga pengolahan timah di Bangka Belitung nyaris cuti bersama. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan tepat, yang bertumpu pada potensi lain kepulauan ini, agar pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tidak terus-terusan *sikok* persen.

Sektor perkebunan dan pariwisata layak menjadi penopang timah agar tenaga kerja Bangka Belitung naik kelas. Sebab, pengangguran tertinggi di provinsi ini justru dari kelompok pendidikan



**SUMBER:** BPS

tinggi—karena minimnya lapangan kerja formal.

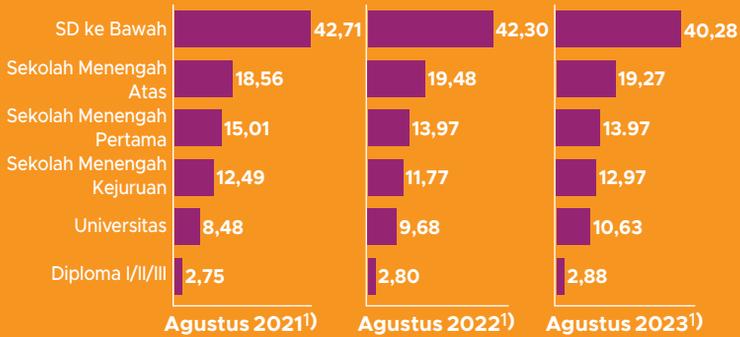
Semuanya sudah cukup gem-bira dapat menghasilkan ratusan ribu rupiah dari timah. Begitulah, terlalu lama dimanjakan alam, masyarakat Melayu Bangka Belitung kemudian melahirkan sebuah istilah, yang lebih seperti ledakan: *dak kawa nyusah* alias “tidak mau susah”.

...

Pada 2023, ekonomi Provin-

si Bangka Belitung tumbuh 4,38 persen, melambat dibanding tahun 2022, yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,4 persen. Sumber pertumbuhan terbesar justru lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi (12,9 persen), diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi (13,82 persen), lalu usaha jasa lainnya (10,97 persen)—tiga lapangan usaha yang kontribusinya tidak besar bagi ekonomi satu provinsi.

## PERSENTASE PENDUDUK BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN AGUSTUS 2021—AGUSTUS 2023



SUMBER: BPS

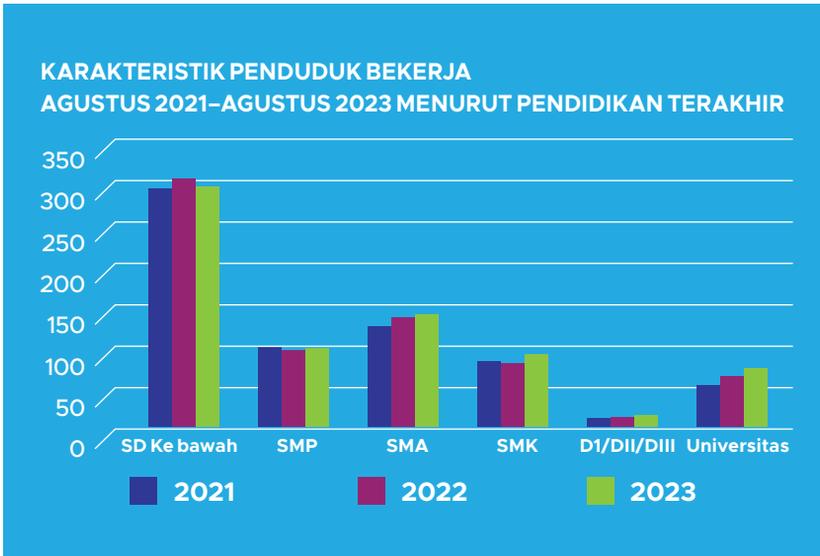
Adapun yang berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung masih industri pengolahan dan pertanian. Kontribusi industri pengolahan sebesar 21,15 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 19,49 persen; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor 15,69 persen; konstruksi 9,5 persen; dan pertambangan serta penggalian 7,64 persen.

Kok, bisa, kontribusi sektor pertambangan hanya satu digit, padahal provinsi ini bergantung pada timah? Jawabannya ada pada tambang ilegal. Dari total 862 ribu hektare lahan tambang yang tercatat di Bangka Belitung, separuh lebih (473 ribu hektare) merupakan lahan yang izinnya dikuasai

PT Timah Tbk (BUMN). Tak hanya menyerobot lahan PT Timah, penambang rakyat juga menggarap banyak tambang ilegal yang belum dilengkapi perizinan.

Dampaknya, pertumbuhan ekonomi di sektor tambang banyak yang tak tercatat—baru terdeteksi ketika bijih timah itu sudah diolah menjadi ingot. Itu sebabnya, kontribusi industri pengolahan selalu tertinggi di Bangka Belitung dan pada 2023 mencapai 21,15 persen. Dan subsektor paling besar di sektor pengolahan ini tak lain tak bukan adalah industri logam dasar alias smelter timah.

Setelah industri pengolahan, pertanian menjadi motor pertumbuhan di Bangka Belitung. Subsektor terbesar adalah industri tanaman perkebunan yang didomi-



SUMBER: BPS

nasi kelapa sawit, karet, dan lada. Industri perikanan (ikan tangkap) dan industri tanaman hortikultura (tanaman sayuran dan buah) menguntit di posisi berikutnya.

Kendati punya kontribusi terbesar pada perekonomian, industri pengolahan di Bangka Belitung bukan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Ini karena banyak pekerjaan di pabrik telah diotomatisasi mesin. Pemberi kerja terbanyak justru lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (25,08 persen), disusul perdagangan besar dan eceran (16,74 persen) dan pertambangan dan penggalian (16,54 persen). Pada triwulan ketiga 2023, serapan tenaga kerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan peri-

kanan tumbuh paling tinggi, yakni mencapai 0,04 persen atau setara dengan 4,99 ribu tenaga kerja. Ini karena adanya kenaikan harga komoditas sawit dan karet pada periode tersebut.

Terkonsentrasinya lapangan kerja di sektor hulu ini membuat mayoritas angkatan kerja Bangka Belitung berpendidikan rendah. Dari jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2023, sebanyak 40,28 persen merupakan lulusan sekolah dasar. Sebaliknya, karena kurangnya pekerjaan formal—yang biasanya disediakan industri jasa dan pengolahan—jumlah penganggur lulusan universitas justru tinggi, mencapai 21,1 persen. Pada Agustus 2023, hanya 10,63 persen penduduk yang bekerja merupakan



*Tambang timah di Belitung Timur, Bangka Belitung. Dok TEMPO/ Hendra Suhara*

lulusan perguruan tinggi.

Mudahnya hidup dari timah selama ratusan tahun membuat masyarakat Bangka Belitung tak begitu peduli terhadap pendidikan. Hal ini membuat rata-rata lama sekolah di Kepulauan Bangka Belitung hanya 8,25 tahun pada 2023. Dan pada tahun yang sama, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Kepulauan Bangka Belitung merupakan yang paling rendah di Indonesia, hanya 18,19 persen. Ini adalah perbandingan jumlah penduduk yang sedang kuliah dengan jumlah penduduk usia perguruan tinggi (19-23 tahun).

Bangka Belitung tertinggal dari Papua, yang APK-nya sudah 19,99 persen.

Dalam beberapa tahun ke belakang, sejumlah pihak telah berupaya mengubah situasi provinsi. Sebab, mereka sudah sadar betapa masyarakat begitu bergantung pada timah—bahkan jauh sebelum kasus korupsi sektor ini meledak.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2023, ada beberapa sektor unggulan yang menjadi fokus pengembangan di Bangka Belitung. Pertama, industri pengolahan hasil laut dan

perikanan. Ini meliputi pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut, seperti abon, tepung ikan, dan surimi; pengeringan, pembekuan, pengasapan, dan pengalengan ikan; serta minyak ikan.

Sektor berikutnya pengolahan lada. Ini mencakup oleoresin sebagai bahan baku flavor; bahan pengawet alami; serta bahan baku obat dan farmasi, kosmetik, parfum, pengalengan daging, saus, minuman ringan, industri roti, dan kembang gula.

Lalu ada sektor industri pengolahan sawit, yang mencakup industri *oleofood* seperti *specialty fats additive* (penolong pengolahan pangan); industri oleokimia, yaitu *fatty acids, fatty alcohols, fatty amine, methyl esters*, dan polimer turunan minyak sawit; serta industri bioenergi dan kemurgi, yaitu *bioavtur (bio-jet fuel) nanocellulose derivatives, bio-based fiber polymers (carbon fiber, viscous), new generation of bio-based composite*. Dan terakhir adalah pengolahan timah dan mineral ikutan timah yang berupa logam tanah bahan bakar nuklir. Saat ini, bijih timah Bangka hanya diolah sampai ingot atau timah batangan.

Di samping itu, sektor pariwisata terus menunjukkan pertumbuhan dan potensinya. Kendati bukan menjadi yang terbanyak dalam menyerap tenaga kerja, lapangan pekerjaan di sektor ako-

modasi dan makan-minum terus bergerak ke atas. Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja di sektor ini baru 5,03 persen, tapi setahun kemudian sudah menjadi 6,38 persen—tumbuh 26,83 persen.

Alam pantai Bangka Belitung tak kalah elok dibanding Bali dan Lombok. Berada pada kawasan segitiga emas Singapura, Johor, dan Riau (Sijori), Bangka Belitung sebetulnya sudah punya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang dan Pulau Lengkuas di Belitung. Bangka Belitung juga sudah punya Geopark Belitung sebagai *geopark* dunia, Pantai Parai Tenggara, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Rambak, Pantai Tongaci, dan Pantai Penyusuk dengan Pulau Putri.

Di Bangka Tengah ada Taman Hutan Pelawan dan danau indah bekas lahan tambang, yakni Danau Bukit Pading dan Danau Kaolin. Begitu pula di Bangka Barat dan Bangka Selatan banyak destinasi wisata menarik. Namun, tanpa pembangunan infrastruktur dan jalur transportasi yang memadai serta terjangkau, mustahil potensi mengeluarkan daya ledaknya. Dengan kebijakan pemerintah yang tepat, baik dari sisi ekonomi yang akan melahirkan permintaan tenaga kerja maupun sisi pendidikan yang akan menciptakan suplai tenaga kerja, niscaya Bangka Belitung akan keluar dari buaian sumber daya alam bernama timah.

## TERBATAS LAPANGAN KERJA LULUSAN UNIVERSITAS

Tidak *nyambung*-nya pendidikan dengan lapangan pekerjaan di Bangka Belitung tecermin dari wajah pengangguran kepulauan tersebut. Di sini semua serba-terbalik. Pengangguran terbesar justru lulusan pendidikan tinggi. Sedangkan yang paling banyak terserap oleh dunia kerja malah lulusan sekolah dasar.

Lulusan sekolah dasar mendominasi penduduk bekerja Bangka Belitung pada Agustus 2023. Angkanya mencapai 40,28 persen. Hanya 10,63 persen yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Lulusan universitas yang menganggur di sini mencapai 21,1 persen.

Anomali ini bisa terjadi karena pertambangan dan pengolahan timah, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sementara itu, tidak ada lapangan usaha yang memadai yang dapat menyerap lulusan pendidikan tinggi.

Ketergantungan terhadap timah tersebut membuat rata-rata lama sekolah di Kepulauan Bangka Belitung hanya 8,25 tahun pada 2023. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi di daerah ini bahkan hanya 18,19 persen, terendah se-Indonesia.

Situasi ini bisa diubah jika ada kerja sama yang padu anta-

ra pemerintah daerah dan pusat sebagai pembuat kebijakan, institusi dan lembaga pendidikan yang akan mencetak tenaga kerja, serta dunia usaha dan industri yang akan menggerakkan ekonomi sekaligus pengguna sumber daya manusianya.

Para peneliti menemukan, pendidikan vokasi belum melakukan sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sarana dan prasarana pendidikan vokasi belum mengikuti perkembangan teknologi di dunia usaha dan industri. Dan yang paling penting, pembukaan program studi pada pendidikan vokasi tidak selaras dengan potensi daerah yang ada di Bangka Belitung. Ini belum termasuk kenyataan bahwa lulusan sekolah vokasi kurang memiliki etos kerja, jiwa kepemimpinan, komunikasi, serta kerja sama.

Siapa yang harus memulai? Apakah pendidikan vokasi dan pemerintah daerah mengikuti kemauan dunia usaha dan industri? Apakah dunia usaha yang menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah dan pasokan tenaga kerja? Jawabannya adalah duduk bersama.

Di samping memiliki timah, Bangka Belitung sebetulnya punya

beberapa sektor ekonomi unggulan. Pertama, industri pengolahan hasil laut dan perikanan.

Berikutnya pengolahan lada. Lalu ada sektor industri pengolahan sawit. Selanjutnya ada pengolahan timah dan mineral ikutan timah yang berupa logam tanah bahan bakar nuklir. Terakhir, sektor pariwisata terus menunjukkan pertumbuhan dan potensinya. Sektor ini terus bergerak ke atas sejak film *Laskar Pelangi*.

Untuk itu, diperlukan program vokasi yang kurikulumnya *nyambung (link and match)* dengan dunia usaha dan industri. Dunia usaha dan industri juga memerlukan *innovation planning* yang komprehensif. Mesti ada kajian potensi daerah, terutama untuk sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, pertambangan, serta pariwisata. Hilirisasi pada setiap sektor perlu dilakukan dengan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor tersebut.

*Blue economy* atau ekonomi kelautan dapat menjadi alternatif, mengingat pertambangan timah makin lama makin berkurang. Kolong alias lahan bekas tambang timah yang jumlahnya sangat banyak perlu dimanfaatkan, agar tidak menjadi beban, tapi justru menjadi sumber ekonomi baru. Misalnya untuk pariwisata, budi daya ikan air tawar, dan sumber

*Blue economy atau ekonomi kelautan dapat menjadi alternatif, mengingat pertambangan timah makin lama makin berkurang. Kolong alias lahan bekas tambang timah yang jumlahnya sangat banyak perlu dimanfaatkan, agar tidak menjadi beban, tapi justru menjadi sumber ekonomi baru. Misalnya untuk pariwisata, budi daya ikan air tawar, dan sumber air baku.*

air baku. Pemanfaatan teknologi juga dapat diterapkan pada budi daya udang vaname.

Dengan adanya kajian mendalam, potensi Bangka Belitung dapat maksimal mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan pada ujungnya, dunia usaha dan industri mendapat pasokan tenaga kerja mumpuni, sementara manusianya memperoleh pekerjaan yang layak. Makin banyak lulusan pendidikan vokasi terserap oleh lapangan pekerjaan, makin besar animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah vokasi, sehingga dapat menurunkan angka malas sekolah Provinsi Bangka Belitung.





# PROVINSI LAMPUNG: **BERGERAK KELUAR DARI ‘CANGKANG LAMA’**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH LAMPUNG DAN BENGKULU:**

**Ketua:** *Yana Sukaryana (Politeknik Negeri Lampung)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Lampung: *Kresna Shifa Usodri, Dimas Prakoswo Widiyani, Rizky Rahmadi, Fajar Rochman, M. Teguh Prastyo, Fadiansyah Achmad Nurullah, Tiara Prima Sari*
2. AKN Rejang Lebong: *Caesar Pebrianto, Nur'aini, Kiky Nurfitri Sari, Nining Suningsih, Muhammad Subhan Hamka*
3. Politeknik Raflesia: *Harry Prayoga Setyawan*

*Provinsi Lampung dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Tapi, dalam satu dekade terakhir, produktivitas tanaman pangan dan perkebunannya cenderung stagnan. Perlu penggerak pertumbuhan ekonomi baru.*

Berlambang perisai dengan lukisan padi dan lada, Provinsi Lampung menegaskan sebuah simbol bahwa gerbang masuk Pulau Sumatera itu punya komoditas pertanian andalan. Provinsi ini memang merupakan kawasan penghasil dan pemasok pangan strategis nasional serta menyanggah status “lumbung pangan nasional”.

Sang Bumi Ruwai Jurai (Bumi dengan Dua Tradisi)—sebutan untuk Lampung—juga menjadi kawasan produksi dan perdagangan lada yang strategis, bahkan sejak zaman prakolonial. Jenis lada paling banyak diproduksi di Indonesia adalah lada hitam yang dikenal dengan nama *Lampung black pepper*.

Dua simbol hasil bumi itu sejatinya belum cukup. Jika kita membaca buku *HPU (Himpunan Pengetahuan Umum)* yang dihafal siswa sekolah dasar pada 1970-1980-an atau sebelum itu, Lampung juga dikenal sebagai penghasil singkong, jagung, pisang, tebu, kakao, kopi, karet, dan tambak udang yang berbanjar-banjar di sepanjang kawasan timur.

Apakah senarai hasil bumi tersebut masih menjadi komoditas unggulan hingga kini? Sampai berapa lama akan terus bertahan? Apakah sudah saatnya mereka perlu bergerak keluar dari “cangkang lama”—yang “aman” dengan pertumbuhan terbesar di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan?

Tim peneliti Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Wilayah Lampung dan Bengkulu menyuguhkan fakta pengamatan data produktivitas komoditas unggulan dalam satu dekade terakhir. Tim ini beranggotakan 13 peneliti dari tiga perguruan tinggi vokasi dan telah menggelar diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan dari sepuluh instansi daerah, mitra perguruan tinggi, dan mitra dunia usaha dan industri.

Hasilnya? Inovasi atau hilirisasi dan penerapan pembangunan berkelanjutan mutlak diperlukan jika kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ter-



SUMBER: BPS

hadap produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi ingin tetap menjadi yang terbesar. Sektor-sektor lain bisa menyialip atau

berkembang cepat menjadi sumber ekonomi baru di masa depan.

Berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha sejak 2017

hingga 2022, sektor pertanian (dalam makna yang luas) memberikan kontribusi tertinggi, yaitu 27,9 persen, pada 2022. Sektor ini menyerap sekitar 40 persen dari total tenaga kerja yang ada di provinsi berpenduduk 9,4 juta jiwa itu.

Angka kontribusi 27,9 persen itu lebih tinggi daripada sektor industri pengolahan, yang berada di urutan kedua (18,55 persen), lalu perdagangan besar dan eceran (13,2 persen), konstruksi (9,75 persen), dan pariwisata (tecermin dari kontribusi penyediaan makanan dan minuman sebesar 1,52 persen serta jasa lainnya 1 persen).

Persentase PDRB Lampung dapat dilihat pada info grafik.

Namun lapangan usaha sektor pertanian pada 2022 punya nilai lebih rendah dibanding lima tahun sebelumnya. Dan jika menyelam lebih dalam ke pertumbuhan masing-masing, yaitu tanaman pangan dan komoditas perkebunan rakyat, akan tampak bahwa produktivitas lahan pertanian dan perkebunan cenderung stagnan dari tahun ke tahun.

Produktivitas tanaman padi, misalnya, hanya menghasilkan 50-51 kuintal per hektare sejak 2013 hingga 2022, sementara alih fungsi lahan terus terjadi. Produktivitas yang relatif stagnan juga terjadi pada jagung, ubi jalar, kopi

robusta, kacang hijau, karet, kelapa dalam, dan tebu. Produktivitas yang meningkat terjadi pada komoditas ubi kayu, kedelai, dan kelapa sawit.

Sementara itu, produktivitas tanaman lada dan kakao justru menurun. Petani kakao di Lampung Timur dan Lampung Selatan malah banyak yang beralih ke singkong dan jagung. Hama dan curah hujan yang tinggi lantaran perubahan iklim menyebabkan buah kakao cepat busuk.

Lalu kebun lada yang begitu dibanggakan di masa lalu kini hanya menghasilkan sekitar 470 kilogram lada per hektare (2022). Bandingkan dengan tahun 2013, yang mencapai di atas 510 kilogram per hektare. Ekspor lada dari Indonesia pun masih dalam wujud primer, dalam bentuk utuh (tidak dihancurkan atau ditumbuk). Sampai saat ini, Indonesia belum mengekspor lada dalam bentuk olahan atau manufaktur (Ditjenbun, 2019).

Untuk perikanan, masalah berbeda terjadi. Lampung sebenarnya memiliki garis pantai sepanjang 1.105 kilometer. Ini merupakan jalur terpanjang kedua di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Aceh. Lampung juga dikelilingi laut yang luas. Secara geografis, Lampung berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah timur, dan Selat Sunda



*Petani memanen kopi robusta di Lampung Barat. Tempo/Amston Probel*

di sebelah selatan.

Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, volume ekspor hasil perikanan Lampung mengalami peningkatan dari 25 ribu ton pada 2017 menjadi 31 ribu ton pada 2021. Nilai ekspor perikanan pun meningkat dari US\$ 237 juta (2017) menjadi US\$ 297 juta (2021).

Namun melimpahnya hasil perikanan tak serta-merta mendorong konsumsi ikan penduduk di provinsi beribu kota Bandar Lampung ini. Rata-rata konsumsi kalori dari ikan per kapita per hari penduduk Lampung hanya berkisar 45 kkal (2020-2022). Angka itu terhitung rendah, lebih rendah daripada Aceh (88 kkal), kurang dari separuh Sulawesi Selatan, dan hampir sepertiga konsumsi ikan penduduk Maluku, yang tertinggi di Indonesia.

Masalah lain membunchah: menurunnya kualitas lingkungan perikanan budi daya, tergerusnya hutan mangrove, serta meluasnya penyakit ikan dan udang. Sebanyak 17,8 persen hutan bakau rusak, 16 persen terumbu karang terdegradasi, sementara aktivitas rumah tangga dan pabrik juga mencemari 51 desa tepi laut.

Berbagai masalah tersebut membutuhkan penanganan yang memberikan solusi agar pertumbuhan di sektor pertanian kembali terungkit. Pertumbuhan di indus-

tri pengolahan yang terkoneksi dengan sektor pertanian harus didongkrak. Selama ini, struktur industri pengolahan dalam PDRB tahun 2010-2022 telah meningkat dari 17,18 persen (2010) menjadi 18,55 persen (2022), tapi terasa lambat dan belum mencirikan kemajuan ekonomi daerah secara modern.

Jumlah usaha industri besar dan sedang bertambah 35 industri sepanjang lima tahun terakhir. Jenis industri dalam lima tahun terakhir juga belum banyak berubah dan masih didominasi kegiatan industri makanan. Jumlah industri di Lampung masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Provinsi Banten, tetangga di sebelah selatan, yang tercatat memiliki perusahaan empat kali lipatnya.

Pendekatan berbasis kawasan sangatlah tepat. Pengembangan agrowisata, misalnya, diperlukan di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat, yang kuat pada produksi kopi, juga Kabupaten Pesawaran, yang menghasilkan kakao.

Wisatawan memang telah diajak bervakansi ke kebun-kebun kopi sembari merasakan pengalaman memetik ceri merah sendiri, menyangrai, menggiling, dan menyeduh kopi sendiri. Tapi menyelenggarakan festival kopi serta menggelar kompetisi barista dan menyeduh kopi dengan menda-

tangan para barista dari berbagai negara akan memberikan efek amplifikasi pada Bergeraknya sektor pariwisata di kawasan ini.

Dibukanya Sekolah Kopi di Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat, merupakan inovasi yang layak mendapat apresiasi. Sekolah ini bisa menjadi sarana agro-eduwisata, yaitu wisata berbasis pendidikan komoditas kopi. Peserta bisa belajar tentang pembibitan, penanaman, hingga penyangraian dan penyajian kopi. Politeknik Negeri Lampung (Polinel) juga terhitung antisipatif dengan membuka program studi baru, yaitu D-4 Pengelolaan Perkebunan Kopi, dan telah menerima mahasiswa sejak tahun ajaran 2022/2023.

Pendekatan berbasis kawasan itu harus diiringi dengan transformasi menyeluruh jika Lampung ingin mewujudkan Visi 2045: "Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan". Transformasi itu meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan digital.

Berdirinya perusahaan pengolahan nanas terbesar ketiga di dunia (Great Giant Pineapple) di Lampung bisa menjadi contoh keberhasilan transformasi tersebut. Pabrik pengolahan nanas modern dengan kapasitas pengolahan sampai 750 ribu metrik ton per tahun itu menerapkan *integrated farming system*: mengintegrasikan

pabrik dengan perkebunan dan produksi kaleng, hingga pemanfaatan limbah berupa kulit nanas untuk makanan sapi, bahkan sampai ke produksi biogas dari kotoran sapi.

Perusahaan itu juga mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap proses, seperti *precision agriculture* (penggunaan *drone*, *Internet of Things*) dan *e-grower* (petani mitra). Ini menarik karena perusahaan bisa melacak (prinsip *traceability*) seluruh proses (penanaman, *harvesting*, *processing*). Dengan begitu, tak ada hasil perkebunan yang busuk hingga harus dibuang.

Dengan sistem terintegrasi itu, ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Produktivitas, daya saing yang tinggi, digitalisasi pasar, serta tumbuhnya pusat ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan pun menjadi niscaya.

• • •

Salah satu sektor yang bisa menjadi penggerak ekonomi di masa depan adalah pariwisata. Inilah "cangkang baru" yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung, yang telah tumbuh positif dari 2,79 persen pada 2021 menjadi

4,28 persen pada 2022.

Pertumbuhan positif dari tahun ke tahun terjadi seiring dengan adanya kemajuan ekonomi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Tingkat pengangguran terbuka sepanjang 2005-2022 menunjukkan perbaikan dengan tren yang makin menurun, dari 8-9 persen menjadi 4,52 persen. Ini mengisyaratkan bahwa kesempatan kerja penduduk juga terus membaik.

Jika sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan, kebijakan dan program ketenagakerjaan harus difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, seperti pelatihan keterampilan bahasa, pelayanan, dan manajemen pariwisata. Usaha industri kecil-mikro yang *men-support* dunia pariwisata juga harus mendapat perhatian khusus.

Selama ini, industri kecil-mikro yang diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat justru menyusut. Data BPS mencatat bahwa jumlah industri ini menurun dari sekitar 99 ribu unit (2017) menjadi 84 ribu unit (2021). Tak ada pilihan lain, industri kreatif yang menjadi penopang utama dunia pariwisata harus ditumbuhkan, dan itu hanya bisa terjadi jika usaha kecil dan menengah bergerak berderap.

Secara geografis, Provinsi Lampung memiliki posisi strategis. Menjadi pintu masuk Pulau Sumatera, Lampung bisa “membelokkan” arus orang yang hendak bergerak ke provinsi-provinsi lain di belahan utara. Destinasi wisata di sepanjang Jalur Lintas Timur dan Jalur Lintas Barat kini mulai bertebaran.

Telah berfungsinya jalan tol dari Pelabuhan Bakauheni ke Palembang, Sumatera Selatan, juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi waktu tempuh menuju *spot-spot* wisata. Pembangunan serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, rel kereta api, bandar udara, dan pelabuhan akan memperlancar arus barang dan orang serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah tinggal menyiapkan transportasi publik yang efisien serta mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan industri dan pariwisata. Salah satu infrastruktur pendukung yang penting adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bisa memastikan konektivitas digital yang cepat dan andal. Ini termasuk memperluas jaringan internet, menyediakan Wi-Fi gratis di tempat umum, serta memperkuat aksesibilitas internet di daerah-daerah terpencil.

Kata kuncinya adalah membaiknya sarana infrastruktur ko-

Tahun	Wisatawan		Total
	NUSANTARA (Pergerakan)	MANCANEGERA (Kunjungan)	
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	7.381.774	155.053	7.536.827
2017	11.395.827	245.372	11.641.199
2018	13.933.207	274.742	14.207.949
2019	10.445.855	298.063	10.743.918
2020	2.911.406	1.647	2.913.053
2021	2.937.395	1.757	2.939.152
2022	4.597.534	7.014	4.604.548
2023	14.266.430	81.106	14.347.536

Tabel 12. Perkembangan jumlah wisatawan ke Provinsi Lampung Tahun 2016-2023

SUMBER: BPS

nektivitas serta kualitas akses moda transportasi. Kreativitas menyelenggarakan event-event pariwisata menjadi pekerjaan rumah berikutnya, demi menghidupkan rencana pengembangan pariwisata yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

RTRW pengembangan pariwisata Lampung antara lain diarahkan pada (1) pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi Bakauheni Harbour City, (2) pengembangan wisata Pantai Barat Lampung yang terintegrasi dengan kawasan Teluk Lampung dan

Danau Ranau, serta (3) pengembangan kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan kembali menghidupkan Lampung Safari Way Kambas Park and Conservation Center.

Danau Ranau, yang terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, sudah dikembangkan menjadi obyek wisata sejak 1972. Danau terbesar kedua di Sumatera (setelah Danau Toba) itu terbentuk dari gempa besar dan letusan vulkanis gunung berapi. Wisata alam yang selama ini diminati adalah pemandangan

danau yang biru, Pulau Mariza di tengah danau, dan pemandian air panas.

Integrasi wisata Danau Ranau dengan wisata Pantai Barat Lampung, juga kolaborasi dengan program wisata pemerintah OKU Selatan, tentu akan lebih memacu jumlah kunjungan ke wilayah ini. Festival kesenian atau folklor yang mengeksplorasi cerita legenda terbentuknya danau—yaitu pertempuran pendekar pedang dengan sepasang naga—bisa menjadi daya tarik baru. Begitu pula kawasan danau yang dapat menjadi ajang *sport tourism*—bisa diperluas tak sekadar sebagai ajang olahraga balap sepeda dan motor trail.

Di Kabupaten Pesisir Barat, eksotisme yang lebih memikat tersaji. Pesisir Barat memiliki garis pantai yang panjang dan ombak yang kuat. Pantai Tanjung Setia, misalnya, selalu menjadi ajang kompetisi surfing internasional tiap tahun. Namanya *World Surfing League (WSL) Krui Pro*.

Kompetisi selancar ini diminati atlet profesional luar negeri. Pesertanya selalu bertambah. Dari 212 peserta pada 2022 meningkat menjadi 259 pada 2023, dan tahun ini tercatat mencapai 265 peserta. Krui dan Nias dikenal sebagai salah satu *spot surfing* favorit para peselancar dunia.

Lalu ada Teluk Kiluan di Kabupaten Tanggamus, yang berja-

rak tempuh hanya tiga jam dari Bandar Lampung. Teluk Kiluan adalah surga tersembunyi dengan pemandangan pantai, kekayaan terumbu karang, dan ikan hias yang terlihat jelas. Satu lagi yang paling menarik wisatawan untuk datang adalah ratusan lumba-lumba jenis hidung botol dan paruh panjang yang menghuni pantai. Ini mengingatkan kita pada wisata lumba-lumba di Pantai Lovina di utara Bali yang mendatangkan ratusan ribu turis.

Di wilayah selatan, selain wisata Gunung Anak Krakatau dan wisata Pantai Marina Kalianda, ada pantai baru yang belum lama dibuka: Rio by the Beach, yang hanya berjarak tempuh satu jam dari Pelabuhan Bakauheni via jalan tol. Lalu ada lagi Pantai Minang Rua di Kecamatan Bakauheni, yang punya wilayah konservasi dan desa wisata yang masuk 75 Besar Desa Wisata Terbaik 2023.

Di wilayah timur, tepatnya di Rajabasa Lama, Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, terdapat kawasan konservasi yang begitu dikenal: Taman Nasional Way Kambas. Kawasan pelestarian ini berdiri sejak 1936 dan diresmikan sebagai taman nasional oleh Menteri Kehutanan pada 1999.

Selain sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, taman nasional ini melestarikan fauna khas Sumatera lainnya, seperti tapir,

enam jenis primata, kijang, harimau Sumatera, beruang madu, serta badak Sumatera. Total populasi gajah di area taman nasional ini 313 ekor. Taman Nasional Way Kambas dengan luas 125 ribu hektare ini pun menjadi sekolah gajah pertama di Indonesia.

Taman nasional itu ditutup saat pandemi Covid-19 dan baru dibuka kembali tahun ini. Sebelumnya, digelar secara rutin Festival Way Kambas, acara promosi pariwisata, seni, dan budaya Lampung demi menggaet kunjungan pelancong dan pencinta kawasan konservasi.

Berbagai potensi alam berupa keindahan pantai, laut, danau, gunung, dan taman nasional itu akan menggerakkan industri pariwisata, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi daerah yang meninggi. Industri kreatif, industri agro, industri pengolahan, dan industri jasa akan ikut terkerek.

Angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara sejak 2016 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Kendati jumlah kunjungan pelancong asing kurang dari 100 ribu orang pada 2023, jumlah itu meningkat 10 kali lipat lebih dibanding masa pandemi. Nilai totalnya mencapai lebih dari 14 juta pada 2023, melonjak lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun 2022.

Tabel 12 menunjukkan data

yang ditampilkan tim peneliti.

Ihwal rata-rata tamu menginap di hotel berbintang di Lampung, lama tamu menginap pada 2011-2022 hanya dua-tiga hari. Sedangkan rata-rata lama tamu domestik menginap di hotel berbintang sepanjang 2005-2022 berada pada kisaran satu-dua hari. Durasi waktu tinggal yang lebih lama dan banyaknya uang pelancong yang dibelanjakan semestinya menjadi target bersama.

Ke depan, kian dominannya generasi Z mengisi struktur demografi penduduk juga akan mengubah peta potensi 13 kabupaten dan dua kota di Provinsi Lampung. Pada 2020 saja, generasi Z memiliki proporsi terbesar dibanding generasi lainnya, yaitu mencapai 31,95 persen dari total jumlah penduduk usia produktif. Sedangkan generasi Y mencapai 30,51 persen, generasi X berjumlah 24,82 persen, dan generasi *baby boomer* hanya 12,72 persen.

Ketika penduduk Lampung mencapai 10 juta jiwa pada 2030, generasi Z akan memberikan dampak yang luar biasa. Boleh jadi sektor-sektor tradisional akan ditinggalkan dan berganti dengan industri kreatif yang menjadi *leading sector*. Sektor-sektor baru yang lebih bertumpu pada kekuatan industri digital akan memasuki musim panen raya berikutnya.

## Vokasi Menuju Indonesia Emas 2045

Sektor pertanian dan pariwisata, berdasarkan hasil analisis tim peneliti Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah, memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Provinsi Lampung.

Pada sektor pertanian, tren digitalisasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan muncul sebagai *driver* utama yang akan membentuk lanskap sektor ini di masa depan.

Sedangkan di sektor pariwisata, pengembangan wisata bahari dan *agro-ecotourism*, didukung peningkatan *soft skill* seperti penguasaan bahasa asing dan komunikasi bisnis, diidentifikasi sebagai kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi pariwisata daerah.

Tren peningkatan PDRB Provinsi Lampung yang konsisten sejak 2010 hingga 2022 menumbuhkan optimisme dan harapan bahwa pertumbuhan stabil itu akan berlanjut hingga Indonesia Emas 2045. Saat ini, ekonomi Lampung tumbuh dari 2,79 persen pada 2021 menjadi 4,28 persen pada 2022.

Penurunan tingkat pengangguran vokasi dari sekitar 10 persen pada 2010 menjadi 6 persen pada

2022 menunjukkan perbaikan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja vokasi. Peningkatan penerimaan siswa pendidikan vokasi, yang mencapai sekitar 50 ribu siswa pada 2022, juga menunjukkan minat yang tumbuh terhadap pendidikan vokasi.

Jika tren itu berlanjut, kita dapat memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran vokasi di Lampung bisa mencapai level yang sangat rendah, mungkin di bawah 3 persen, pada 2045. Hal ini mengindikasikan potensi terciptanya keseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja vokasi di masa depan.

Korelasi positif antara peningkatan jumlah tenaga kerja vokasi dan pertumbuhan PDRB menunjukkan investasi dalam pendidikan vokasi memberikan hasil yang nyata bagi perekonomian Lampung.

Namun, perlu diingat, pencapaian ini akan bergantung pada kemampuan sistem pendidikan vokasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang dinamis. Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan kecerdasan buatan mungkin akan mengubah lanskap ketenagakerjaan secara dramatis.

Karena itu, sistem pendi-



*Event wisata tahunan Pawai Festival Skala Brak Lampung Barat di Liwa, Lampung Barat, Lampung. Dok TEMPO/Amston Probel*

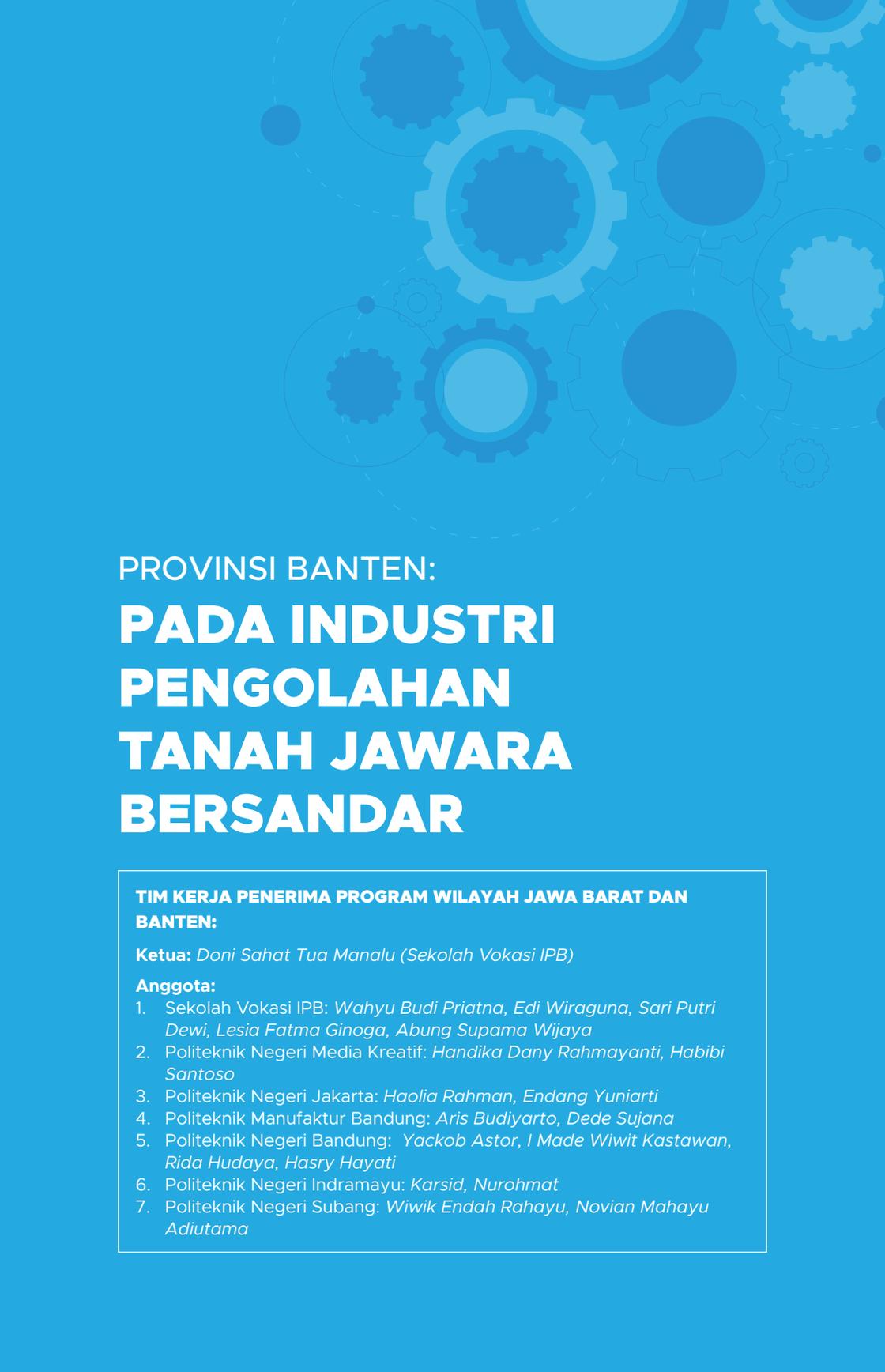
dikan vokasi di Lampung harus mampu beradaptasi dengan cepat, mungkin dengan memperkenalkan kurikulum yang berfokus pada keterampilan yang tidak mudah diotomatisasi, seperti kreativitas, pemecahan masalah kompleks, dan kecerdasan emosional.

Penting pula untuk memastikan bahwa manfaat dari pengembangan pendidikan vokasi terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Lampung. Ini mungkin memerlukan investasi khusus dalam infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan program-program untuk meningkatkan akses

terhadap teknologi digital.

Untuk mewujudkan proyeksi positif ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Kebijakan yang mendukung pengembangan pendidikan vokasi, fleksibilitas sistem pendidikan yang terus memperbarui kurikulum sesuai dengan perkembangan teknologi, juga insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan karyawan, serta program-program kemitraan antara sekolah vokasi dan industri akan menjadi kunci keberhasilan.





PROVINSI BANTEN:  
**PADA INDUSTRI  
PENGOLAHAN  
TANAH JAWARA  
BERSANDAR**

**TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH JAWA BARAT DAN BANTEN:**

**Ketua:** *Doni Sahat Tua Manalu (Sekolah Vokasi IPB)*

**Anggota:**

1. Sekolah Vokasi IPB: *Wahyu Budi Priatna, Edi Wiraguna, Sari Putri Dewi, Lesia Fatma Ginoga, Abung Supama Wijaya*
2. Politeknik Negeri Media Kreatif: *Handika Dany Rahmayanti, Habibi Santoso*
3. Politeknik Negeri Jakarta: *Haolia Rahman, Endang Yuniarti*
4. Politeknik Manufaktur Bandung: *Aris Budiarto, Dede Sujana*
5. Politeknik Negeri Bandung: *Yackob Astor, I Made Wiwit Kastawan, Rida Hudaya, Hasry Hayati*
6. Politeknik Negeri Indramayu: *Karsid, Nurohmat*
7. Politeknik Negeri Subang: *Wiwik Endah Rahayu, Novian Mahayu Adiutama*

*Banten pernah berjaya di sektor perdagangan pada masa silam. Perannya tergantikan oleh industri pengolahan, yang memiliki peran sangat strategis dalam perekonomian Banten saat ini. Lapangan usaha itu memberikan kontribusi terbesar pada PDRB provinsi ini.*

Banten menyanggah nama harum di masa silam. Dengan posisi yang strategis di ujung barat Pulau Jawa, Banten pernah ke-sohor sebagai salah satu pusat perdagangan rempah-rempah di Nusantara—sejak abad ke-16, ketika Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1631-1692). Pada masa itu, Banten tidak hanya menjadi pusat penyebaran agama Islam, tapi juga pusat perdagangan dunia dengan pelabuhannya yang sibuk.

Banten juga menjadi wilayah penting pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Seperti dikutip situs web resmi Pemerintah Provinsi Banten, di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811), pemerintah kolonial membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung Kulon. Daendels juga menjadikan Anyer sebagai titik nol proyek pembangunan jalan raya trans-Jawa hingga ke Panarukan, Jawa Timur.

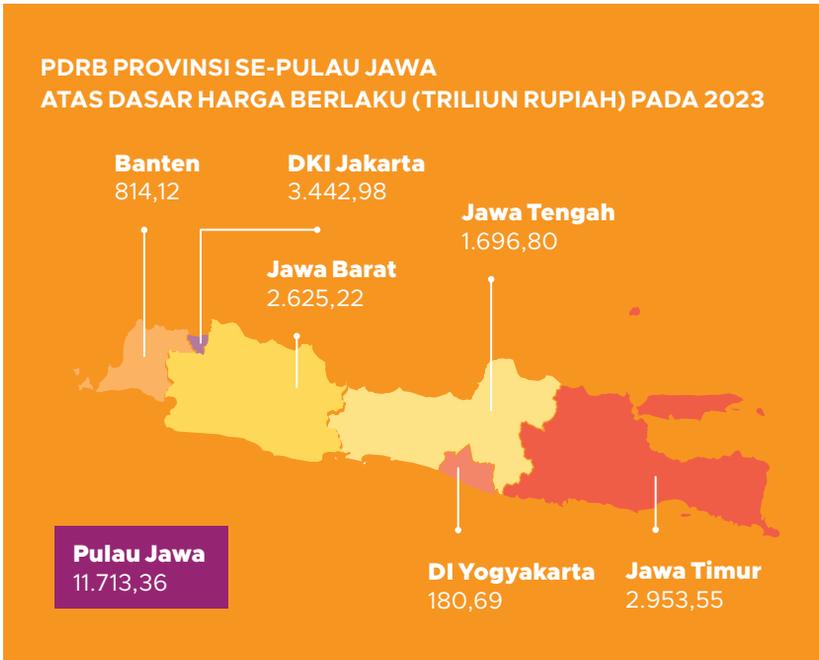
Pengaruh perekonomian dunia terhadap perekonomian Banten masih cukup kuat hingga kini.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat, salah satu faktor yang memengaruhi adalah besarnya volume impor bahan baku dan ekspor produk industri pengolahan dari provinsi ini.

Ya, perdagangan tak lagi menjadi penopang utama perekonomian provinsi paling muda di Pulau Jawa ini. Lapangan usaha industri pengolahan kini menjadi kontributor utama perekonomian provinsi yang mendapat julukan Tanah Jawara ini—karena Banten dikenal sebagai gudang pendekar ilmu bela diri, terutama silat.

## **Potensi dan Keunggulan Wilayah**

Perekonomian provinsi yang berpisah dari Jawa Barat pada 4 Oktober 2000 itu tumbuh 4,81 persen pada 2023. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai 5,03 persen. Produk domestik regional bruto (PDRB) Banten atas dasar harga berlaku pada 2023 mencapai Rp 814,12 triliun, naik 8,95 persen dari tahun sebelum-



**SUMBER:** BPS Provinsi Banten

nya yang Rp 747,22 triliun.

Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Banten pada 2023 adalah industri pengolahan, yang menyumbang Rp 246.265,69 miliar atau 30,25 persen. Meski tidak lagi menjadi penopang utama perekonomian Banten, sektor perdagangan masih mampu menempati posisi kedua, dengan kontribusi Rp 101.006,64 miliar (12,41 persen). Selanjutnya, sektor konstruksi menyumbang Rp 95.666,94 miliar (11,75 persen), transportasi dan pergudangan Rp 90.542,70 miliar (11,12 persen), dan *real estate* Rp 64.183,34 miliar (7,88 persen).

Dengan luas wilayah 8.651,2 kilometer persegi—hanya lebih luas dari Daerah Istimewa Yogyakarta—Banten memang kalah dari provinsi lain di Pulau Jawa. Dengan PDRB sebesar Rp 814,12 triliun pada 2023, Banten hanya unggul dari Yogyakarta, yang memiliki PDRB Rp 180,69 triliun.

Potensi sektor-sektor unggulan tersebut juga tergambar dalam hasil penelitian oleh konsorsium tujuh perguruan tinggi vokasi (PTV) di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Penelitian dengan metode *horizon scanning* atau pendeteksian dini dan *focus group discussion* (FGD) dengan pemangku kepen-

**PDRB KABUPATEN/KOTA DI BANTEN  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU (TRILIUN RUPIAH) PADA 2023**



**SUMBER:** BPS Provinsi Banten

tingan di Banten tersebut merupakan bagian dari Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah.

Program tersebut diselenggarakan selama sepuluh bulan, sejak Agustus 2023 hingga Mei 2024, di empat kabupaten dan empat kota di Banten. Program itu merupakan kajian yang menyinergikan kemitraan dan penyesuaian antara satuan pendidikan vokasi dan pemangku kepentingan di daerah untuk menghasilkan ringkasan kebijakan yang berisi *workforce planning* dan *innovation planning* guna menghasilkan kluster inovasi

berbasis potensi atau kebutuhan daerah.

Konsorsium PTV menganalisis berbagai lapangan usaha di Banten dengan metode *forward linkage* (FL) atau daya penyebaran dan *backward linkage* (BL) atau derajat kepekaan. Daya penyebaran dan derajat kepekaan digunakan untuk melihat keterkaitan antarsektor serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dalam perekonomian dan kemampuannya dalam menggerakkan sektor riil.

Hasilnya menunjukkan nilai FL dan BL tertinggi memang tidak dimiliki salah satu dari tujuh sub-lapangan usaha industri pengo-

### PDRB BANTEN ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (MILIAR RUPIAH) PADA 2023



SUMBER: BPS Provinsi Banten

lahan. Namun besaran keterkaitan antarsektornya, baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang, dari ketujuh sublapangan usaha industri pengolahan dan sektor lainnya sudah mencapai angka di atas 1. Artinya, untuk setiap 1 persen kenaikan suplai atau permintaan terhadap produk industri pengolahan, *output* perekonomian Banten secara keseluruhan akan meningkat lebih tinggi lagi, yakni menjadi di atas 1 persen.

Bila nilai FL dan BL dari berbagai lapangan usaha terse-

but dibandingkan dengan nilai rata-ratanya yang masing-masing mencapai 1,3452, diperoleh derajat kepekaan *forward linkage* (DFL) dan daya penyebaran *backward linkage* (DBL). Dengan menggunakan nilai DFL dan DBL ini, akan ditentukan lapangan usaha mana saja yang menjadi sektor unggulan.

Merujuk pada hasil penghitungan tersebut, terdapat tujuh lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan karena memiliki nilai DFL dan DBL yang melebihi

angka 1. Ketujuh lapangan usaha itu adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kertas dan barang dari kertas, percetakan; industri kimia, farmasi, dan obat; serta industri logam dasar.

Berdasarkan hal ini, industri pengolahan memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Banten, karena tiga di antara tujuh sektor unggulan tersebut merupakan bagian dari sektor industri pengolahan. Ketiganya adalah sublapangan usaha industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman.

Hasil dari identifikasi sektor-sektor unggulan menunjukkan Banten memiliki basis industri manufaktur yang kuat, terutama di sektor otomotif, tekstil, elektronik, serta makanan dan minuman. Tindak lanjutnya adalah meningkatkan investasi dalam pengembangan industri berbasis teknologi, mendorong kemitraan antara industri dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memberikan insentif bagi industri yang berinovasi dan berkelanjutan.

Selain industri manufaktur, pertanian dan agrobisnis masih

menjadi sektor unggulan di provinsi ini. Potensi besar terdapat dalam subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tindak lanjutnya adalah memperkuat infrastruktur pertanian, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani, serta mendorong inovasi teknologi di sektor ini.

Potensi pariwisata di Banten juga cukup besar, terutama di sektor wisata alam, budaya, dan sejarah. Tindak lanjutnya adalah meningkatkan promosi pariwisata, meningkatkan infrastruktur pariwisata, seperti aksesibilitas transportasi dan akomodasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan.

Sektor infrastruktur dan konstruksi juga menjadi salah satu unggulan Banten. Pembangunan infrastruktur di provinsi ini terus berkembang, termasuk pembangunan jalan, bandar udara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Tindak lanjutnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memastikan pengembangan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Adapun sektor teknologi informasi dan komunikasi menjadi makin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Tindak lanjutnya adalah meningkatkan aksesibilitas internet dan



*Seorang pekerja beraktifitas di Pellet Stock Yard PT.Krakatau Steel, Cilegon, Banten. Dok TEMPO/Seto Wardhana*

teknologi informasi di seluruh wilayah, memberikan pelatihan dan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan teknologi, serta mendorong inovasi dan kreativitas di sektor ini.

Pemerintah setempat perlu menindaklanjutinya dengan merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan ini, mengalokasikan sumber daya yang memadai, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Banten.

## **Sebaran Potensi dan Keunggulan Wilayah**

Hasil analisis konsorsium PTV juga menggambarkan kondisi umum potensi, keunggulan, dan peluang pengembangan pada setiap kabupaten/kota di Banten yang didapatkan berdasarkan hasil FGD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap kabupaten/kota, dan dokumen pemerintahan lainnya dari setiap wilayah tersebut.

Dalam kurun 2019-2023, perkembangan ekonomi di Banten menunjukkan tren yang dinamis dengan berbagai sektor unggulan yang menjadi motor penggerak pertumbuhan di setiap daerah. Kota Cilegon, Kabupaten Serang,

Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang masing-masing memiliki keunggulan dan potensi yang khas.

Setiap daerah berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Banten. Identifikasi sektor-sektor unggulan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kekuatan ekonomi lokal, tapi juga mengungkap peluang pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut.

Kota Cilegon, misalnya, dikenal sebagai pusat industri baja di Indonesia, dengan Krakatau Steel sebagai perusahaan andalan yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Industri baja di Cilegon tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan bagi ribuan warga, tapi juga memicu perkembangan industri pendukung, seperti pabrik kimia dan manufaktur.

Sektor petrokimia di Cilegon berkembang pesat dengan kehadiran berbagai perusahaan kimia besar. Infrastruktur pelabuhan yang baik, yang mendukung aktivitas ekspor-impor, memperkuat posisi Cilegon sebagai salah satu kota industri terpenting di Indonesia.

Sebagai ibu kota Banten, Kota Serang memiliki sektor perdagangan dan jasa yang cukup do-

minan. Kehadiran pusat-pusat pemerintahan dan pendidikan tinggi mendorong perkembangan sektor jasa, termasuk jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Kota Serang juga memiliki beberapa kawasan industri yang mendukung perekonomian lokal. Pengembangan infrastruktur terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing kota ini. Sedangkan Kabupaten Serang memiliki keunggulan di sektor industri, yang berkembang dengan adanya beberapa kawasan industri.

Kemudian, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah dengan perkembangan industri dan manufaktur yang pesat, dengan Kawasan Industri Jatake dan Kawasan Industri Manis menjadi pusat bagi berbagai perusahaan nasional dan multinasional.

Sektor perdagangan dan jasa juga berkembang pesat di kabupaten ini, terutama di kawasan perumahan baru, yang terus bermunculan. Investasi di bidang infrastruktur seperti jalan tol dan fasilitas umum turut mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang.

Sedangkan Kota Tangerang memiliki sektor perdagangan dan jasa yang kuat, dengan banyak pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran yang menarik banyak pengunjung. Industri manufaktur juga menjadi sektor unggulan de-

ngan kehadiran berbagai pabrik dan perusahaan yang beroperasi di wilayah ini. Proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan peningkatan jaringan transportasi publik terus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kota Tangerang terletak di sebelah barat Jakarta dan memiliki akses yang baik ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta serta Pelabuhan Merak. Kondisi itu menjadikan kota ini pusat transportasi penting di wilayah metropolitan Jakarta.

Adapun Kota Tangerang Selatan dikenal dengan perkembangan industri kreatif serta sektor perdagangan dan jasa. Keberadaan pusat-pusat perbelanjaan modern dan kawasan perumahan elite menjadikan perdagangan dan jasa sebagai sektor yang sangat dominan. Kota ini juga menjadi pusat pendidikan dengan banyaknya universitas dan lembaga pendidikan tinggi di sana. Sektor industri kreatif, termasuk desain, teknologi informasi, dan media, juga berkembang pesat, menciptakan banyak peluang bagi generasi muda.

### **Kondisi Angkatan Kerja**

BPS mencatat penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) di Banten pada Agustus 2023

mencapai 9,26 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 5,97 juta orang, sedangkan sisanya yang bukan angkatan kerja sebanyak 3,29 juta orang. Komposisi angkatan kerja adalah 5,52 juta orang bekerja dan 448,43 ribu penganggur. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2023 sebesar 7,52 persen, turun 0,57 persen dibandingkan dengan Agustus 2022.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurun dibandingkan dengan Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 64,44 persen, turun 0,28 persen dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya. TPAK adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah.

Sebagian besar dari mereka bekerja di tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Banten, yaitu perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (21,51 persen), industri pengolahan (21 persen), serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (12,01 persen).

Selama Agustus 2022 hingga Agustus 2023 terjadi perubahan lapangan pekerjaan penyerap tenaga kerja terbesar. Dibandingkan

Kabupaten/ Kota	Potensi dan Keunggulan	Peluang Pengembangan
Kota Cilegon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Strategis: terletak antara Jakarta dan Merak, memiliki akses langsung ke Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Cigading.</li> <li>• Kawasan Industri: sektor manufaktur, kimia, dan logistik.</li> <li>• Sumber Daya Alam: tambang mineral dan bahan baku industri seperti batu bara, nikel, dan baja</li> <li>• Infrastruktur: pembangunan infrastruktur telah meningkatkan konektivitas dan memperkuat basis industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri dan manufaktur</li> <li>• Energi</li> <li>• Perdagangan dan jasa</li> </ul>
Kota Serang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pemerintahan: adanya kantor-kantor pemerintah, lembaga negara, dan pusat administrasi regional.</li> <li>• Infrastruktur: pembangunan infrastruktur telah meningkatkan konektivitas dan memperkuat basis industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan dan jasa</li> <li>• Transportasi dan pergudangan</li> </ul>
Kabupaten Serang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Transportasi: di jalur utama antara Jakarta dan Pelabuhan Merak.</li> <li>• Pariwisata memiliki potensi pariwisata alam yang menarik, seperti pantai yang indah, pegunungan, dan situs-situs sejarah dan budaya.</li> <li>• Memiliki kondisi geografis yang cocok untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan angin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri dan manufaktur</li> <li>• Energi</li> <li>• Perdagangan dan jasa</li> </ul>
Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Strategis: Kota Tangerang terletak di sebelah barat Jakarta dan memiliki akses yang baik ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta Pelabuhan Merak, menjadikannya pusat transportasi yang penting di wilayah metropolitan Jakarta.</li> <li>• Pusat Industri dan Manufaktur: Kota ini merupakan pusat industri dan manufaktur yang berkembang pesat, dengan adanya berbagai kawasan industri seperti Kawasan Industri Bukit Nusa Indah dan Kawasan Industri Manis II. Ini menjadikan Kota Tangerang sebagai destinasi utama bagi investasi industri dan bisnis.</li> <li>• Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, transportasi umum, dan fasilitas publik telah meningkatkan konektivitas dan memperkuat basis ekonomi Kota Tangerang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri dan manufaktur</li> <li>• Perdagangan dan jasa</li> </ul>
Kabupaten Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Industri yang Berkembang: Kawasan Industri Modern Cikupa.</li> <li>• Infrastruktur yang Mendukung: pembangunan infrastruktur meningkatkan konektivitas dan memperkuat basis ekonomi Kabupaten Tangerang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri dan manufaktur</li> <li>• Perdagangan dan jasa</li> </ul>
Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Bisnis dan Perdagangan: banyak pusat bisnis dan perdagangan yang berkembang pesat.</li> <li>• Infrastruktur yang Mendukung: pembangunan infrastruktur telah meningkatkan konektivitas dan memperkuat basis ekonomi Kota Tangerang Selatan.</li> <li>• Kawasan Hijau dan Rekreasi: memiliki banyak taman dan kawasan hijau yang menawarkan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi penduduknya, serta berbagai tempat rekreasi dan wisata yang menarik untuk dikunjungi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri kreatif</li> <li>• Perdagangan dan jasa</li> </ul>
Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Alam Melimpah: memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, tambang, dan lahan pertanian.</li> <li>• Pengembangan Infrastruktur: Adanya proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan peningkatan akses transportasi dapat meningkatkan konektivitas dan membuka peluang ekonomi baru di wilayah ini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian dan perkebunan</li> <li>• Kerajinan dan industri</li> </ul>

Kabupaten Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi Pertanian dan Perkebunan: Wilayah ini memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, yang cocok untuk berbagai komoditas pertanian seperti padi, jagung, kelapa, dan kakao.</li> <li>• Budaya dan Kearifan Lokal: memiliki budaya lokal yang kaya dan beragam, termasuk tradisi seni dan budaya masyarakat Banten yang masih lestari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian dan perkebunan</li> <li>• Industri kreatif</li> </ul>
----------------------	--	--

Tabel 13. Daftar Potensi dan Keunggulan pada Kabupaten/Kota di Banten

dengan Agustus 2022, lapangan pekerjaan di sektor konstruksi meningkat paling besar, dari 5,95 persen menjadi 7,08 persen. Sedangkan lapangan pekerjaan di industri pengolahan menurun paling besar, yaitu dari 23,04 persen menjadi 21 persen.

Jumlah penduduk bekerja masih didominasi tamatan sekolah dasar (SD) ke bawah (tidak atau belum pernah bersekolah, belum tamat SD, atau tamat SD), yaitu sebesar 32,27 persen. Adapun penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan perguruan tinggi sebesar 13,96 persen.

Hasil analisis konsorsium PTV terhadap pekerja lulusan vokasi menunjukkan jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Banten pada 2020 meningkat sekitar 13,29 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 3.316 perusahaan. Tenaga kerja yang diserap perusahaan tersebut mencapai 709.851 orang.

Di Banten terdapat program pendidikan vokasi industri sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Vokasi, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang kom-

peten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sejak program tersebut diluncurkan, tingkat kontribusi tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi di Banten mencapai sekitar 130 ribu orang.

Konsorsium PTV menilai membangun ekosistem kemitraan antara pendidikan vokasi dan dunia industri menjadi sebuah kebutuhan. Pengembangan program studi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah vokasi akan makin terbuka dengan adanya kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan dunia industri.

Posisi Banten yang sangat strategis, karena berdampingan dengan Ibu Kota dan kota bisnis Jakarta, menjadi potensi luar biasa di masa depan. Banten menjadi penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa serta memiliki perkembangan wilayah yang pesat. Pemprov berharap ada politeknik negeri di Banten, karena saat ini hanya terdapat politeknik di bawah Kementerian Perindustrian.

## EKOSISTEM KEMITRAAN UNTUK PERTUMBUHAN

Banten memiliki potensi daerah yang besar di sektor industri manufaktur, energi, kimia, serta perdagangan dan jasa. Namun potensi tersebut belum diimbangi dengan tingkat inovasi dan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai. Inovasi di provinsi ini masih berfokus pada pelayanan publik dan pemerintahan.

Provinsi Banten memang sudah menerapkan kebijakan pendidikan gratis, tetapi penerapannya terhalang keterbatasan dana dan sumber daya. Penurunan mentalitas dan keterampilan generasi muda dalam bekerja di sektor potensial memperburuk kondisi ini.

Buruknya kualitas data dan kerangka berpikir masyarakat yang belum partisipatif juga menghambat pertumbuhan. Potensi daerah masih dapat dimaksimalkan apabila kualitas sumber daya manusianya juga ditingkatkan, terutama SDM vokasi, disertai dengan sinergi antara pemerintah serta dunia usaha dan industri.

Pendekatan *foresight* dan *system dynamics* digunakan untuk memahami konteks, fokus, pengumpulan dan analisis data, identifikasi tren, pengembangan skenario, evaluasi dan validasi skenario, serta pengembangan

strategi dan implementasi. Hasil dari *system dynamics* menunjukkan peningkatan investasi dalam pendidikan vokasi dan teknologi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun melalui pendekatan *foresight* teridentifikasi dua dari enam pendorong perubahan, yaitu adopsi teknologi serta pengangguran dan stabilitas sektor tradisional, dalam mengembangkan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah di Banten.

Adopsi teknologi menjadi penting karena dominasi sektor industri dan energi sebagai potensi daerah Banten memerlukan teknologi canggih yang berkelanjutan. Adopsi teknologi tinggi meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, yang akan membuat Banten mampu bersaing baik di pasar nasional maupun global. Industri juga bisa berkembang pesat dengan dukungan sumber daya manusia yang sesuai atau bahkan melebihi kebutuhan industri.

Program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah ini berperan penting da-



*Proyek pembangunan saluran pipa panas di Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Cilegon, Banten. Dok TEMPO/STR/Dasril Roszandi*

lam mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan pengembangan ekonomi lokal. Fokus utamanya adalah perencanaan tenaga kerja

dan inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.



BEKASI

DEPOK

KARAWANG

SUBANG

INDRAMAYU

BOGOR

PURWAKARTA

CIREBON

SUMEDANG

MAJALENGKA

BANDUNG  
BARAT

CIMAHU

KUNINGAN

SUKABUMI

BANDUNG

CIAMIS

CIANJUR

GARUT

BANJAR

TASIKMALAYA

PANGANDARAN



# PROVINSI JAWA BARAT: **DARI PERKEBUNAN HINGGA INDUSTRI PENGOLAHAN**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH JAWA BARAT DAN BANTEN:**

**Ketua:** *Doni Sahat Tua Manalu (Sekolah Vokasi IPB)*

### **Anggota:**

1. Sekolah Vokasi IPB: *Wahyu Budi Priatna, Edi Wiraguna, Sari Putri Dewi, Lesia Fatma Ginoga, Abung Supama Wijaya*
2. Politeknik Negeri Media Kreatif: *Handika Dany Rahmayanti, Habibi Santoso*
3. Politeknik Negeri Jakarta: *Haolia Rahman, Endang Yuniarti*
4. Politeknik Manufaktur Bandung: *Aris Budiarto, Dede Sujana*
5. Politeknik Negeri Bandung: *Yackob Astor, I Made Wiwit Kastawan, Rida Hudaya, Hasry Hayati*
6. Politeknik Negeri Indramayu: *Karsid, Nurohmat*
7. Politeknik Negeri Subang: *Wiwik Endah Rahayu, Novian Mahayu Adiutama*

*Pertanian dan perkebunan di Jawa Barat memiliki potensi besar karena didukung kondisi geografis dan ekosistem yang cocok untuk pengembangan berbagai komoditas. Namun industri pengolahan masih menjadi penopang utama perekonomian provinsi ini.*

Jawa Barat dianugerahi tanah yang subur. Wilayah yang dikenal juga dengan sebutan Tatar Pasundan ini memiliki tanah dengan tingkat kesuburan relatif baik. Hamparan sawah dan lahan perkebunan membentang di provinsi seluas 37.089,42 kilometer persegi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa ini. Padi, palawija, dan tanaman perkebunan tumbuh subur di mana-mana, memancarkan kekayaan alam yang melimpah.

Dinas Perkebunan Jawa Barat mencatat subsektor perkebunan dengan luas lahan sekitar 498 ribu hektare mengembangkan 30 jenis komoditas. Perkebunan tidak hanya memberikan manfaat dari produk-produknya, tapi juga menawarkan potensi keindahan alam yang dapat dikembangkan menjadi obyek agrowisata.

Lihatlah hamparan kebun teh yang hijau bak gelombang permadani di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Di daerah ini, terdapat setidaknya lima obyek agrowisata kebun teh yang diminati wisatawan, terutama di akhir pekan dan hari libur, yaitu Agrowisata Gu-

nung Mas, Kebun Teh Puncak Pass, Kebun Teh Cisarua, The Ciliwung Great Tea Estate, dan Kebun Teh Riung Gunung.

Berhawa sejuk karena berada di daerah pegunungan dengan ketinggian antara 800 dan 1.200 meter di atas permukaan laut, destinasi wisata tersebut menjadi tujuan pelancong dari kota-kota di sekitar kawasan Puncak, yang mendambakan udara segar dan bebas dari polusi.

Area perkebunan di Jawa Barat yang umumnya berada di kawasan perbukitan atau pegunungan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kawasan perkebunan di Jawa Barat yang sudah dikembangkan atau yang mungkin dikembangkan sebagai obyek agrowisata di antaranya Kawasan Perkebunan Teh Gunung Mas di Puncak, Kabupaten Bogor; Kawasan Perkebunan Teh Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung; Kawasan Perkebunan Teh Ciater-Tangkuban Parahu, Kabupaten Subang; Kawasan Perkebunan Teh Gedeh dan Panyairan, Kabupaten Cianjur; serta Kawasan Perkebunan Teh Goalpara dan



*Warga saat berwisata di kebun teh Puncak. TEMPO/M Taufan Rengganis*

Simpanan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi.

Selain perkebunan teh, di Jawa Barat terhampar perkebunan komoditas seperti kopi, kakao, karet, kelapa sawit, kelapa, tebu, dan tembakau. Beberapa potensi kawasan perkebunan juga sudah dikembangkan menjadi kawasan agrowisata. Salah satunya wisata kebun kopi di Gunung Malabar, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di tempat ini, pelancong diajak mencecap pengalaman dari memetik kopi, mengunjungi tempat pengolahan buah kopi menjadi biji kopi, pengeringan, roasting (pemanggangan), dan penggilingan, hingga menyeduhnya menjadi kopi yang nikmat.

Di masa lalu, kesuburan Tanah Priangan telah menyedot minat kaum kolonial datang ke wilayah ini untuk mengembangkan budi daya perkebunan. Sekitar abad ke-18, kaum kolonial mulai mengembangkan perkebunan kopi, teh, dan kina di wilayah ini. Sebagian lahan perkebunan tersebut masih berproduksi hingga kini.

Jawa Barat juga memiliki hamparan sawah yang produktif. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, Jawa Barat memiliki lahan persawahan seluas 928.218 hektare pada 2019. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat produksi beras daerah ini pada 2022

mencapai 9,43 juta ton, meningkat 3,39 persen dibanding 2021, yang mencapai 9,11 juta ton.

Peningkatan produksi padi tersebut seiring dengan meningkatnya luas panen padi pada 2022 sebesar 1,66 juta hektare atau naik 3,63 persen dibanding tahun sebelumnya. Produksi beras pada 2022 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 5,45 juta ton, naik 184.881 ton atau 3,51 persen dibandingkan dengan produksi beras pada 2021 yang sebesar 5,26 juta ton. Produksi beras tertinggi di Jawa Barat pada 2022 dicapai lima kabupaten, yaitu Indramayu (1.482.255 ton), Karawang (1.226.880 ton), Subang (1.038.780 ton), Cianjur (617.941 ton), dan Majalengka (566.087 ton).

Pertanian di Jawa Barat memiliki potensi besar karena didukung kondisi geografis dan ekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian unggulan pada sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

### **Potensi Wilayah dan Sektor Unggulan**

Dengan produksi perkebunan dan pertanian yang melimpah, tak mengherankan bila sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu penopang perekono-

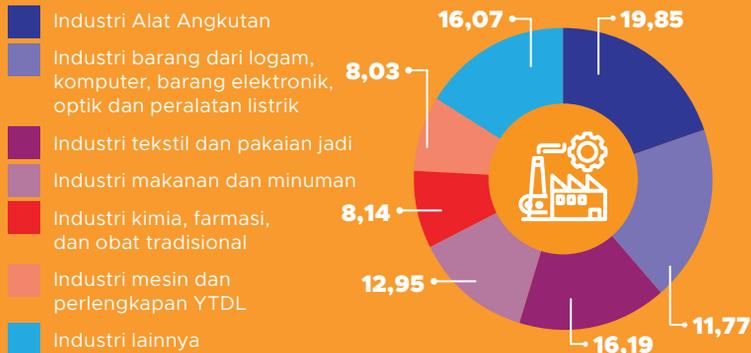
mian Jawa Barat. Menurut data BPS, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Barat.

Potensi sektor tersebut juga tergambar dalam hasil penelitian oleh konsorsium tujuh perguruan tinggi vokasi (PTV) di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Penelitian dengan metode *horizon scanning* atau pendeteksian dini dan *focus group discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan di Jawa Barat tersebut merupakan bagian dari Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah.

Program tersebut diselenggarakan selama 10 bulan sejak Agustus 2023 hingga Mei 2024 di 18 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat. Program itu menyinergikan kemitraan dan penyelarasan antara satuan pendidikan vokasi dan pemangku kepentingan di daerah untuk menghasilkan *policy brief* atau ringkasan kebijakan yang berisi *workforce planning* dan *innovation planning* guna menghasilkan kluster inovasi berbasis potensi atau kebutuhan daerah.

Hasilnya menunjukkan pertanian dan agrobisnis masih menjadi unggulan di Jawa Barat. Potensi besar di sektor ini terdapat dalam subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tin-

**PERAN SUBKATEGORI TERHADAP NILAI TAMBAH KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN DI JAWA BARAT 2022 (PERSEN)**



**SUMBER:** PDRB Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

dan lanjutnya adalah memperkuat infrastruktur pertanian, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani, serta mendorong inovasi teknologi di sektor ini.

Namun sektor ini bukan penopang utama perekonomian Jawa Barat. Dengan kontribusi Rp 113.186,39 miliar atau 8,57 persen, sektor ini berada di urutan keempat penyumbang PDRB Jawa Barat atas dasar harga konstan pada 2022.

Sektor industri pengolahan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2022, yang mencapai 5,45 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional, sebesar 5,31 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada

2022 meningkat hampir 2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang berada di angka 3,74 persen.

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengubah barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan menjadi barang jadi atau setengah jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan.

Nilai perekonomian Jawa Barat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan pada 2022 mencapai Rp 1.589 triliun. Berdasarkan data BPS, sektor yang

## PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN PROVINSI JAWA BARAT 2022 (MILIAR RUPIAH)



**SUMBER:** BPS Jawa Barat

paling banyak berkontribusi juga industri pengolahan. Sektor itu berkontribusi paling tinggi dalam pertumbuhan ekonomi provinsi ini pada 2022 dengan andil sebesar 2,97 persen. Dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga, sebesar 2,81 persen.

Konsorsium PTV menilai hal ini dapat menjadi salah satu poin untuk membangun atau memperluas lapangan usaha, dilihat dari sektor unggulan pada industri

pengolahan, dari pengolahan makanan hingga manufaktur.

Hasil dari identifikasi sektor-sektor unggulan di Jawa Barat menunjukkan Jawa Barat memiliki basis industri manufaktur yang kuat, terutama di sektor otomotif, tekstil, elektronik, serta makanan dan minuman. Tindak lanjutnya adalah meningkatkan investasi dalam pengembangan industri berbasis teknologi, mendorong kemitraan antara industri dan lembaga pendidikan untuk mening-

katkan kualitas tenaga kerja, serta memberikan insentif bagi industri yang berinovasi dan berkelanjutan.

Industri pengolahan menyumbang Rp 683.420,25 miliar atau 42,24 persen pada PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Barat pada 2022. Jumlah tersebut jauh dari sumbangan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, yang berada di urutan kedua dengan Rp 230.532,56 miliar atau 14,41 persen.

Pada rentang 2018-2020, peran industri pengolahan terus menurun, terutama pada 2020 akibat pandemi Covid-19, dan kembali naik pada periode 2021 seiring dengan membaiknya kondisi Jawa Barat pascapandemi. Peran subkategori pada industri pengolahan berubah pada 2022, tapi enam subkategori masih menempati urutan teratas. Keenam subkategori tersebut adalah industri alat angkutan; industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kimia, farmasi, dan obat tradisional; industri makanan dan minuman; serta industri mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL).

Industri alat angkutan menjadi subkategori industri pengolahan yang berperan paling besar pada 2022, yaitu sebesar 19,84 persen,

diikuti industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik, sebesar 18,77 persen.

Selain industri pengolahan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor yang menjadi unggulan Jawa Barat adalah konstruksi dan infrastruktur, yang menyumbang sebesar Rp 126.184,39 miliar atau 8,35 persen. Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat terus berkembang, termasuk pembangunan jalan, bandar udara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Tindak lanjutnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memastikan pengembangan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi unggulan Jawa Barat meski terbilang baru, dengan menyumbang Rp 97.480,64 miliar atau 3,82 persen pada PDRB 2022. Sektor ini menjadi makin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Tindak lanjutnya adalah meningkatkan aksesibilitas internet dan teknologi informasi di seluruh wilayah, memberikan pelatihan dan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan teknologi, serta mendorong inovasi dan kreativitas di sektor ini.

No.	Kabupaten/Kota	Sektor	Potensi	Tantangan
1	Kabupaten Bogor	Pertanian, pariwisata, industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanaman pangan; hortikultura; perkebunan kopi robusta, karet, dan cokelat; peternakan daging, telur, dan susu</li> <li>Wisata alam, desa wisata, wisata olahraga</li> <li>Industri pertambangan, pengolahan, makanan/minuman, tekstil, kimia</li> </ul>	Urbanisasi, infrastruktur, konversi lahan, produktivitas menurun
2	Kota Bogor	Pariwisata, pendidikan, perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wisata alam dan budaya, wisata kuliner</li> <li>Kerajinan tangan, makanan olahan, produk <i>fashion</i></li> </ul>	Kesesakan lalu lintas
3	Kabupaten Sukabumi	Agrobisnis, pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabai, ubi jalar, padi</li> <li>Budi daya ikan air tawar, produk olahan ikan</li> <li>Wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi</li> </ul>	Infrastruktur, pendidikan
4	Kota Sukabumi	Ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retail, pasar tradisional, UMKM</li> <li>Jasa pendidikan, kursus, dan pelatihan, jasa kesehatan</li> </ul>	Ukuran kecil, fasilitas terbatas
5	Kabupaten Cianjur	Agrobisnis	Agrobisnis beras dan teh	Aksesibilitas, infrastruktur
6	Kabupaten Bandung	Industri, pariwisata, agrobisnis	Industri manufaktur, wisata alam	Kemacetan, polusi alam
7	Kota Bandung	Ekonomi kreatif, industri	Pusat pendidikan di Jawa Barat, teknologi	Ketersediaan lahan
8	Kabupaten Bandung Barat	Industri, pariwisata	Industri manufaktur, teknologi	Infrastruktur, urbanisasi
9	Kota Cimahi	Ekonomi kreatif	Industri kreatif	Kepadatan penduduk
10	Kabupaten Garut	Agrobisnis	Domba, Dodol Garut	Infrastruktur, bencana alam
11	Kabupaten Tasikmalaya	Agrobisnis, pariwisata	Padi, palawija, wisata alam	Infrastruktur, akses pasar
12	Kota Tasikmalaya	Ekonomi kreatif	Kerajinan lokal	Fasilitas
13	Kabupaten Cirebon	Agrobisnis	Hasil laut	Polusi
14	Kota Cirebon	Pariwisata, industri kreatif	Batik, kuliner	Keterbatasan Lahan
15	Kabupaten Kuningan	Agrobisnis, pariwisata	Hasil pertanian, wisata alam	Infrastruktur
16	Kabupaten Indramayu	Agrobisnis, industri	Padi, hasil laut	Polusi, banjir
17	Kabupaten Subang	Agrobisnis, industri	Padi, karet, buah	Infrastruktur
18	Kabupaten Purwakarta	Industri, pariwisata	Manufaktur, pariwisata	Infrastruktur

19	Kabupaten Karawang	Industri, agrobisnis	Kawasan industri, padi	Kemacetan, polusi
20	Kabupaten Bekasi	Industri	Pabrik, perusahaan	Kepadatan penduduk
21	Kota Bekasi	Industri	Perumahan, industri	Kemacetan
22	Kota Depok	Ekonomi kreatif	Pusat pendidikan Universitas	Keterbatasan lahan
23	Kabupaten Sumedang	Agrobisnis, pertanian	Tahu Sumedang, pertanian	Infrastruktur
24	Kabupaten Majalengka	Agrobisnis, pariwisata	Bandara, pertanian, transportasi	Infrastruktur
25	Kabupaten Ciamis	Agrobisnis, pariwisata	Pangandaran, kopi dan palawija	Infrastruktur, bencana alam
26	Kabupaten Pangandaran	Pariwisata, agrobisnis	Pantai, perikanan	Infrastruktur, bencana alam
27	Kota Banjar	Ekonomi kreatif, agrobisnis	Perdagangan lokal, perdagangan, jasa	Fasilitas terbatas

Tabel 14. Kondisi Umum Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

Potensi pariwisata di Jawa Barat pun cukup besar, terutama di sektor wisata alam, budaya, dan sejarah. Penyediaan akomodasi dan makan-minum, yang erat kaitannya dengan industri pariwisata, berkontribusi Rp 42.972,84 miliar atau 2,88 persen. Tindak lanjutnya adalah meningkatkan promosi pariwisata, meningkatkan infrastruktur pariwisata, seperti aksesibilitas transportasi dan akomodasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan.

Sebagai tindak lanjut, konsorsium PTV menyatakan pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut, mengalokasikan sumber daya yang memadai, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

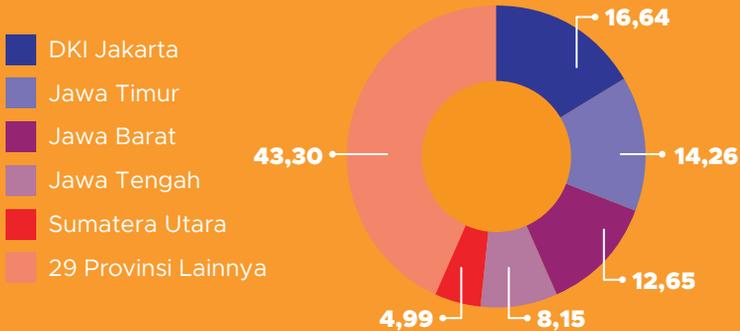
Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga sangat penting guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

### Sebaran Potensi dan Sektor Unggulan

Jawa Barat adalah salah satu provinsi paling dinamis di Indonesia dengan populasi besar, keberagaman budaya, dan potensi ekonomi yang luas. Dengan lebih dari 48 juta penduduk, Jawa Barat berperan penting dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian, industri manufaktur, serta pariwisata menjadi sektor unggulan provinsi ini.

Untuk memahami kondisi umum setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat, konsorsium PTV melakukan analisis mendalam me-

### KONTRIBUSI PDRB PROVINSI ATAS DASAR HARGA BERLAKU TERHADAP TOTAL PDRB 34 PROVINSI 2022 (PERSEN)



SUMBER: BPS

ngenai aspek demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasilnya menunjukkan Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar di berbagai sektor ekonomi. Setiap kabupaten dan kota memiliki karakteristik dan potensi unik yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui program-program strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan infrastruktur, dan inovasi teknologi.

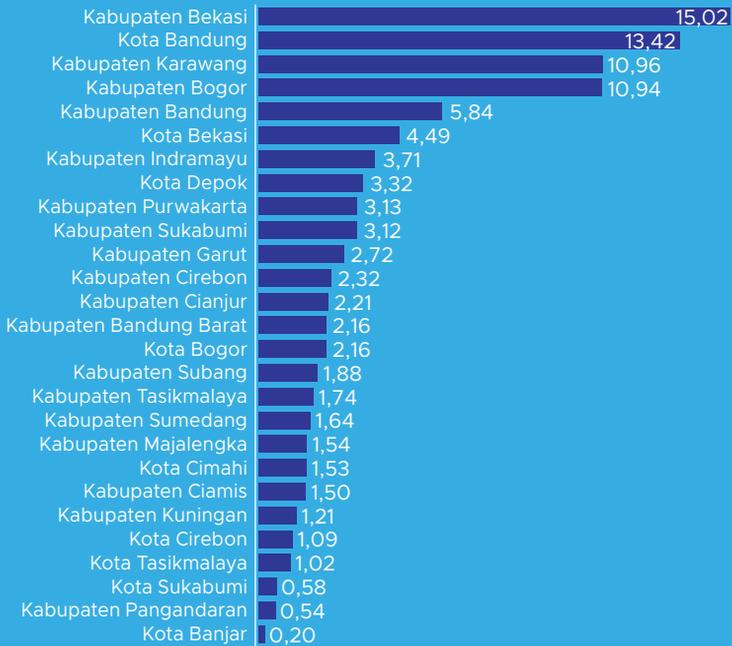
Dari hasil analisis, dengan mengatasi tantangan yang ada, seperti infrastruktur yang kurang memadai, kemacetan lalu lintas, dan polusi, Jawa Barat dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

BPS mencatat Jawa Barat juga memiliki total nilai tambah

barang dan jasa terbesar ketiga, setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kontribusi Jawa Barat terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia pada 2022 sebesar 12,65 persen. Hal tersebut mengindikasikan potensi yang dimiliki Jawa Barat cukup besar di Indonesia, dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hingga sektor jasa.

Sepanjang 2018-2022, Kabupaten Bekasi memegang peran paling besar terhadap total PDRB 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun, pada 2018-2020, persentase perannya cenderung menurun, dari 15,42 persen pada 2018 menjadi 14,98 persen pada 2020, kemudian meningkat kembali pada tahun berikutnya menjadi 15,16 persen dan sedikit menurun pada 2022, sebesar 15,02 persen. In-

### DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT 2022 (PERSEN)



SUMBER: BPS

dustri pengolahan menjadi sektor yang paling dominan di Kabupaten Bekasi, dengan kontribusi 78,01 persen terhadap PDRB wilayahnya pada 2022, sehingga kinerja sektor ini sangat berpengaruh pada PDRB kabupaten.

Kota Bandung berada di posisi kedua dengan kontribusi berfluktuasi antara 13,24 dan 13,45 persen. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Bandung selain sebagai pusat pemerintahan, menjadi pusat per-

ekonomian di wilayah Jawa Barat. Sebagai pusat dari berbagai macam kegiatan, Kota Bandung memiliki potensi utama perekonomian pada sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Kabupaten Bogor menempati peringkat ketiga dengan peran terbesar terhadap PDRB Jawa Barat. Pada 2022, kabupaten ini menyumbang sebesar 10,94 persen terhadap PDRB total 27 kabupaten/kota. Semua itu berkat

letaknya yang berdekatan dengan Jakarta dan potensi yang dimilikinya pada sektor industri pengolahan. Dalam rentang 2018-2022, kontribusi PDRB Kabupaten Bogor berada di kisaran 11 persen dan konsisten di posisi ketiga kontributor terbesar di Jawa Barat.

### **Kondisi Angkatan Kerja**

Menurut data BPS Provinsi Jawa Barat, pada Agustus 2023, dari 25,39 juta penduduk usia kerja di Jawa Barat, sebanyak 23,5 juta di antaranya bekerja dan 1,89 juta orang menganggur. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Agustus tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 meningkat 0,05 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2022. Di sisi lain, jumlah penduduk yang menganggur pada kondisi Agustus 2023 menurun bila dibandingkan dengan kondisi Agustus tahun sebelumnya. Penganggur pada Agustus 2023 berkurang 0,24 juta orang dibanding kondisi Agustus 2022.

Kondisi ketenagakerjaan Jawa Barat pada saat itu juga sudah membaik di beberapa sektor dibanding kondisi pada 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Jawa Barat pada Agustus 2023 sebesar 66,49 persen. Arti-

nya, dari 100 orang yang berumur 15 tahun ke atas di provinsi ini, 66-67 orang di antaranya aktif secara ekonomi.

TPAK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. TPAK dihitung berdasarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas).

Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat tercatat 7,44. Itu berarti, dari 100 orang angkatan kerja di Jawa Barat, 7-8 orang di antaranya belum dapat terserap di pasar kerja. TPT dihitung berdasarkan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah orang angkatan kerja.

Sebagian besar pekerja bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (23,22 persen); industri pengolahan (19,37 persen); pertanian, kehutanan, dan perikanan (15,7 persen); penyediaan akomodasi dan makan-minum (9,01 persen); pengangkutan dan pergudangan (4,82 persen); pendidikan (4,45 persen); serta konstruksi (7,13 persen).

Analisis *horizon scanning* untuk *workforce planning* dari konsorsium PTV mengindikasikan pekerja lulusan vokasi di Jawa Barat pada 2023 didominasi tamatan pendidikan tinggi, dengan jumlah aparatur sipil negara (ASN) lulusan S-1 mencapai 56.377 orang, sementara lapangan kerja perdagangan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja walaupun jumlahnya menurun.

Pada 2018, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) banyak diserap bidang perdagangan, dengan jumlah total 3.600.367 orang. Lulusan SMK juga banyak menysar bidang industri. Angka terendah bidang pekerjaan yang menjadi sasaran lulusan SMK adalah pengadaan air, karena mungkin penjurusan di SMK tidak terlalu berfokus pada bidang tersebut.

Hasil analisis perkiraan kesempatan kerja lulusan SMK dan lapangan usaha di daerah atau wilayah dibandingkan dengan komposisi dan lulusan SMK tahun 2023-2025 menunjukkan identifikasi sektor unggulan di Jawa Barat menekankan program digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Sedangkan berbagai inovasi di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan telah dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Adapun identifikasi keca-

kan lokal di Jawa Barat dapat mencakup beragam aspek, termasuk keahlian tradisional, budaya, dan potensi sumber daya manusia yang khas untuk wilayah tersebut. Beberapa hasil identifikasi kecapakan lokal yang mungkin ditemukan di Jawa Barat adalah seni dan kerajinan tradisional, keterampilan pertanian, keterampilan musik dan tarian tradisional, keterampilan kuliner lokal, kearifan lokal dan adat-istiadat, serta pengolahan sumber daya alam lokal.

Sedangkan hasil pemetaan terhadap ketersediaan inovasi yang dimiliki daerah beserta kegunaannya berdasarkan sektor prioritas di daerah atau wilayah menunjukkan Jawa Barat menekankan program digitalisasi untuk berbagai aktivitas, khususnya aktivitas ekonomi. Digitalisasi dilakukan karena memberikan efisiensi bagi keberlangsungan aktivitas bisnis, termasuk program petani milenial.

Petani milenial dibutuhkan mengingat jumlah petani di Jawa Barat makin berkurang. Harapannya, sektor pertanian dapat bersatu dengan sektor industri lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui pemanfaatan teknologi, petani milenial akan menggerakkan kewirausahaan bidang agrikultur agar bisa berlanjut.

## AGAR PENDIDIKAN VOKASI RELEVAN DENGAN INDUSTRI

Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan populasi besar dan potensi yang tersebar di berbagai sektor, dari pariwisata, ekonomi kreatif, agrobisnis, hingga industri, provinsi ini dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Hanya, terdapat sejumlah tantangan yang menghadang pertumbuhan tersebut, seperti kualitas data yang rendah, metodologi pendataan yang tak akurat, paradigma pembangunan yang *top-down*, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Jawa Barat berpeluang besar mewujudkan tujuan tersebut di masa datang. Syaratnya, berdasarkan hasil pendekatan *foresight* dan *system dynamics*, perlu ada ekosistem kemitraan strategis yang terpadu antara lembaga pendidikan vokasi dan berbagai pemangku kepentingan. Prioritas utamanya adalah inovasi inklusif, pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, serta pengembangan keterampilan digital dan teknologi.

Kedua pendekatan ini digunakan untuk memahami konteks, fokus, pengumpulan dan analisis data, identifikasi tren, pengem-

banan skenario, evaluasi dan validasi skenario, serta pengembangan strategi dan implementasi. Hasil analisis *system dynamics* menunjukkan peningkatan investasi dalam pendidikan vokasi dan teknologi dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, produktivitas, dan *output* ekonomi. Strategi pengembangan pendidikan vokasi mencakup peningkatan kurikulum yang relevan, perluasan akses pelatihan dan magang, serta penguatan kolaborasi antara berbagai lembaga pendidikan dan industri.

Rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan vokasi meliputi investasi dalam pendidikan dan pelatihan teknologi untuk persiapan tenaga kerja menghadapi industri maju, penguatan ekosistem kemitraan untuk menciptakan ekosistem pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung transformasi ekonomi dan inklusivitas digital, adopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi serta daya saing, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas.

Melalui investasi yang tera-



*Pekerja melakukan sortasi teh putih di Bandung, Jawa Barat. Dok TEMPO/Prima Mulia*

rah dalam pendidikan vokasi, infrastruktur digital, dan pariwisata berkelanjutan, Jawa Barat dapat mendorong pertumbuhan inklusif,

meningkatkan kapabilitas tenaga kerja, dan mendorong ketahanan ekonomi di tengah dinamika global yang terus berubah.





# PROVINSI JAWA TENGAH: **PRIMADONA BARU BERNAMA KAWASAN INDUSTRI**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH JAWA TENGAH:**

**Ketua:** *Kurnianingsih (Politeknik Negeri Semarang)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Negeri Semarang: *Amin Suharjono, Sahid, Sri Marhaeni Salsiyah, Eka Murtiasri*
2. Politeknik Negeri Cilacap: *Ganjar Ndaru Ikhtiangung, Isa Bahroni*
3. Politeknik Maritim Negeri Indonesia: *Rahindra Bayu Kumara, Gunawan Budi Santoso*
4. Politeknik ATMI Surakarta: *Fransiskus Xaverius Suryadi, Tri Hannanto Saputra*
5. Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret: *Santoso Tri Hananto, Herman Saputro*
6. Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro: *Previari Umi Pramesti, Mohd Ridwan*

*Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar produk domestik regional bruto Jawa Tengah pada 2023. Dengan berdirinya delapan kawasan industri unggulan, Jawa Tengah berpotensi besar menarik investasi karena memiliki fasilitas infrastruktur memadai.*

Kabupaten Kendal telah lama dikenal sebagai kabupaten santri. Julukan itu disematkan kepada Kendal karena terdapat banyak pondok pesantren di kabupaten ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat, pada 2023, terdapat 157 pondok pesantren yang tersebar di 20 kecamatan di kabupaten yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah ini. Jumlahnya bertambah tujuh pondok pesantren dibanding tahun sebelumnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kabupaten Kendal mendapat julukan baru sebagai salah satu pusat industri di Jawa Tengah. Di kabupaten seluas lebih dari 1.118 kilometer persegi ini, sekarang berdiri Kawasan Industri Kendal (KIK) atau Kendal Industrial Park (KIP).

Kawasan industri ini dibangun sejak November 2016, hasil kerja sama PT Jababeka Tbk dan Sembcorp Development Ltd, Singapura. Dengan luas 1.000 hektare, KIK merupakan kawasan industri terbesar kedua di Jawa Tengah—setelah Kawasan Industri Terpadu Batang, yang memben-

tang di atas lahan seluas 4.300 hektare. Enam kawasan industri lain di Jawa Tengah adalah Aviarma Industrial Estate, Semarang; Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS), Kabupaten Demak; Batang Industrial Park; Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang; BSB Industrial Park, Semarang; dan Kawasan Industri Tanjung Emas EPZ, Kota Semarang, yang luasnya di bawah 500 hektare.

Dengan berdirinya delapan kawasan industri unggulan tersebut, Jawa Tengah berpotensi besar menarik investasi karena memiliki fasilitas infrastruktur yang memadai. Kawasan industri di provinsi ini mencakup berbagai sektor ekonomi, seperti industri manufaktur, tekstil, otomotif, dan agroindustri.

BPS mencatat Jawa Tengah membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen pada 2023. Pertumbuhan ini sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai 5,3 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha penyediaan akomodasi dan ma-

kan-minum, yaitu 11,24 persen.

Sedangkan dari sisi struktur ekonomi Jawa Tengah, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku, dengan kontribusi 34,03 persen. Sektor industri pengolahan mengungguli perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (13,61 persen); pertanian, kehutanan, dan perikanan (13,23 persen); serta konstruksi (11,22 persen). Keempat lapangan usaha tersebut menyumbang 72,09 persen PDRB Jawa Tengah pada tahun lalu.

Industri pengolahan, menurut BPS, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan/atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat pada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan.

Dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang signifikan terhadap struktur ekonomi, tidak mengherankan jika pemerintah Jawa Tengah mengandalkan kawasan industri untuk menarik investasi.

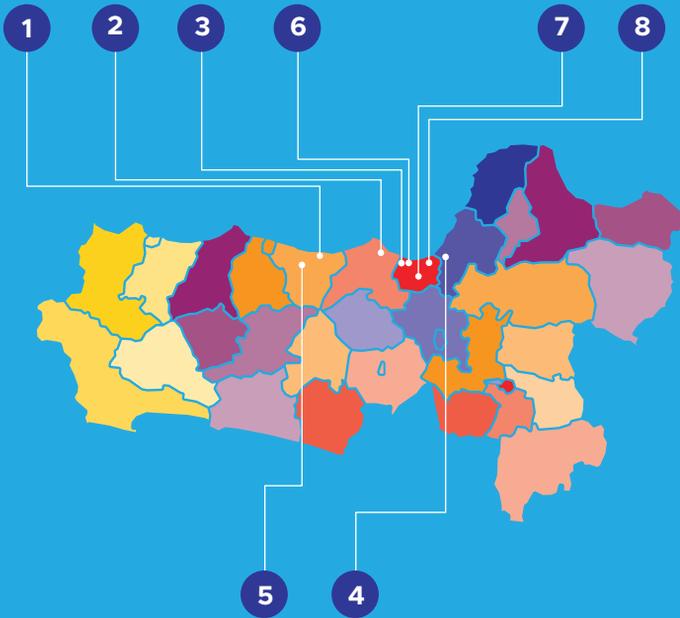
Berdasarkan hasil penelitian

tim konsorsium periset dari enam perguruan tinggi vokasi (PTV) di Jawa Tengah dalam Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah, peningkatan realisasi investasi di Jawa Tengah didukung keberadaan kawasan industri, terutama penambahan penyewa di Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

Pemerintah Jawa Tengah pun terus mempromosikan investasi yang berfokus pada sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja dan negara tujuan prioritas dengan meningkatkan kerja sama antara pemangku kepentingan dan terobosan inovasi digitalisasi promosi. Pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan kawasan industri tersebut melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur pendukung, air baku, dan peningkatan pengelolaan kawasan industri menjadi lebih berkualitas.

Realisasi investasi di Jawa Tengah pada 2022 meningkat menjadi Rp 68,41 triliun, yang terdiri atas realisasi investasi yang dilaporkan melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar Rp 58,89 triliun dan realisasi investasi non-LKPM sebesar Rp 9,52 triliun. Dari LKPM, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 33,9

## 8 KAWASAN INDUSTRI UNGGULAN JAWA TENGAH



- ① Kawasan Industri Terpadu Batang **4.300 Ha**
- ② Kawasan Ekonomi Khusus Kendal **1.000 Ha**
- ③ Aviarna Industrial Estate Semarang **462 Ha**
- ④ Kawasan Industri JIPS Kabupaten Demak **300 Ha**
- ⑤ Batang Industrial Park **287 Ha**
- ⑥ Kawasan Industri Wijayakusuma Kota Semarang **250 Ha**
- ⑦ BSB Industrial Park Semarang **112 Ha**
- ⑧ Kawasan Industri Tanjung Emas EPZ Kota Semarang **30 Ha**

**SUMBER:** DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022

**10 BESAR PDRB JAWA TENGAH MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2023 (JUTA RUPIAH)**



Industri Pengolahan  
**577.429.037,01**



Transportasi dan Pergudangan  
**69.538.665,34**



Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  
**230.872.971,58**



Informasi dan Komunikasi  
**69.420.568,27**



Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  
**224.405.332,88**



Jasa Keuangan  
**48.965.197,30**



Konstruksi  
**190.320.155,09**



Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib  
**39.869.995,43**



Jasa Pendidikan  
**70.550.282,60**



Pertambangan dan Penggalian  
**38.133.317,98**

**SUMBER:** BPS Jawa Tengah

triliun, sedangkan realisasi PMDN sebesar Rp 24,99 triliun. Realisasi investasi 2022 tersebut meningkat Rp 6,18 triliun atau 11,72 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tim konsorsium PTV Jawa Tengah juga memetakan sektor-sektor yang menjadi unggulan perekonomian Jawa Tengah—se-

lain industri pengolahan—yaitu pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Sektor pertanian tumbuh 2,92 persen pada 2022, meningkat dibanding tahun sebelumnya (0,78 persen). Pertanian juga memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah sebesar 13,53 persen, turun dibanding tahun se-

belumnya (13,86 persen).

Perdagangan juga tumbuh 4,32 persen, tapi turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (5,8 persen). Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah juga turun menjadi 13,6 persen dari 13,75 persen pada 2021. Hal itu dipengaruhi oleh, antara lain, belum optimalnya ekspor dan impor Jawa Tengah, belum optimalnya nilai tambah produksi perdagangan, serta fluktuatifnya harga kelompok kebutuhan masyarakat, yang juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Adapun pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), penyediaan lapangan pekerjaan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun kontribusi sektor ini pada PAD dan PDRB belum optimal, meskipun berdasarkan data kontribusi sektor pariwisata pada PAD tahun 2022 meningkat menjadi 9,63 persen dibanding 2021 (2,88 persen). Sedangkan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB tahun 2021 sebesar 3,06 persen.

## **Potensi dan Keunggulan Wilayah**

Tim konsorsium PTV Jawa Tengah mengidentifikasi sek-

tor-sektor unggulan di daerah atau wilayah target berdasarkan lapangan usaha dengan analisis *horizon scanning* untuk *innovation planning*. Klasifikasi tersebut berdasarkan analisis *location quotient* (LQ) dan *dynamic location quotient* (DLQ).

Analisis LQ digunakan untuk menilai spesialisasi antara peran aktivitas PDRB di Jawa Tengah dan peran aktivitas ekonomi pada tingkat perekonomian nasional. Jika LQ lebih besar dari 1, artinya nilai peran sektor di Jawa Tengah lebih unggul dari tingkat nasional; sektor itu adalah sektor basis dan memiliki keunggulan produksi komoditas lebih banyak dari kebutuhan konsumsi di Jawa Tengah dan dapat dijual ke daerah lain. Jika LQ lebih kecil dari 1, artinya sektor itu dikategorikan nonbasis karena nilai spesialisasi di Jawa Tengah lebih rendah dari tingkat nasional; hasil produksi komoditasnya belum memenuhi kebutuhan konsumsi Jawa Tengah.

Terdapat lima sektor basis dari hasil analisis LQ sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah menurut lapangan usaha berdasarkan pengolahan data PDRB Jawa Tengah 2019–2022, yaitu industri pengolahan, jasa pendidikan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, serta konstruk-

## HASIL MATRIKS GABUNGAN NILAI RATA-RATA LQ DAN DLQ

KRITERIA	LQ>1	LQ<1
DLQ>1	<p><b>Unggulan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi</li> <li>2. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor</li> <li>3. Penyediaan akomodasi dan makan minum</li> </ol>	<p><b>Andalan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan</li> <li>2. Pengadaan listrik, gas</li> <li>3. Transportasi dan pergudangan</li> <li>4. Informasi dan komunikasi</li> <li>5. Real sstate</li> </ol>
DLQ<1	<p><b>Prospektif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pengolahan</li> <li>2. Jasa pendidikan</li> </ol>	<p><b>Tertinggal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertambangan dan penggalian</li> <li>2. Pengadaan air</li> <li>3. Jasa keuangan</li> <li>4. Jasa perusahaan</li> <li>5. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib</li> <li>6. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial</li> <li>7. Jasa lainnya</li> </ol>

**SUMBER:** BPS Jawa Tengah

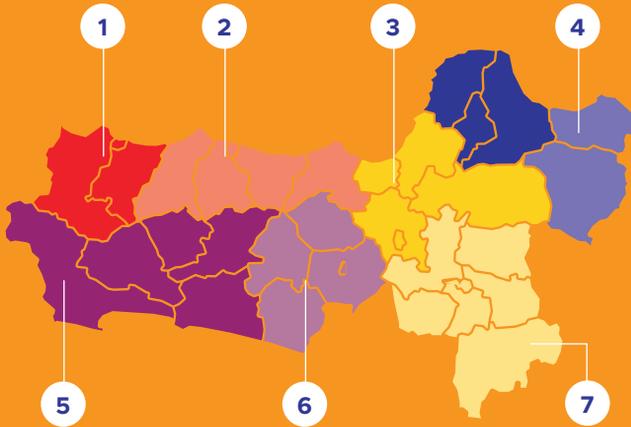
si.

Sedangkan analisis DLQ merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan sektor regional dan laju pertumbuhan sektor nasional dalam skala lebih besar. Tujuannya untuk mengetahui potensi dari hasil identifikasi sektor basis dan nonbasis. Perhitungan analisis DLQ akan menghasilkan peran

dan prioritas dari sektor yang lebih berpotensi dikembangkan di masa datang. Apabila nilai yang diperoleh lebih kecil dari 1, sektor itu masuk kategori tidak prospektif. Jika nilainya lebih besar dari 1, sektor itu masuk kategori prospektif.

Dari analisis ini, terdapat delapan sektor unggulan yang ma-

## SEKTOR UNGGULAN WILAYAH JAWA TENGAH



### 1 Bregasmalang

Pertambangan dan penggalian; perdagangan dan jasa; konstruksi; informasi dan komunikasi; real estate; penyediaan akomodasi

### 2 Petanglong

Perdagangan dan jasa; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air; penyediaan akomodasi; pertambangan dan penggalian; informasi dan komunikasi; real estate

### 3 Kedungsepur

Perdagangan dan jasa; pengadaan listrik dan gas; informasi dan komunikasi; real estate; penyediaan akomodasi; pengadaan air; pariwisata

### 4 Jakutibanglor

Perdagangan dan jasa; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air; penyediaan akomodasi; pertambangan dan penggalian

### 5 Baringmascakeb

Penggalian; pengadaan air; konstruksi; perdagangan dan jasa; informasi dan komunikasi; real estate; pertanian; pariwisata

### 6 Purwomanggung

Perdagangan dan jasa; pengadaan air; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; informasi dan komunikasi; real estate; pariwisata

### 7 Subosukawonosraten

Industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan dan jasa; pengadaan air; penyediaan akomodasi; real estate; pariwisata

SUMBER: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022

suk kategori prospektif. Kedelapan sektor tersebut adalah transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan-minum; konstruksi; pengadaan listrik dan gas; pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor; *real estate*; serta informasi dan komunikasi.

Merujuk pada hasil analisis LQ dan DLQ, kombinasi di antara nilai tersebut selanjutnya dijadikan kriteria dalam menentukan sektor ekonomi yang tergolong andalan, unggulan, prospektif, dan tertinggal dibanding produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2019-2022. Terdapat 4 sektor unggulan, 2 sektor prospektif, 5 sektor andalan, dan 7 sektor tertinggal.

Hasil matriks gabungan nilai rata-rata LQ dan DLQ memberikan gambaran yang jelas tentang klasifikasi sektor-sektor ekonomi di Jawa Tengah berdasarkan keunggulan kompetitif dan prospek pertumbuhannya. Berikut ini interpretasi dari hasil tersebut.

1. Unggulan: Sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, serta penyediaan akomodasi dan makan-minum adalah sektor-sektor yang menunjukkan keunggulan kompetitif lokal yang tinggi dan pertumbuhan yang dinamis. Sektor-sektor tersebut memiliki

peran penting dalam perekonomian daerah dan berkontribusi signifikan terhadap PDRB. Sektor-sektor itu mampu bersaing dengan baik di pasar nasional dan menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang, sehingga harus menjadi fokus utama dalam strategi pengembangan ekonomi daerah.

2. Andalan: Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; serta *real estate* masuk kategori andalan. Sektor-sektor tersebut memiliki nilai LQ dan DLQ yang cukup tinggi, yang menunjukkan sektor-sektor itu juga memiliki keunggulan kompetitif yang baik dan potensi pertumbuhan yang positif. Meski tidak seunggul sektor dalam kategori unggulan, sektor-sektor andalan ini tetap penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah serta layak mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya.

3. Prospektif: Sektor industri pengolahan dan jasa pendidikan masuk kategori prospektif. Sektor-sektor ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik, tapi mungkin belum mencapai tingkat keunggulan kom-



*Pekerja membuat sepatu di pabrik sepatu di KIT Batang, Jawa Tengah. BPMI Setpres/Vico*

petitif setinggi sektor unggulan dan andalan. Pengembangan sektor prospektif memerlukan investasi dan dukungan yang tepat agar bisa lebih berkontribusi pada perekonomian daerah di masa mendatang. Fokus pada sektor prospektif bisa membantu diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang sudah mapan.

4. Tertinggal: Sektor pertambangan dan penggalian; pengadaan air; jasa keuangan; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya tergolong sebagai sektor tertinggal. Nilai LQ dan DLQ yang rendah menunjukkan sektor-sektor ini tidak memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dan pertumbuhannya lambat. Upaya khusus mungkin diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor-sektor ini, termasuk melalui reformasi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, dan inovasi.

Hasil analisis dalam matriks LQ dan DLQ memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas kebijakan dan alokasi sumber daya. Fokus pada sektor unggulan dan andalan dapat mempercepat pertum-

buhan ekonomi, sementara perhatian pada sektor prospektif dapat memastikan diversifikasi dan pengembangan jangka panjang. Upaya perbaikan di sektor-sektor tertinggal akan membantu menciptakan perekonomian yang lebih seimbang dan inklusif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Berdasarkan potensi dan keunggulannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membagi wilayahnya menjadi tujuh wilayah pengembangan. Pembagiannya didasari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Pembagian itu dilakukan sesuai dengan potensi dan karakter wilayah masing-masing.

Pembagian wilayah pengembangan tersebut merupakan bagian dari sistem perwilayahan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan kelestarian alam serta pemerataan pembangunan.

Pemerintah menamai ketujuh wilayah pengembangan tersebut dengan nama-nama unik, yaitu Barlingmascakeb, yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang,

dan Temanggung), Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten), Jekutibanglor (Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora), Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi), Petanglong (Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan), serta Bregasmalang (Brebes, Tegal, Kota Tegal, dan Pemalang).

### **Kondisi Angkatan Kerja**

Menurut catatan BPS Jawa Tengah, angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 21,07 juta orang, bertambah 1,59 juta orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga tercatat meningkat 0,88 persen menjadi 71,72 persen pada Agustus 2023.

Penduduk yang bekerja sebanyak 19,99 juta orang, meningkat 1,6 juta orang dari Agustus 2022. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,13 persen atau turun 0,44 persen dibanding Agustus 2022. Sedangkan persentase pekerja setengah penganggur naik sebesar 1,01 persen menjadi 6,4 persen. Adapun persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,09 persen menjadi 23,11 persen dibanding Agustus 2022. Sebanyak 12,07

juta orang (60,39 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,23 persen dibanding Agustus 2022 (60,16 persen).

Pada masa setelah pandemi Covid-19, sektor pertanian menyerap 324 ribu pekerja selama Agustus 2021-Agustus 2022 atau 24,78 persen dari total serapan tenaga kerja provinsi ini. Sektor usaha perdagangan menyerap 94 ribu orang dan industri pengolahan menyerap 71 ribu orang.

Lapangan pekerjaan yang serapan tenaga kerjanya meningkat adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,33 juta orang), disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum (0,3 juta orang).

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 57,11 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu sebesar 54,6 juta rupiah. Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa, tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan kesempatan dalam lapangan kerja karena perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja untuk memenuhi peningkatan produksi dan pela-

yanan. Dalam konteks Jawa Tengah, jika sektor seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, ini menandakan sektor-sektor tersebut sedang berkembang, yang mungkin merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini baik untuk lulusan pendidikan vokasi. Keterampilannya dapat langsung diaplikasikan dalam industri-industri tersebut.

Lulusan vokasi di Jawa Tengah yang bekerja pada periode 2017-2022 berkembang secara signifikan dalam berbagai sektor ekonomi. Sebagian besar lulusan vokasi terdistribusi secara merata di berbagai jabatan, yang mencerminkan diversifikasi lapangan kerja.

Dalam sektor industri, sebagian besar pekerja lulusan vokasi tersebar di sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa. Di sektor manufaktur, banyak lulusan vokasi yang mengisi posisi operator mesin dan teknisi produksi. Sedangkan sektor konstruksi mendapat kontribusi dari lulusan vokasi yang bekerja sebagai tukang, teknisi konstruksi, dan pengawas proyek.

Jumlah pekerja lulusan vokasi di Jawa Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, jumlah pekerja lulusan vokasi di Jawa Tengah mencapai 17,5 juta

orang. Jumlah ini meningkat menjadi 19,6 juta orang pada 2021 dan 18,4 juta orang pada 2022.

Lapangan usaha dengan jumlah pekerja lulusan vokasi terbanyak adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, yang mencapai 3,5 juta orang. Industri pengolahan menyerap pekerja lulusan vokasi hingga 4 juta orang. Adapun pekerja lulusan vokasi di sektor konstruksi mencapai 1,5 juta orang.

Secara umum, pekerja lulusan vokasi di Jawa Tengah tersebar di berbagai lapangan usaha, dari lapangan usaha pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, hingga jasa. Hal ini menunjukkan lulusan vokasi memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Tengah.

Peningkatan jumlah pekerja lulusan vokasi di Jawa Tengah menunjukkan lulusan vokasi makin diminati dunia kerja. Penyebabnya, antara lain, kualitas lulusan vokasi terus meningkat, kebutuhan tenaga kerja meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah makin mendorong pengembangan pendidikan vokasi. Peningkatan jumlah pekerja lulusan vokasi di Jawa Tengah ini dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan vokasi di Indonesia.

## PENDIDIKAN VOKASI KUAT, INVESTASI MENINGKAT

Perkembangan ekonomi dan teknologi di Jawa Tengah menghadirkan tantangan dan peluang signifikan bagi pendidikan vokasi. Urbanisasi yang cepat, pertumbuhan industri, serta integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi telah mengubah pasar tenaga kerja. Kondisi ini membutuhkan tenaga kerja adaptif dan terampil dalam kompetensi teknologi dan manajerial baru.

Pendidikan vokasi yang kuat diperlukan agar investasi di Jawa Tengah meningkat. Perencanaan tenaga kerja dan pengembangan inovasi strategis menjadi sangat penting untuk memastikan sistem pendidikan vokasi dapat memenuhi permintaan pasar kerja yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil kajian tim ekosistem kemitraan, penguatan pendidikan vokasi adalah salah satu langkah strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor unggulan yang berkontribusi besar pada kemajuan ekonomi Jawa Tengah.

Studi ini menggunakan pendekatan model *system dynamic* untuk menganalisis data tren pasar tenaga kerja, kapasitas pendidikan vokasi, tingkat investasi,

dan pertumbuhan ekonomi sejak 2024 hingga 2050. Variabel utama yang dianalisis termasuk permintaan tenaga kerja nonvokasi dan vokasi, pertumbuhan angkatan kerja vokasi, investasi di wilayah tersebut, kapasitas pendidikan vokasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

*Analytical hierarchy process* (AHP) juga digunakan untuk menentukan prioritas penggerak perubahan—menekankan pentingnya kemajuan teknologi seperti penerapan mesin dan otomatisasi. Metode *foresight STEEPV* (*social, technological, economic, environmental, political, values*) juga digunakan untuk menganalisis lebih mendalam penggerak perubahan ekonomi dan teknologi.

Penerapan *scenario planning* di Jawa Tengah memiliki beberapa implikasi penting bagi perencanaan tenaga kerja dan kebijakan ekonomi. Di antaranya, perbaikan pendidikan vokasi perlu diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha.

Penting pula memetakan keterampilan yang diperlukan dalam lima tahun ke depan untuk memastikan keterampilan yang diajarkan akan tetap relevan. Pe-



*Produksi mobil listrik buatan SMK Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah. vokasi.kemdikbud.go.id*

merintah daerah perlu menjadi katalisator antara kebutuhan SDM dan industri dengan mengeluar-

kan kebijakan yang mendukung pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri.



KULONPROGO

SLEMAN

YOGYAKARTA

BANTUL

GUNUNG KIDUL



# PROVINSI D.I. YOGYAKARTA: **BUKAN SEKADAR TEMPAT PELESIRAN**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH D.I. YOGYAKARTA:**

**Ketua:** *Wiryanta (Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada)*

### **Anggota:**

1. Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada: *Anggi Rahajeng, Muhamad Sidiq Wicaksono, Yudistira Hendra Permana, Erlin Estiana Yuanti*
2. Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta: *Ari Dwi Rahmawati, Rais Faisal Ahyar*
3. Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta: *Tri Hadi Karyono, Fajar Wahyu Nugroho, Mgr Inz Naufal Annas Fauzi, Khairunnisa'*
4. Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta: *Ima Novilasari*
5. Universitas Gadjah Mada: *Anas Saifurrahman*

*Pariwisata sudah lama menjadi salah satu tumpuan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun DIY bukan hanya pariwisata. Perekonomian provinsi ini juga ditopang sejumlah sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB.*

Aroma dupa menguar dari bangunan tiga lantai di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Pada sore yang sedikit basah selepas gerimis, salah satu pusat belanja batik dan cendera mata di kota dengan bermacam julukan—dari Kota Budaya, Kota Pelajar, hingga Kota Gudang—itu terlihat ramai. Pria-wanita, tua-muda, dan anak-anak tampak menyesaki gedung bergaya kolonial itu.

Di luar gedung, kawasan pedestrian di sepanjang sisi kiri dan kanan jalan yang menjadi salah satu penanda ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu juga tampak semarak. Para pelancong, baik domestik maupun mancanegara, serta warga setempat berbaur di trotoar yang membentang dari seberang Stasiun Tugu di ujung utara hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta di ujung bagian selatan.

Ada yang sekadar cuci mata di toko dan gerai di sepanjang sisi jalan atau menjelajahi Pasar Beringharjo yang kesohor. Tidak sedikit pula yang menghabiskan waktu menikmati senja dengan sekadar kongko di bangku kayu berangka

besi tempa yang tersedia di beberapa area trotoar.

Sektor pariwisata memang sudah lama menjadi ikon DIY. Kota Yogyakarta, termasuk kawasan Jalan Malioboro yang kondang hingga mancanegara, adalah salah satunya. Beragam warisan budaya di Kota Yogyakarta, dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Tugu Yogyakarta, peninggalan sejarah Benteng Vredeburg, potensi wisata Kabupaten Sleman seperti Gunung Merapi dan Candi Prambanan, bentang alam yang permai di Kabupaten Kulon Progo, hingga hamparan pantai yang menawan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, telah menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk pelesiran ke provinsi yang menyandang status sebagai daerah istimewa ini.

Namun pandemi Covid-19 yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, pada awal 2020, membuat pariwisata DIY sempat terpuruk. Sektor pelancongan ini baru kembali menggeliat seiring dengan meredanya pagebluk mematikan itu dan pemerintah resmi mencabut status

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DIY  
MENURUT LAPANGAN USAHA 2023**

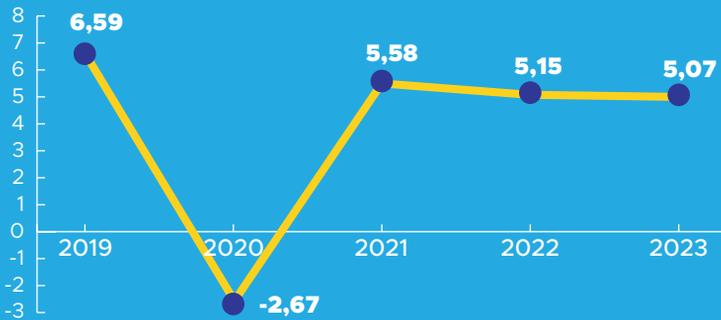
**Rp 180,69 triliun**

(Atas Dasar Harga Berlaku)

**Rp 118,63 triliun**

(Atas Dasar Harga Konstan)

**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DIY 2019-2023 (PERSEN)**



**SUMBER:** BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (2024)

pandemi Covid-19, yang beralih ke endemi, pada 26 Juni 2023.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY menyebutkan, pada 2023, kategori penyediaan akomodasi dan makan-minum yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) DIY sebesar Rp 18,4 triliun. Jumlah ini meningkat dari Rp 14,6 triliun pada 2019. Sumbangannya terhadap PDRB DIY kembali mencapai dua digit setelah tiga tahun berturut-turut turun ke kisaran 9 persen. Kontribusinya pada 2023 mencapai 10,18 persen dan menduduki peringkat ketiga setelah jasa keuangan dan asuransi serta

transportasi dan perdagangan.

Dari jumlah tersebut, sebesar 8,38 persen dari PDRB total atau 82,31 persen terhadap kategori itu merupakan sumbangan dari subkategori penyediaan makan-minum. Sedangkan 1,8 persen PDRB atau 17,69 persen terhadap kategori itu adalah kontribusi dari penyediaan akomodasi.

Seiring dengan meredanya pandemi *corona*, tingkat hunian hotel di DIY juga meningkat 22,07 persen pada 2023. Tingkat hunian hotel berbintang naik 23,57 persen, lebih tinggi dibanding tingkat okupansi hotel nonbintang, yang naik 17,23 persen. Dengan angka tersebut, DIY masuk tiga besar provinsi

## LAPANGAN USAHA DENGAN PERTUMBUHAN TERTINGGI



**SUMBER:** BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (2024)

dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang yang tinggi selama 2023. Banyaknya kegiatan rapat dan kunjungan wisatawan mancanegara menyumbang peningkatan tersebut.

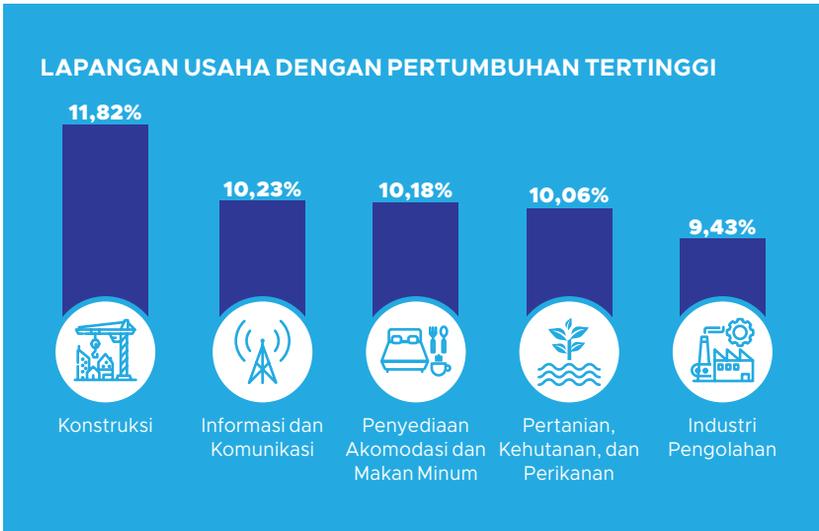
### DIY Tak Cuma Pariwisata

Namun DIY bukan hanya pariwisata. Perekonomian provinsi ini ditopang sejumlah sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB. BPS mencatat nilai PDRB DIY atas dasar harga berlaku pada 2023 mencapai Rp 180,69 triliun. Jumlah itu meningkat hampir Rp 15 triliun dibanding tahun sebelumnya (Rp 165,72 triliun). Peningkatan nilai PDRB itu dipengaruhi oleh meningkatnya produksi serta harga barang dan jasa di hampir semua kategori.

Angka PDRB DIY juga naik berdasarkan harga konstan 2010, dari Rp 112,90 triliun pada 2022 menjadi Rp 118,63 triliun pada

2023. Perekonomian DIY tumbuh 5,07 persen pada 2023, sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya akibat meningkatnya produksi di hampir semua kategori, bukan karena inflasi. Ada lima lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB DIY pada 2023, yaitu konstruksi; informasi dan komunikasi; penyediaan akomodasi dan makan-minum; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta industri pengolahan.

Data tersebut tak jauh berbeda dengan hasil penelitian tim konsorsium periset dari tiga perguruan tinggi di DIY dalam Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan sejak 20 September 2022 hingga 29 Februari 2024 di empat kabupaten dan satu kota di DIY itu menunjukkan hasil identifikasi sektor-sektor unggulan di daerah atau wilayah target berdasarkan lapangan usaha hingga



**SUMBER:** BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (2024)

Agustus 2023. Perdagangan masih menempati posisi teratas, diikuti pertanian, industri pengolahan, akomodasi dan makan-minum, konstruksi, serta jasa pendidikan.

Struktur perekonomian DIY didominasi lima kategori sebelum masa pandemi (2018-2019). Kelima kategori tersebut adalah industri pengolahan; konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan-minum; pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Pandemi Covid-19 menyebabkan posisi penyediaan akomodasi dan makan-minum serta perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor tergusur oleh kategori informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan

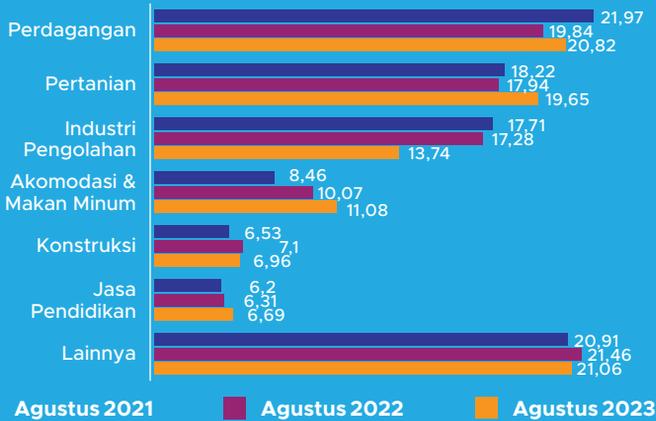
pada 2020.

Namun, pada 2021-2023, penyediaan akomodasi dan makan-minum mampu kembali ke posisi lima besar dan menggeser jasa pendidikan. Adapun perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor masih di bawah informasi dan komunikasi.

### Potensi dan Keunggulan Wilayah

Dalam analisis *horizon scanning* untuk *innovation planning* terhadap potensi dan keunggulan guna pengembangan sektor industri di DIY, tim konsorsium periset mendapatkan berbagai temuan. Berdasarkan data Yogyakarta dalam Angka Tahun 2023, terdapat lima sektor unggulan di Kota

## HASIL IDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DI DAERAH/WILAYAH TARGET BERDASARKAN LAPANGAN USAHA (PERSEN)



SUMBER: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (2024)

Yogyakarta, yang meliputi industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan-minum; informasi dan komunikasi; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; serta jasa pendidikan.

Kabupaten Sleman, sebagai bagian integral dari DIY, menonjolkan potensi dan keunggulan yang memancarkan pesona keindahan alam, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi. Wilayah ini menjadi salah satu pusat pendidikan terdepan di Indonesia. Di sana tersebar 37 perguruan tinggi, yang empat di antaranya perguruan tinggi negeri.

Potensi pendidikan di Sleman melibatkan berbagai aspek, dari

perguruan tinggi prestisius hingga inisiatif-inisiatif yang mendukung pendidikan berkualitas. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Sleman tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga sebagai pusat inovasi dan penelitian yang berkontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kabupaten Sleman juga menawarkan potensi pariwisata yang memikat, seperti wisata alam dan warisan budaya, yang menjadi tujuan favorit bagi wisatawan yang mencari petualangan, kedamaian, dan keindahan alam. Obyek wisata seperti Gunung Merapi; desa di

kawasan wisata Kaliurang, Kuning, dan Sambirejo; taman rekreasi Kali Kuning dan Kaliurang Park; Candi Prambanan dan candi-candi lainnya; kesenian dan tradisi; pusat kreativitas dan seni; serta kuliner tradisional menjadi daya tarik kabupaten ini.

Sleman juga menjadi lumbung pangan karena pertanian di kabupaten ini didominasi berbagai jenis tanaman pangan, termasuk padi, jagung, kedelai, dan tanaman sayuran. Keberagaman jenis tanaman ini menunjukkan fleksibilitas lahan pertanian di wilayah tersebut. Padi, sebagai tanaman pangan utama, tumbuh subur di sawah-sawah yang tersebar di berbagai kecamatan.

Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi pariwisata yang beragam, baik wisata alam berupa pantai, gua, bukit, air terjun, pegunungan, dan tempat bersejarah, maupun wisata budaya dan wisata religi. Obyek wisata pantai menjadi unggulan kabupaten yang terbentang 72 kilometer di wilayah selatan dari ujung barat ke ujung timur itu. Terdapat kawasan yang terdiri atas delapan pantai yang berdekatan, yaitu Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sili, Sundak, dan Ngandong.

Gunungkidul juga memiliki wisata alam unik berupa kawasan karst yang meliputi sepuluh wilayah kecamatan dengan luas 13 ribu kilometer persegi. Keunikan tersebut

bercirikan fenomena di permukaan (eksokarst) dan bawah permukaan (endokarst). Fenomena permukaan meliputi bentukan positif berwujud perbukitan karst berjumlah lebih dari 40 ribu bukit yang berbentuk kerucut. Bentuk negatifnya berupa lembah-lembah karst dan telaga karst. Sedangkan fenomena bawah permukaan meliputi 119 gua karst dengan hiasan stalaktit dan stalagmit serta semua aliran sungai bawah tanah.

Tempat wisata di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul yang banyak dikunjungi wisatawan antara lain Gua Ngingrong dan Lembah Karst Mulo di Kecamatan Wonosari; Gua Jlamprong, Gua Kali Suci, Gua Jomblang, dan Gua Grubug di Kecamatan Semanu; Gua Seropan di perbatasan Kecamatan Semanu dan Kecamatan Ponjong; Gua Cokro di Kecamatan Ponjong; serta Gua Pindul di Kecamatan Karangmojo.

Adapun Kabupaten Bantul memiliki potensi dan keunggulan di sektor pertanian, yaitu pengembangan kawasan pertanian terintegrasi (*integrated farming*), dengan komoditas utama bawang merah dan komoditas pendukung padi dan cabai. Target pengembangannya pada 2022-2024 seluas 1.000 hektare. Terdapat empat kawasan sentra produksi pangan di kabupaten ini, yaitu Selopamiro, Srigading, Parangtritis, dan Gadingharjo. Kabupaten Bantul juga memiliki

potensi perikanan berupa produksi perikanan tangkap dan perikanan pendukung.

Selain itu, Bantul memiliki potensi ekonomi kreatif. Industri kreatif menjadi salah satu sektor unggulan, selain pertanian dan pariwisata. Sektor kerajinan tumbuh sangat pesat dengan produk yang menjadi komoditas baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Sebanyak 70 persen produk kerajinan di DIY merupakan produk industri kerajinan di Kabupaten Bantul, yakni kerajinan keramik, kerajinan kulit, aksesoris keris, batik, kerajinan bambu, kayu batik, dan lain-lain. Karena itu, Kabupaten Bantul menetapkan industri kreatif sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Seperti wilayah lain di DIY, Kabupaten Bantul memiliki potensi pariwisata berupa wisata alam dan buatan, yang mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten ini sehingga jumlah hotel dan restoran pun bertambah.

Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi dan keunggulan sebagai kawasan aerotropolis berupa pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan kawasan *smart agriculture*, *smart tourism*, dan destinasi wisata bisnis atau MICE (pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran).

Di Kulon Progo, sebagai ba-

gian dari perencanaan aerotropolis, akan diterapkan sistem ekonomi sirkuler untuk mendukung terwujudnya kawasan kota futuristik; pengembangan sains, teknologi, dan inovasi menuju kota cerdas (*science techno city*); pengembangan konektivitas; serta pengembangan pelayanan kesehatan bertaraf internasional.

Kabupaten ini juga memiliki potensi dan keunggulan di bidang ekonomi kreatif dan industri serta pariwisata berkelanjutan, seperti pelestarian kawasan cagar budaya, untuk menjaga kelestarian potensi ekologis dan budaya warisan leluhur.

## Kondisi Angkatan Kerja

Pekerja tangguh, produktivitas, dan inovasi menjadi tiga kata kunci utama dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan situasi dan perkembangan dunia yang cepat, *agile* (tangkas), dan masif, kompetensi pekerja harus mengikuti perkembangan abad ke-21 dan Revolusi Industri 4.0.

Definisi pekerja tangguh adalah pekerja yang memiliki kapasitas adaptif dan tangkas terhadap perkembangan global, memiliki pengetahuan dan keterampilan kompetensi yang cukup dan sesuai dengan perkembangan global, serta memiliki karakter pekerja



Pedagang batik. Dok TEMPO/STR/Yovita Amalia

“istimewa” sesuai dengan kearifan lokal Yogyakarta. Karakter pekerja “istimewa” DIY adalah pekerja yang *sawiji*, *greget*, *sungguh*, *golong gilig*, dan *ora mingkuh*.

*Sawiji* artinya berfokus pada tujuan secara terpadu dan terintegrasi. *Greget* bermakna kegigihan dan kerja keras yang dinamis atau semangat. *Sungguh* berarti kepercayaan diri dalam bertindak, tapi tetap rendah hati meskipun telah mumpuni atau tidak sombong. *Golong gilig* artinya rasa persatuan, gotong-royong. Sedangkan *ora mingkuh* bermakna tidak mudah menyerah dan siap menghadapi risiko terhadap mandat dan amanah pekerjaan atau bertanggung jawab. Pembentukan karakter pekerja tangguh ini dimulai dari individu, keluarga, dan komunitas.

Hasil dari diskusi menyatakan terdapat perbandingan signifikan dalam hal ketangguhan antara pekerja dari Yogyakarta dan dari luar Yogyakarta. Pekerja di Yogyakarta umumnya adalah pekerja rentan, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk membangun pribadi pekerja tangguh. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penguatan pendidikan vokasional, peningkatan karakteristik pekerja istimewa, dan peningkatan literasi digital.

Strategi dalam peningkatan karakteristik pekerja “istimewa” adalah melalui peningkatan kegiatan berbasis komunitas yang inovatif dan kreatif, penguatan literasi digital dan pendidikan vokasional, peningkatan kualitas pendidikan global, percepatan transformasi digital, serta percepatan ekonomi

digital.

Berdasarkan data BPS, jumlah orang angkatan kerja di DIY pada Februari 2024 adalah 2,2 juta. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 73,18 persen. Jumlah tersebut menurun 0,25 persen dibanding Februari 2023.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 sebesar 3,24 persen, turun 0,34 persen dibanding Februari 2023 (3,58 persen). Penduduk DIY yang bekerja sebanyak 2,13 juta orang atau 96,76 persen dari total angkatan kerja di DIY. Sebagian besar penduduk yang bekerja adalah pekerja penuh (64,25 persen), sementara pekerja paruh waktu sebanyak 30,74 persen dan setengah penganggur 5,01 persen.

Lapangan pekerjaan yang persentase penyerapan tenaga kerjanya meningkat terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (3,14 persen); administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (1,8 persen), serta industri pengolahan (1,49 persen). Sedangkan lapangan pekerjaan yang menurun terutama pada bidang penyediaan akomodasi dan makan-minum (1,89 persen), perdagangan besar dan eceran (1,53 persen), dan jasa lainnya (0,93 persen).

Sebanyak 1,2 juta orang (56,33 persen) bekerja pada kegiatan informal atau turun 2,2 persen

jika dibandingkan dengan Februari 2023 (58,53 persen).

Pemetaan komposisi kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan tim konsorsium periset memperlihatkan, pada rentang 2017-2022, penduduk DIY menunjukkan tren pekerjaan yang menarik, terutama di kalangan lulusan vokasi. Kondisi ekonomi dan pendidikan yang berkembang di DIY telah menciptakan peluang kerja di berbagai sektor.

Sebagian besar lulusan vokasi DIY, misalnya, menemukan pekerjaan di sektor industri dan manufaktur. Jabatan-jabatan di sektor ini melibatkan teknisi, operator mesin, dan tenaga terampil lainnya. Peningkatan jumlah perusahaan manufaktur di DIY selama periode ini memberikan dampak positif terhadap kesempatan kerja bagi lulusan vokasi.

Sektor jasa juga memainkan peran penting. Banyak lulusan vokasi bekerja di sektor perhotelan, pariwisata, dan pelayanan konsumen. Jabatan seperti koki, pramugari, dan petugas pelayanan pelanggan juga menjadi pilihan populer di antara lulusan vokasi DIY.

Tidak banyak anak muda yang mau terjun ke pertanian tradisional, tapi pertanian modern menjadi salah satu sektor yang menarik minat lulusan vokasi. Mereka terlibat dalam teknologi pertanian, manajemen sumber daya alam, dan pemeliharaan peralatan pertanian.

## POTENSI DAERAH BERDASARKAN TEMUAN RISET

### Arah Pembangunan Kewilayahan

#### POTENSI KABUPATEN/KOTA DIY

##### Kabupaten Kulon Progo

Jasa konstruksi mendukung proyek strategis nasional dan kota aerotropolis; ekonomi kreatif

##### Kabupaten Sleman

Perdagangan untuk mendukung kawasan perkotaan Yogyakarta; ekonomi kreatif mendukung pariwisata berbasis alam; pertanian milenial.

##### Kota Yogyakarta

Ekonomi kreatif mendukung pariwisata berbasis budaya heritage; ekonomi berbasis teknologi dan pengetahuan (knowledge based sector).

##### Kabupaten Bantul

Industri manufaktur; ekonomi kreatif mendukung pariwisata berbasis budaya-alam; pertanian milenial.

##### Kabupaten Gunung Kidul

Ekonomi kreatif mendukung pariwisata berbasis alam (*geopark* dan bahari); perikanan kelautan.

No	Tema Utama Pengembangan	Ketentuan Umum Pengaturan
1	Pelestarian lingkungan dan penunjang ekonomi wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian dan perlindungan tinggi dengan pengembangan terbatas sesuai dengan ketentuan terkait</li> <li>• Arah kegiatan: konservasi, budaya, pariwisata, pertanian</li> </ul>
2	Kawasan industri terpadu berbasis sumber daya alam wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sedang-tinggi berbasis potensi lokal</li> <li>• Arah kegiatan: perdagangan, jasa, industri terpadu, pertanian, pariwisata</li> </ul>
3	Koridor ekonomi lokal yang terintegrasi dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sedang-tinggi berbasis potensi lokal</li> <li>• Arah kegiatan: perdagangan, jasa, pertanian, pariwisata</li> </ul>
4	Regional economic hub dan wilayah pemajuan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan tinggi sebagai pusat ekonomi wilayah</li> <li>• Arah kegiatan: perdagangan dan jasa, pariwisata, pendidikan, industri terpadu</li> </ul>
5	Wilayah penunjang pariwisata berbasis lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sedang dengan memperhatikan faktor lingkungan</li> <li>• Arah kegiatan: perdagangan, jasa, pertanian, pariwisata, industri</li> </ul>

#### Modal Utama DIY

1. Pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Indeks pembangunan manusia tertinggi nasional.
3. Indeks pembangunan kebudayaan tertinggi nasional.
4. Angka harapan hidup tinggi di atas rata-rata nasional.
5. Sektor pariwisata terus menunjukkan pertumbuhan..

## MENYIAPKAN PEKERJA TANGGUH YANG ISTIMEWA

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membutuhkan investasi sekitar Rp 40 triliun per tahun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5 persen hingga 2028. Investasi ini diharapkan dapat mendorong produk domestik regional bruto (PDRB) DIY menjadi sekitar Rp 150 triliun per tahun.

Pada kondisi makroekonomi seperti itu, peluang kerja bisa diciptakan bagi 2,5 juta pekerja per tahun. Kebutuhan tenaga kerja ini terdiri atas 1,8 juta pekerja nonvokasi dan 0,7 juta pekerja vokasi per tahun. Dalam kondisi ini, diperkirakan jumlah penganggur vokasi sekitar 40 ribu pekerja pada 2028. Kondisi itu tergambar melalui analisis pemodelan *system dynamic* yang dilakukan tim ekosistem kemitraan.

Kajian ini juga menghasilkan enam dimensi *foresight*. Dimensi pertama adalah dimensi sosial dengan faktor penguangkit keluarga tangguh dan evolusi kerja, lalu dimensi teknologi dengan faktor penguangkit transformasi digital dan keamanan data. Berikutnya dimensi ekonomi dengan faktor penguangkit ekonomi digital serta *green, blue, orange, and silver economy* (lansia).

Kemudian dimensi lingkung-

an dengan faktor penguangkit krisis perubahan iklim global dan ketahanan pangan, dimensi politik dengan faktor penguangkit kebijakan penguatan pendidikan vokasi dan strategi adaptif kolaboratif, serta dimensi tata nilai dengan faktor penguangkit keistimewaan Yogyakarta dan karakter pekerja istimewa.

Rencana aksi implementasi pengembangan tenaga kerja dan inovasi di DIY terdiri atas tiga periode. Penguatan pendidikan vokasi menjadi bagian dalam rencana aksi periode pertama (2025-2026), yang mencakup enam rencana aksi. Selain penguatan pendidikan vokasi, rencana aksi itu adalah persiapan pekerja tangguh sesuai dengan karakteristik istimewa melalui pendidikan dan pelatihan, pembangunan keluarga tangguh sebagai fondasi, penguatan pendidikan vokasi, kolaborasi pendidikan dan ketenagakerjaan, pelatihan dan pemagangan, serta peningkatan kapasitas modal manusia sesuai dengan kebutuhan daerah.

Periode kedua (2027-2029) mencakup empat rencana, yaitu pengembangan pekerja tangguh, inovasi daerah, literasi digital, dan kesiapan menghadapi disrup-



*Pembuatan kriya kayu Mahasiswa AKN Seni dan Budaya Yogyakarta yang dijadikan perhiasan khas Yogyakarta. Dok vokasi.kemdikbud.go.id*

si ekonomi. Adapun periode ketiga (2030) meliputi tiga rencana, yakni mengembangkan ekosistem kemitraan pendidikan vokasi yang kuat, mengembangkan keahlian

digital, serta mengembangkan keahlian sains, teknologi, teknik, matematika (STEM), dan sosial humaniora.



TUBAN

BANGKALAN

PAMEKASAN

SUMENEP

LAMONGAN

SAMPANG

BOJONEGORO

GRESIK

SURABAYA

NGAWI

SIDOARJO

MADIUN

JOMBANG

MOJOKERTO

NGANJUK

MAGETAN

PASURUAN

SITUBONDO

PONOROGO

KEDIRI

PROBOLINGGO

PACITAN

TULUNGAGUNG

BLITAR

BATU

LUMAJANG

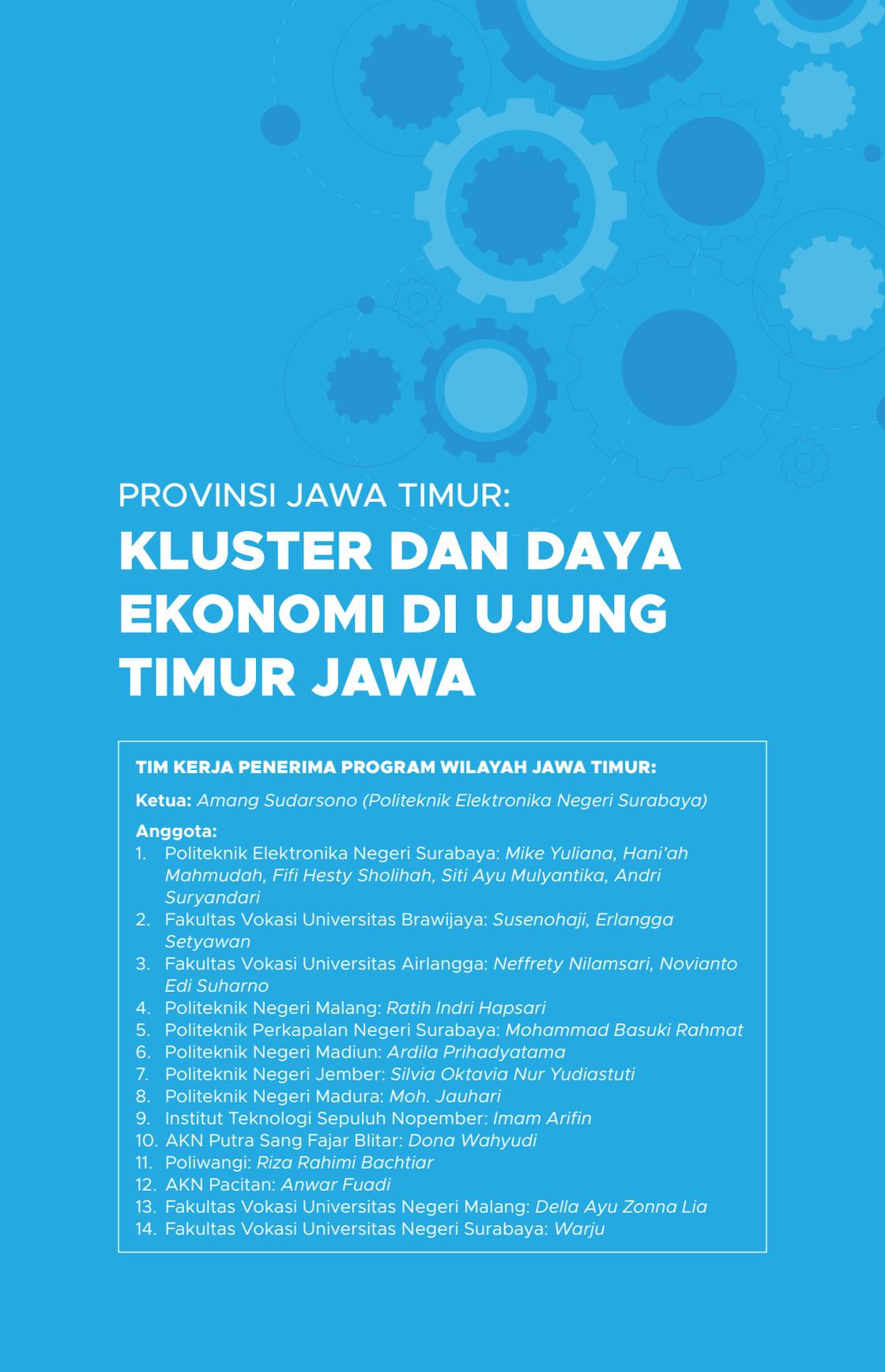
BONDOWOSO

TRENGGALEK

MALANG

JEMBER

BANYUWANGI



# PROVINSI JAWA TIMUR: **KLUSTER DAN DAYA EKONOMI DI UJUNG TIMUR JAWA**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH JAWA TIMUR:**

**Ketua:** *Amang Sudarsono (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya: *Mike Yuliana, Hani'ah Mahmudah, Fifi Hesty Sholihah, Siti Ayu Mulyantika, Andri Suryandari*
2. Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya: *Susenoahaji, Erlangga Setyawan*
3. Fakultas Vokasi Universitas Airlangga: *Neffrety Nilamsari, Novianto Edi Suharno*
4. Politeknik Negeri Malang: *Ratih Indri Hapsari*
5. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya: *Mohammad Basuki Rahmat*
6. Politeknik Negeri Madiun: *Ardila Prihadyatama*
7. Politeknik Negeri Jember: *Silvia Oktavia Nur Yudiasuti*
8. Politeknik Negeri Madura: *Moh. Jauhari*
9. Institut Teknologi Sepuluh Nopember: *Imam Arifin*
10. AKN Putra Sang Fajar Blitar: *Dona Wahyudi*
11. Poliwangi: *Riza Rahimi Bachtiar*
12. AKN Pacitan: *Anwar Fuadi*
13. Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang: *Della Ayu Zonna Lia*
14. Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya: *Warju*

*Klusterisasi versi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi provinsi di timur Jawa itu. Sebagian daerah punya daya yang memerlukan intervensi infrastruktur demi pengembangannya.*

Sudah merupakan pengetahuan umum, pembagian wilayah di Jawa Timur berdasarkan karakteristik sosial dan budaya mengenal telatah-telatah Mataraman, Arek, Pandalungan, dan Madura Pulau. Ada pula telatah-telatah kecil, seperti Panoragan, Osing, Tengger, Madura Bawean, Madura Kangean, dan Samin. Tapi, demi tujuan identifikasi potensinya yang layak diunggulkan, ada kategorisasi lain yang berguna: Labanegoro, Wilis Utara, Wilis Selatan, Metropolitan, Malang Raya, Probomajang, Ijen, dan Madura.

Kategorisasi yang dilabeli sebagai kluster itu terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2019–2024. Penetapanannya dibuat sebagai bagian dari langkah-langkah pemerintah provinsi untuk pengembangan wilayah, demi meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi,

infrastruktur, sosial, dan budaya.

Kegunaan kluster menjadi relevan dalam penelitian yang berkenaan dengan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah. Kluster yang ditetapkan berdasarkan keidentikan kondisi geografi, sosial, topologi, sumber daya alam, dan lain-lain itu membantu mengatasi problem yang bisa timbul akibat terlalu banyaknya kabupaten/kota yang sebetulnya memiliki karakter serupa di Jawa Timur. Kluster memungkinkan tim peneliti bisa lebih mendetail dalam melakukan observasi.

Dengan berpegang pada “klusterisasi” tersebut, tim peneliti—sebuah konsorsium dari 14 perguruan tinggi vokasi di Jawa Timur—mendapati potensi atau daya ekonomi wilayah berpenduduk 41,64 juta jiwa<sup>1</sup> (14,83 persen dari total penduduk Indonesia) itu sangat beragam. Potensi ini meli-

---

<sup>1</sup> Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri per Desember 2023.

**PETA JAWA TIMUR YANG DIKELOMPOKKAN PER KLUSTER MENURUT KEIDENTIKAN KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL, TOPOLOGI, SUMBER DAYA ALAM, DAN LAIN-LAIN.**



**SUMBER:** RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024

puti “*usual suspects*”, yakni sektor atau lapangan usaha yang bersifat “tradisional”, ekstraktif, perdagangan, dan industrial, serta sektor “modern” yang berhubungan dengan jasa.

Ada delapan kluster. Ada semacam “irisan” sektor-sektor yang serupa di setiap kluster. Tapi ada juga sektor yang hanya terdapat di kluster tertentu. Di semua kluster, termasuk Kluster Metropolitan,

yang meliputi Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan, sektor pertanian terlihat masih berlaku. Di sebagian besar kluster juga ada sektor pariwisata dan perkebunan. Yang cenderung spesifik di kluster tertentu adalah sektor industri, perikanan dan kelautan, peternakan dan perikanan, kehutanan, perniagaan dan jasa,

serta pertambangan.

Dalam penelitian, yang merupakan tinjauan ke depan (*foresight*), potensi-potensi tersebut mengemuka melalui tahap-tahap *horizon scanning* atau pendeteksian tanda-tanda awal perubahan—meliputi pembacaan terhadap data sekunder, artikel akademik, artikel koran, laporan riset, dan lain-lain—serta diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Di antara data yang dicermati dan diolah<sup>2</sup> ada data pertumbuhan ekonomi, pengeluaran publik, sumber daya manusia, termasuk perkembangan lulusan pendidikan vokasi yang bekerja berdasarkan lapangan usaha, dan data lain yang menyangkut tren.

Di samping ekonomi, untuk meneropong kondisi dan merancang langkah-langkah demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi pada periode lima tahun mendatang itu, aspek-aspek lain ini pun menjadi faktor penting yang turut diperhitungkan: sosial, politik, teknologi, dan lingkungan.

Potensi-potensi yang dapat diidentifikasi—pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, pertam-

ban, perdagangan, industri, dan pariwisata—memang selama ini berperan dalam perekonomian Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebagian sektor ini ikut berkontribusi secara berarti dalam pertumbuhan ekonomi. Pada 2022, misalnya, dari pertumbuhan 5,34 persen, kontribusi terbesar, 1,9 persen, berasal dari industri pengolahan, disusul perdagangan (1,28 persen) dan sektor lain (1,40 persen). Sektor pertanian kurang dari 1 persen (0,18 persen).

### **Klaster, Masalah, dan Potensi**

Tim peneliti mendapati, di bagian utara dari arah perbatasan Jawa Tengah, kawasan Gerbang Kertasusila, yang meliputi Kluster Labanegoro dan sebagian kabupaten dari Kluster Metropolitan, merupakan pusat pengembangan industri, investasi, *hub* atau titik sentral arus barang dan orang, baik domestik maupun internasional; juga daerah ekspansi kilang minyak (Tuban dan Bojonegoro) dan area ekonomi khusus (Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIPE di Gresik). Di JIPE, yang diresmikan Presiden

---

<sup>2</sup> Pengolahan dilakukan dengan Powersim, perangkat lunak untuk membuat simulasi, menguji skenario, dan melakukan analisis mendalam serta ketidakpastian.

Kluster Kewilayahan	Masalah	Potensi
Labanegoro	Tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi	Pertanian, perikanan dan kelautan, industri, perdagangan, pariwisata, peternakan, minyak dan gas bumi
Wilis Utara, Wilis Selatan, Malang Raya	Ada kondisi wilayah tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar, juga pergerakan perekonomiannya, khususnya di daerah-daerah pegunungan, terpencil, dan terdalam	Pertanian, perkebunan, perindustrian, pariwisata, kehutanan
Metropolitan	Penduduk memiliki pergerakan perekonomian yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi tinggi; indeks pembangunan manusia tinggi, namun wilayah ini mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi disertai kesenjangan pendapatan yang tinggi pula	Jasa, niaga, perindustrian, pertanian, pariwisata
Probomajan, Ijen, Madura	Tingkat kemiskinan tinggi, terutama Kabupaten Probolinggo, dengan jumlah penduduk miskin yang cukup banyak; dua kabupaten juga mempunyai indeks pembangunan manusia yang rendah	pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri, pertambangan

Tabel 15. Kluster Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP-JMD) Jawa Timur Tahun 2019-2024

Joko Widodo pada 9 Maret 2018, terdapat industri metal, industri elektronik, industri kimia, industri energi, dan industri pendukung logistik.

Mengarah ke timur, ada kawasan Madura, yang meliputi Madura dan pulau-pulau di sekitarnya. Ini merupakan sentra pengembangan industri perikanan



*Santri menjemur pakaiannya di Pondok Pesantren. TEMPO/Prima Mulia*

dan peternakan sapi potong.

Bergeser ke selatan, di belahan barat, ada kawasan Lingkar Wilis, yang terdiri atas Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Madiun, Magetan, dan Ngawi. Kawasan ini menjadi sentra agroindustri, agrowisata, multikultura, dan industri pengolahan ringan. Di belahan timur, ada kawasan Bromo Tengger Semeru, yang meliputi Pasuruan, Probolinggo, Batu, Malang, dan Lumajang. Di sini, di samping berpusatnya pariwisata, agrobisnis, lumbung energi listrik, dan industri pengolahan, terdapat pula Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari (berlokasi di Kabupaten Malang) sebagai sentra pengembangan industri teknologi digital dan pariwisata.

Tak ketinggalan, di bagian penghabisan, belahan paling timur, ada kawasan Selingkar Ijen, yang meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Yang menonjol di sini, selain pusat pariwisata alam dan budaya, adalah kegiatan yang menyangkut perlintasan barang dan orang dari Jawa ke Bali atau sebaliknya. Di Banyuwangi, seperti halnya Tuban dan Bojonegoro, terdapat pula potensi minyak bumi.

Diskusi-diskusi dengan para pemangku kepentingan mengungkap aneka cerita yang sayang

untuk disisihkan. Sebagai fakta, cerita-cerita ini memberi wajah bagi statistik yang ada atau, tepatnya, menjadi petunjuk mengenai berlangsungnya tren. Misalnya tentang Kediri yang ternyata, belakangan, tidak sepenuhnya bergantung pada Gudang Garam.

Perusahaan rokok yang telah beroperasi di Kota Tahu sejak 1958 itu memang berkontribusi sangat besar—lebih kurang 80 persen—dalam produk domestik regional bruto Kediri. Tapi, dari forum diskusi terpumpun, tim peneliti mengetahui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai berperan signifikan dalam menggerakkan ekonomi Kota Kediri. Data Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (UMTK) Kediri memperlihatkan terus bertambahnya pelaku UMKM. Pada 2023, misalnya, jumlah pelaku UMKM mencapai 9.553. Angka ini merupakan kenaikan 2.476 pelaku dari tahun sebelumnya (7.077 pelaku). Sebagian besar bergerak di bidang usaha makanan.

Informasi yang didapat mengekspos peran Dinas Koperasi UMTK Kediri dalam memberikan dukungan bagi pelaku UMKM. Peran yang dijalankan di antaranya memberikan pendampingan melalui peningkatan kapasitas—antara lain dengan memanfaatkan Balai-balai pelatihan. Tujuannya

agar mereka mampu mengelola keuangan dan berinovasi untuk menghadapi persaingan.

Dari aspek sumber daya manusia, Kota Kediri termasuk daerah di Jawa Timur yang pengembangannya bagus. Karena itu, keterbatasan sumber daya alam tidak menjadikannya tertinggal. Faktanya, ada daerah yang kaya akan sumber daya alam, tapi, karena terdapat kendala terkait dengan faktor-faktor yang bisa mendukung pemanfaatannya, pembangunan di daerah itu mengalami hambatan.

Misalnya Pacitan. Tidak tersedianya infrastruktur yang baik, terutama di area yang jauh dari kota, menyebabkan pengembangan sumber daya alam di kabupaten ini terbatas. Sebagai contoh, sempat ada rencana proyek pembangunan fasilitas pengolahan ikan. Survei telah dilaksanakan. Ada investor yang tertarik. Tapi, setelah perhitungan dibuat, angkanya tidak “masuk” karena terdapat kendala ketersediaan air dan infrastruktur, termasuk listrik.

Tetangga Pacitan, yakni Ponorogo, menghadapi rintangan lain. Kabupaten ini sebenarnya merupakan penghasil komoditas pertanian, termasuk penyangga kebutuhan pangan Jawa Timur. Tapi mayoritas petaninya adalah orang yang sudah lanjut usia. Ada

problem siapa yang akan meneruskan kerja di sektor ini karena generasi mudanya tidak tertarik bertani, terutama kalau masih dilakukan secara tradisional. Daerah-daerah lain yang masih punya potensi di sektor pertanian punya masalah yang sama.

Ada pula daerah yang berlimpah pendapatannya dari eksplorasi sumber daya alam, ekonominya tumbuh, tapi kegiatan itu belum bisa mengakomodasi masyarakat setempat. Belum sampai menimbulkan *paradox of plenty*, yakni sumber daya alam yang berlimpah tak serta-merta menyejahterakan; masih ada yang tidak bisa ikut memperoleh manfaatnya. Di Bojonegoro, hal ini terjadi tersebut oleh, di antaranya, belum bertemunya (*link and match*) keberadaan sekolah vokasi di sana dengan kebutuhan ketenagakerjaan pertambangan minyak dan gas bumi.

Berkenaan dengan penyiapan kapasitas calon tenaga kerja, tim peneliti juga menemukan potensi besar dari keberadaan pesantren, yang jumlahnya lebih dari 4.000, di berbagai pelosok wilayah Jawa Timur. Potensi ini, terutama, berupa calon tenaga kerja muda. Masalahnya, agar mereka yang berminat terjun ke sektor-sektor ekonomi dapat terakomodasi, terserap di berbagai lapangan usaha yang ada, perlu penyiapan. Dari

sudut pandang vokasi, setidaknya dibutuhkan pelatihan.

Perlu perencanaan ketenagakerjaan menyeluruh untuk merealisasi hal itu, bahkan pendekatan lebih dulu ke pesantren-pesantren. Dengan kata lain, upayanya tidak dapat dilakukan terpisah-pisah dan sporadis.

Diskusi lain yang isunya juga relevan dengan situasi yang sedang berlaku adalah tentang bagaimana dunia usaha merespons urgensi untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan tujuan menyelamatkan lingkungan. Hal ini termasuk bagaimana meng-“hijau”-kan praktik bisnis yang ada. Tema *green jobs* atau pekerjaan yang dapat membantu melindungi ekosistem dan biodiversitas dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan menjadi subyek pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri, pemerintah provinsi, pelaku industri, serta GIZ, lembaga kerja sama internasional dari Jerman yang di Indonesia berfokus pada perlindungan lingkungan, energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus dibersihkan untuk memastikan hal itu terealisasi. Begitu pula halnya dengan potensi-potensi yang telah diidentifikasi dan patut diunggul-

kan dalam lima tahun mendatang: diperlukan kolaborasi antarinstansi bahkan sebelum tahap penyusunan rencana demi kesamaan “frekuensi” menyangkut tujuan yang hendak dicapai.

Menurut hasil analisis data yang dilakukan tim peneliti, Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sedangkan beberapa kota lain tumbuh ajek saja. Faktor-faktor kunci yang mendukung pertumbuhan ekonomi Surabaya dan Sidoarjo adalah keberadaannya sebagai pusat ekonomi dan bisnis, infrastruktur yang baik, serta adanya universitas berkualitas.

Agar kabupaten/kota lain di setiap kluster di Jawa Timur dapat mencapai pertumbuhan yang setara, demi meningkatkan pemerataan ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya, diperlukan langkah-langkah strategis. Daya tarik daerah bisa dikerek dengan stimulasi investasi, melalui kebijakan yang mendukung, dan pemberian insentif kepada pemilik modal. Investasi untuk pembangunan infrastruktur juga perlu diperkuat untuk memperbaiki konektivitas dan daya tarik industri. Dukungan penuh pemerintah setempat dalam menciptakan lingkungan usaha yang menunjang adalah keniscayaan.

## AGAR PENDIDIKAN VOKASI MENJADI SOLUSI

Potensi lokal merupakan faktor penting, yang bisa diandalkan sebagai fokus dari strategi pembangunan daerah, untuk memastikan ekonomi tumbuh berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demi mengarahkan pembangunan dapat dilakukan secara terstruktur, diperlukan pengidentifikasian serta upaya mengembangkan sumber daya alam, manusia, budaya, dan infrastruktur yang khas di setiap daerah.

Dengan menjalankan hal itu, investasi yang tepat dan penciptaan lapangan kerja berbasis keunggulan dan kearifan lokal akan mampu mendorong pertumbuhan yang merata. Di sini peran kunci yang tak bisa dihindarkan adalah sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Semua hal tersebut bertumpu pada asumsi bahwa tenaga kerja lokal yang terampil dan relevan dengan kebutuhan pasar dapat diandalkan. Dalam realitasnya, hal ini tidak sepenuhnya berlaku. Ada ketimpangan antara keluaran institusi pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Hal ini terjadi juga di Jawa Timur.

Pendidikan vokasi berpeluang mengisi celah itu. Bertujuan

menghasilkan lulusan siap kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pendidikan vokasi dapat memainkan peran penting. Ia dapat menjadi solusi.

Tantangan yang dihadapi dan harus diatasi Jawa Timur adalah ketidakselarasan antara lulusan pendidikan vokasi dan kebutuhan DUDI, kualitas pengajaran dan fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya keterlibatan industri dalam proses pendidikan vokasi. Data yang ada menunjukkan lulusan pendidikan vokasi merupakan penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur: 10-14 persen untuk lulusan sekolah menengah kejuruan dan 6-8 persen untuk lulusan diploma.

Maka yang diperlukan adalah model inovasi dan kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga pendidikan vokasi dan industri.

Ada hal baiknya, sebagai fondasi: pemerintah telah mengambil langkah positif melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang diperkuat dengan



Alat Smart Biokonversi buatan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. vokasi.kemdikbud.go.id

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Keduanya mengatur pelibatan DUDI dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah pun dijalankan demi memastikan keselarasan antara kebutuhan industri dan keterampilan lulusan vokasi. Penelitian ini, yang diadakan sehubungan dengan program itu, telah mengidentifikasi pula berbagai faktor yang memengaruhi pengembangan pendidikan vokasi. Analisis terhadap berbagai penggerak perubahan (*drivers of change*), yang

mencakup aspek sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, dan budaya, menghasilkan skenario perencanaan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor pendidikan, dan industri untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dalam otomatisasi dan *artificial intelligence*, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Harapan dari pendekatan tersebut adalah terciptanya ekosistem pendidikan vokasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar—yang berpotensi mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong inovasi berbasis potensi daerah.



SAMBAS

SINGKAWANG

BENGKAYANG

LANDAK

MEMPAWAH

SANGGAU

PONTIANAK

KUBU  
RAYA

SEKADAU

KAYONG  
UTARA

KETAPANG

KAPUAS HULU

SINTANG

MELAWI



# PROVINSI KALIMANTAN BARAT: **PARIWISATA, CANTIK SAJA TIDAK CUKUP**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH KALIMANTAN BARAT:**

**Ketua:** *Topan Prihantoro (Politeknik Negeri Pontianak)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Pontianak: *Rika Riyanti, Muhammad Ali, Alban Naufal, Zaenal Mutaqin, Tri Pratomo, Indah Anjar Reski, Kunarsih*
2. Politeknik Negeri Sambas: *Budi setiawan, Hikmah Trishawati*
3. Politeknik Negeri Ketapang: *Erick Radwitya, Trian Adimarta*

*Singkawang telah menjadi etalase wisata unik untuk Provinsi Kalimantan Barat. Industri pelancongan siap mendorong ekonomi daerah.*

Seorang dosen politeknik di Pontianak pernah harus menunda pulang dari kunjungan di Jakarta karena kehabisan tiket pesawat. Saat itu, semua penerbangan ke ibu kota Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut sudah penuh karena banyak pelancong ingin berkunjung ke Singkawang.

Singkawang memang menjadi pusat perhatian wisatawan saat beberapa perayaan tradisi digelar di sana. Perayaan-perayaan itu adalah Capgome, tahun baru Masehi, tahun baru Cina, dan sembahyang kubur. Momen ini akan dimeriahkan rangkaian acara budaya yang memikat. Ribuan pengunjung, bahkan dari luar pulau dan mancanegara, antusias datang untuk menyaksikan acara sekali dalam setahun ini.

Jadi, tak aneh, beberapa hari menjelang *event* tersebut mereka sudah berbondong-bondong terbang ke Pontianak, lalu melanjutkan perjalanan via darat selama sekitar tiga setengah jam menuju Singkawang. Kalau tak jauh-jauh hari pesan tiket pesawat, risiko tidak kebagian sangat besar. Begitu juga hotel dan penginapan mesti pesan lama sebelumnya.

Dalam beberapa hal, upacara

tradisi di Singkawang itu memang sudah seperti menjadi ikon wisata tak resmi untuk Kalimantan Barat. Kota ini lalu bagai etalase pariwisata Kalbar untuk menarik minat turis lokal dan asing.

Kenapa disebut ikon wisata tak resmi? Ya, karena sektor wisata selama ini belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mengoptimalkan perannya sebagai penyumbang bagi produk domestik regional bruto (PDRB). Pemerintah masih memprioritaskan sektor-sektor yang secara tradisi menjadi kontributor utama dalam PDRB, seperti perkebunan, perikanan, dan pertambangan.

Kini ada angin segar yang berembus dari berbagai kalangan bahwa pariwisata sangat potensial menjadi kontributor besar juga. Tentu saja berbagai langkah perbaikan perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Kelak, bukan hanya Singkawang, varian wisata lain di wilayah ini pun layak dikunjungi.

## **Kalimantan barat; Klaster dan Angka**

Kalbar secara geografis terletak pada posisi 2° 05' LU-3°

05' LS dan 108° 30'–114° 10' BT. Secara kewilayahan, provinsi ini dibagi menjadi tiga dimensi wilayah, yakni pesisir dan kepulauan, pedalaman, serta wilayah perbatasan antarnegara.

Wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Wilayah-wilayah ini memang berada di pesisir pantai.

Sedangkan wilayah pedalaman meliputi beberapa kabupaten: Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Landak, dan Ketapang. Adapun dimensi wilayah perbatasan antarnegara mencakup kabupaten-kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Apa yang akan dikembangkan di Kalimantan Barat tentu saja tak akan lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. RPJMN ini menekankan pentingnya percepatan pembangunan wilayah pulau Kalimantan berdasarkan keunggulan dan potensi daerah yang dimiliki melalui tiga kegiatan pri-

oritas:

1. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus-menerus.

Provinsi Kalimantan Barat kemudian merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018–2023 yang menjabarkan prioritas pembangunan di wilayah ini. Agenda prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

- Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung Perekonomian
- Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara umum pemberi kontribusi terbesar dalam perekonomian berdasarkan rata-rata PDRB tahun 2010–2023 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda; sektor konstruksi; serta sektor pertambangan dan penggalian. Untuk

No.	Kategori	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Potensial
B	Pertambangan dan Penggalian	Bukan Unggulan
C	Industri Pengolahan	Bukan Unggulan
D	Pengadaan Listrik, Gas	Bukan Unggulan
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Unggulan
F	Konstruksi	Bukan Unggulan
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Bukan Unggulan
H	Transportasi dan Pergudangan Bukan	Unggulan
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	Bukan Unggulan
J	Informasi dan Komunikasi	Bukan Unggulan
K	Jasa Keuangan	Bukan Unggulan
L	<i>Real Estate</i>	Bukan Unggulan
M, N	Jasa Perusahaan	Bukan Unggulan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Potensial
P	Jasa Pendidikan	Bukan Unggulan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Unggulan
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Bukan Unggulan

Tabel 16. Hasil Overlay Analysis Terhadap Sektor-Sektor Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022

**SUMBER:** BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

mendukung pengembangan dan pemanfaatan kelima sektor tersebut, diperlukan pengembangan kluster inovasi sebagai pendekatan alternatif dalam pembangunan keunggulan daya saing berbasis potensi daerah.

Adapun potensi daerah su-

dah dipetakan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang menjadi lima kluster. Kluster pertama adalah Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, dan Kubu Raya. Unggulan di kluster ini adalah pusat industri dan jasa regional berdaya saing yang menghubungkan wila-

No.	Kategori	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Potensial
B	Pertambangan dan Penggalian Bukan	Unggulan
C	Industri Pengolahan	Bukan Unggulan
D	Pengadaan Listrik, Gas	Bukan Unggulan
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Unggulan
F	Konstruksi	Bukan Unggulan
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Potensial
H	Trasportasi dan Pergudangan	Bukan Unggulan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Bukan Unggulan
J	Informasi dan Komunikasi	Bukan Unggulan
K	Jasa Keuangan	Bukan Unggulan
L	<i>Real Estate</i>	Bukan Unggulan
M, N	Jasa Perusahaan	Bukan Unggulan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Bukan Unggulan
P	Jasa Pendidikan	Bukan Unggulan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Unggulan
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Bukan Unggulan

Tabel 17. Hasil Overlay Analysis Terhadap Sektor-Sektor Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022

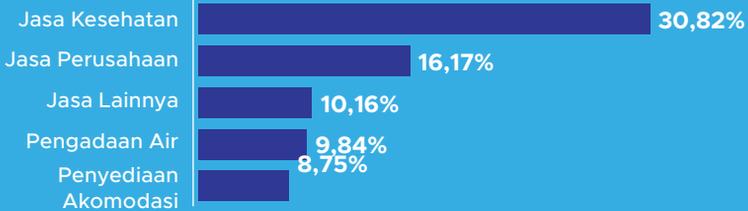
**SUMBER:** BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

yah Indonesia barat dengan ASEAN. Kluster kedua adalah Singkawang, Bengkayang, dan Sambas, yang akrab disebut Singbebas. Sektor unggulannya di kawasan ini adalah pariwisata, ekonomi kreatif domestik, ekonomi biru, dan energi terbarukan. Desa glo-

bal berkelanjutan dan lumbung pangan juga menjadi andalan kawasan ini.

Kemudian ada kluster Ketapang dan Kayong Utara. Dua kabupaten ini menjadi pusat pengembangan ekonomi biru dan hilirisasi sumber daya alam. Sektor unggul-

### PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV 2023 BERDASARKAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA



**SUMBER:** BPS JProvinsi Kalimantan Barat, 2023

Tahun	2022	2021	2020	2019	2018	Rata-rata
Pertumbuhan (%)	5,07	4,78	-1,82	5,09	5,07	3,6
PDRB	255.797,28	231.321,16	213.950	212.150	194.138,22	-

Tabel 18. Data Perkembangan Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

**SUMBER:** BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

an berupa ekonomi hijau dan lum-  
bung pangan menjadi perhatian  
di kluster Landak, Sanggau, dan  
Sekadau. Lalu ada kluster Sintang,  
Melawi, dan Kapuas Hulu, yang  
juga dengan sektor unggulan eko-  
nomi hijau serta pertambangan  
dan perkebunan. Kluster terakhir  
ini juga digadang-gadang menjadi  
penyangga untuk Ibu Kota Negara  
(IKN) Nusantara.

Berdasarkan pemetaan wi-  
layah, Kapuas Hulu memang lebih  
dekat ke IKN seandainya akses  
jalan baru kelak dibuka. Maka,  
dalam RPJPD 2025-2045, kluster  
Sintang ini akan menjadi poros  
baru terdekat untuk Kalimantan  
Barat.

Berdasarkan data dari ber-  
bagai kantor pemerintah, ekonomi  
daerah memang banyak didukung  
sektor pertanian, kehutanan, dan  
perikanan. Pada 2021, misalnya,  
Badan Pusat Statistik (BPS) Pro-  
vinsi Kalimantan Barat telah me-  
lakukan analisis potensi unggulan  
yang ada di provinsi ini meng-  
gunakan *overlay base economic  
approach*. Analisis ini digunakan  
untuk melihat kategori dan sub-  
kategori ekonomi potensial, baik  
dari sisi kontribusi maupun sisi  
pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan tabel di atas,  
terlihat bahwa pada 2021 yang  
menjadi sektor potensial adalah  
pertanian, kehutanan, dan peri-

kanan serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sedangkan yang menjadi sektor unggulan adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pada 2022 juga telah dilakukan analisis sektor-sektor unggulan yang ada di Kalbar oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat dengan menerapkan empat jenis analisis, yakni Location Quotient Analysis, Klassen Typology Method, Shift Share Analysis, dan Overlay Analysis.

Overlay Analysis merupakan analisis terakhir untuk menentukan kategori unggulan berdasarkan tiga analisis sebelumnya. Hasilnya adalah sebagai berikut.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa sektor potensial adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Untuk sektor unggulan, lapangan usahanya berasal dari pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Kalau dilihat berdasarkan sumbangannya pada pertumbuhan ekonomi, datanya bisa dilihat pada grafik Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2023 Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha.

Berdasarkan grafik itu, persentase sektor unggulan berasal dari sektor jasa kesehatan, jasa perusahaan, jasa lainnya, pengadaan air, dan penyediaan akomodasi.

Jadi, gambaran umumnya, pada 2021, 2022, dan 2023 sektor unggulan untuk mendorong ekonomi daerah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Kebijakan ekonomi daerah Kalimantan Barat 2023, merujuk pada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat (Perda Nomor 1 Tahun 2021), memasuki tahap pemantapan. Dalam tahap ini, prioritasnya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat, dan daya saing daerah. Momentum pertumbuhan ekonomi akan tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat, serta daya saing daerah dapat dipercepat.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.

## **Mendorong Sektor Pariwisata**

Berdasarkan riset yang dilakukan dan juga adanya temuan-temuan, konsorsium men-



*Cap Go Meh 2561, di Singkawang, Kalimantan Barat. TEMPO/ Tony Hartawan*

dorong agar sektor pariwisata mendapat perhatian pemerintah untuk dikembangkan. Apalagi memang sudah ditetapkan bahwa sektor ini menjadi unggulan untuk kluster Singbebas.

Di seluruh Kalimantan Barat saat ini terdapat 744 obyek wisata yang bisa menjadi andalan mendorong ekonomi. Jenis wisata yang tersedia adalah 499 wisata alam, 53 wisata buatan, 23 wisata religi, 28 wisata bahari, 16 wisata sejarah, 10 wisata kuliner, dan satu wisata pendidikan.

Bagi orang di luar Kalbar, tentu saja Singkawang dengan rangkaian acara Capgome hingga sembahyang kubur adalah daya tarik utama. Dua peristiwa budaya itu bahkan sudah mendunia karena mampu menarik pelancong internasional, yang kebanyakan dari Cina dan Hong Kong.

Warga Singkawang yang merantau juga berbondong-bondong pulang kampung untuk ikut merayakan ritual itu di kampung halaman. Arus ke Singkawang makin besar karena turis dalam negeri tak sedikit yang ingin menikmati acara khas tersebut.

Fakta ini tentu saja menunjukkan betapa besar potensi acara tahunan itu untuk menarik turis. Apalagi jika beberapa *handicap* yang selama ini ada bisa dikurangi atau dihilangkan. Salah satu persoalan yang dirasakan pengun-

jung selama ini adalah kurangnya penginapan yang memadai—baik dari segi kualitas maupun kuantitas—bagi mereka. Saat puncak acara, banyak wisatawan kesulitan mendapatkan penginapan terdekat dengan Singkawang.

Persoalan lain adalah akses menuju Singkawang yang cukup jauh, terutama bagi wisatawan dari luar pulau. Sebab, mereka harus transit dulu di Pontianak, lalu menempuh perjalanan darat selama tiga setengah jam jika lalu lintas normal. Tapi soal ini segera teratasi jika Bandara Singkawang sudah beroperasi.

Tidak hanya saat Capgome dan sembahyang kubur, pada musim liburan tahun baru Cina, Idul Fitri, dan Idul Adha kota ini juga banyak dikunjungi wisatawan. Sebab, Singkawang juga menawarkan wisata pantai yang elok. Dengan garis pantai yang sangat panjang, ada beberapa lokasi yang bisa menjadi tujuan wisata: Pantai Pasir Panjang, Pantai Tanjung Bajau, Pantai Gratis, dan lain-lain. Jika tak ingin ke pantai, wisatawan bisa memilih mendatangi Gunung Poteng atau Sungai Hang Moi.

Jadi Singkawang tak hanya kisah tentang ritus tahunan, tapi juga tentang alam yang molek. Sebenarnya, wisata alam memang bisa menjadi “senjata rahasia” Kalbar untuk membuat pundi-pun-

di pendapatan asli daerah (PAD)-nya menggelembung berat. Selain Singkawang, dua daerah seklusternya, yakni Kabupaten Bengkayang dan Sambas, kaya dengan suguhan wisata alam.

Di Bengkayang, antara lain, ada Pulau Lemukutan, yang perairannya menjadi ajang olahraga *surfing*. Di Sambas, ada pemandangan sangat eksotis di Tanjung Dato dan penangkaran penyu di Desa Sebusus. Di sini, wisatawan bisa melepas penyu menuju laut dan itu adalah pengalaman yang unik.

Kalbar masih menyimpan aset lain berupa wisata budaya yang tak kalah menarik dibanding daerah lain, Orang bisa menuju Sambas untuk menyimak acara adat Dayak yang disebut Gawai. Tradisi ini mirip *nyepi* di Bali karena pada saat momen ini warga tidak boleh ke luar rumah dalam 24 jam. Sebenarnya, kepercayaan itu juga dilakukan warga Dayak di seluruh Kalimantan, tak hanya yang berada di Sambas.

Kekayaan adat lain di Sambas adalah Istana Alwatzikoebilah, yang dulunya menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Sambas. Istana ini berdiri di Lubuk Madung, yang merupakan pertemuan tiga sungai, yakni Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Teberau.

Saat berkunjung ke Sambas,

turis tak hanya bisa menyimak istana, tapi juga menyaksikan berbagai aktivitas budaya. Sebab, kerajaan Melayu ini juga mewariskan peradaban yang sudah lama terbentuk.

Tradisi Melayu lain yang menarik adalah Robo-robo di Kabupaten Mempawah. Ini merupakan tradisi tolak bala yang digelar pada pekan terakhir bulan Safar. Pada saat menjalankan adat ini, masyarakat Melayu di Mempawah makan di luar rumah.

Apa yang diceritakan di atas baru sebagian kecil dari kekayaan obyek dan subyek wisata di Kalimantan Barat. Tapi, dari contoh-contoh tersebut, bisa dilihat betapa besar potensinya untuk memberikan kontribusi pada PDRB.

## **Pertanian dan Perkebunan**

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA), angka sementara produksi padi di Kalimantan Barat pada 2022 sebesar 814,74 ribu ton. Nilai ini mengalami peningkatan 14,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya (711,9 ribu ton).

Angka sementara luas panen dan produktivitas pada 2022 masing-masing sebesar 272,12 ribu hektare dan 29,94 kuintal/hektare. Kabupaten/kota dengan produksi padi terbanyak adalah Kabupaten

Sambas, yang mencapai 204,2 ribu ton. Urutan kedua adalah Kabupaten Ketapang, sebanyak 105,83 ribu ton, dan Kabupaten Landak, sebanyak 104,26 ribu ton.

Kalimantan Barat menjadikan Kabupaten Landak sebagai lumbung pangan. Kabupaten yang berjarak 185 kilometer dari Kota Pontianak ini menghasilkan 2.800 ton padi dalam setahun. Untuk seluruh Kalbar, produksi padinya mencapai 700,29 ribu ton gabah kering giling (GKG) pada 2023. Luas panen padi mencapai 224,07 ribu hektare.

Kapasitas produksi di Landak masih bisa dioptimalkan lagi, antara lain, dengan mekanisasi pertanian. Selain itu, perlu dicarikan cara agar harga bibit, pupuk, dan pestisida yang masih tinggi dapat diturunkan.

Selebihnya, sebagai lumbung pangan, semestinya ada produk-produk unggulan. Untuk padi, seharusnya tersedia kelas-kelas premium. Karena saat ini hal itu belum terwujud, perlu dipikirkan kajian mendalam dan upaya rekayasa genetika agar tersedia bibit unggul yang tahan hama dan dengan jangka panen pendek.

Kalbar juga memiliki potensi di bidang hortikultura, misalnya cabai rawit, cabai besar, pisang, jeruk, dan nanas. Saat ini, penghasilan jeruk terbesar ada di Kabupaten Sambas.

Bidang hortikultura perlu mendapat dorongan serius karena saat ini belum mampu melakukan pengolahan komoditas dalam skala industri. Memang banyak usaha pengolahan di kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tapi saat ini belum mampu memberikan kontribusi besar pada pergerakan ekonomi.

Sementara itu, dari aspek perkebunan, angka sementara sawit tahun 2022 menunjukkan peningkatan luas lahan, sebanyak 9,26 ribu hektare, dibanding tahun 2021. Produksi minyak kelapa sawit diperkirakan 5,6 juta ton.

Kalimantan Barat memiliki perkebunan sawit seluas 2.039.203 hektare pada 2022. Ini menempatkan Kalbar di urutan ketiga, setelah Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan potensi unggulan di Kalbar.

Hasil utama dari perkebunan kelapa sawit adalah minyak sawit mentah (CPO) dan limbah. Untuk proses produksi CPO, semua kebun sawit dikelola perusahaan, sementara limbah masih terbelengkalai. Padahal limbah pabrik sawit masih memiliki nilai ekonomi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat di sekitar wilayah kebun dan pabrik.

Pemanfaatan limbah sawit telah dilakukan untuk meningkat-

kan perekonomian masyarakat di Kalbar melalui beberapa strategi dan kegiatan:

1. Pengolahan limbah cangkang;
2. Pengolahan limbah tandan kosong untuk pupuk organik;
3. Pengolahan pelepah sawit dan pemanfaatan lidi sawit sebagai komoditas ekspor;
4. Pemanfaatan daun dan pelepah sawit sebagai pelet pakan ternak;
5. Pemanfaatan batang sawit yang tidak produktif sebagai biomassa untuk sumber energi dan pengolahan nira batang sawit yang tidak produktif menjadi *brown sugar*.

Pemerintah perlu menyiapkan regulasi pengolahan untuk limbah kebun dan pabrik sawit yang tidak lagi dikelola perusahaan. Limbah ini harus dikelola masyarakat setempat melalui badan usaha milik desa yang dilindungi peraturan daerah.

Memang, hampir semua bagian dari pohon sawit bisa dimanfaatkan. Mari memulainya dari ujung atas pohon sawit. Daun lidinya bisa diolah menjadi hiasan dan itu sangat potensial menjadi komoditas ekspor. Sedangkan limbah lidinya bisa dianyam untuk perangkat lampu hias. Produk ini bahkan sangat layak juga diekspor. Residu cacahan sawit juga masih bisa dimanfaatkan sebagai penghasil cuan. Daunnya bisa di-

jadikan pelet untuk pakan ternak. Lalu, yang terakhir, tandan kosongnya bisa dimanfaatkan sebagai kompos.

Hilirisasi bahkan masih bisa dilakukan terhadap pohon sawit yang sudah berusia 25 tahun. Dari pohon yang sudah tua dan akan segera di-*replanting* ini, bisa diambil niranya untuk bahan pembuatan gula merah. Dan dengan teknologi yang ada, bisa juga nira itu dimanfaatkan untuk membuat *brown sugar*. Produk ini sekarang sedang *ngetren* di kalangan peminum kopi sebagai cara menghindari gula putih.

Selain itu, ada potensi yang menjadi primadona tapi masih menyimpan persoalan, yakni kratom atau *Mitragyna speciosa*. Di Kabupaten Kapuas Hulu, tanaman ini menjadi salah satu komoditas penggerak ekonomi masyarakat dan sudah dibudidayakan secara luas sejak 2010. Daun kratom diyakini memiliki khasiat sebagai obat herbal. Mayoritas masyarakat Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, menanam pohon kratom di rumah atau kebun mereka. Daun kratom biasanya dijual dalam bentuk basah, kering, remahan (*digiling*), ataupun dalam bentuk tepung.

Nilai ekonomisnya sangat signifikan karena mudah didapat dan murah. Tak aneh, sebagian besar masyarakat Kapuas Hulu

menggantungkan hidupnya pada tanaman kratom, terlebih saat pandemi Covid-19. Kratom saat ini mulai naik daun dengan kualitas ekspor yang meningkat. Permintaannya terus meningkat.

BPS mencatat ekspor kratom Indonesia mencapai 8.206,7 ton pada 2022. Volumennya melonjak 87,9 persen dibanding setahun sebelumnya (4.367,54 ton).

Tingginya permintaan kratom membuat 70 persen petani karet dan nelayan di 14 kecamatan di Kapuas Hulu mengalihkan mata pencarian menjadi petani kratom. Saat ini, terdapat 18.120 petani dan 44.491.317 pohon yang ditanam masyarakat. Areanya tersebar di 23 kecamatan wilayah Kapuas Hulu.

Namun status tumbuhan ini menjadi perdebatan. Pasalnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai penggunaan kratom menimbulkan efek samping yang berbahaya. Dalam dosis rendah, kratom mempunyai efek stimulan, sementara dosis tinggi memiliki efek sedatif-narkotik. Senyawa 7-hidroksimitraginin pada kratom disebut memiliki efek 13 kali kekuatan morfin, yang menimbulkan adiksi, depresi pernapasan, hingga kematian. BNN pun melarang penggunaan kratom kecuali untuk penelitian.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melarang

kratom digunakan dalam obat tradisional, herbal, fitofarmaka, suplemen makanan, dan pangan olahan. Larangan itu tertera dalam Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan serta Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka.

Untuk mendapatkan kepastian, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta BPOM meneliti manfaat tanaman kratom.

## **Perikanan**

Luas area perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan mencapai 26 ribu kilometer persegi. Perinciannya adalah 2.004.000 hektare berupa perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak, dan 15.500 hektare laut.

Secara geografis, Kalimantan Barat memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan perairan umum. Nilai produksi perikanan tangkap di laut pada 2022 adalah Rp 4,28 triliun, dengan produksi 139,32 ribu ton. Sedangkan nilai produksi perikanan-

an perairan umum adalah Rp 1,46 triliun, dengan produksi 32,83 ribu ton.

Total jumlah nelayan perikanan tangkap adalah 31.948 orang pada 2022. Mereka terdiri atas nelayan perairan umum sebanyak 16.638 orang dan nelayan perairan laut 15.310 orang.

Sektor perikanan yang sedang menjadi perhatian saat ini adalah budi daya udang vaname. Budi daya komoditas ini banyak dilakukan dari Mempawah sampai Sungai Kunyit. Terjun ke usaha ini memang perlu dana cukup besar, tapi hasilnya sangat sepadan.

Harga vaname ukuran 40 mencapai Rp 75 ribu per kilogram. Untuk yang ukuran 20, harganya Rp 100 ribu. Saat ini, dalam perairan seluas 1 hektare, tambak udang vaname bisa menghasilkan 15-20 ton.

Kabupaten Mempawah, yang memiliki garis pantai sepanjang 72 kilometer, merupakan salah satu sentra tambak udang vaname. Lokasinya terletak di beberapa daerah pesisir, seperti Desa Sungai Bakau Besar Laut di Kecamatan Sungai Pinyuh, Desa Sungai Bakau Kecil dan Kelurahan Pasir Wan Salim di Kecamatan Mempawah Timur, serta Desa Kuala Secapah di Kecamatan Mempawah Hilir. Budi daya vaname di wilayah ini sangat produktif.

Selain udang vaname, ko-

moditas yang bisa dioptimalkan di wahana air payau adalah bandeng, kepiting bakau, dan udang windu. Saat ini, perairan potensialnya mencapai 74.300 hektare, tapi baru 20 persen yang sudah dimanfaatkan.

Sektor perikanan air tawar menghasilkan lele, jelawat, dan nila. Luas perairan yang potensial untuk budi daya ini mencapai 248.167 hektare, tapi baru 32 persen yang sudah dimanfaatkan.

Saat ini, hampir semua produk perikanan masih dijual segar alias belum diolah. Produksi bandeng, misalnya, tercatat cukup besar, tapi semua dijual dalam keadaan segar. Belum ada yang menjual dalam bentuk bandeng presto yang bisa tahan selama 3-4 minggu. Sebenarnya sudah ada yang berusaha di bidang pengolahan, tapi baru skala UMKM. Produknya berupa nuget atau presto.

Masih di air tawar, budi daya ikan arwana juga bisa dilirik. Saat ini, usaha ikan arwana terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan di Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya, banyak kalangan yang mengembangkan budi daya ikan tirus.

Gelembung renang di bagian perut ikan tirus diambil untuk dijadikan bahan benang operasi, juga untuk bahan pembuatan kosmetik. Ini yang menyebabkan harga ikan tirus cukup mahal.

## Pengolahan Air

Di Kalimantan Barat, tinggi permukaan daratan dan permukaan air laut tidak begitu jauh berbeda. Itu yang membuat di beberapa daerah di Kalbar kerap ada genangan air. Dari genangan inilah sebenarnya terdapat potensi yang bisa dimanfaatkan. Potensi ini paling besar terdapat di Kabupaten Kubu Raya.

Limbah air bisa diolah menjadi produk yang siap digunakan untuk perlengkapan mandi-cucikakus (MCK). Air yang dihasilkan benar-benar bening dan layak digunakan untuk mandi dan cuci. Sayangnya, saat ini upaya pengolahannya belum optimal.

Untuk kebutuhan air minum, Kalbar memiliki cukup banyak sumber air pegunungan, misalnya dari Gunung Pasi, Gunung Vanderling, Gunung Anjungan, dan gunung di Danau Laet. Saat ini, sudah ada beberapa pabrik air minum kemasan yang melakukan produksi.

## Pertambangan

Sektor pertambangan bauksit alias bijih aluminium menjadi unggulan di Kabupaten Ketapang. Saat ini, pengolahan bauksit dilakukan di smelter PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW) di Kecamatan Kendawangan. Sa-

king besarnya skala industri ini, sebanyak 25-30 persen penduduk Ketapang bekerja di pertambangan.

Selain bauksit, kini sedang berlangsung penggalian untuk pasir silika, bahan baku kaca. Usaha ini masih belum mencapai skala industri, tapi sudah menjadi perhatian pemerintah. Problem utama saat ini adalah aksesnya yang tergolong masih terbatas. Tentu, jika ingin mengembangkan penambangan pasir silika, jalur transportasi itu yang perlu diperbaiki.

Di luar komoditas itu, jenis mineral yang bisa ditambang adalah timah dan emas. Selain di Ketapang, bahan tambang ini terdapat di beberapa kabupaten, yakni Sanggau, Kapuas Hulu, Bengkayang, dan Mempawah.

• • •

Pariwisata sebagai mutiara terpendam yang mulai ditemukan untuk mendorong ekonomi Provinsi Kalimantan Barat kian melaju kencang. Tapi, untuk ke sana, banyak hal mesti dilakukan lebih dulu, terutama soal kemudahan akses dan kemudahan mendapat penginapan layak.

Cantik saja tidak cukup. Kenyamanan dan keamanan juga syarat mutlak bagi industri pariwisata. Kalbar siap gas dan mengembangkan layar.

## PETA JALAN PENDIDIKAN VOKASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

*Policy paper* ini berisi dokumen peta jalan pendidikan vokasi dan peta jalan kluster inovasi di Provinsi Kalimantan Barat. Berkas ini dimaksudkan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk pembangunan daerah.

Metodologi yang digunakan untuk menyusun peta jalan ini adalah metode *foresight* dengan tahapan *horizon scanning*, *scenario planning*, dan *roadmapping*. Metode ini akan mengidentifikasi *event*, *trend*, dan *driver* penentu dari perencanaan ketenagakerjaan dan perencanaan inovasi di Kalimantan Barat berdasarkan aspek *social*, *technology*, *economic*, *environment*, *political*, and *value* (STEEPV).

Setelah melalui semua tahap, ditentukanlah *driver of change* atau pendorong perubahan. Pendorong perubahan ini bisa berasal dari berbagai hal, seperti inovasi teknologi, perubahan regulasi, tren ekonomi, gerakan budaya, dan pergeseran perilaku konsumen. Setiap pendorong perubahan memiliki potensi untuk mengganggu norma-norma yang ada, menciptakan peluang baru, serta membentuk arah masa depan organisasi dan komunitas. Me-

mahami dan merespons dengan efektif pendorong perubahan ini sangat penting bagi dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta individu yang ingin berkembang di lingkungan yang dinamis dan terus berubah.

Penentuan *driver of change* untuk *workforce planning* dan *innovation planning* dilakukan dengan metode *Delphi consultation*. Dalam kegiatan ini, dilakukan identifikasi data *trends* yang sebelumnya sudah didapatkan, kemudian dilanjutkan dengan scoring menurut *level of confidence* dan *level of expertise* bersama pakar yang diyakini keahliannya.

Hasilnya adalah terdapat dua *driver* pada *workforce planning* dan dua *driver* pada *innovation planning*. *Driver* pada *workforce planning* terdiri atas dimensi politik (regulasi pusat/daerah) dan dimensi sosial, yakni *link and match*. Adapun *driver* pada *innovation planning* yang terdiri atas dimensi politik (tindak lanjut hasil riset) dan dimensi sosial (*link and match*).

Setelah menentukan *driver of change*, tim konsorsium Kalbar menyusun *scenario planning* untuk *workforce planning* dan *innovation planning*. *Scenario planning* dalam

metode *foresight* adalah proses menciptakan dan menyusun beberapa skenario yang masuk akal tentang kemungkinan yang terjadi di masa depan.

*Scenario planning* ini disusun berdasarkan metode deduktif untuk *workforce planning* dan *innovation planning* dengan memasukkan kedua *driver* untuk setiap rancangan. Dari identifikasi *driver* tersebut, dibuatlah *scenario planning* setiap bagian.

Ada empat skenario kemungkinan di masa depan dalam ketenagakerjaan. Berikut ini penjabaran untuk setiap skenario yang telah dibuat.

### **Skenario 1**

Skenario 1 menggambarkan kondisi ideal dalam ketenagakerjaan. Skenario ini didasari dua faktor utama: kompetensi lulusan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI serta adanya kesinambungan antara regulasi pusat dan daerah.

Dalam skenario ini, lulusan pendidikan vokasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan pasar kerja. Kolaborasi antara satuan pendidikan vokasi dan DUDI akan meningkat dalam perancangan kurikulum berbasis industri. Pelibatan industri dalam proses belajar-mengajar akan me-

mastikan kesiapan lulusan menghadapi tuntutan pasar kerja.

Regulasi harmonis dan saling mendukung antara pusat dan daerah akan menciptakan lingkungan stabil dan kondusif bagi pertumbuhan industri dan pendidikan vokasi.

### **Skenario 2**

Skenario 2 dirancang berdasarkan kompetensi lulusan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan DUDI. Persoalannya adalah terdapat kesenjangan regulasi ketenagakerjaan pusat dan daerah. Ini mengakibatkan berbagai kendala dalam penerapan kebijakan ketenagakerjaan. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas di lembaga pendidikan vokasi terlambat. Hal ini akan memengaruhi kualitas pendidikan dan pelatihan.

Kondisi tersebut juga berdampak pada perbedaan standar dan prosedur. Ini menghambat lulusan dalam memanfaatkan kompetensi mereka secara optimal. Akibatnya, akses mereka memasuki dunia kerja menjadi terbatas.

Hal yang perlu dilakukan untuk itu:

- Upaya menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah;
- Problem koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini harus diatasi untuk memastikan lulusan

pendidikan vokasi mendapat kesempatan yang sama, tak terkendala perbedaan regulasi regional.

### **Skenario 3**

Skenario 3 dirancang berdasarkan adanya kesenjangan kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan DUDI. Juga terdapat kesenjangan regulasi ketenagakerjaan antara pusat dan daerah. Lulusan pendidikan vokasi sering menghadapi tantangan dalam penyerapan di DUDI. Tingkat kepercayaan DUDI terhadap kualitas lulusan pendidikan vokasi rendah dan cenderung memilih tenaga kerja asing. Akibatnya, minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi rendah.

Hal yang perlu dilakukan:

- Memperbaiki kualitas pendidikan vokasi dengan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri;
- Perlu pelatihan yang berfokus pada keterampilan praktis;
- Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan DUDI harus diperkuat untuk menciptakan program magang dan pelatihan kerja yang relevan;
- Regulasi di tingkat pusat dan daerah perlu diselaraskan;
- Pemerintah perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang menyerap lulusan vokasi dan

mendorong penggunaan tenaga kerja lokal;

- Sosialisasi mengenai prospek pendidikan vokasi harus ditingkatkan;
- Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di daerah serta kebijakan yang mendukung pemberdayaan dan peningkatan keterampilan SDM lokal harus ditingkatkan.

### **Skenario 4**

Skenario 4 dirancang berdasarkan kondisi adanya kesenjangan kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan DUDI. Di sisi lain, terdapat kesinambungan antara regulasi pusat dan daerah. Lulusan vokasi tidak terserap maksimal dalam pasar tenaga kerja. SDM yang seharusnya produktif justru menjadi beban ekonomi. DUDI tak percaya terhadap kualitas lulusan vokasi dan memilih tenaga kerja asing. Daya saing industri akhirnya menurun di tingkat lokal dan nasional.

Hal yang perlu dilakukan:

- Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pendidikan vokasi, dan DUDI;
- Pemerintah perlu mendorong kerja sama dengan menyediakan insentif bagi DUDI yang terlibat dalam program magang dan pelatihan kerja untuk lulusan vokasi;

- Pelatihan dan peningkatan kompetensi oleh pemerintah daerah dan pusat harus ditingkatkan.

## Innovation Planning

Perencanaan skenario untuk inovasi disusun berdasarkan dua driver utama. Tim konsorsium Kalbar merumuskan empat skenario yang meliputi berbagai kemungkinan masa depan.

### Skenario 1

Skenario ini didasari dua faktor utama: Terdapat tindak lanjut hasil riset serta inovasi antar-*stakeholder* terintegrasi. Dalam skenario ini, hasil riset dapat diimplementasikan dengan dukungan lebih besar dari para pemangku kepentingan. Temuan riset diterapkan secara efektif dalam praktik nyata. Peningkatan pendanaan dan kemitraan terhadap riset menjadi faktor krusial.

Hal yang perlu dilakukan:

- Pembuatan pusat data terintegrasi untuk mempermudah akses dan penggunaan data riset;
- Ada evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program agar riset tetap sesuai dengan kebutuhan dan berdampak positif;
- Kepastian bahwa hasil riset dapat diimplementasikan secara efektif, maka perlu pening-

katan kolaborasi antar-*stakeholder*;

- Perlu pengembangan regulasi yang mendukung riset berkelanjutan, peningkatan pendanaan dan kemitraan, serta pembentukan pusat data terintegrasi;
- Pelaksanaan riset berkelanjutan difokuskan pada isu-isu strategis yang relevan dengan potensi daerah, didukung pelatihan dan pengembangan kapasitas peneliti.

### Skenario 2

Skenario 2 dirancang berdasarkan kondisi tindak lanjut hasil riset tersedia tapi inovasi antar-*stakeholder* dilakukan secara parsial. Kurangnya dukungan dalam melaksanakan riset sering disebabkan oleh ketidakpercayaan pemangku kepentingan. Alasannya, mungkin proses riset kurang transparan, komunikasi tak efektif antara peneliti dan *stakeholder*, atau hasil riset tidak langsung terlihat aplikatif.

Hal yang perlu dilakukan:

- Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas hasil riset guna meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan;
- Membuat forum komunikasi inovasi antar-*stakeholder* untuk mendorong dialog terbuka,

kolaborasi, dan berbagi pengetahuan;

- Membangun komitmen bersama dalam menetapkan tujuan riset;
- Fasilitasi dan publikasi hasil riset secara transparan.

### **Skenario 3**

Skenario 3 dirancang berdasarkan kondisi belum adanya tindak lanjut hasil riset, serta inovasi antar-*stakeholder* dilakukan secara parsial. Kemajuan riset terhambat karena miskomunikasi antar-*stakeholder*. Ketidakepahaman tentang tujuan, metode, atau hasil yang diharapkan dapat menghambat koordinasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan riset.

Hal yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini:

- Upaya membangun komunikasi yang jelas dan terbuka di antara semua pihak;
- Membuat forum komunikasi inovasi antar-*stakeholder* untuk berbagi informasi, menyelesaikan perbedaan, dan menyelaraskan visi serta misi riset;
- Membangun komitmen bersama dalam menetapkan tujuan riset dan mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

### **Skenario 4**

Skenario 4 dirancang berdasarkan kondisi belum adanya tindak lanjut hasil riset, tapi inovasi antar-*stakeholder* terintegrasi. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses adalah langkah krusial untuk memastikan riset berjalan lancar dan hasilnya relevan dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan intensif ini memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

Tantangannya adalah adanya perbedaan interpretasi hasil riset dan keterbatasan sumber daya dalam mengimplementasikan hasil riset. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dibentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berfungsi sebagai platform untuk menyelaraskan interpretasi, mendiskusikan temuan riset, dan menetapkan langkah-langkah implementasi yang disepakati bersama.

Keterbatasan sumber daya dalam mengimplementasikan hasil riset juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Karena itu, peningkatan SDM dalam melakukan riset dan analisis data menjadi sangat penting. Selain itu, pemetaan tema riset yang serumpun dapat membantu mengidentifikasi fokus riset yang saling terkait. Dengan

pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, keterbatasan sumber daya dapat diatasi dan hasil riset dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien.

### **Peta Jalan Pendidikan Vokasi Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang**

Peta jalan (*roadmap*) pendidikan vokasi disusun berdasarkan *scenario planning* yang dibuat sebelumnya. *Driver* pada *workforce planning* terdiri atas dimensi politik berupa regulasi pusat/daerah dan dimensi sosial berupa *link and match*. Peta jalan ini untuk jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3 tahun), dan jangka panjang (5 tahun).

#### **Peta Jalan Jangka Pendek (1 Tahun)**

*Goals/policy orientation* yang hendak dicapai dalam jangka pendek adalah penyusunan regulasi dalam rangka penyesuaian kurikulum. Aktivitas atau program kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah pembentukan tim koordinasi daerah vokasi (TKDV) yang merupakan kolaborasi antar-*stakeholder*, pemetaan ketenagakerjaan, identifikasi kesenjangan kurikulum, serta perumusan dan penyesuaian kebijakan. Diharapkan program tersebut menda-

pat dukungan pemerintah daerah dan terjadi komunikasi efektif antar-*stakeholder*.

Indikator capaian yang akan mendukung program kebijakan tersebut:

- Terbentuknya TKDV;
- Tersusunnya regulasi yang harmonis antara pusat dan daerah;
- Pemetaan jumlah dan jenis keahlian dan MOU dengan pemangku kepentingan.

#### **Peta Jalan Jangka Menengah (3 Tahun)**

Pada jangka menengah, *goals/policy orientation* yang hendak dicapai adalah implementasi regulasi guna meningkatkan kompetensi lulusan. Program kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, kolaborasi antar-*stakeholder*, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, magang industri, dan penerapan teknologi yang sesuai dengan DUDI dalam proses pembelajaran.

Dari program kebijakan yang telah disusun, diharapkan:

- Adanya kolaborasi yang efektif antar-*stakeholder*;
- Transparansi program;
- Adanya program inovatif.

Indikator capaian yang akan mendukung program kebijakan tersebut adalah jumlah dan kualiti-

tas program serta kurikulum pendidikan vokasi lebih dinamis.

### **Peta Jalan Jangka Panjang (5 Tahun)**

Pada jangka panjang, *goals/policy orientation* yang hendak dicapai adalah evaluasi regulasi dalam rangka keterserapan lulusan. Program kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan hasil analisis kebutuhan pasar kerja, meningkatkan kesesuaian kurikulum, meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, monitoring *tracer study*, evaluasi umpan balik pemangku kepentingan, evaluasi efektivitas program kebijakan, dan rekomendasi perbaikan program.

Dari program kebijakan yang telah disusun, diharapkan adanya keselarasan antar-*stakeholder* dalam pencapaian program. Indikator capaian yang akan mendukung program kebijakan tersebut adalah persentase keterserapan lulusan pendidikan vokasi.

### **Peta Jalan Kluster Inovasi Provinsi Kalimantan Barat**

*Driver* pada *innovation planning* dalam peta jalan kluster inovasi terdiri atas dimensi politik berupa tindak lanjut hasil riset dan dimensi sosial berupa *link and match*. Peta jalan telah disusun

dan terdiri atas *roadmap* jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3 tahun), dan jangka panjang (5 tahun).

### **Peta Jalan Jangka Pendek (1 Tahun)**

Pada jangka pendek, *goals/policy orientation* yang hendak dicapai adalah peningkatan komunikasi antar-*stakeholder*. Program yang dapat dilaksanakan adalah pembentukan komitmen dengan dokumen kerja sama antar-*stakeholder*, pembuatan forum komunikasi inovasi antar-*stakeholder*, dan pemetaan tema riset yang serumpun.

Dari program kebijakan yang telah disusun, diharapkan:

- Adanya dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan forum komunikasi inovasi antar-*stakeholder*;
- Penyamaan persepsi antar-*stakeholder* dalam pengembangan inovasi.

Indikator capaian yang akan mendukung program kebijakan tersebut adalah terbentuknya forum komunikasi inovasi antar-*stakeholder*, jumlah MOU dan perjanjian kerja sama yang ditandatangani, serta jumlah skim riset.

### **Peta Jalan Jangka Menengah (3 Tahun)**

Pada jangka menengah, orientasi yang hendak dicapai adalah membuat jejaring riset antar-*stakeholder* dan diseminasi hasil riset. Program kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah membuat tim kerja lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi semua *stakeholder* yang dapat memberikan kontribusi dan terdampak oleh riset yang dilakukan, peningkatan SDM dalam melakukan riset dan analisis data, serta fasilitasi dan publikasi hasil riset. Untuk itu, diharapkan adanya perda dan pedoman teknis, transparansi dan pelaporan, serta evaluasi dan monitoring.

Indikator capaian yang akan mendukung program kebijakan tersebut adalah terbentuknya tim kerja lintas sektor, jumlah publikasi hasil riset, dan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan.

### **Peta Jalan Jangka Panjang (5 Tahun)**

Pada jangka panjang, orientasi yang hendak dicapai adalah peningkatan infrastruktur dan teknologi untuk pengembangan dan implementasi hasil riset. Program yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan fasilitas laboratorium dan pusat riset, pembuatan pusat data yang terintegrasi untuk mempermudah akses dan data

riset, peningkatan pendanaan dan kemitraan, pengembangan regulasi yang mendukung riset berkelanjutan dan terintegrasi antar-*stakeholder*, serta pelaksanaan evaluasi berkala mengenai kebijakan dan program riset yang telah berjalan.

Dari program kebijakan yang telah disusun, diharapkan:

- Adanya ruang konsultasi publik, tempat masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan umpan balik terhadap kegiatan forum;
- Adanya forum terbuka secara berkala untuk mendiskusikan hasil dan rencana kegiatan forum dengan partisipasi luas dari pemangku kepentingan;
- Pilot project untuk menguji dan menyempurnakan mekanisme kerja forum sebelum penerapan skala penuh;
- Kemitraan strategis dengan lembaga riset, universitas, dan organisasi internasional untuk mendapatkan dukungan tambahan dan meningkatkan kapasitas forum.

Indikator capaian yang akan mendukung program kebijakan tersebut adalah terbentuknya perda dan pedoman teknis inovasi daerah yang berbasis potensi daerah, terbentuknya pusat data riset terintegrasi, serta terlaksananya evaluasi kebijakan dan program riset secara berkala.





# PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: **DARI SAWIT HINGGA LIGNIT**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH:**

**Ketua:** *Abdul Rozaq (Politeknik Negeri Banjarmasin)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Banjarmasin: *Kun Nursyaiful Priyo Pamungkas, Agus Pebrianto, Reza Fauzan, Teguh Suprianto, Effan Najwaini, Dessy Lestari Saptarini, Rahimi Fitri, Roolliana, Evi Widiastuti, Muhammad Azhar, Puspa Ayu Yohana*
2. Politeknik Negeri Tanah Laut: *Meldayanoor, Veri Julianto*
3. Politeknik Sampit: *Ahmad Fikriyadi, Lilis Indriani*

*Perekonomian Kalimantan Tengah didominasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Perlu pengembangan sektor-sektor lain.*

## **Melejit dengan Kelapa Sawit**

Dari udara, menjelang mendarat di Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangka Raya, siapa pun yang berada di dalam tubuh pesawat akan bisa melihat bentangan berhektare-hektare pohon kelapa sawit. Apa yang kita lihat dari udara adalah sebagian kecil dari kebun kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah.

Saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat lebih dari 2,2 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit. yang terdiri atas perkebunan besar milik swasta dan perkebunan kecil milik rakyat. Jumlah luasan hektare kebun kelapa sawit hampir sama dengan jumlah penduduknya, yang mencapai 2,6 juta jiwa.

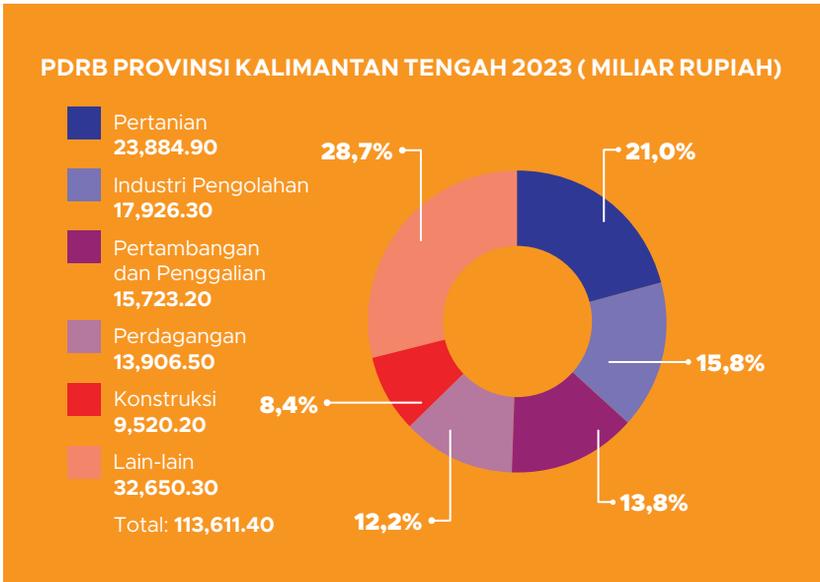
Luasnya kebun kelapa sawit itu menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi kedua yang memiliki lahan kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Provinsi ini dalam hal luas lahan perkebunan sawit—hanya kalah dari Riau (2,86 juta hektare) dan sedikit di atas Kalimantan Barat (2,07 juta hektare).

Dengan lahan seluas itu, tak aneh jika Kalimantan Tengah merupakan produsen kedua kelapa sawit di Indonesia, dengan total produksi 8,36 juta ton pada 2023. Posisinya sedikit di bawah Riau, yang memiliki luas lahan lebih besar, dengan produksi 8,73 juta ton pada tahun yang sama.

Tak aneh juga jika hasil perkebunan mendominasi produk domestik regional bruto (PDRB)-nya. Pada tahun lalu (2023), pendapatan domestik provinsi ini mencapai Rp 112,7 triliun. Sektor terbesar yang menyumbang pendapatan itu adalah pertanian dan perhutanan, sebesar Rp 23,8 triliun. Jika didetailkan lebih jauh, dari sektor itu sumbangan terbesar datang dari perkebunan (terutama sawit), sebesar Rp 20,6 triliun.

Jika melihat data tentang luasan lahan sawit Indonesia, kita akan melihat ada sedikit perbedaan antara pembagian lahan sawit di Kalimantan Tengah dan sejumlah provinsi lain, terutama yang berada di Sumatera. Di Kalimantan Tengah, tidak tercatat kebun kelapa sawit milik negara (PTPN), yang berbeda dengan di Sumatera Utara atau beberapa daerah lain.

Hal ini terjadi karena marak-



SUMBER: BPS

nya perkebunan kelapa sawit memang baru terjadi “belakangan”. Hal ini dimulai pada 1981, ketika Lembaga Penelitian Tanah, Bogor, melakukan penelitian untuk mengecek kondisi tanah di Kalimantan Tengah. Hasilnya, mereka berkesimpulan ada lebih dari 15 juta hektare lahan di Kalimantan Tengah yang cocok untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat *road-map* menuju pemanfaatan lahan di sana sebagai perkebunan sawit pada 1984.

Namun baru pada 1992 investor masuk dan mulai melakukan sejumlah langkah nyata untuk mengembangkan perkebunan sa-

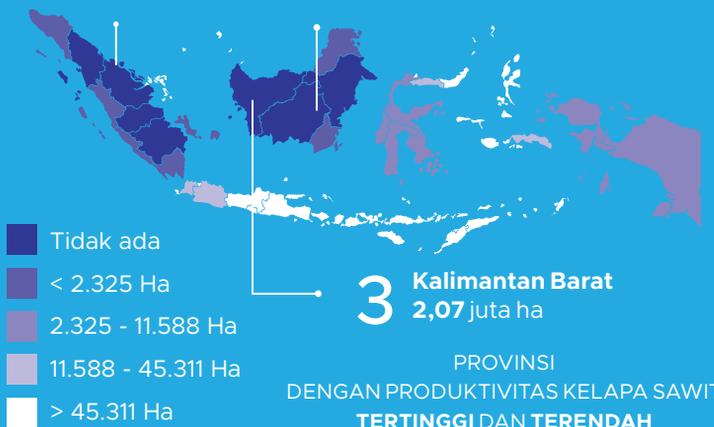
wit. Sejak saat itulah perkebunan sawit berkembang dengan masif di Kalimantan Tengah dan menjadi idola baru. Industri perkebunan kelapa sawit dianggap lebih berkesinambungan dibanding pemanfaatan hutan model lama, yaitu dengan mengambil kayunya, karena bisa dipanen setiap tahun.

Sejauh ini, perkebunan masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan kisaran 500 ribu pekerja, jauh di atas sektor-sektor lain, seperti perdagangan (292 ribu) atau bahkan pertambangan (113 ribu), yang juga merupakan sektor besar dalam PDRB. Meski demikian, sebagian besar pos sumber daya manusia di perkebunan kelapa sa-

## PETA LUAS AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA 2022

1 Riau 2,87 juta ha

2 Kalimantan Tengah 2,21 juta ha



SUMBER: BPS

wit—terutama untuk tingkat menengah ke atas—diisi pekerja dari luar daerah. Mereka datang dari sejumlah daerah, termasuk dari provinsi yang telah lama memiliki industri kelapa sawit, seperti Sumatera Utara.

Upaya untuk menyuplai tenaga kerja ahli di bidang perkebunan dan pertanian bukannya tidak dilakukan. Ada sejumlah lembaga pendidikan vokasi dengan konsentrasi di bidang pertanian dan perkebunan di Kalimantan Tengah. Meski demikian, upaya ini belum menutup sepenuhnya kebutuhan akan tenaga kerja di bidang ini.

Ada beragam faktor yang

menyebabkan hal itu. Di antaranya rendahnya keinginan anak muda lulusan lembaga pendidikan vokasi di bidang pertanian atau perkebunan untuk terjun ke lapangan. Setelah lulus, mereka memang mendaftar ke perusahaan-perusahaan pengelola perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Tengah, tapi saat ditanyakan apakah mereka bersedia diterjunkan ke dalam kebun, kebanyakan dari mereka mundur teratur.

Ada anggapan, dengan mengantongi ijazah dari lembaga pendidikan tinggi, mereka akan ditempatkan di kantor, bukan di tengah perkebunan. Padahal, oleh

## PROUKSI KELAPA SAWIT 2022



SUMBER: BPS

lembaga pendidikan, mereka disiapkan untuk ditempatkan di area perkebunan karena disiplin ilmu yang mereka pelajari lebih tepat dipraktikkan di lapangan.

Meski tidak secara langsung, adanya kesenjangan dalam pemanfaatan kesempatan kerja antara “orang lokal” dan pendatang ini juga sedikit-banyak berkontribusi pada konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.

Hal lain yang muncul adalah pencurian buah sawit. Kalangan petani sawit di Seruyan dan Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyatakan resah terhadap maraknya pencurian buah sawit atau tandan buah segar (TBS), yang dikhawatirkan berdampak pada penurunan pendapatan mereka. Petani sawit asal Kotim, J.M.T. Pandiangan, menuturkan bahwa TBS sawit yang

dicuri mencapai 6 ton tiap bulan, dan dari jumlah tersebut nilai kerugian yang harus ditanggung petani diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Tantangan lain adalah soal dampak lingkungan hidup. Bagaimanapun, aktivitas manusia akan sedikit-banyak berdampak pada lingkungan yang berubah. Mitigasi dan upaya meminimalkan dampak dari efek pada lingkungan tentu perlu dilakukan.

Hal yang kerap dirasakan adalah kebakaran hutan yang sering terjadi dan cukup mengganggu aktivitas masyarakat, baik di Kalimantan Tengah maupun di daerah lain. Menciptakan perkebunan sawit di lahan gambut yang ramah lingkungan tentu perlu dilakukan. Tanpa dilakukannya hal tersebut, lahan gambut akan menjadi kering dan mudah terba-

## PRODUKSI KELAPA SAWIT MENURUT PROVINSI 2022 (PERSEN)



SUMBER: BPS

kar di musim kemarau. Apalagi, belakangan ini, perubahan iklim membuat musim hujan susah diprediksi dan kekeringan kerap makin panjang.

Tantangan lain berikutnya adalah otomatisasi yang mulai dilakukan di sejumlah perkebunan besar. Teknologi otomatisasi akan menggantikan peran manusia di beberapa profesi. Hilangnya profesi-profesi tertentu akan mengubah kebutuhan tenaga kerja ke arah tenaga kerja yang inovatif dan kreatif.

Selain itu, produsen minyak sawit mentah (CPO) besar harus menjawab tantangan adanya kebijakan Deforestation Free atau EUDR (Regulation on Deforestation-Free Commodity/Product). Kebijakan ini sebenarnya mulia,

yaitu bertujuan menghilangkan deforestasi dan degradasi hutan dari rantai pasok komoditas dan produk global yang masuk ke negara-negara yang kritis terhadap masalah lingkungan, seperti negara-negara Uni Eropa. Kebijakan EUDR ini tentu bisa berdampak pada hasil perkebunan sawit dan turunannya.

Sejumlah produsen CPO saat ini sudah mulai *comply* dengan aturan-aturan tersebut dengan mempraktikkannya dalam setiap level proses yang mereka lakukan, baik di perkebunan, pembibitan, pengangkutan, maupun dalam proses pengolahan di pabrik.

Di luar kelapa sawit, sektor pertanian Kalimantan Tengah sebenarnya memiliki potensi lain, seperti buah nanas. Tantangannya

adalah, selain produksinya ditingkatkan, diperlukan industri pengolahan hasil pertanian ini di bagian hilirnya. Saat ini, buah nanas dari Kalimantan Tengah banyak diekspor ke negara tetangga, Malaysia, dalam kondisi belum terolah. Di Malaysia, buah itu kemudian diproses dan dikalengkan, lalu dijual kembali ke Indonesia, termasuk ke Kalimantan Tengah.

Hilirisasi produk pertanian ini akan memberikan dampak manfaat yang cukup besar. Selain menaikkan nilai jual, hal itu akan menyerap lebih banyak tenaga kerja serta menaikkan pendapatan daerah.

Beberapa daerah di Kalimantan Tengah juga menghasilkan padi kebun. Berbeda dengan padi sawah, yang ditanam di lahan yang terendam air, padi jenis ini ditanam di tanah yang lebih kering. Jenis beras yang dihasilkan pun berbeda dengan beras di Pulau Jawa, misalnya, yang pulen. Tantangannya adalah bagaimana menghasilkan varietas bibit padi yang sesuai dengan lingkungan atau kondisi tanah di daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama di Pulang Pisau, melalui riset yang mendalam.

Dalam berbagai diskusi dengan pemangku kepentingan, program *food estate* sempat dibahas karena pemerintah pusat menjadikan hal ini sebagai salah satu pro-

yek besar yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah pangan di Kalimantan atau Indonesia secara umum. Meski demikian, sampai saat ini *food estate* belum membuahkan hasil yang diinginkan karena masih banyak lahan *food estate* yang belum dimanfaatkan.

Ke depannya, sektor pertanian ini akan menjadi salah satu prioritas penting di Kalimantan Tengah. Hal ini telah disadari sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah, provinsi itu direncanakan bisa menjadi lumbung pangan dan lumbung energi nasional di masa depan.

### Dari Batubara dan Lignit

Meski tak sebesar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, pendapatan dari sektor tambang di Kalimantan Tengah cukup signifikan. Setidaknya sektor ini menjadi penyumbang kedua pada PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, tepat di bawah sektor pertanian/perkebunan. Tahun lalu (2023), sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp 15,72 triliun pada pendapatan daerah Kalimantan Tengah. Yang terbesar tentu saja dari batu bara dan lignit (*brown coal*), yang mencapai Rp 12,31 triliun pada tahun lalu.



*Petani mengangkut tandan buah kelapa sawit. Dok TEMPO/Fahmi Ali*

Angka dari hasil tambang juga muncul di sektor lain, seperti industri pengolahan.

Konsentrasi penambang-

an batu bara ini dapat dilihat di sejumlah titik. Kabupaten seperti Barito Utara, Murung Raya, Kapuas, dan Barito Timur adalah dae-

rah produsen batu bara terbesar di Kalimantan Tengah. Keempat kabupaten ini menghasilkan lebih dari dua pertiga batu bara di Kalimantan Tengah.

Tantangan terbesar dari industri ini adalah bagaimana mengalirkan lebih banyak keuntungan dari hasil tambang ke daerah setempat. Sebagaimana diketahui, sebagian besar pertambangan batu bara dikuasai perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di luar Kalimantan Tengah. Dengan demikian, imbas keuntungan lebih banyak mengalir ke luar daerah.

Hal lain adalah soal penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan serta sektor pertanian/perkebunan bisa sangat fluktuatif, bergantung pada permintaan pasar dalam dan luar negeri. Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 14,37 persen, dari US\$ 5.829,59 juta (Januari-Desember 2022) menjadi US\$ 4.992,1 juta (Januari-Desember 2023).

Komoditas utama yang diekspor dari Kalimantan Tengah selama Desember 2023 meliputi batu bara, minyak kelapa sawit, bijih zirkonium, niobium, dan tantalum, serta kayu lapis dan bahan mineral lainnya. Negara tujuan utama ekspor Kalimantan Tengah pada bulan tersebut adalah

Cina, Jepang, dan India.

Kaitannya dengan ketenagakerjaan, tantangan utama perdagangan internasional adalah dapat menyebabkan pengangguran di industri dan wilayah tertentu. Ketika perusahaan di suatu negara dapat mengimpor barang lebih murah dari negara lain, perusahaan tersebut mungkin memilih melakukan hal itu, yang menyebabkan hilangnya pekerjaan di industri dalam negeri yang tidak dapat bersaing dalam harga. Tantangan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. **Perbedaan upah:** di beberapa negara, tenaga kerja lebih murah daripada di negara lain. Ketika bisnis dapat mengimpor barang yang diproduksi oleh pekerja yang dibayar lebih rendah, mereka mungkin dapat menjual barang tersebut dengan harga lebih rendah daripada produsen dalam negeri.
2. **Perbedaan kebijakan dan peraturan:** beberapa negara memiliki peraturan tenaga kerja dan lingkungan yang lebih longgar, yang dapat membuat bisnis lebih murah untuk memproduksi barang di sana.
3. **Kemajuan teknologi:** kemajuan teknologi, seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan, dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia di industri tertentu.

## ANGKATAN KERJA DAN JALAN MENUJU MASA DEPAN

Indonesia saat ini menikmati bonus demografi, ketika jumlah penduduk yang berusia produktif melimpah dan jauh melampaui penduduk pada usia tidak produktif (anak-anak dan orang tua). Hanya, bonus ini tak lama lagi akan berubah, khususnya di Kalimantan Tengah.

Pada 2035, rasio ketergantungan penduduk Kalimantan Tengah diproyeksikan meningkat menjadi 47,42 persen dari 42,46 persen pada 2020. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 47 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan sebesar 47,52 persen ini disumbangkan rasio ketergantungan penduduk usia muda, sebesar 34,75 persen, sementara rasio ketergantungan penduduk lanjut usia sebesar 12,77 persen. Makin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan makin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Namun Kalimantan Tengah bisa dianggap masih menikmati bonus demografi karena rasio ketergantungan di bawah angka 50.

Kabar gembira lain ada-

lah ketahanan provinsi ini dalam menghadapi guncangan ekonomi saat pandemi Covid-19 terjadi pada 2020-2022. Itu karena pendapatan daerah provinsi ini (kelapa sawit dan batu bara) cukup solid untuk menopang perekonomian daerah.

Meski demikian, fluktuasi nilai ekspor kedua komoditas itu cukup tinggi karena keduanya memiliki pasar besar di luar negeri. Seperti dijelaskan sebelumnya, pasar luar negeri untuk kedua komoditas itu sering mengalami fluktuasi, yang tentu pada akhirnya berakibat pada penyerapan tenaga kerja.

Solusi untuk mengatasi persoalan utama ini antara lain pemerintah perlu berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan guna membantu transisi pekerja ke industri baru yang sedang tumbuh atau untuk memperoleh keterampilan baru yang dibutuhkan. Pendekatan lain adalah mendorong investasi. Investasi dapat meningkatkan jumlah pekerjaan yang tersedia dan membantu mengurangi tingkat pengangguran, sementara ketenagakerjaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan produktivitas.



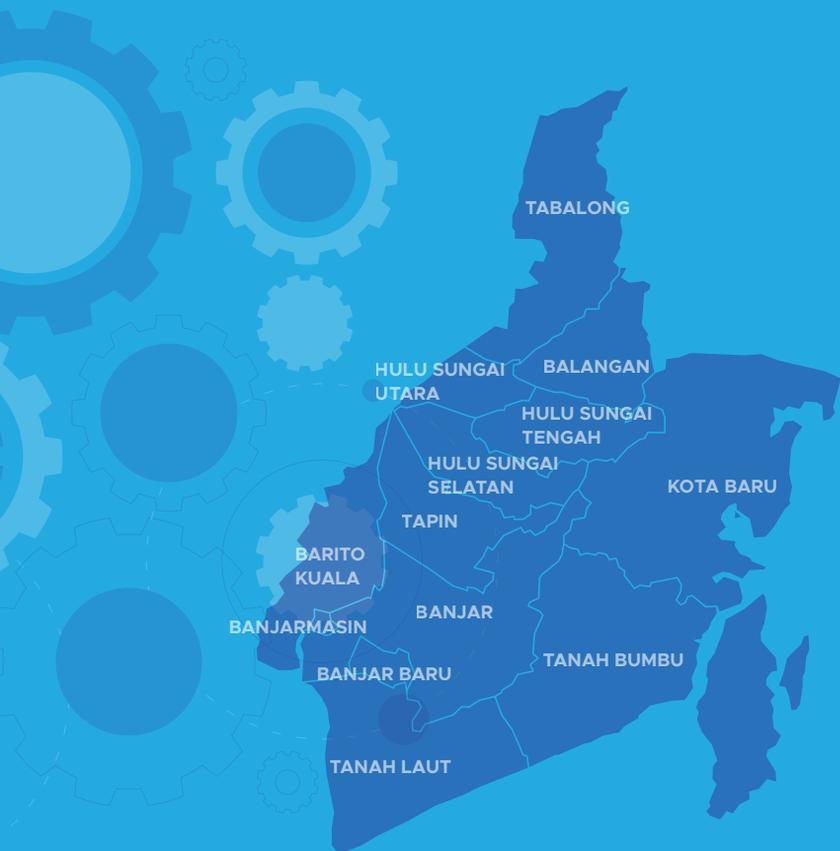
*Pekerja menyortir kelapa sawit di Kalimantan Timur. Dok TEMPO/Ayu Ambong*

Investasi dapat dilakukan pemerintah, swasta, dan asing. Pemerintah dapat membangun infrastruktur, memberikan insentif pajak, dan meningkatkan akses ke pasar untuk mendorong investasi dalam negeri. Investasi swasta dan asing juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data dari Dinas PMPT-SP Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi penanaman modal pada 2023 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 36.866 orang.

Agroindustri diperkirakan akan menjadi primadona. Karena itu, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi untuk memajukan industri ini. Di antaranya memasok tenaga kerja terampil dari lembaga pendidikan vokasi.

Dengan memperbaiki sektor ini, diharapkan *roadmap* atau peta jalan untuk kemajuan Kalimantan Tengah dapat dicapai dengan maksimal.

Peta jalan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pada jangka pendek (satu tahun) berfokus pada pengembangan teknologi baru dan memperkenalkannya kepada masyarakat dan industri. Dimulai pula pada masa ini pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Dalam jangka menengah (tiga tahun), pelatihan makin meluas. Di sisi lain, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri mulai ditingkatkan. Sedangkan dalam jangka panjang (lima tahun) mulai berfokus pada inovasi yang berhasil serta melanjutkan kolaborasi yang sudah dirintis.



TABALONG

HULU SUNGAI  
UTARA

BALANGAN

HULU SUNGAI  
TENGAH

HULU SUNGAI  
SELATAN

KOTA BARU

TAPIN

BARITO  
KUALA

BANJARMASIN

BANJAR

TANAH BUMBU

BANJAR BARU

TANAH LAUT



# PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: **BERKAH TAMBANG DAN PERKEBUNAN**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH:**

**Ketua:** *Abdul Rozaq (Politeknik Negeri Banjarmasin)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Banjarmasin: *Kun Nursyaiful Priyo Pamungkas, Agus Pebrianto, Reza Fauzan, Teguh Suprianto, Effan Najwaini, Dessy Lestari Saptarini, Rahimi Fitri, Roolliana, Evi Widiastuti, Muhammad Azhar, Puspa Ayu Yohana*
2. Politeknik Negeri Tanah Laut: *Meldayanoor, Veri Julianto*
3. Politeknik Sampit: *Ahmad Fikriyadi, Lilis Indriani*

*Perekonomian Kalimantan Selatan didominasi pertambangan (batu bara) dan perkebunan kelapa sawit. Tantangan berikutnya adalah pengembangan wisata dan perdagangan.*

## **Dominasi Pertambangan**

Kapal-kapal tongkang tak henti-hentinya melintas di atas Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Kapal-kapal itu bergerak perlahan menyeret gunung muatan berwarna hitam di belakangnya: batu bara. Maklum, Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, setelah Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.

Provinsi ini tercatat memiliki sumber daya batu bara mencapai 13,22 miliar ton atau 9,19 persen dari total sumber daya batu bara nasional. Sedangkan cadangan batu baranya tercatat sebesar 4,21 miliar ton atau sekitar 10,8 persen dari cadangan batu bara nasional. Dengan cadangan sebesar itu, tak aneh perekonomian Kalimantan Selatan didominasi pertambangan.

Struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 masih didominasi pertambangan dan penggalian, yang mencapai 30,82 persen, disusul pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,37 persen, industri pengolahan sebesar 10,75

persen, serta perdagangan sebesar 9,66 persen. Peran keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 62,6 persen.

Jika dilihat dari angka rupiahnya (harga berlaku), sektor pertambangan menyumbang hampir Rp 83 triliun. Angka ini belum memasukkan sektor-sektor lain, yang tentu juga terpengaruh oleh sektor ini. Sedangkan pertanian (yang didominasi perkebunan sawit) menyumbang sekitar Rp 30,6 triliun. Kedua sektor ini saja sudah menyumbang lebih dari 40 persen PDRB Kalimantan Selatan, yang totalnya mencapai Rp 269 triliun.

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan IV 2023 dibanding triwulan IV 2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,69 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan tahun 2023, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,77 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 0,73 persen, dan perdagangan sebesar 0,57 persen.

Meski mendominasi PDRB dan mengerek pertumbuhan ekonomi, pertambangan batu bara dan mineral lain di Kalimantan Se-



SUMBER: BPS

latan ternyata “irit” dalam menyerap tenaga kerja. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian, yang mencapai lebih dari 33,33 persen. Adapun pertambangan hanya menyerap 3,9 persen penduduk Kalimantan Selatan.

Penyerapan tenaga kerja yang kecil di sektor pertambangan ini disebabkan oleh proses di sektor ini yang umumnya memakai alat berat. Sedangkan sektor pertanian atau perkebunan lebih banyak mengandalkan tenaga manusia (padat karya). Banyak proses di perkebunan, seperti pemamanan dan penyemaian, yang masih menggunakan banyak tenaga ma-

nusia.

Dominasi pertambangan, terutama batu bara, ini tidak berubah dari tahun ke tahun. Jika diperhatikan, tidak ada perubahan struktur perekonomian yang signifikan di Kalimantan Selatan sejak 2017 hingga 2021. Tidak adanya perubahan struktur ekonomi yang dimaksud dapat diartikan bahwa urutan kontribusi sektoral tidak berubah, kecuali yang dicatatkan oleh sektor informasi dan komunikasi, yang nilai produknya dapat mengungguli sektor jasa keuangan dan asuransi sejak 2019.

Bahkan bisa dikatakan tiga sektor utama yang menopang perekonomian Kalimantan Selat-

## JUMLAH PENDUDUK ANGKATAN KERJA DAN PENDUDUK BEKERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2017-2023



**SUMBER:** BPS

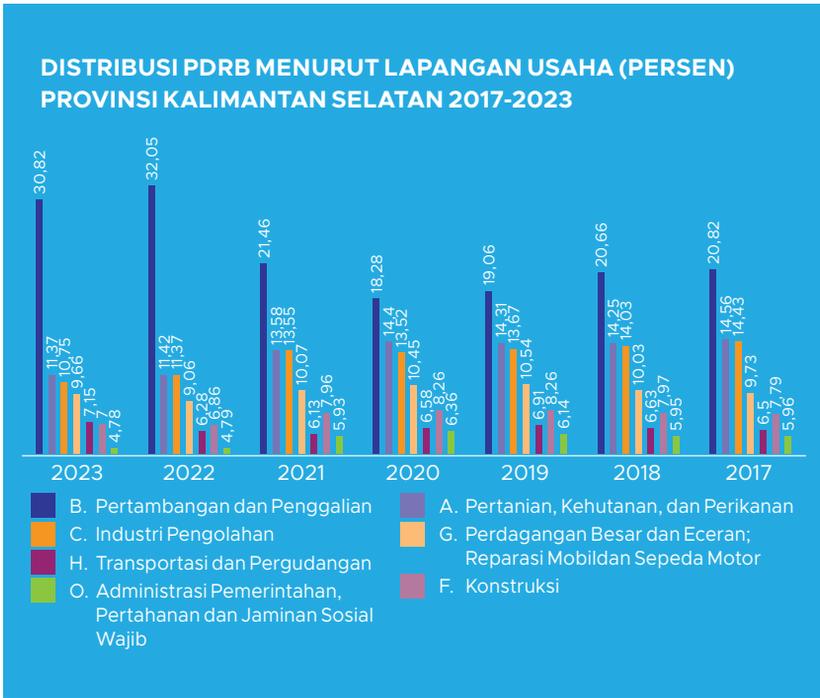
an-pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan-mengalami kecenderungan penurunan kontribusi. Kecenderungan peningkatan dapat dilihat dari sektor perdagangan, konstruksi, serta sektor transportasi dan pergudangan.

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dominan. Masih tingginya kontribusi sektor ini harus menjadi perhatian karena sektor ini merupakan sektor yang sumber dayanya tidak dapat diperbarui. Perlu ada kebijakan riil terhadap transformasi struktur ekonomi ke sektor lain, seperti pertanian, industri, dan pariwisata. Wacana transformasi ini juga disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Tantangan lain adalah soal lingkungan hidup. Ketiga sektor yang mendominasi perekonomian Kalimantan Selatan-terutama pertambangan-diketahui memiliki dampak lingkungan yang besar. Meski memiliki skala dan jenis dampak yang berbeda, sektor pertanian-dalam hal ini perkebunan kelapa sawit-juga kerap dituduh memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan sekitar.

Karena itu, diperlukan perhatian untuk meminimalkan dampak-dampak tersebut dengan menjalankan aturan yang telah digariskan pemerintah pusat dan



SUMBER: BPS

daerah. Selain itu, sejumlah produsen di hilir, terutama korporasi global, telah menerapkan persyaratan yang menjamin kelestarian lingkungan dalam pengolahan bahan baku, termasuk minyak sawit mentah (CPO).

### Menggali Potensi Lain

Berada di sebelah tenggara pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan sejak dulu menjadi titik temu berbagai suku di Indonesia. Para pelaut Bugis dan Jawa, yang berseberangan wilayah dengan provinsi ini, ikut berkontri-

busi pada dinamika kehidupan di sana. Sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan adalah suku Banjar (74,34 persen), disusul suku Jawa (14,51 persen), Bugis (2,81 persen), dan Dayak (2,23 persen).

Pola kehidupan masyarakat suku Banjar, hampir dari hulu ke hilir, ditandai dengan budaya yang khas, yaitu budaya sungai. Budaya suku Banjar mengalami proses akulturasi, percampuran dengan budaya lain, seperti budaya Dayak, Jawa, dan Melayu.

Orang-orang Banjar terkenal memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Karakter wirausaha ini me-



Aktivitas tambang batu Bara di Tapin, Kalimantan Selatan. Dok TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

numbuhkan sifat kompetitif dalam sikap dan perilaku mereka. Hal itulah yang membuat di sejumlah tempat di Indonesia bagian tengah dan timur, komunitas suku Banjar dikenal sebagai pedagang yang ulet.

Hal itu didasari budaya dan etos kerja yang kuat. Mereka juga memiliki motivasi tinggi, sebagaimana semboyan yang umum dimiliki masyarakat lokal, seperti *gawi sabumi sampai manuntung* (bekerja sama sampai selesai), *waja sampai kaputing* (bekerja bersama-sama dari awal sampai akhir), dan *kayuh baimbai* (bekerja secara serentak).

Mereka juga memiliki sikap religius yang kuat. Kuatnya nilai

religius ini membuat penduduk Kalimantan Selatan mengirimkan anak-anaknya ke banyak lembaga pendidikan agama (pesantren) di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa.

Komposisi masyarakat yang ulet dan terampil dalam perdagangan seperti itu sebenarnya membuka peningkatan sektor lain untuk mendukung perekonomian di Kalimantan Selatan. Ekonomi di provinsi tersebut pada triwulan IV 2023 dibanding triwulan IV 2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,69 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 10,68 persen, jasa keuangan dan

No.	Jenis Lapangan Usaha	Tahun 2020	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	694,45	33,33
B	Pertambangan dan Penggalian	70,7	3,39
C	Industri Pengolahan	183,041	8,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,474	0,17
E	Pengadaan Air	6,398	0,31
F	Konstruksi	109,031	5,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	412,249	19,79
H	Transportasi dan Pergudangan	82,39	3,95
I	penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142,985	6,86
J	Informasi dan Komunikasi	13,429	0,64
K	Jasa Keuangan	16,109	0,77
L	Real Estate	2,912	0,14
M.N	Jasa Perusahaan	20,15	0,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	81,334	3,90
P	Jasa Pendidikan	109,137	5,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,014	1,54
R.S.T.U	Jasa lainnya	103,516	4,97
	<b>Jumlah Penduduk Bekerja</b>	<b>2.083.319</b>	<b>51,14</b>
	<b>Jumlah Penduduk Angkatan Kerja</b>	<b>2.186.967</b>	<b>53,69</b>
	<b>Jumlah Penduduk Pencari Kerja</b>	<b>103,648</b>	<b>4,74</b>
	<b>Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>1.886.617</b>	<b>46,31</b>
	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>4.073.584</b>	<b>100</b>

Tabel 19. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan menurut Jenis Pekerjaan/ Lapangan Usaha Tahun 2020

asuransi sebesar 10,2 persen, dan konstruksi sebesar 8,63 persen. Kenaikan angkatan kerja di sektor perdagangan juga terlihat paling tinggi.

Hal lain yang menarik untuk dilirik adalah sektor pariwisata. Meski saat ini masih sangat kecil, ada sejumlah potensi yang bisa dikembangkan. Di antaranya keberadaan Geopark Meratus di Kabupaten Barito Kuala. Taman bumi ini memiliki kelengkapan wisata, dari dataran tinggi, sungai,

hingga budaya, seperti pasar terapung. Wisata religi berupa kegiatan tahunan (haul) seorang pemuka agama di Martapura juga menarik untuk dikembangkan.

Di luar sektor-sektor yang potensial tapi masih penuh tantangan untuk dikembangkan, saat ini sebenarnya Kalimantan Selatan merupakan lumbung beras untuk wilayah Kalimantan. Berbeda dengan beras asal Jawa, beras di Kalimantan Selatan lebih cocok untuk selera masyarakat Kalimantan.

## ANGKATAN KERJA DAN INOVASI KE DEPAN

Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui kemitraan inovatif dan pendidikan vokasi. Pemerintah provinsi berkeinginan memanfaatkan potensi lokal, khususnya dalam bidang agroindustri dan energi terbarukan, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sejahtera.

Diharapkan nantinya terbentuk ekosistem untuk kemitraan inovatif antara lembaga pendidikan vokasi, pemerintah daerah, dan industri dalam meningkatkan daya serap lulusan vokasi di Kalimantan Selatan serta menyelaraskan inovasi daerah dengan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Masalah pendidikan memang masih menjadi tantangan terbesar. Mayoritas tenaga kerja di Kalimantan Selatan memiliki tingkat pendidikan rendah—43,99 persen hanya berpendidikan sekolah dasar.

Pendidikan vokasi sebenarnya diharapkan bisa menghadapi masalah pengangguran. Namun saat ini pendidikan vokasi mendapat tantangan berupa tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan lulusannya, terutama dari

sekolah teknik. Karena itu, pendidikan vokasi perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Ekonomi Kalimantan Selatan terutama didorong pertambangan, pertanian, dan kehutanan. Selain itu, terdapat potensi pertumbuhan signifikan di sektor agroindustri dan energi terbarukan. Adopsi teknologi dan inovasi baru sangat penting untuk transformasi ekonomi. Kolaborasi efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat lokal sangat diperlukan. Di samping itu, kemitraan serta koordinasi perlu diperkuat untuk mendukung inovasi dan pengembangan tenaga kerja.

Agar pendidikan vokasi lebih sesuai dengan potensi ekonomi dan tantangannya, perlu kiranya pendidikan vokasi merevisi kurikulum supaya sesuai dengan kebutuhan industri. Keterlibatan industri dalam pendidikan melalui program magang, pelatihan, dan *co-op* juga perlu didorong.

Selain itu, diperlukan dukungan untuk inovasi dengan menerapkan kebijakan yang mendorong penelitian dan pengembangan di bidang agroindustri dan energi terbarukan, serta mengembangkan infrastruktur untuk



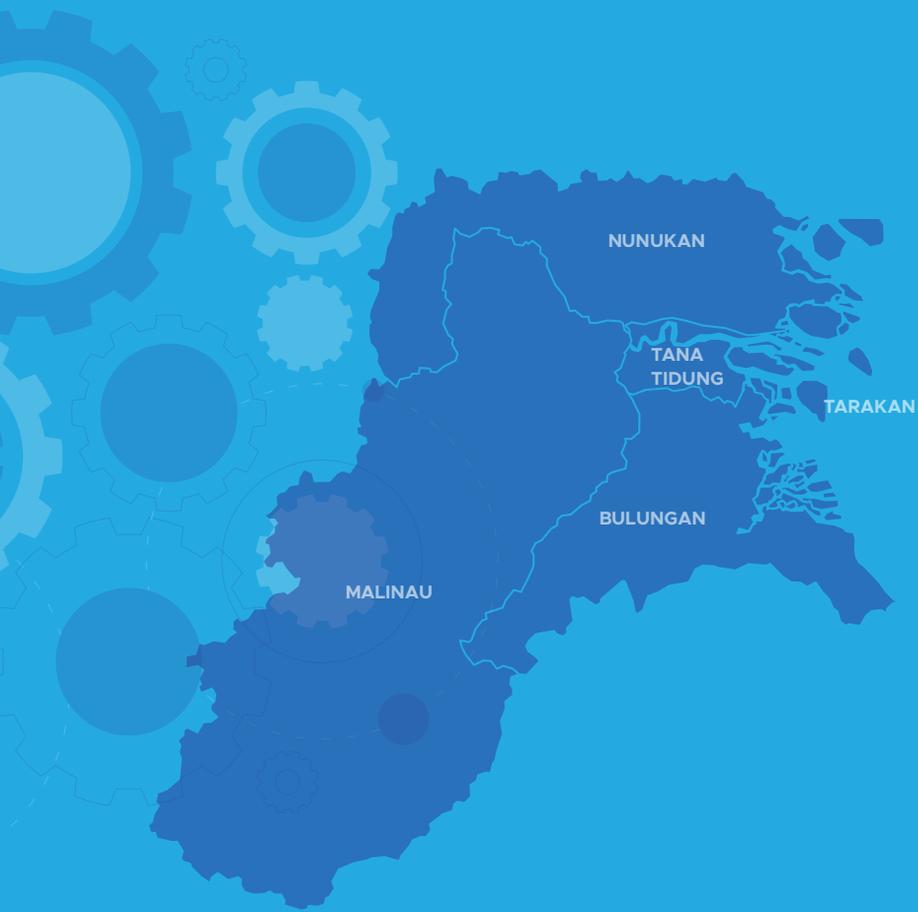
*Pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Dok TEMPO/STR/Eko Siswono Toyudho*

mendukung adopsi teknologi baru, termasuk *smart grid* dan pertanian digital.

Kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi dalam sektor energi terbarukan dan agroindustri perlu dibuat. Dukungan finansial perlu pula diberikan untuk program pelatihan dan pendidikan vokasi. Kemitraan publik-swasta harus didorong untuk memacu pembangunan daerah.

Implementasi *roadmap* disarankan dilakukan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, jangka pendek (satu tahun) berfokus pada

pengembangan kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan proyek percontohan. Sedangkan untuk jangka menengah (tiga tahun) perlu ada upaya meningkatkan inisiatif, memperkuat program pelatihan, serta memperdalam hubungan antara industri dan pendidikan. Dan terakhir, untuk jangka panjang (lima tahun) perlu dicapai integrasi penuh praktik inovatif dalam ekonomi daerah guna menjadikan Kalimantan Selatan sebagai pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan.



NUNUKAN

TANA  
TIDUNG

TARAKAN

BULUNGAN

MALINAU



# PROVINSI KALIMANTAN UTARA: **NIAT EKONOMI HIJAU DI TEPI NEGERI**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA:**

**Ketua:** *Surahman (Politeknik Negeri Samarinda)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Negeri Samarinda: *Karyo Budi Utomo, Ibnu Eka Rahayu, Amiril Azizah, Hidayat, Dita Andansari, Yunita Sintasari S, M. Fauzan Noor*
2. Politeknik Negeri Balikpapan: *Syahrudin, Yasmin Zulfati Yusrina*
3. Politeknik Negeri Nunukan: *Ismail Ramli, Luti Wiyani, Harizatul Jannah, Basran*
4. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda: *Sukariyan, Andi Lisnawati, Adnan Putra Pratama, Pandhu Rochman*

*Berlimpah dengan sumber energi kotor, Kaltara maju dengan gagasan green growth. Sudah di jalan yang benar, tapi penyediaan tenaga kerja akan sangat menantang.*

Mari ke Kalimantan Utara via udara. Rute terbaik pada saat ini adalah melalui Bandar Udara Juwata, Tarakan. Landasan pacunya sepanjang 2.250 meter dan lebarnya 45 meter. Pesawat berbadan besar bisa mendarat di sini.

Namun, karena Tarakan berupa pulau, untuk ke *mainland* Kalimantan Utara (Kaltara) harus ganti moda. Ada dua pilihan: naik kapal dari pelabuhan Tarakan atau naik pesawat lagi dari Juwata ke semua bandara domestik dan perintis yang ada di Kaltara. Setelah berada di daratan utama Kaltara, pergi ke kota/kabupaten mana pun bisa lewat jalur darat, termasuk ke hampir semua wilayah terluar.

Mau pergi ke Malaysia lewat darat dari *mainland*? Sebentar lagi itu pun bisa. Ketika laporan ini ditulis, akses ke sana masih terputus di Binuang, Krayan. Pembangunan jembatan di desa itu masih belum rampung.

Kaltara memang sedang giat membangun.

...

Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 dan salah satu provinsi muda di Indonesia. Kaltara lebih tua hanya dari empat provin-

si baru di Tanah Papua. Provinsi yang sebelumnya bagian dari Kalimantan Timur (Kaltim) ini terbentuk pada 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kotanya adalah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Luas Kaltara sekitar 75.467 kilometer persegi atau seluas Provinsi Jawa Tengah ditambah Jawa Timur. Jumlah penduduknya 727.755 jiwa pada 2022. Artinya, hanya ada sembilan penduduk per kilometer persegi, seperti kepadatan penduduk di Papua Barat.

Kaltara memiliki satu kota dan empat kabupaten, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung. Dua kabupaten, Nunukan dan Malinau, berbatasan dengan Malaysia.

Cita-cita pembangunan Kaltara adalah terwujudnya provinsi yang berubah, maju, dan sejahtera. Ada 14 misi untuk mewujudkan visi tersebut, tapi cukup satu kunci untuk mewujudkannya, yakni “pertumbuhan hijau” (*green growth*).

*Green growth* adalah per-

tumbuhan ekonomi yang kuat tapi juga ramah lingkungan serta inklusif secara sosial. Ini berbeda dengan model pembangunan konvensional, yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan, seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam.

Kajian yang dilakukan konsorsium perguruan vokasi di Kaltim-Kaltara untuk pembuatan laporan ini menunjukkan Kalimantan Utara sudah di jalan yang benar dengan *green growth*-nya. Kita pun segera bisa menjumpai contohnya di teras provinsi ini: Bandara Juwata, Tarakan.

Menolak redup karena statusnya sebagai bandara internasional dicabut Jakarta pada masa Covid-19 dan hingga kini tak dikembalikan, Juwata mencetak sejarah dengan menjadi bandar udara pertama di Indonesia yang menerapkan sistem *green airport* pada apron saat pengisian bahan bakar avtur. Ini baru satu bagian dari program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara untuk membangun bandar udara hijau pada 2024.

Demi ekonomi hijau pula, Pemprov Kaltara bergabung dengan Governors Climate and Forest (GCF) Task Force, organisasi yang berisi gubernur dari seluruh dunia yang berkomitmen terhadap perubahan iklim dan kehutanan. Pemprov juga memperkuat kebijakan

transfer anggaran profit berbasis ekologi untuk mendorong kabupaten/kota meningkatkan kinerja ekologinya.

Sesungguhnya, bagi Kaltara, pilihan pertumbuhan hijau banyak godaannya. Soalnya, wilayah ini kaya akan potensi pertambangan dan kini sektor itu menjadi andalan ekonomi Kaltara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara pada 2022 menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian merupakan penopang utama ekonomi, dengan kontribusi 36,42 persen dari total produk domestik regional bruto (PDRB). Nilainya Rp 138,72 triliun. Duit itu diperoleh dari pertambangan minyak, gas alam, dan batu bara yang dihasilkan 83 usaha pertambangan.

Nilai ekspor juga menunjukkan tambang menjadi penggerak ekonomi Kaltara. Pada 2022, ekspor Kaltara senilai 2,672 miliar dolar AS dan tambang menyumbang 89,37 persen nilai tersebut.

Namun banyak sektor lain yang bisa diarahkan untuk dijadikan hijau. Sektor itu adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang saat ini memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB, yakni 14,06 persen. Kaltara memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 128.793 hektare di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan.

Di sektor pariwisata, provinsi ini juga memiliki beragam destinasi, yang tersebar di lima kabupaten/kota. Obyek wisata itu dari gunung hingga laut, seperti Pantai Tanah Kuning II, Terumbu Karang Malingkit, Desa Wisata Metun Saja, dan Air Terjun Binusan.

Lagi pula, menjadi hijau bukan berarti tak boleh bermain di industri. Untuk ini, Kaltara sedang bersiap dan sudah pasang target untuk menjadi provinsi industri.

Dalam periode 2033-2038, Kalimantan Utara menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap PDRB, nilai ekspor, jumlah tenaga kerja, nilai investasi sektor industri tanpa migas, dan jumlah unit usaha industri skala besar. Berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), Kaltara bermaksud mengembangkan industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada pengolahan produk unggulan daerah.

Salah satu kebijakan industri hijau yang paling terlihat adalah kiblat pemenuhan energinya. Kaltara memilih memenuhi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan dan PLTA Mentarang. Meski banyak kritik terhadap kualitas “hijau” PLTA, pilihan ini jauh lebih baik daripada mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, yang sumbernya berlimpah di Kaliman-

tan.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah terluar dan perbatasan, Pemprov Kaltara mendorong pengembangan energi terbarukan dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

Di sektor industri, Kaltara sedang membangun Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan. Meski sejauh ini masih memicu kontroversi, KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dicita-citakan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia.

Di dalam kawasan ini akan ada berbagai pabrik. Dalam diskusi kelompok terpumpun atau FGD bersama para pemangku kepentingan di Kaltara untuk penyusunan laporan ini, diperoleh keterangan soal jenis industrinya. Menurut Direktur Pusat Pembangunan Nasional, di antara industri yang akan dibangun, ada pabrik litium dan petrokimia.

Jika melihat apa yang diimpor provinsi ini, ada pula potensi pengembangan produksi barang industri. Diketahui, nilai impor Kaltara pada 2022 sebesar 170,89 juta dolar AS. Barang yang diimpor terutama adalah hasil industri, sebesar 97,72 persen dari total impor. Produksinya mungkin bisa dilakukan sendiri di Kaltara karena



*Petugas melakukan pengecekan berkala pada panel surya. Tempo/Tony Hartawan*

barang itu tidak semuanya berasal dari negeri canggih. Negara importir itu misalnya Vietnam, Malaysia, Kamboja, bahkan Pakistan.

Jadi, industri besar di Kaltara dari sektor hulu sampai hilir akan berada dalam konsep hijau dan berkelanjutan.

Tentu saja, prioritas pembangunan di Kalimantan Utara bukan hanya industri besar, melainkan juga peningkatan keunggulan kompetitif setiap kabupaten/kota, hingga pemberian bantuan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di setiap wilayah. Berdasarkan dokumen profil potensi daerah dan peluang investasi Perda Nomor 18 Tahun 2018 serta Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Utara,

rencana strategis industri Kaltara juga berfokus pada pengembangan kota baru mandiri berbasis keunggulan daerah.

Misalnya, di sektor pertanian, ada program produksi padi sawah pada kawasan Delta Kayan Food Estate di Kabupaten Bulungan. Luasnya 50 ribu hektare.

Di sektor perkebunan, ada program untuk komoditas perkebunan. Program utamanya pada kelapa sawit, disusul dengan kelapa dalam dan kakao.

Di sektor kelautan dan perikanan, ada produksi tambak udang windu, tambak bandeng, pengolahan udang dan ikan segar dan beku, serta budi daya rumput laut. Di sektor pariwisata, akan dikembangkan wisata bahari, wisata alam, dan budaya Dayak.

Pengembangan sektor pendukung ini penting karena pembangunan harus merata, seperti yang juga disyaratkan dalam *green growth*. Sementara itu, dalam hal pemerataan pembangunan, Kaltara masih punya masalah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkannya. Diketahui, IPM Kaltara pada 2022 tercatat sebesar 71,83. Angkanya memang naik 0,64 persen dibanding tahun 2021, dan angka IPM ini sudah tergolong tinggi karena lebih dari 70. Namun jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2023 masih sebanyak 47,97 ribu. Meski angkanya turun dari 50,58 ribu pada September 2022, ada ketimpangan dalam hal jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan dan perkotaan. Di desa, jumlah penduduk miskin lebih besar daripada di kota.

Tingkat ketimpangan atau rasio Gini penduduk pada Maret 2023 juga tercatat sebesar 0,277, naik sedikit jika dibandingkan dengan rasio Gini pada September 2022, sebesar 0,270.

Namun yang paling menantang dari cita-cita *green growth* Kaltara adalah penyiapan tenaga kerja.

Diskusi untuk laporan ini mengungkapkan soal besarnya kebutuhan akan tenaga kerja, khususnya yang terkait dengan

KIPI. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian-Pengembangan Kalimantan Utara, serapan tenaga kerja di kawasan industri ini diperkirakan mencapai 75 ribu orang. Belum jelas benar soal detail lowongan pekerjaan, tingkat pekerjaan, dan sertifikasi yang dibutuhkan, tapi perkiraan jumlah kebutuhan tenaga kerja ini sejalan dengan data tentang peningkatan pertumbuhan sektor industri tanpa migas dan penyerapan tenaga kerja di kawasan industri.

Diskusi juga menyoroti tren tenaga kerja di sektor pertanian. Soalnya, meskipun potensi pertanian di Kalimantan Utara besar, minat peserta didik cenderung pada bidang teknologi informasi daripada pertanian. Ini mengonfirmasi kebutuhan untuk meningkatkan keselarasan antara konsentrasi keahlian pendidikan dan sektor ekonomi.

Selain itu, ada diskusi soal regulasi yang mendukung prioritas bagi tenaga kerja lokal dan penyiapan sumber daya manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan data tentang peningkatan pertumbuhan sektor industri tanpa migas dan penyerapan tenaga kerja di kawasan industri.

Melihat ke masa depan, akan ada sejumlah pekerjaan yang dinilai kritis. Pekerjaan itu antara lain pekerjaan yang membutuhkan in-

sinyur elektrik karena terkait dengan rencana pembangunan pabrik litium, pabrik petrokimia, dan PLTA Mentarang.

Pekerjaan lain yang kritis adalah pekerjaan yang membutuhkan insinyur sipil untuk pengembangan kawasan industri dan proyek infrastruktur lainnya. Juga insinyur lingkungan, mengingat proyek KIPI Tanah Kuning adalah proyek strategis nasional untuk pengembangan industri hijau.

Meskipun minat peserta didik cenderung ke bidang teknologi informasi dan pertambangan daripada pertanian, dari diskusi terungkap bahwa sektor pertanian masih memiliki potensi besar di Kaltara, sehingga ahli pertanian tetap penting. Ada pula kebutuhan manajer sumber daya manusia. Sebab, dengan peningkatan investasi dan pengembangan industri, manajer SDM akan berperan penting dalam merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas.

Yang juga dibutuhkan, tapi tidak terkait dengan industri hijau, adalah petugas kesehatan. Soalnya, di Kaltara, angka pernikahan dini tinggi, yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus bayi *stunting*.

Kajian ini menyimpulkan bahwa penting untuk memperhatikan kebutuhan akan tenaga kerja kritis dalam perencanaan pembangun-

an ekonomi di Kalimantan Utara. Tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja.

Berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kritis ini, di antaranya pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja, lembaga pendidikan, perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan, dan masyarakat umum. Peran yang diharapkan antara lain menyediakan program pelatihan, meningkatkan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, menciptakan kebijakan yang mendukung penyerapan tenaga kerja lokal, serta memfasilitasi kerja sama antara lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja, dan industri.

Pemerintah daerah dalam hal ini dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan program-program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal.

Langkah lain adalah mengembangkan program-program pendukung perekrutan tenaga kerja lokal. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja serta perusa-



*Siswa Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK Negeri 1 Sebatik Barat saat merawat pohon durian di Sebatik Kalimantan Utara, 10 April 2023. Tempo/Hilman Fathurrahman W*

haan lokal untuk mengembangkan program-program yang memfasilitasi rekrutmen dan pengembangan tenaga kerja lokal. Ini termasuk program magang, kerja sama proyek, serta pembangunan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri.

Pemprov juga perlu mendorong diversifikasi ekonomi. Ini menjadi cara untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam, dengan memberikan insentif bagi pengembangan sektor alternatif seperti perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Insentif tersebut bisa berupa pengurangan biaya administratif, penyediaan infrastruktur pendukung, dan pro-

mosi investasi.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain juga mutlak, termasuk lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja, perusahaan, dan masyarakat umum. Koordinasi yang baik akan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan dan program-program yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kritis.

Ada pula tantangan dari sisi kompetensi tenaga kerja yang harus ditingkatkan. Dalam soal kemampuan nonteknis, misalnya. Kompetensi nonteknis atau *soft skills* adalah keterampilan yang tidak langsung terkait dengan pengetahuan teknis atau spesifik

dalam suatu bidang, tapi sangat penting dalam berbagai situasi dan pekerjaan.

Contoh kompetensi nonteknis adalah komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis, serta mendengarkan dengan baik. Contoh lain adalah kemampuan interpersonal atau kemampuan berinteraksi dengan orang lain dengan baik, termasuk dalam situasi konflik atau ketegangan.

Kemampuan beradaptasi juga diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi atau lingkungan kerja.

Kompetensi lain yang dibutuhkan adalah kecakapan lokal. Kecakapan lokal adalah kemampuan atau pengetahuan tentang budaya, bahasa, dan praktik lokal suatu daerah atau negara tertentu. Perlunya kecakapan lokal bagi tenaga kerja dapat bervariasi, bergantung pada jenis pekerjaan dan lingkungan kerja yang dihadapi.

Kecakapan lokal yang penting bagi tenaga kerja antara lain memahami pasar lokal (untuk membantu tenaga kerja memahami pasar lokal), kebutuhan konsumen, dan tren bisnis yang berlaku di daerah tersebut. Selain itu, kecakapan lokal memungkinkan tenaga kerja berinteraksi dengan masyarakat lokal, mitra bisnis, dan kolega dengan lebih efektif. Kecakapan

lokal juga dapat membantu tenaga kerja menghindari kesalahpahaman budaya yang dapat muncul dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, kecakapan lokal memungkinkan tenaga kerja memahami regulasi dan kebijakan yang berlaku di daerah tersebut, yang dapat memengaruhi operasi bisnis.

• • •

FGD juga mengungkap potensi jomplangnya ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan di Kaltara di masa depan. Itu adalah kebutuhan akan *data analyst*, *data science analyst*, *mix & acetylene (welder)*, *big data analyst*, *information technology (AI, AR, VR)*, *big data*, *cloud computing*, *cyber security*, *IOT specialist*, *mobile edge computing*, *digital twin technology*, *advantage agriculture technology*, *biotechnology*, teknologi pengelolaan lingkungan, ahli madya mekatronika, teknologi otomasi industri, teknik penangkapan ikan, dan *logistic specialist*. Mau tak mau, Kaltara akan mengimpor tenaga kerja yang dibutuhkan ini dari luar, kecuali segera mencari cara untuk memenuhinya.

Demikianlah, tak gampang bagi Kaltara untuk menjadi provinsi yang mengedepankan *green growth*. Tapi itu bukan alasan untuk kembali berkiblat pada ekonomi ekstraktif. *Benuanta* (optimistis) adalah moto provinsi ini.

## VOKASI UNTUK KALTARA YANG BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF

Kalimantan Utara menetapkan haluan pembangunannya pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif. Cita-cita ini diwujudkan melalui Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), dan *Food Estate*. Diyakini, kebijakan ini dapat secara signifikan mempercepat pembangunan.

Sebagai provinsi dengan penduduk paling jarang, hanya sembilan jiwa per kilometer persegi (BPS, 31 Maret 2023), dan angkatan kerja per Agustus 2023 sebesar 387.823, jelas ada masalah kesenjangan *supply* dan *demand* tenaga kerja lokal. KIPI dan KIHI saja diperkirakan akan menyerap 200 ribu tenaga kerja lokal. Ada pula persoalan *skill* karena industri yang dikembangkan sarat teknologi canggih, seperti pabrik litium, petrokimia, dan PLTA Mentarang.

Akan dibutuhkan pasokan tenaga kerja dari luar provinsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun ini tentu mengancam niat pembangunan yang inklusif dan menyejahterakan semua warga Kaltara.

Perguruan tinggi vokasi (PTV) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) bisa memainkan

peran penting dalam penyediaan tenaga kerja lokal. Namun kajian oleh konsorsium PTV Kaltara/Kaltim untuk pemetaan dan proyeksi tenaga kerja menemukan ada masalah yang harus diantisipasi agar PTV/SMK di Kaltara bisa mengambil peran itu.

Masalah utama adalah kesenjangan kurikulum, sarana, dan teknologi di PTV/SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Ketimpangan itu membuat siswa tak siap langsung kerja. Ada pula soal koordinasi antar-pemangku kepentingan. Misalnya, meskipun KIPI sejak awal digembar-gemborkan akan membutuhkan SMK dalam penyediaan tenaga kerja, tidak ada info riil dan spesifik soal ini, seperti tenaga kerja berketerampilan apa yang diperlukan. Daya saing SDM di Kaltara juga masih rendah. Ada isu lemahnya daya juang dan etika (*soft skills*) lulusan PTV dan SMK.

Sebenarnya, angkatan kerja yang tersedia saat ini bisa dipakai, dengan lebih dulu meningkatkan pengetahuan dan skill-nya. Masalahnya, infrastruktur seperti balai latihan kerja banyak yang belum jadi. Pada saat yang sama, ada kekurangan guru dan dosen produktif di PTV/SMK.



Pelatihan pertanian dan perkebunan SMK Negeri 1 Sebatik, Kalimantan Utara.  
Dok TEMPO/Hilman Fathurrahman W

## Rekomendasi

Agar lulusan PTV/SMK di Kaltara dapat berperan dalam pembangunan wilayah, ada sejumlah rekomendasi yang perlu dilaksanakan:

1. Pemetaan guru SMK produktif dan dosen PTV bersertifikat kompetensi;
2. Pemetaan kualifikasi dan ke-

butuhan *future of works* SDM Kaltara yang terkait dengan KIPI, KIHI, dan lainnya serta penerbitan perda/pergub untuk melindungi tenaga kerja lokal;

3. Revitalisasi sarana praktikum di PTV/SMK dengan teknologi yang *up to date*;
4. Pemadanan kurikulum/program yang mengarah pada kebutuhan DUDI.





# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: **NGALAP BERKAH** **IBU KOTA NUSANTARA**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA:**

**Ketua:** *Surahman (Politeknik Negeri Samarinda)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Samarinda: *Karyo Budi Utomo, Ibnu Eka Rahayu, Amiril Azizah, Hidayat, Dita Andansari, Yunita Sintasari S, M. Fauzan Noor*
2. Politeknik Negeri Balikpapan: *Syahrudin, Yasmin Zulfati Yusrina*
3. Politeknik Negeri Nunukan: *Ismail Ramli, Luti Wiyani, Harizatul Jannah, Basran*
4. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda: *Sukariyan, Andí Lisnawati, Adnan Putra Pratama, Pandhu Rochman*

*Kalimantan Timur terus berbenah untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Banyak yang belum kompatibel, tapi tak ada pilihan selain bersiap. Agar tak jadi tamu di rumah sendiri.*

Nun di pedalaman Kalimantan Timur, 124 kilometer jauhnya dari ibu kota provinsi, Samarinda, pengganti Jakarta terus disiapkan. IKN Nusantara—nama resmi ibu kota baru itu—akan meliputi area seluas 2.561 kilometer persegi, kira-kira setara luas Jakarta ditambah Kota Depok-Bogor-Bekasi-Tangerang-Tangerang Selatan dikalikan dua. Sekitar 65,96 kilometer persegi akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, seperlima lainnya akan menjadi Kawasan IKN Nusantara, dan selebihnya sebagai Kawasan Pengembangan IKN Nusantara. Ada pula wilayah metropolitan Nusantara, yang mencakup kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, yaitu Penajam, Tenggarong, Balikpapan, dan Samarinda.

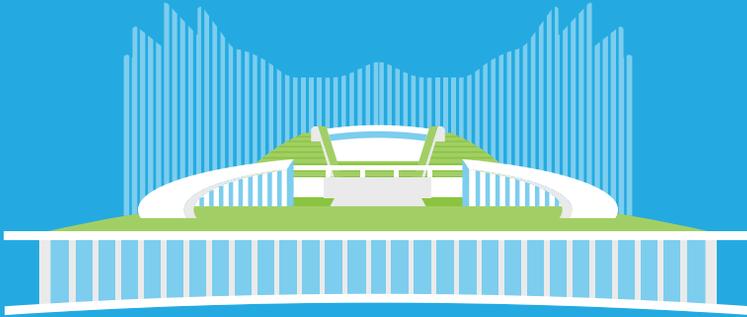
Pembangunan IKN dibagi dalam lima tahap, hingga 2045. Tahap pertama berlangsung sejak lokasi IKN ditetapkan pada 2022 hingga 2024. Ketika tahap pertama selesai dikerjakan, presiden, para menteri, anggota DPR, anggota TNI/Polri, dan sekitar setengah juta penduduk sudah akan bermukim di IKN. Bagaimana kebutuhan IKN akan dipenuhi?

Provinsi Kalimantan Timur

(Kaltim) mengincar peran sebagai penyuplai segala kebutuhan ibu kota baru itu. Dalam berbagai kesempatan, pejabat Kaltim dan warga, dalam acara resmi ataupun tak resmi, sering mengatakan tidak ingin menjadi tamu di IKN.

Provinsi lain di dekat IKN jelas menginginkan peran yang sama—dari provinsi di seberang Selat Makassar, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, hingga provinsi-provinsi di Jawa. Tapi Kaltim bisa “menang banyak” dalam persaingan itu karena IKN berada di wilayahnya, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pemerintah pusat juga tak akan mengabaikan Kaltim. Bagaimanapun, tentu tidak baik jika IKN moncer tapi wilayah di tepinya buram. Karena itu, bersamaan dengan pembangunan IKN, pemerintah pusat menyiapkan Kalimantan Timur untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Untuk itu, pada pembangunan IKN tahap 4 (2034-2039), salah satu yang akan disiapkan adalah infrastruktur yang menunjang ekosistem tiga kota, yakni IKN, Balikpapan



## **PETA JALAN IKN (2022-2045)**

Ibu Kota Nusantara akan dibangun dalam lima tahap dengan biaya sekitar Rp 466 triliun. Targetnya, menjadikan kota ini sebagai kota paling berkelanjutan di dunia.

### **Tahap I (2022-2024)**

Pemindahan tahap awal pusat pemerintahan dari Jakarta, termasuk pemindahan aparat sipil negara dan TNI/Polri. Untuk itu akan dibangun:

- Infrastruktur utama (Istana Kepresidenan, Gedung MPR/ DPR, perumahan dan infrastruktur untuk setengah juta penduduk tahap awal)
- Siap untuk perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024

### **Tahap II (2025-2029)**

Pembangunan IKN tahap II diarahkan untuk pembangunan “area inti yang tangguh”, mencakup pembangunan pusat penelitian untuk inovasi dan pusat-pusat perekonomian untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas nasional, dengan menekankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Di antara yang akan dibangun:

- Bandara VVIP
- Peningkatan kapasitas Bendungan Sepaku Semoi

### Tahap III (2030-2034)

Pembangunan IKN dilanjutkan dengan lebih progresif. Di antara yang dibangun:

- Sistem transportasi umum
- Penambahan infrastruktur digital untuk pembangunan *smart city*

### Tahap IV (2035-2039)

Pembangunan infrastruktur yang menunjang ekosistem 3 kota, yakni IKN, Balikpapan, dan Samarinda untuk memberi dampak ekonomi signifikan bagi wilayah Kalimantan Timur.

- Jaringan kereta api regional
- Pengembangan infrastruktur digital

### Tahap V (2040-2045)

Ketika tahap ini berakhir, IKN diharapkan sudah bereputasi global sebagai “Kota Dunia untuk Semua”. Pembangunan yang dikerjakan:

- Finalisasi infrastruktur dan sistem transportasi
- Pengembangan dan penambahan infrastruktur digital

pan, dan Samarinda.

Kehadiran IKN dan apa yang akan diberikan kota ini telah menjadi harapan segar bagi Kaltim. Maklum, pertumbuhan ekonomi provinsi ini seakan-akan kurang gas. Pada 2022, misalnya, pertumbuhan ekonominya menjadi yang terendah se-Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pasca-pandemi Covid-19 itu

hanya 4,48 persen, yang bahkan lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional (5,31 persen). Namun, supaya Kaltim bisa menanggung berkah sebagai tuan rumah IKN, banyak hal perlu disiapkan.

Dalam diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD) untuk penyusunan laporan ini, terungkap bahwa per-

siapan Kaltim untuk menyambut IKN bukan sekadar *upgrading*, melainkan transformasi. Sektor-sektor unggulan di Provinsi Kaltim 2019–2023 masih mengandalkan sumber daya alam, sementara IKN akan butuh penggerak di sektor teknologi, bisnis, dan jasa.

Saat ini, apa yang dimiliki Kaltim dan yang dibutuhkan IKN sama sekali tidak kompatibel, berdasarkan analisis terhadap rencana pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), hingga potensi daerah. FGD yang digelar di berbagai kota di Kaltim itu menyarankan perlu adanya sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), dan kebijakan IKN.

Yang tak sinkron bukan cuma rencana pembangunan, melainkan juga ketersediaan tenaga kerja. Dibentuk pada 1956, provinsi dengan sepuluh kabupaten/kota ini yang terluas keempat, tapi dengan jumlah penduduk tidak sampai 4 juta jiwa (3.909.740) dan sekitar 1,5 juta di antaranya terkonsentrasi di Kota Samarinda dan Balikpapan. Dari jumlah penduduk sebesar ini, jumlah penduduk angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Provinsi Kalimantan Timur pada Agustus 2023 sebanyak 1,95 juta orang, sementara yang bekerja sebanyak 1,85 juta orang. Rasio yang beker-

ja di sektor formal dan informal sekitar separuh-separuh.

Dalam FGD bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur, terungkap bahwa secara total Kaltim memiliki luas kawasan budi daya 10.451.331 hektare (ha), yang potensial sebagai pengembangan ekonomi, yang terdiri atas kawasan hutan, perkebunan, pertanian, pariwisata, industri, permukiman, pertambangan, dan kawasan lindung seluas 1.844.969 ha. Kalimantan Timur juga memiliki 344.581 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan sekitar 5.000 produk, 6.948 perusahaan konstruksi, 1,3 juta ha perkebunan sawit, serta 75 unit pabrik minyak sawit mentah (CPO) dengan kapasitas produksi 4–5 juta ton per tahun.

Kawasan budi daya ini, menurut Disnakertrans, berkemampuan menyerap 6–9 juta tenaga kerja—sekitar dua kali lebih besar dibanding jumlah penduduk Kaltim.

Soal kekurangan tenaga kerja ini sudah terasa betul di IKN, yang di bidang konstruksi saja pada tahap awal ini membutuhkan tenaga kerja lebih dari 260 ribu orang. Menurut hasil FGD, Kaltim kekurangan tenaga kerja terampil di sektor konstruksi akibat dari kecilnya jumlah siswa di jurusan teknik alat berat, teknik konstruksi dan perumahan, bisnis konstruksi,



*Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. TEMPO/Subekti*

serta properti.

Yang terjadi sesungguhnya bukan sekadar kurang. FGD menemukan kontribusi sektor konstruksi di Kaltim turun dari 8,98 persen menjadi 7,7 persen.

Hal yang sama terjadi pada sektor industri pengolahan, yang turun menjadi 15,05 persen, dari sebelumnya 17,87 persen. Begitu pula sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang berkurang kontribusinya menjadi 7,04 persen, dari sebelumnya 7,95 persen.

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar di Kaltim justru pada sektor pertambangan dan penggalian (23.564 orang),

naik menjadi 53,24 persen, dari sebelumnya 45,52 persen. Yang ditambang dan digali adalah bahan bakar fosil. Sedari dulu, Kaltim memang penghasil minyak, gas bumi, serta batu bara, termasuk di tapak IKN, di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Masalahnya, IKN dicita-citakan menjadi wilayah paling berkelanjutan di dunia. Untuk itu, desainnya disesuaikan dengan kondisi alam dan kawasannya rendah emisi karbon. Sebanyak 75 persen kawasan IKN direncanakan menjadi ruang terbuka hijau. Pemakaian energi akan menggunakan 100 persen energi bersih. Jadi,

bahan bakar fosil, sumber utama pendapatan Kaltim saat ini, justru seteru nomor satu IKN.

Namun, tanpa IKN pun, Kaltim seharusnya membenahi kekuatan ekonominya yang sangat bergantung pada ekspor batu bara. Dengan fluktuasi harga global dan perubahan regulasi internasional yang terus-menerus, sektor alternatif seperti perdagangan, pertanian, dan pariwisata perlu diperkuat untuk ketahanan ekonomi daerah.

Kembali ke isu tenaga kerja Kaltim. Karena ketersediaan tenaga kerja dan lapangan kerja jomplang, Kaltim menjadi pasar yang terbuka luas bagi tenaga kerja dari luar provinsi. Akibatnya, tenaga kerja Kaltim akan bersaing dengan tenaga kerja dari seluruh Indonesia.

Pembangunan ibu kota baru membikin isu persaingan sumber daya manusia (SDM) ini makin krusial. Soalnya, persaingan ini bisa mengakibatkan gesekan sosiologis dan ketimpangan sosial bagi SDM lokal dalam hal akses terhadap kesempatan kerja.

IKN diproyeksikan menjadi *benchmarking*. Mengusung jargon *smart city*, salah satu yang perlu dipersiapkan adalah tenaga kerja *high skill* di bidang industri teknologi. Jika tenaga kerja lokal di sektor inovasi tidak tersedia di Kabupaten Penajam Paser Utara, atau di Kalimantan Timur, sudah

pasti tenaga kerja akan dipenuhi dari daerah lain. Akhirnya, yang menikmati manfaat pemindahan ibu kota bukan penduduk lokal.

Soal persaingan tenaga lokal dan dari luar daerah ini sebenarnya isu lama di Kaltim. Sekitar 15 tahun lalu, karena masalah ini, Wali Kota Bontang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja. Dalam perda yang diperbarui pada 2018 itu disebutkan perusahaan wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal paling sedikit 75 persen dari seluruh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika rasio ini dilanggar, akan ada sanksi administratif, misalnya penghentian sementara proses produksi. Tapi tak selamanya kebijakan politik ini bisa bertahan.

Soal ketahanan pangan juga menjadi isu. Jangankan untuk mencukupi kebutuhan IKN, untuk kebutuhan Kaltim saja masih mendatangkan dari luar. Meski belum berhasil, Kaltim memilih berusaha mandiri.

Sektor pertanian di Kaltim diperkirakan akan menjadi salah satu sektor yang paling diminati dalam lima tahun ke depan. Sebab, jumlah rekomendasi terhadap pekerjaan tersebut meningkat dan tenaga yang dibutuhkan di sektor pertanian/perkebunan sangat besar. Potensi perkebunan kelapa sawit yang ada di Kaltim mendo-

rong terciptanya *demand* untuk tenaga kerja yang terampil di bidang perkebunan. Hal ini juga didukung dengan posisi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menempati urutan kedua dari penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha, dengan persentase 19,21 persen.

Menurut proyeksi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltim, penduduk yang bekerja menurut sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akan meningkat signifikan, sekitar 5.000 tiap tahun, karena Kaltim akan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan hilirisasi produk, serta karena akan ada IKN Nusantara.

Tantangan juga ada di sektor industri kreatif dan kerajinan, yang menjadi salah satu sektor yang potensial untuk berkembang. Yang perlu didorong antara lain industri *fashion* dan kriya. Pada 2015, *fashion* sudah mulai hadir di Kota Samarinda dan Kaltim, di mulai dari sarung Samarinda. Hingga saat ini, tendensi untuk meningkatkan SDM di bidang desain *fashion* terus digalakkan, walaupun belum optimal karena belum ada sinergi antarlembaga. Juga belum ada sekolah desain *fashion* setingkat perguruan tinggi di Kaltim, sehingga semua siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) tata busana yang ingin kuliah harus ke luar pulau. Kendala yang sering

dihadapi di antaranya biaya yang sangat mahal dan izin dari orang tua. Industri *fashion* dan kriya jika dioptimalkan dapat menciptakan generasi milenial dan gen Z yang terjun dalam *fashion design* ataupun kriya yang berdaya saing dan bergerak cepat untuk menjawab kebutuhan IKN.

Di balik isu tenaga kerja, ada pula masalah kultur. Menurut Disnakertrans, pencari kerja di Kaltim cenderung pemilih dan daya juangnya terbilang lemah. Itu antara lain karena mereka sebenarnya tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Mereka punya kebun sawit, kebun energi, kebun kayu, dan di bawah tanah ada tabungan batu bara. Mereka bekerja hanya untuk mencari status dan agaknya pekerjaan yang dikehendaki bukan kerja kasar. Jenis pekerjaan itu misalnya berdagang atau bekerja di kantor.

Karena itu, data penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha menunjukkan dominasi dari sektor perdagangan besar dan eceran, yang menempati urutan pertama. Tercatat, pekerja pemilik toko bertambah sebanyak 1.572 orang selama 2022-2024 atau 786 orang per tahun, dari 24.102 orang pada 2022 menjadi 25.674 orang pada 2024. Demikian pula jabatan empat digit lainnya, yakni pekerja tenaga perkantoran umum, dengan pertambahan 1.929 orang atau 965 orang per tahun.

Toh, ada pula statistik ketenagakerjaan yang menggembirakan. Jumlah penduduk lulusan diploma yang bekerja di Kalimantan Timur pada 2021 yang terbesar adalah yang berjabatan profesional, mencapai 15,6 ribu orang, dan relatif meningkat paling cepat dibanding jabatan lain, yaitu sebesar 3,1 ribu orang atau 776 orang per tahun selama 2017-2021. Data di atas mengindikasikan bahwa lulusan perguruan tinggi vokasi mampu bersaing dalam posisi jabatan yang tergolong prestisius.

Sayangnya, jumlah lulusan diploma ini sedikit. Pada 2022, persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus diploma I/II/III sekitar 3,26 persen, yang berlatar belakang pendidikan sekolah dasar ke bawah 25,98 persen, dan sisanya—yang terbesar—dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK.

Karena itu, dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 2024-2026 dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, terdapat dua prioritas, yakni peningkatan daya saing SDM yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Bersama para pihak, Provinsi Kaltim bahu-membahu menyelenggarakan pelatihan atau *workshop* untuk melakukan pembenahan mental (*soft skill*) dan

peningkatan keterampilan.

## **Kaltim Dua Dekade Kemudian**

Tepat pada peringatan 100 tahun Indonesia, pada 2045, IKN sudah menyelesaikan pembangunan tahap kelima. Pada tahap ini, infrastruktur dan sistem transportasi sudah final, demikian pula pengembangan dan penambahan infrastruktur digital, setelah pada tahap sebelumnya diselesaikan pembangunan jaringan kereta api regional, sistem transportasi umum, dan persiapan kota cerdas.

Kota ini sudah menjadi kota yang berkelanjutan. Sekitar 80 persen mobilitas warganya didukung transportasi umum, sepeda, atau jalan kaki. Itu dimungkinkan karena kota ini menekankan pembangunan yang padat dan dapat dilalui dengan berjalan kaki serta akan dilayani jaringan jalur sepeda di seluruh kota, sistem metro yang terdiri atas dua jalur rel, sistem bus *rapid transit*, dan minibus otonom yang berfungsi sebagai pengumpan.

Dikelilingi hutan Kalimantan, karena 65 persen area IKN akan menjadi area konservasi, 10 persen wilayah IKN juga sudah giat memproduksi pangan.

Pada saat yang sama, Kaltim ada di mana, jika tidak dari sekarang bertransformasi?

## MASA DEPAN VOKASI KALTIM: BERKIBLAT KE IKN, BERPIJAK DI PEDALAMAN

Pendidikan vokasi harus mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Di Kalimantan Timur (Kalim), kebutuhan itu bersumber dari kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pengembangan industri berkelanjutan serta bernilai tambah di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, seperti kemurgi dan oleokimia.

Untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja lulusan Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dan SMK di masa depan dan menyusun rencana inovasi daerah dilakukan kajian *Foresight* dan *System Dynamic*. *Foresight* dipakai mengidentifikasi *event*, *trend*, dan *driver* ketenagakerjaan dan inovasi dengan menelaah aspek *Social*, *Technology*, *Economic*, *Environment*, *Political*, dan *Value*. *System Dynamic* menjadi pisau analisis untuk model ekonomi, ketenagakerjaan, dan skenario perumusan kebijakan.

Kajian ini menemukan, tenaga kerja di Kaltim tidak siap menyambut IKN dan pengembangan industri berkelanjutan di pedalaman. Kaltim tidak memiliki cukup tenaga kerja untuk kebutuhan ini dan yang ada pun tidak semuanya punya kualifikasi sesuai. Situasi ini

penting untuk diatasi, karena jika tidak, warga Kaltim terancam jadi tamu di daerah sendiri.

Setidaknya ada lima masalah yang perlu diatasi. Pertama lemahnya daya juang dan etika lulusan PTV/SMK, yang tergambar dari kecenderungan lulusannya memilih pekerjaan berisiko rendah dan berada di perkotaan.

Kedua, adanya *miss match* antara kurikulum PTV/SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI), selain belum adanya peta kualifikasi dan kebutuhan *future of works* SDM Kaltim untuk IKN.

Ketiga, tertinggalnya teknologi di sarana praktikum PTV/SMK. Keempat, tidak adanya peta guru/dosen, kurangnya guru/dosen produktif, *training/retraining*, dan sertifikasi.

Kelima, belum adanya *Innovation Planning* untuk usaha/industri kecil menengah, di mana lulusan PTV/SMK nantinya bisa bekerja.

Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi kebijakan pengembangan PTV/SMK adalah:

1. Menyusun regulasi pemetaan guru/dosen produktif berserti-



IKN, di Kalimantan Timur. Dok Otorita IKN

2. Pemetaan kualifikasi dan kebutuhan *future of works* SDM Kaltim di IKN.
3. Menyusun program revitalisasi sarana praktikum.
4. Menyusun program pemadanan kurikulum/program dengan kebutuhan DUDI.
5. Menyusun strategi implementasi *Innovation Planning*.



JEMBRANA

BULELENG

TABANAN

BADUNG

DENPASAR

BANGLI

GIANYAR

KARANGASEM

KLUNGKUNG



PROVINSI BALI:

# MEMBANGUN DENGAN BERTUMPU PADA KESELARASAN

**TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH BALI:**

**Ketua:** Ni Nyoman Sri Astuti (Politeknik Negeri Bali)

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Bali: I Gde Agus Jaya Sadguna, I Gusti Agung Mas Krisna Komala Sari, Ni Nyoman Harini Puspita, I Nyoman Darmayasa, I Wayan Edy Arsawan, Ida Ayu Anom Arsani, I Gusti Ngurah Kade Mahesa Adi Wardana, Ni Made Sintya Rani
2. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional: Putu Eka Wirawan, Bagus Putu Wahyu Nirmala
3. Program Diploma Universitas Pendidikan Ganesha: I Gusti Ngurah Agung Suryaputra, I Gusti Lanang Agung Parwata
4. Politeknik Nasional: Ida Ayu Ria Paramita Handayani, I Wayan Agus Selamat

*Bali bukan cuma pariwisata. Angka kunjungan pelancong pascapandemi memang melonjak tinggi. Pertanian yang disokong industri agro dan industri kreatif bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi.*

Pada falsafah Tri Hita Karana, sejatinya Bali bersandar. Pandangan tentang harmonisasi tiga unsur utama dalam ajaran Hindu inilah yang menggerakkan kehidupan (ekonomi, politik, sosial, budaya, dan religi) di Pulau Dewata dan dipercaya akan mengantarkan ke kesejahteraan.

Tiga unsur pembentuk kehidupan itu adalah *parahyangan*, yaitu hubungan harmonis dengan Tuhan; *pawongan* atau relasi harmonis dengan sesama manusia; dan *palemahan* atau persekutuan harmonis dengan alam atau lingkungan.

Kita bisa menyaksikan bagaimana filosofi itu bekerja, misalnya, di Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli. Juga di sistem subak dan *subak abian* yang dipegang kukuh lebih dari 2.500 kelompok tani di delapan kabupaten dan satu kota di Negeri Seribu Pura itu. Atau dari lahirnya *agropreneur* muda yang menggarap perhutanan sosial di kawasan barat Bali.

Tim peneliti Program Pengu-

atan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di provinsi ini memberikan penekanan pada pentingnya memedomani Tri Hita Karana di semua aspek pembangunan di Bali. Apalagi pemerintah provinsi memiliki visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, menjaga kesucian dan keharmonisan alam dan manusia Bali, untuk mewujudkan *krama* (rakyat) Bali yang sejahtera dan bahagia.

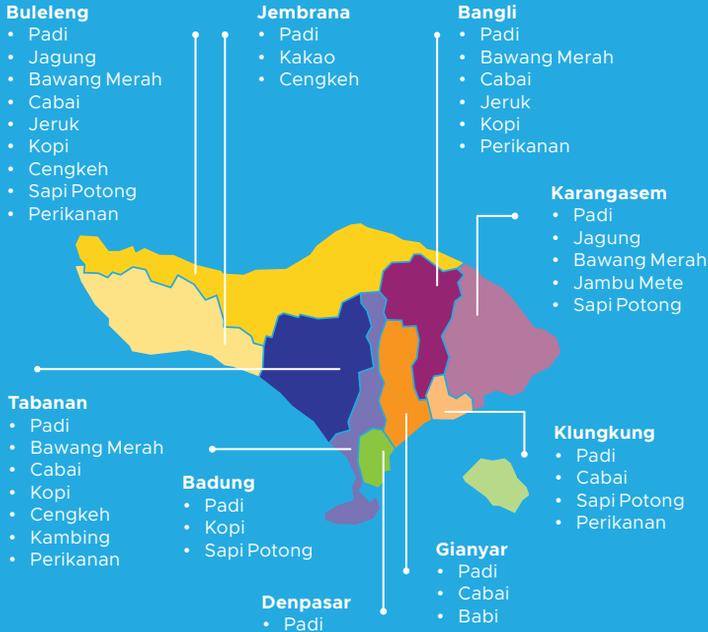
Ekosistem yang merangkul tiga matra itu akan sangat bernilai di era yang didominasi antroposentrisme dan alam yang makin terdegradasi. Industri pariwisata di Bali dengan angka-angka kunjungan yang terus melonjak (dan ambisi-ambisi serba “ter”—seperti terbesar dan terluas—di Asia atau Asia Tenggara), bagaimanapun, telah menabung problem lingkungan yang serius: sampah, pencemaran lingkungan, dan kemacetan yang kian parah.

Desa Penglipuran, salah satu dari sembilan desa adat di Bali, bisa menjadi contoh baik. Desa



*Sawah terasering. Dok Tempo/Mundri Winanto*

## PETA KOMODITAS/PRODUK UNGGULAN PROVINSI BALI



SUMBER: BPS

wisata ini masih memegang kukuh tradisi, memiliki hari suci, wilayah suci, serta masyarakat adat yang mencintai dan merawat alam.

Penglipuran, yang berasal dari kata *pengeling pura*—bermakna tempat suci untuk mengenang para leluhur—mendapat predikat sebagai desa wisata terbaik dan desa paling bersih di dunia pada 2023. Penghargaan lain adalah Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA), dan masuk Sustainable Destinations Top 100

menurut Green Destinations Foundation.

Dengan luas 112 hektare, desa ini memiliki wilayah hijau yang lebih besar daripada wilayah permukiman dan fasilitas umumnya. Sebanyak 50 hektare berupa lahan pertanian, 45 hektare hutan bambu, 4 hektare hutan kayu, 9 hektare permukiman warga, dan 4 hektare tempat suci.

Mereka juga memiliki ritual keagamaan yang menarik perhatian wisatawan: Ngusaba, untuk

menyambut hari raya Nyepi. Desa ini rutin mengadakan festival budaya bertajuk Penglipuran Village Festival.

Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga sebagai wujud nyata dalam mempertahankan keseimbangan antara manusia dan alam. Hutan itu tak hanya berfungsi memperindah, tapi juga sebagai kawasan resapan air. Hutan bambu Penglipuran kerap disebut sebagai hutan pelindung desa.

Tradisi menjaga kawasan resapan air mengingatkan kita pada tradisi subak, yang memuliakan air dengan mengatur irigasi (sawah) secara bersama-sama. Sistem pengairan ini sudah dikenal masyarakat Bali sejak abad ke-9 Masehi.

Sistem subak, juga belakangan *subak abian* (subak untuk tanaman kering atau perkebunan), berkembang dalam pengaruh nilai-nilai Hindu yang kuat dan membentuk kearifan lokal untuk memperoleh hasil panen yang optimal dan selaras dengan alam. Subak umumnya memiliki pura dan menggelar berbagai ritual. Pengaturannya diketuai pemuka adat (pekaseh) yang juga seorang petani.

Subak yang merupakan tra-

disi budaya yang membentuk lanskap Bali itu kemudian diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 2012. Luas awalnya 20 ribu hektare. Subak Jatiluwih, misalnya, dengan luas lebih dari 2.000 hektare, di Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, dikenal sebagai salah satu lumbung padi bagi Bali.

Namun belakangan UNESCO mengeluarkan ancaman akan mencabut warisan budaya takbenda Jatiluwih lantaran muncul masalah alih fungsi sebagian lahan. Pemerintah jelas dituntut menegaskan komitmen dalam mempertahankan prinsip subak demi masa depan Bali.

Sementara saat ini subak menghadapi tantangan, *subak abian* justru terus tumbuh. Jumlah subak abian hampir 1.200 kelompok di delapan kabupaten, mendekati subak, yang seluruhnya mencapai 1.500. *Subak abian* untuk tanaman kopi di Kintamani, misalnya, melonjak dari semula empat kelompok pada awal 2000-an menjadi 67 kelompok saat ini. Begitu pula *subak abian* untuk tanaman kakao, jeruk, jambu mete, anggur, vanili, pala, kapas, dan kelapa.

Kelompok-kelompok tani tersebut aktif menggelar berbagai

No	Indikator Lapangan Usaha	PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.989.291,58
2	Pertambangan dan Penggalian	2.312.139,37
3	Industri Pengolahan	16.158.833,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	553.539,86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	421.646,34
6	Konstruksi	26.135.968,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.555.301,67
8	Transportasi dan Pergudangan	18.889.724,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43.962.388,52
10	Informasi dan Komunikasi	15.028.830,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.486.407,31
12	<i>Real Estate</i>	10.682.357,19
13	Jasa Perusahaan	2.866.674,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.684.323,63
15	Jasa Pendidikan	13.613.259,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.469.156,42
17	Jasa lainnya	4.423.392,89

Tabel 20. PDRB Provinsi Bali Tahun 2022

SUMBER: BPS Provinsi Bali

*workshop*, dari soal budi daya tanaman hingga pengolahan limbah tanaman, dari ilmu pemasaran hingga logistik, dan mengurus sertifikasi indikasi geografis. Ba-

dan Riset dan Inovasi Daerah juga menggelar berbagai riset untuk memulihkan kembali komoditas yang pernah jaya, seperti jeruk keprok Tejakula di Kabupaten Bu-



**SUMBER:** BPS

leleng, yang berkibar pada 1980-an. Hasilnya, pemerintah provinsi memperluas budi daya jeruk keprok sejak 2023.

Sebanyak 15 peneliti yang tergabung dalam konsorsium tiga perguruan tinggi vokasi di Bali dan terlibat dalam Program Penguatan Ekosistem Kemitraan itu mencatat bahwa sektor pertanian (dalam arti luas, termasuk perkebunan, perikanan, dan peternakan) merupakan sektor primer yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Bali. Sektor

hulu ini menyediakan bahan baku bagi sektor industri berbasis pertanian.

Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Bali sebesar 15,1 persen pada 2020. Nilai itu tertinggi kedua—setelah sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, yang memiliki kontribusi terhadap PDRB Bali sebesar 18,4 persen. Sektor ini sangat erat terkait dengan dunia pariwisata, yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali.

Tim memetakan berbagai komoditas/produk unggulan daerah yang berpotensi untuk dikembangkan melalui rancangan inovasi model ekosistem. Pemetaannya seperti di bawah ini.

Pemetaan komoditas, dari sisi perdagangan, juga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori: komoditas ekspor, komoditas perdagangan antarwilayah, komoditas tradisional, dan komoditas bahan baku industri lokal.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, komoditas ekspor yang selama ini menghidupi Bali antara lain padi, kelapa, vanili, kakao, tembakau, kopi, cengkih, buah-buahan, bawang merah, olahan cabai, dan produk perikanan (tuna, udang, tongkol, cumi, cakalang) serta peternakan (sapi potong, olahan ayam).

Berdasarkan Statistik Perdagangan Antarwilayah Indonesia Tahun 2020, tujuh provinsi memiliki permintaan yang tinggi terhadap tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan Bali. Provinsi Bengkulu, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, misalnya, mengajukan permintaan komoditas beras. Provinsi Lampung, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta memilih komoditas kopi, kopra, dan ikan beku.

Untuk meningkatkan nilai tambah, sektor primer dan industri juga perlu memperkuat rantai koneksinya. Sektor industri memang hanya berkontribusi sekitar 6 persen dari total PDRB Provinsi Bali, tapi sektor ini merupakan sektor terbesar ketiga yang menyerap tenaga kerja dan sektor terbesar kedua dari sisi jumlah usaha. Sektor ini juga memiliki *output multiplier* yang tinggi.

Nilai tambah itu tak sebatas memperkuat industri agro. Sektor primer perlu juga berjalani berkecenderungan dengan industri kreatif. Industri unggulan berbasis agro dan kreatif bisa menjadi kekuatan utama Bali, terutama karena kekayaan alam/pertanian, budaya, kreativitas, dan pencapaian dunia pariwisata Pulau Dewata.

Di industri kreatif, Bali antara lain punya potensi mengembangkan industri kerajinan tekstil, kerajinan kayu, kosmetik, obat tradisional, kriya, seni rupa, aplikasi, animasi, dan *game*. Sedangkan di industri agro, Bali perlu memperkuat industri pengolahan pada komoditas unggulan sektor perkebunan dan hortikultura.

Pengembangan inovasi pertanian, kelautan, dan perikanan itu berfokus pada berbagai komoditas unggulan di tiap kawasan.

Di perikanan, misalnya, konsep minapolitan bisa diperkenalkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kelautan.

• • •

Jika dihitung dari ruang daratannya, Bali sebenarnya hanya punya luas wilayah sepertiga dari tetangganya di timur, Nusa Tenggara Barat, dan seperdelapan dari Jawa Timur, tetangganya di barat. Sebanyak 4,3 juta jiwa di Bali menempati wilayah daratan seluas 564 ribu hektare. Wilayah ini terbagi menjadi dua kawasan peruntukan: kawasan lindung (23,1 persen) dan kawasan budi daya (76,9 persen).

Dari kawasan budi daya, wilayah pertanian menempati lebih dari separuhnya (293,7 ribu hektare atau 52,5 persen). Selebihnya adalah kawasan permukiman (14,5 persen), kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan kawasan pariwisata. Kawasan yang terakhir menempati kawasan budi daya sebesar 7 persen atau 5,4 persen dari ruang daratan Bali.

Kendati memiliki ruang septujuh kawasan pertanian, kawasan pariwisata memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Bali. Pada caturwu-

lan pertama (Januari-April) 2024, Bali sudah dikunjungi 1,8 juta turis mancanegara atau sepertiga angka nasional (4,1 juta)—menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah itu meningkat sekitar 28 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Ini menjadikan angka kunjungan wisatawan di Bali terbesar di Indonesia.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan angka 6-7 juta kunjungan seperti tahun lalu. Pemerintah juga akan menjaga agar tak terjadi *overtourism*, terlalu banyaknya pengunjung, yang justru menurunkan produktivitas dan kualitas hidup wilayah itu. Karena itu, Bali didorong berfokus pada kualitas dengan mengutamakan lamanya waktu tinggal (dari 2,5 hari pada 2023 menjadi di atas 3 hari pada tahun berikutnya) dan peningkatan pengeluaran para pelancong, sehingga menggerakkan ekonomi pelaku wisata, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di Bali.

Angka (target) kunjungan sebesar itu hampir menyamai capaian jumlah wisatawan asing sebelum pandemi Covid-19. Saat itu, Bali menyumbangkan hampir 40 persen total turis asing yang berkunjung ke Indonesia. Pada 2019,

jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mencapai 6,2 juta. Setahun setelah itu, angkanya merosot drastis hingga menjadi tak sampai 1,1 juta kunjungan.

Bali pun menjadi daerah dengan ekonomi paling terdampak pandemi. Dari pertumbuhan ekonomi mencapai 6,31 persen pada 2018, lalu 5,6 persen pada 2019, tiba-tiba anjlok menjadi -9,34 persen pada 2020 dan -2,46 persen pada 2021. Ekonomi Bali mulai pulih pada 2022 dengan angka pertumbuhan 4,84 persen (data BPS).

Proyek-proyek konstruksi disebut, seiring dengan pembangunan sejumlah proyek strategis, terutama untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada 2022. Jalan bebas hambatan dibangun, mal dan *spot* wisata diperbanyak, *event-event* besar digelar. World Water Forum pada Mei 2024, misalnya, berhasil mendatangkan 54 ribu wisatawan—20 ribu di antaranya merupakan delegasi.

Pesatnya pengembangan pariwisata itu telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi. Data PDRB Provinsi Bali pada 2022 menunjukkan kontribusi tiap sektor seperti terlihat pada tabel 20.

Tabel tersebut memperli-

hatkan bahwa pendukung utama sektor pariwisata, yakni penyediaan akomodasi dan makan-minum, memberikan kontribusi terbesar PDRB, disusul sektor pertanian, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan. Ini mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan di sektor pariwisata masih sangat diminati masyarakat.

Dominannya sektor pariwisata perlu diimbangi pertumbuhan di sektor lain di semua kota/kabupaten di Bali. Tentu tak semua daerah memiliki potensi pariwisata yang sama dengan Badung, Denpasar, dan Gianyar. Daerah-daerah itu memiliki berbagai potensi yang dapat didorong menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Di sinilah peran para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi. Melalui implementasi pendekatan *pentahelix* (*academic, business, community, government, media*) sebagai suatu model ekosistem, para pemangku kepentingan pembangunan ekonomi di Bali bisa berkolaborasi.

Pertumbuhan pariwisata yang begitu pesat, bagaimanapun, akan membawa dampak ikutan. Yang saat ini sudah terjadi antara lain peningkatan migrasi ke Pulau Bali, terutama wilayah Bali

selatan. Berikutnya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi wilayah; serta menurunnya debit air tanah dan air permukaan.

Impak lain juga menyertai, seperti meningkatnya keterpusatan lalu lintas, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah; masalah sosial; serta memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri masyarakat dan daerah Bali.

Pelbagai implikasi itu akan menyebabkan ekologi Bali kian rentan, sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi juga kian rendah. Jika keseimbangan ekosistem terganggu, keunggulan bersaing Bali dari sektor pariwisata akan menurun, dan Bali akan ditinggalkan.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali sebenarnya telah menentukan “arah pengembangan inovasi wilayah berdasarkan tema”. Pengelompokannya adalah pengembangan inovasi wilayah dengan tema pariwisata, pengembangan dengan tema pertanian, tema ekonomi produktif, dan tema UMKM.

Dalam tema pariwisata, tren pariwisata dunia saat ini yang digarisbawahi adalah turisme yang lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, selain aspek keamanan dan kenyamanan. RTRW provinsi pun menyodorkan inovasi kepariwisataan daerah yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Inovasi kepariwisataan, masih menurut RTRW, adalah inovasi yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan; menggali potensi daya tarik alam dan budaya yang berlandaskan kearifan lokal; berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan

Agar pariwisata memiliki daya saing, berkualitas, dan berkelanjutan tersebut, RTRW dan visi yang dicanangkan pemerintah provinsi menyebut satu landasan penting: Tri Hita Karana.

Wisata yang memperhatikan keharmonisan alam dan manusia, juga tak melupakan anugerah Sang Hyang Widhi, akan mampu mendorong pembangunan daerah sekaligus kesejahteraan dan kebahagiaan *krama* Bali. Pendatang dan wisatawan yang terkesan pada *krama* Bali yang melayani dengan bahagia pun bisa membawa pulang kado istimewa ke kampung halamannya: kebahagiaan.

## MENGUBAH MINDSET, MENTRANSFORMASI EKONOMI BALI

Sektor unggulan yang meliputi pariwisata berkelanjutan, pertanian bernilai tambah tinggi, dan industri kreatif berbasis budaya lokal merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi Bali. Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah merekomendasikan agar Bali berfokus pada pengembangan sektor-sektor itu.

Memang saat ini Bali menghadapi tantangan dalam diversifikasi ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif di era digital, dengan ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata yang menyebabkan kerentanan ekonomi. Tapi bukan berarti tak ada inovasi, strategi dan kebijakan yang bisa dirumuskan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pengembangan ekosistem inovasi juga diperlukan. Dua hal di antaranya adalah upah minimum regional (UMR) wilayah ini yang terhitung relatif rendah dan *mindset* masyarakat yang perlu ditransformasi.

UMR Bali yang tergolong

rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia berdampak signifikan terhadap ketenagakerjaan di Bali. Dampak tersebut antara lain semakin berkurangnya daya tarik Bali sebagai tujuan kerja. Ini menyebabkan “*brain drain*” atau pengaliran tenaga kerja berkualitas ke daerah dengan UMR yang lebih tinggi atau justru ke luar negeri.

*Mindset* atau pola pikir masyarakat Bali juga memainkan peran penting dalam dinamika ketenagakerjaan di wilayah ini. Bali yang terkenal sebagai destinasi wisata internasional telah membentuk *mindset* bahwa bekerja di sektor pariwisata lebih menjanjikan secara finansial. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan minat dan pengembangan keterampilan di sektor-sektor lain.

Persepsi lain juga muncul, seperti pendidikan vokasi kurang prestisius dibandingkan pendidikan akademik. *Mindset* ini dapat menghambat minat generasi muda untuk menempuh pendidikan vokasi dan memperoleh keterampilan yang selaras dengan kebutuhan industri.

Tim peneliti merancang peta jalan selama lima tahun ke depan

*Bali yang terkenal sebagai destinasi wisata internasional telah membentuk mindset bahwa bekerja di sektor pariwisata lebih menjanjikan secara finansial. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan minat dan pengembangan keterampilan di sektor-sektor lain.*

untuk mempersiapkan tenaga kerja vokasi dan mentransformasi ekonomi Bali. *Goal* jangka panjangnya adalah mewujudkan Ekonomi Kerthi Bali: Bali Sejahtera, Bali Produktif, Bali Hijau. Pentahapannya melalui program jangka pendek (1 tahun), menengah (3 tahun) dan panjang (5 tahun).

Program jangka pendek meliputi pemetaan potensi inovasi di sektor-sektor unggulan Bali seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif; membangun kemitraan awal antara institusi pendidikan vokasi dengan industri lokal; mengembangkan program literasi digital dasar untuk masyarakat.

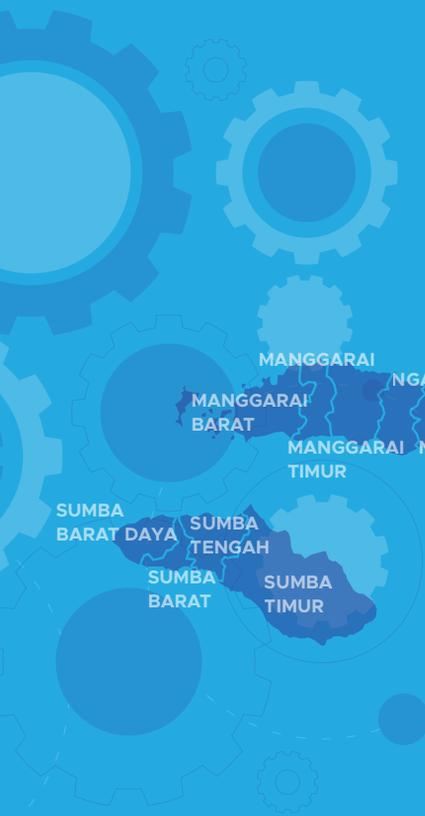
Dalam jangka menengah: memperkuat infrastruktur pendukung inovasi, seperti pusat riset dan inkubator bisnis; dan meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum pendidikan vokasi sesuai

kebutuhan industri; meningkatkan konsistensi kebijakan pembangunan dengan mengintegrasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan menggunakan data yang akurat.

Sedangkan untuk jangka panjang: memperluas implementasi program inovasi ke sektor-sektor ekonomi baru; meningkatkan skala dan dampak inovasi melalui komersialisasi dan ekspor; mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi hijau.

Temuan tentang proyeksi tenaga kerja vokasi hingga 2050 memberi optimisme: peningkatan proporsi tenaga kerja vokasi dari 21,44 persen (2020) menjadi 34,64 persen (2050), penurunan tingkat pengangguran vokasi dari 4,87 persen (2020) menjadi 3,26 persen (2050), peningkatan investasi dari Rp 45.152.300 juta (2020) menjadi Rp 176.303.000 juta (2050), serta stabilisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada 5,50 persen (2050).

Selanjutnya yang diperlukan adalah pendekatan holistik untuk mengembangkan ekosistem inovasi, melibatkan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, penguatan kemitraan industri-akademia, dan pengembangan infrastruktur pendukung inovasi.





# PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: **GELIAT EKOSISTEM WISATA**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR:**

**Ketua:** *Noldin Mariatu Abolla (Politeknik Pertanian Negeri Kupang)*

**Anggota:**

1. Politeknik Pertanian Negeri Kupang: *Johanis A. Jermias, Max A. J. Supit, Alexander Simon Tanody, Dina Viktoria Sinlae, Yosefina Lewar, Theresia N. I. Koni, Cardial Leo Penu*
2. Politeknik eLBajo Commodus: *Fitri Ciptosari, Ni Wayan Noviana Safitri*
3. Politeknik Negeri Kupang: *Frans Mangngi, Jemsrado Sine, Petrus Valentino Baunsele, Melsiani R F Saduk, Sulche Ifone Nafi, Amram Rohi Bire, Dewi Anastasia Wuwur*

*Nusa Tenggara Timur bukan hanya Labuan Bajo. Provinsi ini memiliki potensi wisata lain dan sektor pertanian yang menarik untuk dikembangkan.*

## **Labuan Bajo Sang Primadona**

Surga itu bernama Labuan Bajo. Terletak di sebelah barat laut Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Labuan Bajo adalah tujuan wisata favorit para pelancong dalam dan luar negeri. Kawasan yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, itu memiliki kelengkapan sebagai tempat melepas penat. Ada pantai-pantai yang cantik dan keindahan bawah laut yang menawan. Letaknya pun tak jauh dari Pulau Komodo, yang menjadi habitat reptil raksasa.

Pariwisata di Labuan Bajo mulai dilirik pada 2011, ketika Pulau Komodo baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia oleh New7Wonders. Sejak saat itu, wisatawan yang berkunjung ke sana meningkat setiap tahun. Bahkan, pada 2018 dan 2019, setiap tahun ada lebih dari 1 juta wisatawan datang ke NTT.

Sayangnya, pada 2020, pandemi Covid-19 menyerang dunia. Pariwisata di NTT juga terkena imbasnya. Jumlah wisatawan turun drastis hingga separuh, bah-

kan sepertiganya. Dalam dua tahun terakhir, jumlah wisatawan mulai meningkat hingga mendekati angka 1 juta pengunjung tiap tahun.

Seperti yang sudah dapat diprediksi, Kabupaten Manggarai Barat, tempat Labuan Bajo dan Pulau Komodo berada, adalah kabupaten yang paling banyak mendapat kunjungan wisatawan. Kontribusi Kabupaten Manggarai Barat dalam kunjungan wisatawan meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2012, ketika Labuan Bajo baru terkenal, hanya 9,68 persen wisatawan NTT yang mampir ke Manggarai Barat. Namun kini persentasenya meningkat menjadi lebih dari 37 persen.

Menggeliatnya dunia pariwisata ini tentu berdampak pada perbaikan ekonomi. Produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Manggarai Barat meningkat dari tahun ke tahun, melesit dari Rp 1,6 triliun pada 2011 menjadi Rp 4,3 triliun pada 2023. Meski tidak secara spesifik bidang pariwisata tertera dalam PDRB yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor itu mendorong angka-angka di sektor-sektor lain.

### KUNJUNGAN WISATAWAN KE NTT

Pariwisata menjadi primadona baru di NTT setelah Pulau Komodo ditetapkan sebagai salah satu dari seven wonders pada 2011. Sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19 (2020-2021), arus wisatawan kini kembali meningkat.



**SUMBER:** BPS

Ada gula ada semut. Meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo dan Pulau Komodo menarik sejumlah investor. Mereka datang menanam modal untuk berbagai penunjang pariwisata, dari perhotelan, jasa transportasi, hingga pelayanan wisata. Pada 2023, investasi yang masuk ke Manggarai Barat sekitar Rp 980 miliar, hampir seperempat dari masuknya investasi ke NTT (Rp 3,4 triliun).

Sayangnya, investasi di bidang pariwisata ini belum ajek seperti investasi di bidang-bidang

lain. Fluktuasinya cukup tajam, mengikuti tren jumlah wisatawan yang datang ke sana. Pada masa pandemi, misalnya, investasi di bidang pariwisata merosot tajam, dari Rp 980 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp 147 miliar pada 2021. Belakangan, investasi di Manggarai Barat memang kembali merangkak naik, tapi fluktuasi tetap terjadi.

Meski berdampak positif dalam mengerek ekonomi, masuknya investasi ini juga dikeluhkan warga lokal, karena hal itu turut mengerek harga-harga, terutama



*Suasana pelabuhan di perairann Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tempo/Supriyanto Khafid*

nilai properti. Hal ini membuat penduduk lokal kesulitan dalam memiliki tanah karena mereka harus bersaing dengan para investor dari luar daerah. Bahkan, pada 2022, terjadi demonstrasi terhadap naiknya nilai jual obyek pajak (NJOP) di Manggarai Barat, dampak dari naiknya harga tanah di sana.

Yang juga terkena dampak dari menariknya lahan di sekitar daerah wisata adalah beralihnya lahan-lahan pertanian untuk

keperluan wisata. Karena itu, di masa depan, perlu ada *integrated land platform appraisal* untuk memberikan standar nilai jual lahan yang layak sesuai dengan perkembangan dan adil bagi masyarakat lokal.

Selain mendatangkan investasi dari luar, meningkatnya dunia wisata di Manggarai Barat membuat terbukanya lowongan kerja baru di sana. Sayangnya, peluang ini banyak diisi tenaga kerja dari daerah lain. Untuk sektor wisata,

banyak pekerja berasal dari provinsi-provinsi yang industri pariwisatanya sudah lebih dulu maju, seperti Bali. Mereka mengisi level menengah-serta atas, seperti manajer dan direktur.

### **Mengurai Dominasi Komodo**

NTT tentu saja bukan se-kadar Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Ada banyak destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan di masa depan. Nantinya pariwisata di NTT saat ini, meski baru terkonsentrasi di Labuan Bajo dan sekitarnya, adalah momentum untuk bisa mengerek destinasi wisata lainnya.

Ada Danau Kelimutu di Kabupaten Ende yang unik karena memiliki beragam warna. Di Sumba ada Bukit Warinding, berupa sabana luas yang ketika musim hujan berwarna hijau dan pada musim kemarau menjadi kekuningan. Ada juga Wae Rebo yang dijuluki Desa di Atas Awan. Desa dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut ini adalah desa adat yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya. Dan yang tak kalah indah dari Labuan Bajo adalah Pantai Nihiwatu di Sumba.

Meski secara natural tempat-tempat tersebut dan juga beberapa tempat lain di NTT me-

miliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata favorit, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Pertama adalah infrastruktur yang mendukung. Banyak tempat wisata potensial masih belum memiliki infrastruktur yang mendukung, seperti jalan dan jembatan. Belum lagi akomodasi, transportasi, dan jasa pariwisata yang memadai. Tak jarang, untuk menuju tempat-tempat itu, wisatawan harus menempuh perjalanan panjang dan tak nyaman karena buruknya kondisi jalan.

Selain itu, para pemangku kepentingan di NTT melihat perlunya penataan dan arah pariwisata di masa depan. Melejitnya pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya telah memberikan pelajaran penting bagi mereka untuk menentukan arah pariwisata di NTT secara umum.

Hal menarik yang muncul dari diskusi kelompok terpusat atau *focus group discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan adalah adanya keinginan untuk menjadikan industri pariwisata di NTT sebagai *premium tourism*. Artinya, yang dikejar bukan kuantitas kunjungan wisatawan, melainkan kualitas kunjungan tersebut dan level pembelanjaan yang mereka lakukan.

Hal ini didasari keinginan untuk menjaga sustainability budaya dan alam. Dengan hanya

mengejar kuantitas kunjungan, kemungkinan akan terpengaruhnya budaya asli NTT dan keindahan alamnya sangat besar. Sebaliknya, dengan lebih menjaga kualitas kunjungan, dampak negatif itu bisa diminimalkan.

Untuk mendukung wisata premium seperti itu, persyaratannya juga tidak mudah. Dari sarana dan prasarana yang harus juga premium, masyarakat NTT punya tantangan untuk mempertahankan budaya dan kriya. Sebagaimana diketahui, ketertarikan wisatawan untuk datang ke suatu tempat tidak hanya ditentukan oleh keindahan alamnya, tapi juga oleh budaya dan kriya yang berkembang di sana.

Hal ini tentu bisa dilakukan secara bersama-sama. Badan usaha milik desa, organisasi keagamaan, serta lembaga adat setempat dapat berkolaborasi untuk mengelola secara bersama pariwisata lokal ini dalam badan bersama seperti koperasi.

Salah satu kriya tradisional yang berakar dari budaya adalah tenun ikat. Keunikan tenun ini tentu merupakan potensi budaya dan kriya yang bisa menarik wisatawan. Sayangnya, akhir-akhir ini, regenerasi penenun ikat agak terendat. Anak-anak muda di Sumba, Flores, dan tempat lain kurang tertarik menekuni tradisi ini.

Tentu, jalan untuk mencipt-

takan “Labuan Bajo” lain di NTT masih panjang dan memerlukan kerja keras. Tapi, dengan adanya arah yang jelas, setiap langkah yang dilakukan bukanlah penguangan dari proses yang berbeda.

## **Pertanian Premium**

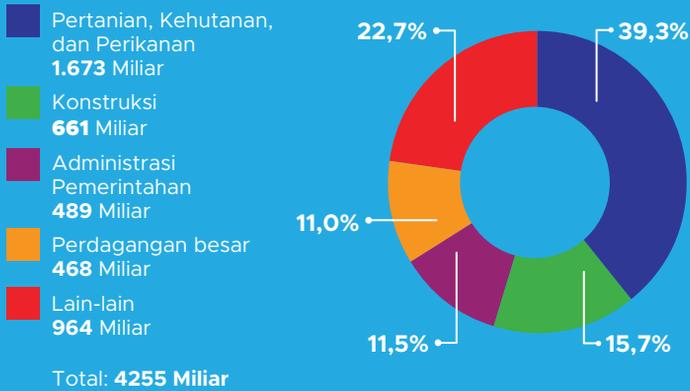
Para penggemar kopi pasti kenal dengan kopi Bajawa yang bernuansa bau bunga dan memiliki rasa keasaman sedang yang cenderung manis. Pada 2012, kopi arabika Bajawa mendapat sertifikat indikasi geografis (IG) dari pemerintah sebagai salah satu kopi arabika Indonesia. Kopi jenis arabika ini dipanen dari Kecamatan Bajawa di dataran tinggi Kabupaten Ngada, 1.200-1.800 meter di atas permukaan laut.

Kopi adalah salah satu produk pertanian/perkebunan andalan dari NTT. Hasil alam lain dari bumi NTT yang mendunia adalah vanili dari Alor, yang dijual sampai ke Eropa. NTT memang salah satu penghasil vanili di Indonesia. Tidak sebanyak di daerah lain, seperti Dairi (Sumatera Utara) atau Pati (Jawa Tengah), tapi vanili Alor punya kekhasan yang tidak dimiliki daerah lain.

Pertanian, perhutanan, dan perikanan adalah sektor penyumbang PDRB terbesar di NTT. Tahun lalu, sektor ini menghasilkan Rp 1,67 triliun dari total Rp 4,25

### PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI NTT 2023

Pertanian merupakan pendapatan terbesar yang tercantum dalam PDRB Provinsi NTT. Meski tak termaktub dalam PDRB, sektor pariwisata menyumbang cukup besar dan tersebar dalam beberapa sektor.



**SUMBER:** BPS

triliun PDRB Provinsi NTT. Sektor terdekatnya, konstruksi, hanya menyumbang kurang dari separuhnya, yaitu Rp 661 miliar. Selain menghasilkan kopi dan vanili yang mendunia, NTT memproduksi palawija seperti jagung.

Meski memberikan sumbangan cukup besar pada PDRB, sebenarnya ada sejumlah tantangan yang dihadapi pertanian di NTT. Tantangan terbesar adalah kondisi alam NTT yang cenderung kering. Musim hujan hanya terjadi pada satu-tiga bulan dalam setahun. Hal ini membuat sebagian besar lahan di NTT bersifat kering, kecuali di beberapa daerah, terutama di dataran tinggi.

Hal itu diperparah oleh perubahan iklim akhir-akhir ini yang membuat pergantian musim menjadi sesuatu yang tidak pasti dan kemarau makin panjang. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada sirkulasi musim tanam petani, yang makin sempit.

Kondisi alam yang keras itu membuat tidak banyak tanaman yang bisa tumbuh di NTT. Hanya beberapa tanaman yang sudah terbiasa dengan alam NTT yang bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan.

Sebenarnya sudah ada sejumlah varietas asli NTT atau varietas yang sudah beradaptasi dengan alam di sana. Hanya, kerap

pemberi bantuan benih dari pemerintah pusat kurang memperhatikan hal ini dan mendatangkan benih dari daerah lain yang belum tentu cocok dengan kondisi di NTT.

Di luar soal kerasnya alam, pertanian di NTT menghadapi tantangan lain, yaitu kurang berminatnya anak muda masuk ke sektor ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu, tapi sebagian besar disebabkan oleh godaan mendapat penghasilan yang lebih besar dengan bekerja di luar kampung halaman mereka—baik ke kota-kota di NTT maupun ke luar provinsi.

Dari berbagai tantangan tersebut—baik kerasnya alam maupun migrasinya anak muda—Inovasi yang cocok dikembangkan untuk sektor pertanian di NTT adalah berfokus pada pertanian premium. Beberapa komoditas pertanian lain yang memiliki nilai jual tinggi dianggap cocok untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian. Setidaknya NTT sudah memiliki modal berupa varietas vanili dan kopi premium. Dengan meningkatkan kualitas pemrosesannya, baik sebelum panen maupun pascapanen, para petani tidak akan disibukkan masalah kuantitas yang terbatas oleh lahan dan musim.

Selain itu, komoditas pertanian dengan nilai jual tinggi akan menyelesaikan masalah pengirim-

an ke daerah atau negara lain, yang pasti memakan biaya jika yang diandalkan adalah komoditas bernilai jual rendah. Tambahkan lagi, vanili dan kopi, misalnya, memiliki masa penyimpanan yang panjang sehingga harganya tidak dipengaruhi kelebihan pasokan pascapanen.

Tentu tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas pemrosesan sehingga komoditas yang dihasilkan dapat sesuai dengan pasar premium di dalam dan luar negeri. Campur tangan teknologi, pertanian organik, dan pemrosesan modern mau tak mau harus dihadirkan. Kehadiran pertanian yang lebih modern ini juga diharapkan mampu menarik minat anak muda untuk kembali ke sektor pertanian.

Karena itu, untuk menjaga kualitas produk-produk pertanian tersebut, perlu ada standardisasi dalam Program Sertifikasi dan Labeling Khusus. Misalnya sertifikasi untuk beras Lembor. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan komoditas itu akan mendapat kepercayaan kualitas dari pembeli.

Diversifikasi produk juga perlu dilakukan untuk menambah keberagaman produk. Bahkan, di masa depan, produk-produk pertanian nonpangan, seperti serat tanaman untuk industri tekstil dan biomassa, dapat menjadi pilihan yang menarik.

Hal lain yang bisa dilakukan untuk membuat sektor pertanian makin menarik adalah mengawinkan kedua sektor unggulan ini, pertanian dan pariwisata. Hal itu bisa dilakukan dengan sejumlah cara. Misalnya dengan mengembangkan desa wisata berbasis pertanian dan budaya, atau dengan membangun platform yang bisa menjembatannya, seperti *smart traditional tourism village*, yang membuat para pemangku kepentingan di berbagai sektor terkoneksi.

Sedangkan untuk menjembatani para petani dengan pembeli, terutama yang berasal dari luar daerah, perlu dibuat platform pertanian digital berbasis komunitas. Di platform ini, para petani dapat berjejaring dan bahkan berinteraksi langsung dengan para pembeli.

Sektor pertanian lokal belum mampu memenuhi kebutuhan yang meningkat akibat pesatnya perkembangan pasar pariwisata. Integrasi sektor pertanian dan pariwisata di NTT merupakan langkah strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Integrasi sektor pertanian dan pariwisata juga diperlukan melalui pengembangan program yang mencakup keterampilan dalam teknologi digital, manajemen rantai pasok, dan literasi keu-

angan. Peningkatan kerja sama dengan sektor publik dan swasta serta partisipasi aktif dari komunitas lokal sangat penting untuk mendukung pengembangan produk unggulan lokal dan inovasi di berbagai sektor.

Selain itu, penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung integrasi sektor pariwisata dengan sektor primer serta pendidikan vokasi sangat diperlukan. Kebijakan yang mencakup insentif bagi para petani dan pelaku usaha pariwisata untuk bekerja sama, alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur pendukung, dan regulasi yang memfasilitasi akses pasar bagi produk lokal akan sangat mendukung integrasi ini.

Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, NTT memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Integrasi sektor pertanian dan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di NTT. Pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal dan potensi daerah serta pemanfaatan teknologi modern merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.

## ANGKATAN KERJA DAN MASA DEPAN

Pada 2023, BPS mencatat ada sekitar 2,1 juta orang angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan angka penganggurannya sekitar 71 ribu atau kurang lebih 3,4 persen. Ini merupakan angka yang cukup baik dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional, yang mencapai 5,32 persen, pada tahun yang sama.

Tantangan terbesar perihal angkatan kerja adalah tingginya migrasi, baik ke kota-kota di NTT maupun ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Mereka yang berusia produktif memilih mengadu nasib di sejumlah daerah, dari Bali hingga kota-kota di Jawa, terutama Jakarta. Mereka juga hadir di sejumlah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.

Yang juga menjadi masalah serius adalah peluang menjadi pekerja migran ilegal di luar negeri. Sejumlah “agen” bahkan keluar-masuk kampung untuk merayu anak-anak muda agar bekerja di luar negeri dengan janji mendapat gaji yang menggiurkan.

Sayangnya, angkatan kerja produktif yang bermigrasi ke luar daerah dan ke luar negeri—baik legal maupun ilegal—didominasi pekerja kasar dan di sektor informal. Hal ini sebenarnya bisa diatasi

dengan mencetak para pekerja terampil melalui pendidikan vokasi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi.

Penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu strategi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan. Pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal dan potensi daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia serta mencetak tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi tantangan industri pertanian dan pariwisata.

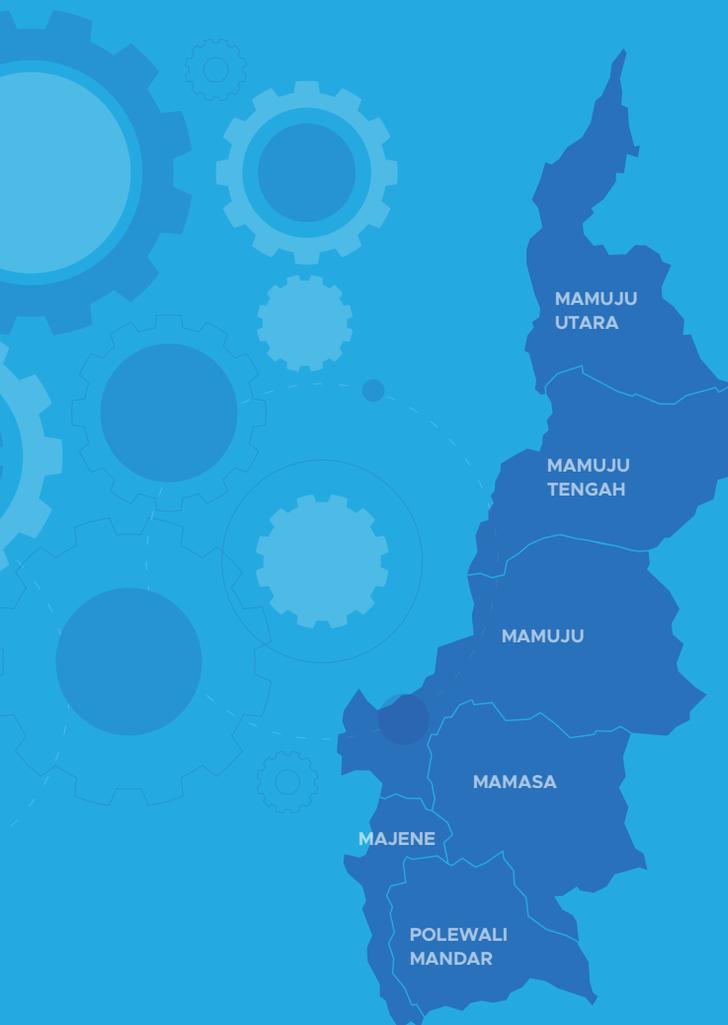
Langkah strategis yang diusulkan untuk mencapai tujuan ini meliputi penguatan pendidikan vokasi melalui kolaborasi dengan industri—untuk memastikan adanya kurikulum dan program pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar—serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelatihan yang mendukung proses belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien. Integrasi sektor pertanian dan pariwisata juga diperlukan melalui pengembangan program yang mencakup keterampilan dalam teknologi digital, manajemen rantai pasok, dan literasi keuangan. Peningkatan kerja sama dengan sektor publik dan



*Proses pembuatan kain tenun khas NTT. Dok TEMPO/Tony Hartawan*

swasta serta partisipasi aktif dari komunitas lokal sangat penting untuk mendukung pengembangan

produk unggulan lokal dan inovasi di berbagai sektor.



MAMUJU  
UTARA

MAMUJU  
TENGAH

MAMUJU

MAMASA

MAJENE

POLEWALI  
MANDAR



# PROVINSI SULAWESI BARAT: **MODAL MEMAJUKAN LUMBUNG LAUT DAN LADANG SUBUR**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT, DAN SULAWESI TENGGARA:**

**Ketua:** *Eng. Baso Nasrullah (Politeknik Negeri Ujung Pandang)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Negeri Ujung Pandang: *Abdul Kadir Muhammad, Zulvyah Faisal, Mahyati, I Masita, Arman, Amrullah, Ismail Anas*
2. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan: *Muh. Ali Arsyad, Luqman Saleh*
3. Politeknik Bombana: *Asrianti, Ikbal*
4. Politeknik Bosowa: *Dewi Andriani, Edy Hidayat, Isminarti*
5. Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin: *Ida Leida Maria, Zainuddin*

*Belum sepenuhnya berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sejak menjadi provinsi sendiri, Sulawesi Barat dapat mengambil peluang dari adanya Ibu Kota Nusantara. Potensi untuk itu ada di darat dan di laut.*

Sulawesi Barat bisa dikatakan merupakan wilayah di luar Kalimantan yang bakal mendapat keuntungan dari keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara—kalau proyek pembangunan pengganti Jakarta ini rampung dan kota baru yang dikelilingi hutan ini benar-benar berfungsi. Harapan ini tidak timbul dari ruang hampa.

Selain menjadi titik pemberangkatan terdekat ke kawasan Kalimantan Timur dari Sulawesi, provinsi yang baru berusia 24 tahun ini telah lama berperan sebagai pemasok bahan pangan untuk wilayah Kalimantan Timur (juga Kalimantan Utara). Maka Provinsi Seribu Bunga—demikian julukannya—sangat berpotensi menjadi penyangga IKN, memainkan peran sebagai pemasok kebutuhan-kebutuhan IKN dan sekitarnya.

Peluang itu penting sebagai bagian dari potensi atau daya ekonomi yang dapat menjadi modal untuk memajukan Sulawesi Barat. Sejak “berpisah” dari Sulawesi Selatan, sebagai buah

dari “pemekaran” wilayah, menjadi provinsi sendiri, Sulawesi Barat bagaimanapun masih terbelang belum sepenuhnya mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sampai saat ini, di seantero pulau yang oleh pelaut Portugis antara abad ke-15 dan ke-16 disebut Celebes itu, Sulawesi Barat masih masuk wilayah-wilayah yang jumlah penduduk miskinnya terbanyak. Perekonomiannya memang secara ajek tumbuh—walau sempat berkontraksi pada 2020, hingga 2,42 persen, di masa pandemi. Namun, pada 2023, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk miskin Sulawesi Barat ada di level 11,49 persen, dari total penduduk 1,45 juta orang. Angka ini di bawah kondisi setahun sebelumnya, ketika proporsi penduduk miskin mencapai 11,75 persen, tapi masih di atas tingkat kemiskinan nasional, 9,36 persen (per Maret 2023).

Gambaran tentang salah satu aspek dalam perkembangan ekonomi Sulawesi Barat itu dida-



*Petani mengecek buah kakao. Dok TEMPO/Iqbal Lubis*

pat dari proses *horizon scanning* atau pendeteksian tanda-tanda awal perubahan dan *focus group discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun dalam penelitian oleh konsorsium empat perguruan tinggi vokasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan bagian dari Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah.

Melalui dua proses atau tahap yang merupakan bagian dari tinjauan ke depan (*foresight*)—tujuan utama dari penelitian—tersebut para peneliti membaca, mencermati, dan mengkaji serta mengolah data, temuan riset, informasi di media massa, dan hasil FGD dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain produk domestik regional bruto, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai indeks yang menyangkut pencapaian pembangunan, yang dikaji secara serius adalah data perubahan ketenagakerjaan menurut sektor atau lapangan usaha. Faktor-faktor yang juga menjadi pertimbangan, selain ekonomi, adalah sosial, politik, teknologi, dan lingkungan. Temuan yang diperoleh merupakan gambaran utuh tentang potensi ekonomi di Sulawesi Barat, sek-

tor-sektor apa saja yang bisa diunggulkan dalam lima tahun ke depan, bukan hanya satu aspek yang terkait dengan keberadaan IKN.

Data dan rangkaian FGD tersebut mengidentifikasi sektor ekonomi atau lapangan usaha potensial inilah yang bisa diunggulkan untuk Sulawesi Barat: perikanan dan kelautan, perkebunan dan pertanian, serta pariwisata. Keadaan topografi dan budaya serta kearifan lokal berperan besar dalam hal ini.

Sulawesi Barat memiliki garis pantai sepanjang lebih-kurang 750 kilometer—kira-kira jarak dari Jakarta ke Surabaya. Garis pantai itu bukan yang terpanjang bahkan di antara provinsi-provinsi lain di Sulawesi (Sulawesi Selatan, yang masuk sepuluh provinsi dengan garis pantai terpanjang di Indonesia, memiliki garis pantai 1.973 kilometer). Tapi anugerah alam ini salah satu potensi terbesar untuk mengembangkan perekonomian dan lapangan kerja, terutama di sektor perikanan dan kelautan, juga pariwisata bahari.

Yang menonjol di sektor perikanan dan kelautan, selain penangkapan ikan, adalah budi daya (tambak) udang dan rumput laut. Sulawesi Barat bisa menja-

di sentra untuk kedua komoditas itu, seperti Sulawesi Selatan, dan berperan sebagai pemasok terbesar bagi kebutuhan Indonesia, juga untuk diekspor.

Agar potensi di sektor perikanan dan kelautan itu bisa di-realisis dengan baik, dan usahanya lestari, beberapa masalah harus diatasi. Budi daya udang menghasilkan air limbah dan tidak sedikit mereka yang berusaha di bidang ini tak punya sarana pengolahan air limbah; mereka membuangnya langsung ke laut. Hal ini tidak hanya menimbulkan ancaman rusaknya lingkungan, tapi juga mungkin akan memicu konflik dengan para pembudi daya rumput laut di wilayah pesisir.

Keharusan adanya pengelolaan yang baik, terutama terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan, berlaku pula untuk budi daya rumput laut. Di Sulawesi Barat, menurut data BPS, daerah yang selama ini menjadi area budi daya komoditas yang digunakan untuk bahan baku industri makanan, industri kosmetik, dan industri kesehatan itu adalah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan

Kabupaten Polewali Mandar. Luas total areanya lebih dari 7 juta kilometer persegi. Sebuah hasil riset<sup>1</sup> menyimpulkan pesisir Kabupaten Majene pun punya potensi. Berdasarkan fakta bahwa di laut tidak ada batas administrasi, dan yang ada adalah batas ekologi, yang paling mungkin memikul tanggung jawab pengelolaan terbesar adalah pemerintah.

Berbeda dengan yang harus dihadapi usaha budi daya udang dan rumput laut, usaha penangkapan ikan memikul beban masalah menyangkut hubungan kerja pelaku-pelakunya. Masalah dalam hal ini adalah hubungan antara pemilik modal (perahu, alat tangkap) dan mereka yang hanya punya tenaga, yang melaut sebagai nelayan. Pola hubungan yang bersifat patron-klien ini dikenal sebagai tradisi *punggawa-sawi*.

Sebagaimana sistem patron-klien, dalam pola hubungan yang terdapat di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan itu ada persetujuan bersama antara orang yang punya otoritas, status sosial, kekayaan, atau sumber daya personal, *pungga-*

<sup>1</sup> Penelitian dilakukan oleh satu tim yang beranggotakan, antara lain, dosen Universitas Sulawesi Barat. Tim ini merupakan penerima fellowship program Ground Work Analysis dari CSF Indonesia untuk periode 2022-2023.

wa (patron), dan orang lain yang mendapat manfaat dari bantuan atau pengaruhnya, *sawi* (klien). Di Sulawesi Barat, di samping menimbulkan ketergantungan, tradisi *punggawa-sawi* menafikan “suara” para *sawi* karena para *punggawa* saja yang bisa menentukan ikan hasil tangkapan mau diapakan atau dijual ke mana. Umumnya justru Sulawesi Barat jadi laluan saja; hasil tangkapan langsung diangkut ke Sulawesi Tenggara. Masyarakat pesisir Sulawesi Barat juga yang rugi.

Di daratan, Sulawesi Barat memiliki potensi lahan perkebunan dengan luas 3.967 kilometer persegi dan lahan pertanian seluas 1.430 kilometer persegi. Selama ini, hasil-hasil perkebunan dan pertaniannya meliputi kopi, kakao, cengkih, kelapa, kelapa sawit, padi, dan buah-buahan. Kakao dan sawit adalah komoditas unggulannya. Dengan sumber daya yang ada, masih terbuka peluang untuk mengembangkan perekonomian Sulawesi Barat di bidang agrikultur dan hortikultura. Ini belum memasukkan kemungkinan memajukan pariwisata yang obyeknya terkait dengan alam di daratan.

Untuk sektor pariwisata, alam hanya salah satu daya

tarik yang ada di Sulawesi Barat. Budaya dan kearifan lokal merupakan daya tarik lain yang ikut berkontribusi dalam kinerja perekonomian provinsi ini. Semua itu dinilai masih dapat berperan, patut diunggulkan, pada tahun-tahun mendatang. Terkait dengan hal ini adalah pengembangan industri kreatif melalui upaya memajukan wisata budaya yang mampu berfungsi layaknya magnet bagi wisatawan lokal dan mancanegara.

Masih ada yang perlu di-benahi demi tercapainya tujuan tersebut. Misalnya mengatasi problem kurang akrabnya pelaku bisnis kreatif, yakni produsen makanan dan kerajinan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan aspek teknologi digital, yang berguna untuk meluaskan jangkauan pemasaran produknya, juga keamanan pembayaran untuk transaksi. Ada kendala pola pikir yang juga mengungkung peluang program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, misalnya dari Dinas Tenaga Kerja.

Contoh yang bersangkutan-paut dengan keamanan pembayaran adalah belum adanya kepercayaan bahwa uang yang didapat dari pembeli melalui transaksi daring (*online*) atau mode pembayaran

elektronik bisa sepenuhnya diakses. Dengan kata lain, masih kuat bercokol pandangan bahwa jual-beli haruslah melibatkan penggunaan uang kontan.

Tim peneliti sebenarnya mendapati, berdasarkan diskusi dengan berbagai pihak, adanya kesadaran umum mengenai perlunya teknologi demi pengembangan perekonomian Sulawesi Barat. Masalahnya, dari sisi pemerintah daerah, langkah-langkah nyata untuk memudahkan adopsi teknologi belum signifikan. Misalnya, tidak banyak peraturan daerah yang mendukung pengembangan teknologi.

Kurangnya atau ketiadaan peraturan juga berlaku di bidang-bidang lain, terutama peraturan yang semestinya merupakan turunan dari regulasi dari pemerintah pusat. Ada faktor politik yang berperan di sini: pergantian pemimpin atau pejabat bisa mengubah apa yang telah dirintis.

Tersebab oleh itulah adanya acuan bersama, yaitu rencana-daftar keinginan yang hendak diwujudkan beserta tahapan-tahapannya—yang disusun bersama antara pemerintah dan lembaga legislatif, juga aturan-aturan pelaksanaannya, bukan saja merupakan keniscayaan. Komitmen juga dibutuhkan. Ini tentu saja

kalau level perekonomian Sulawesi Barat benar-benar hendak dinaikkan, termasuk memastikan statusnya sebagai penyangga IKN serta kawasan di sekitarnya tak goyah.

Untuk itu, di antara yang harus dilakukan adalah mulai menumbuhkan kolaborasi di antara pemangku kepentingan, yaitu menghidupkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, swasta, lembaga akademis, dan masyarakat lokal, khususnya dalam pengembangan inovasi. Aspek ini memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Yang tidak bisa disangkal, pemerintah daerah mempunyai peran penting sebagai fasilitator dalam mengembangkan lingkungan yang ramah bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kewenangannya, pemerintah daerah dapat menyediakan regulasi, insentif bagi pelaku bisnis, dan infrastruktur yang memadai.

Serangkaian langkah yang dapat dijalankan lebih lanjut di antaranya pembangunan kemitraan yang kokoh, penguatan peran pemerintah daerah, pemberdayaan komunitas lokal, pengembangan regulasi yang mendukung, penggalangan sumber daya, serta evaluasi dan pemantauan berkelanjutan.

## ENAM LANGKAH UNTUK SULAWESI BARAT

Sebagian dari upaya mengatasi tantangan yang dihadapi Sulawesi Barat, agar dapat merealisasikan potensi ekonominya, adalah dengan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan. Di sini, masuk perihal perlunya ikhtiar meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan vokasi.

Untuk tujuan itu, dibuatlah peta jalan strategi dan implementasinya, yang meliputi beberapa langkah utama. Mula-mula pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung pelatihan vokasi dalam bidang manajemen bisnis, pemasaran digital, teknologi informasi, dan pengembangan produk pertanian serta peternakan.

Langkah berikutnya adalah memprioritaskan upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas balai latihan kerja. Hal ini dilakukan dengan menyediakan peralatan modern dan program pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal.

Yang penting sesudah hal itu: memperkuat kerja sama antara dunia usaha, industri, dan lembaga pendidikan. Tujuannya tak lain untuk memastikan program magang dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan

sektor unggulan daerah.

Dua hal lain yang tak kalah pentingnya: pertama, implementasi program pelatihan khusus untuk pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan, serta teknologi pengolahan hasil laut demi meningkatkan daya saing produk lokal; dan kedua, memperluas kampanye dan program pendidikan yang berfokus pada disiplin, etika profesional, dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal demi membentuk tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.

Untuk semua langkah tersebut, keberhasilan bisa dicapai, diperlukan upaya meningkatkan keterlibatan media untuk memasyarakatkan program-program pendidikan vokasi dan pelatihan, serta memberikan informasi yang akurat dan konstruktif.

Beberapa program pendidikan vokasi yang dapat direkomendasikan untuk Sulawesi Barat mencakup pelatihan intensif dalam manajemen bisnis dan pemasaran digital untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini perlu dilengkapi dengan penambahan fasilitas balai latihan kerja dan peningkatan program pelatihan di bidang pengemasan dan pe-



*Pemintalan tali kapal untuk nelayan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dok TEMPO/STR/Dhemas Reviyanto Atmodjo*

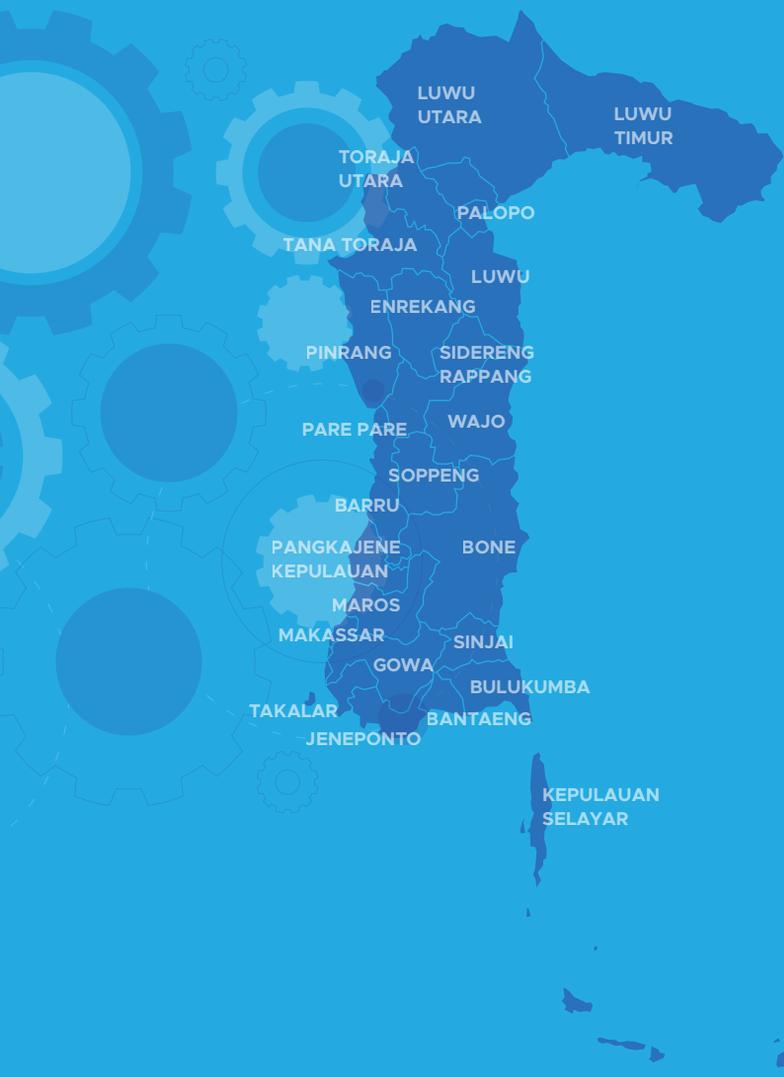
masaran produk lokal akan membantu UMKM dalam menarik lebih banyak konsumen.

Selain itu, program sertifikasi keterampilan dalam teknologi informasi dan pengembangan produk pertanian diperlukan untuk memajukan sektor pertanian dan peternakan. Program pendidikan vokasi juga harus mencakup pelatihan tentang pengelolaan sampah dan teknologi konservasi lingkungan, serta penguatan kompetensi dalam industri pariwisata demi memaksimalkan potensi

yang ada.

Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah pengembangan keterampilan disiplin dan etika profesional, dengan dukungan teknologi, untuk industri perikanan dan pengolahan hasil laut.

Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya adalah Sulawesi Barat dapat membangun sistem pendidikan vokasi yang berkelanjutan dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar kerja dan dinamika industri.



LUWU  
UTARA

LUWU  
TIMUR

TORAJA  
UTARA

PALOPO

TANA TORAJA

LUWU

ENREKANG

PINRANG

SIDERENG  
RAPPANG

PARE PARE

WAJO

SOPPENG

BARRU

PANGKAJENE  
KEPULAUAN

BONE

MAROS

MAKASSAR

SINJAI

GOWA

BULUKUMBA

TAKALAR

BANTAENG

JENEPONTO

KEPULAUAN  
SELAYAR



# PROVINSI SULAWESI SELATAN: **DEMI SEBUAH ‘HUB’ YANG LEBIH DINAMIS**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT, DAN SULAWESI TENGGARA:**

**Ketua:** *Eng. Baso Nasrullah (Politeknik Negeri Ujung Pandang)*

### **Anggota:**

1. Politeknik Negeri Ujung Pandang: *Abdul Kadir Muhammad, Zulvyah Faisal, Mahyati, I Masita, Arman, Amrullah, Ismail Anas*
2. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan: *Muh. Ali Arsyad, Luqman Saleh*
3. Politeknik Bombana: *Asrianti, Ikbal*
4. Politeknik Bosowa: *Dewi Andriani, Edy Hidayat, Isminarti*
5. Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin: *Ida Leida Maria, Zainuddin*

*Fungsi Makassar yang selama ini menjadi penghubung Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur menguntungkan Sulawesi Selatan. Teknologi informasi satu di antaranya, yang memungkinkan bisnis kreatif berpotensi jadi salah satu unggulan ke depan.*

Kota Makassar selalu diibaratkan sebagai gerbang. Ia menghubungkan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Tapi ia sesungguhnya juga merupakan suatu *hub*. Pergerakan orang, barang, juga pengetahuan dan produk pengetahuan pasti melewatinya, atau menyinggahinya, untuk sekadar transit beberapa jam sekalipun. Dari lalu lintas inilah masuk teknologi, termasuk teknologi informasi, yang lalu punya andil dalam dinamika perkembangan perekonomian.

Kegiatan ekonomi yang mendapat faedah riil dari pemanfaatan teknologi informasi di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, adalah bisnis kreatif. Kinerja di sektor atau lapangan usaha ini menjadikan provinsi berpenduduk 9,46 juta orang ini berada di depan dibanding Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, sesama provinsi di bagian selatan Sulawesi.

Bisnis kreatif adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk dan layanan dengan memanfaatkan keahlian kreasi, inovasi, dan artistik. Teknologi in-

formasi memungkinkan bisnis ini tidak saja lebih kreatif dan inovatif, tapi juga meluaskan area pemasarannya dan mengefisienkan transaksinya. Dari segi pemasaran, misalnya, melalui lokapasar (*marketplace*) yang dibangun serta dioperasikan dengan teknologi informasi, para pelaku bisnis kreatif dapat menjual produk ke tempat-tempat jauh yang mustahil dijangkau dengan mudah melalui cara konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian konsorsium empat perguruan tinggi dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, keberadaan bisnis kreatif itu adalah potensi yang layak diunggulkan untuk lima tahun ke depan. Penelitian itu juga mendapati sektor-sektor lain yang dinilai dapat memajukan perekonomian Sulawesi Selatan: perikanan dan kelautan, perkebunan dan pertanian, pariwisata, serta industri pengolahan.

Penelitian tersebut, suatu tinjauan atau proyeksi ke depan (*foresight*), dilakukan berkenaan dengan Program Penguatan



Buruh menjemur rumput laut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah. Dalam penelitian, identifikasi potensi ekonomi dilakukan melalui *horizon scanning* atau mengenali serta menaksir tanda-tanda perubahan—dengan membaca, mencermati, mengolah, dan mengkaji data, hasil riset, artikel media, serta diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dari semua langkah tersebut, bisa diketahui Makassar merupakan pusat kegiatan ekonomi Sulawesi Selatan. Kontribusi Makassar pada 2022 adalah 34,47 persen, sedikit lebih rendah dibanding angka pada 2018 (34,62 persen). Pada tahun-tahun yang sama, peran kabupaten/kota lain kurang dari 10 persen. Sebagian dari kontribusi Makassar itu merupakan porsi dari bisnis kreatif.

Siapa pelaku bisnis di sektor itu? Bagian terbesar dari mereka adalah pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jenis usaha mereka bermacam-macam, dari makanan, kerajinan, desain, hingga penyelenggaraan *event*. Selain penetrasi teknologi informasi yang cukup dalam, yang turut mengambil peran di balik performa ini adalah keberadaan perguruan tinggi vokasi, yang menghasilkan sumber daya manusia dengan keterampilan yang

mendukung.

Bisnis kreatif bukan satu-satunya sektor yang terbi-lang eksklusif untuk Sulawesi Selatan. Sektor lain yang sebagian besar kegiatannya berlokasi di Makassar adalah industri pengolahan. Di dua provinsi lain yang menjadi fokus penelitian konsorsium ini, yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, bahkan pengolahan produk pertanian pun nihil. Pada 2023, dalam struktur produk domestik bruto Sulawesi Selatan, bagian dari sektor industri pengolahan mencapai 12,85 persen. Di Makassar, selain pengolahan hasil pertanian, ada pengolahan hasil perikanan serta produk-produk mineral yang dihasilkan pertambangan.

Dominasi Makassar sangat berpeluang dikurangi. Perkembangan belakangan menunjukkan dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, 14 di antaranya mencatatkan peningkatan kinerja ekonomi. Selain itu, sejak 2022, tujuh kabupaten menjadi daerah andalan karena pertumbuhan ekonominya yang pesat. Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Barru, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kota Palopo, Kabupaten Toraja Utara, dan Kota Parepare. Kabupaten Bantaeng bahkan mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi, 15,45 persen. Peningkatan operasi

industri pengolahan di Kabupaten Bantaeng ikut berkontribusi mendorong pertumbuhan itu.

Sektor terpenting, yang mau tidak mau terkait erat dengan tradisi atau budaya kebaharian masyarakat Sulawesi Selatan, adalah perikanan dan kelautan. Di provinsi ini, hanya empat daerah tingkat II yang tidak berbatasan langsung dengan laut: Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Soppeng. Kondisi geografis ini—total garis pantainya mencapai 1.937 kilometer—bagaimanapun, sulit dinafikan dan akan tetap berpotensi menjadi modal pengembangan ekonomi Sulawesi Selatan.

Seperti halnya di Sulawesi Barat, dua komoditas hasil sektor perikanan dan kelautan yang menonjol adalah udang dan rumput laut. Hasil budi daya udangnya merupakan komoditas ekspor, di samping untuk memasok kebutuhan dalam negeri. Begitu pula rumput laut. Kedua komoditas ini masih berpeluang memainkan rol dalam perekonomian Sulawesi Selatan, tapi harus dipastikan masalah yang ditimbulkannya berkenaan dengan kelestarian lingkungan dan ancaman perubahan iklim terhadap keberlanjutan budi daya keduanya dapat dicarikan jalan keluar.

Satu hal yang dihadapi Su-

lawesi Barat dan berlaku pula di Sulawesi Selatan terkait dengan sektor perikanan dan kelautan adalah tradisi *punggawa-sawi* dalam usaha penangkapan ikan. Tradisi yang merupakan sistem patron-klien antara pemilik modal, *punggawa*, dan nelayan pemilik tenaga yang hanya bisa melaut, *sawi*, ini cenderung merugikan satu pihak, *sawi*, karena tak adanya pilihan lain. Ketergantungan ini bisa diputus melalui pendidikan bagi anak-anak nelayan jika mau. Pemerintah dapat mengambil peran dalam hal ini.

Di samping laut, daratan mengandung sumber daya alam yang selama ini ajek menghasilkan beraneka komoditas yang nilai ekonominya berkontribusi bagi perkembangan Sulawesi Selatan, termasuk dalam menyerap tenaga kerja. Pada 2023, misalnya, sektor perkebunan dan pertanian, yang mengusahakan sumber daya itu, menjadi salah satu penyumbang dominan pertumbuhan sebesar 5,2 persen.

Untuk sektor perkebunan dan pertanian, di Sulawesi Selatan terdapat lahan seluas 6.902 kilometer persegi. Di lahan yang telah digunakan, komoditas yang dihasilkan meliputi kakao, kelapa, kopi, cengkik, sawit, lada, pala, jambu mete, tebu, dan tembakau. Kopi Toraja atau Celebes Kalosi, yang ditanam di dataran tinggi Toraja,



*Sejumlah nelayan membawa ikan hasil tangkapan di Soreang, Sulawesi Selatan. Dok TEMPO/STR/Sakti S. Karuru*

tergolong kopi Indonesia yang telah mendunia, bahkan sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-19. Mengingat peran kedua sektor ini, masih terbuka peluang untuk meningkatkan kinerja yang ada dan menumpukan sebagian perekonomian pada potensi itu pada tahun-tahun mendatang.

Di luar itu, pengembangan pariwisata pun tidak dapat lepas dari anugerah alam yang ada di darat. Dan sektor ini masih menyimpan daya ekonomi yang besar. Dari tingkat kunjungan wisatawan mancanegara saja, misalnya, angkanya sangat prospektif: pada 2023, Badan Pusat Statistik mencatat ada 17.360

orang datang—sebagian besar dari negara-negara Asia Tenggara. Ini kenaikan kunjungan 293,54 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ada banyak tujuan wisata di Sulawesi Selatan. Sebagai contoh, bisa disebut Pantai Losari, Taman Nasional Bantimurung, Tana Toraja, Taman Nasional Taka Bonerate di Kepulauan Selayar, dan wilayah adat Tana Toa Kajang. Dengan dukungan komitmen pemerintah, sektor yang meliputi beraneka kegiatan usaha ini, termasuk keterlibatan pelaku bisnis kreatif, bakal bisa terus dikembangkan.

Yang juga membutuhkan dukungan sungguh-sungguh dari pemerintah, terutama karena

tantangan yang bersangkutan-paut dengan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan, adalah pembangunan pembangkit listrik tanpa bahan bakar batu bara. Ini konteksnya peralihan energi, yang bagaimanapun akan ikut menentukan bentuk dan kelangsungan kegiatan usaha yang ada.

Di Sulawesi Selatan terdapat potensi besar untuk pengadaan energi terbarukan—untuk pembangunan pembangkit listrik yang tidak menggunakan bahan bakar fosil. Potensi itu meliputi energi air, matahari, dan panas bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan potensi itu berkapasitas hingga 19,3 GW<sup>1</sup>. Kapasitas sebesar ini bisa mengaliri listrik sekitar 19 juta rumah (andai per rumah hanya perlu 1.000 W).

Pada 2018, sistem kelistrikan Sulawesi Selatan—juga terutama Sulawesi bagian selatan—mulai memperoleh pasokan dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap. Kapasitasnya 75 MW. Setahun kemudian, PLTB Jeneponto yang berkapasitas 72 MW menyusul. Kini, selain PLTB, di Sulawesi Selatan beroperasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dengan pembangkit terbesar di Kepulauan Selayar. Se-

tidaknya total telah ada sebelas PTLS yang tersebar di sejumlah pulau. Keberadaan PLTS ini dan semua PLTB menghasilkan bauran energi baru terbarukan di Sulawesi bagian selatan sebesar 45,8 persen, di atas target nasional 23 persen pada 2025.

Capaian tersebut memang tidak sepenuhnya merupakan inisiatif pemerintah daerah. Pemerintah pusat, melalui PT PLN, memegang peran. Tapi, demi tujuan menaikkan tingkat pembangunan dan kemajuan perekonomian Sulawesi Selatan, dan untuk memanfaatkan ketersediaan energi yang lebih ramah lingkungan, perlu diselenggarakan mekanisme partisipasi atau, lebih bagus, kemitraan yang lebih memadai. Kolaborasi tak bisa dihindarkan. Suara dari pemangku kepentingan harus didengar.

Beberapa hal lain yang dapat dikenali dari penelitian ini—penguatan peran pemerintah daerah, pemberdayaan komunitas lokal, pengembangan regulasi yang mendukung, penggalangan sumber daya, serta evaluasi dan pemantauan berkelanjutan—dapat dijadikan rujukan untuk membuat atau memperbaiki perencanaan beberapa tahun ke depan. Demi fungsi *hub* yang lebih dinamis.

<sup>1</sup> "Potensi Energi Terbarukan Sulawesi Selatan", *Kompas.com*, 8 Januari 2024.

## ADA KETIDAKPASTIAN, ADA STRATEGI

Arah yang hendak dituju Sulawesi Selatan adalah sektor pertaniannya berperan sebagai pilar utama perekonomian daerah. Ini di samping tujuan-tujuan lain: menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, dan pariwisata yang seiring dengan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Pemerintah daerah telah mengidentifikasi kebijakan dan inisiatif penting untuk merealisasikan tujuan tersebut--demi meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi modern. Pemanfaatan benih unggul, pompanisasi dan penggunaan sumur dalam, smart farming, juga penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung termasuk di antara berbagai rencana inovasi yang didetailkan.

Selain itu, ada program yang bertujuan mengembangkan model bisnis yang mencakup benih, budi daya, pengolahan, dan limbah pertanian. Menjadi penting, dalam hal ini, pertanian yang ramah lingkungan, dengan dukungan teknologi tepat guna untuk pengelolaan dan penggunaan pupuk serta pestisida.

Masa depan mengandung

ketidakpastian, tentu saja. Hal ini pun mengemuka dalam tahap-tahap penelitian. Karenanya, untuk kebutuhan merealisasikan potensi ekonomi yang ada, juga mencapai tujuan tersebut, disusulah peta jalan strategi dan implementasinya dalam aspek pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Agar sektor-sektor unggulan di Sulawesi Selatan dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, ada keharusan untuk menyesuaikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan ini meliputi program studi di perguruan tinggi politeknik dan pendidikan vokasi, program keahlian di sekolah menengah kejuruan, serta jenis keterampilan di lembaga kursus dan pelatihan.

Implementasi peta jalan strategi diharapkan dapat mendorong pendidikan dan pelatihan vokasi di Sulawesi Selatan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, siap kerja, dan bisa mendukung pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah. Di situ termasuk pula sektor pertanian.



*Pertanian bawang di Sulawesi Selatan. Dok TEMPO/STR/Iqbal Lubis*



MINAHASA  
UTARA

MANADO

BITUNG

TOMOHOH

MINAHASA

MINAHASA  
SELATAN

MINAHASA  
TENGGERA

BOOLANG  
MONGONDOW  
UTARA

KOTAMABAGU

BOOLANG  
MONGONDOW

BOOLANG  
MONGONDOW  
TIMUR

BOOLANG  
MONGONDOW  
SELATAN



# PROVINSI SULAWESI UTARA: **RAYUAN** **PROVINSI KELAPA**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH SULAWESI UTARA:**

**Ketua:** *Stevie Kaligis (Politeknik Negeri Manado)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Manado: *Geertje Efraty Kandiyoh, Ivonne H. Putong, Tonny Alalinti, Melky K.E. Paendong, Arifmanuel Kolondam, Verentgita Surentu, Veren Turangan*
2. Politeknik Negeri Nusa Utara: *Ely John Karimela, Stendy Budi Hartono Sakur, Edwin Oscar Langi*
3. Akademi Komunitas Mapanawang Manado: *Marlin Lolowang*

*Provinsi Sulawesi Utara memiliki kekuatan besar di sektor pertanian dan perikanan. Namun belakangan ini pariwisata juga menjadi sektor yang potensial. Apalagi setelah Likupang menjadi salah satu dari lima destinasi pariwisata superprioritas.*

## **Di Darat Nyiur Melambai**

*Klappertaart* adalah salah satu makanan khas Sulawesi Utara yang dikenal luas. Siapa pun yang pernah mencobanya pasti menyukainya. Karena itu, selain di Sulawesi Utara, kita bisa menjumpai kue ini dijual di toko-toko kue di hampir setiap kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Bandung. Kudapan ini bertekstur lembut, berwarna putih, dan memiliki rasa manis yang gurih. Namanya diambil dari bahasa Belanda, yang berarti kue tart kelapa.

Bukan sebuah kebetulan jika *klappertaart* yang berbahan utama kelapa itu berasal dari Sulawesi Utara. Provinsi itu adalah “gudangnya” kelapa. Tahun lalu (2023), Sulawesi Utara—menurut Badan Pusat Statistik (BPS)—menghasilkan sekitar 269.500 ton kelapa. Dengan produksi sejumlah itu, provinsi ini menjadi penghasil kelapa nomor dua di Indonesia. Prestasinya hanya bisa dikalahkan Riau, yang menghasilkan 406.900 ton kelapa.

Kelapa (bukan sawit) adalah “buah dewa” yang sudah menyatu dengan kehidupan rakyat Sulawesi Utara. Dalam budaya di Sulawesi Utara, kelapa muncul dalam legenda, mitos, upacara adat, dan sebagainya. Bahkan, di sejumlah pulau dan suku, ada kearifan lokal yang dijaga agar panen kelapa tidak menyusut.

Tentu saja, kelapa dari Sulawesi Utara tidak melulu menjadi *klappertaart*. Kelapa adalah pohon produktif yang berbuah sepanjang tahun, tak kenal musim, dan seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Pemanfaatannya juga tidak melulu untuk pangan, tapi juga buat olahan nonpangan. Keberagaman hasil olahan kelapa inilah yang membuatnya menarik bagi industri pengolahan.

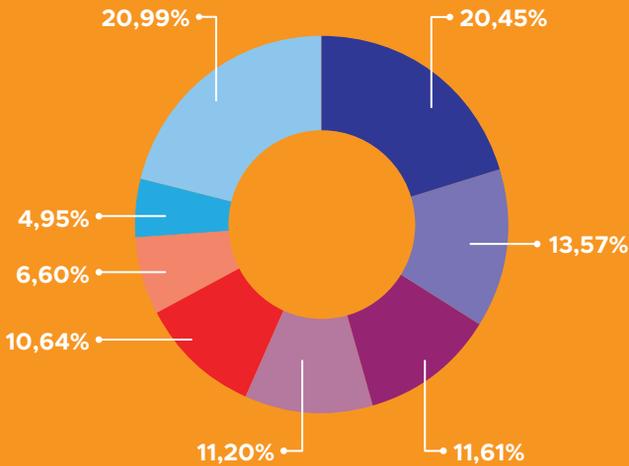
Selama ini, kelapa menjadi andalan hasil perkebunan di Sulawesi Utara. Hasil kelapa yang rata-rata di kisaran 260 ribu ton per tahun itu jauh mengalahkan hasil perkebunan lain, seperti cengkih, pala, kopi, cokelat, dan vanili. Kelapa bahkan menjadi an-



*Warga menata buah kelapa. Dok TEMPO/Denny Sugiharto*

## PDRB SULAWESI UTARA 2023

Sektor terbesar yang menyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Utara adalah sektor pertanian, disusul oleh perdagangan. Pertambahan hanya terlihat di urutan ke-7.



Produk Domestik Regional Bruto: **171,969,422.23**



SUMBER: BPS

dalam subsektor perkebunan, yang menyumbang hampir Rp 8 triliun pada produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara.

Secara keseluruhan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang lebih dari Rp 35 triliun atau sekitar 20 persen dari total PDRB. Di dalamnya ada subsektor pertanian dan peternakan (Rp 21,2 triliun), hasil hutan (Rp 646 miliar), dan perikanan (Rp 13,2 triliun). Dengan demikian, sektor pertanian adalah bagian terpenting dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.

Meski memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian, sektor pertanian belakangan sepi peminat. Dalam diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD), diketahui adanya stagnasi dalam regenerasi angkatan kerja di sektor pertanian. Anak-anak muda ditengarai enggan menjadi petani belakangan ini.

Hal itu dapat dilihat dari data yang disajikan BPS. Meski sektor pertanian masih dominan dengan menyerap 22,8 persen angkatan kerja di Sulawesi Utara, peningkatan dari tahun ke tahun terhitung lebih kecil dibanding sektor lain. Misalnya, di sektor perdagangan ada penambahan 19.740 orang tenaga kerja pada 2023,

tapi penambahan di sektor pertanian hanya sekitar 3.750 orang.

Ada berbagai hal yang menyebabkan berkurangnya minat anak muda pada sektor pertanian. Di antaranya ada anggapan bahwa menjadi petani bukanlah pekerjaan yang bergengsi—tidak seperti pekerjaan kantoran, baik sebagai pegawai negeri sipil maupun kerja di kantor swasta. Selain itu, sektor pertanian dianggap kurang menjanjikan secara finansial.

Hal ini sebenarnya juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mencanangkan gerakan "Mari Jo Bakobong" atau Mari Berkebun. Gerakan tersebut dicanangkan untuk mendukung kedaulatan pangan demi kemakmuran rakyat Sulawesi Utara. Sosialisasi gerakan ini sudah dilakukan, tapi mungkin perlu ada peningkatan pada langkah-langkah riil di lapangan guna menggaet sebanyak mungkin orang untuk kembali ke sektor pertanian dengan pertanian modern.

Selain itu, untuk mengatasi tantangan berupa menurunnya minat anak muda pada sektor pertanian, ada beberapa hal yang diusulkan para pemangku kepentingan. Di antaranya memadukan sektor pertanian dan pariwisata dalam agrowisata. Dengan demikian, ada berbagai hal yang bisa

disajikan, dari panen bersama hingga penjualan buah tangan atau *merchandise*.

## Potensi Pariwisata

Pariwisata memang menjadi salah satu daya tarik Sulawesi Utara, meski hal ini tidak begitu terlihat dalam pendapatan daerah. Sejumlah destinasi wisata, seperti Bunaken, Likupang, dan Tomohon, sudah dikenal masyarakat luas di luar Sulawesi Utara. Meski demikian, ada beberapa tantangan untuk bisa membuat provinsi ini mampu meningkatkan industri pariwisatanya.

Hal terpenting dalam pengembangan industri pariwisata adalah kesiapan masyarakatnya. Di sejumlah daerah yang potensial menjadi destinasi wisata, masyarakat dinilai belum siap menjadi “tuan rumah” bagi para wisatawan lokal ataupun asing. Kesiapan masyarakat ini penting karena kedatangan wisatawan menuntut adanya sejumlah hal, dari akomodasi (hotel atau penginapan), industri kuliner, transportasi, jasa pemandu wisata, hingga sarana pendukung lainnya.

Belum lagi soal seni, budaya, serta kriya sebagai atraksi dan daya tarik pendukung. Sejumlah destinasi wisata yang lebih dulu berkembang, seperti Bali, tidak

hanya memiliki keelokan alam, tapi masyarakatnya juga mampu menghadirkan seni dan budaya unik kepada para wisatawan. Mereka juga menyediakan buah tangan khas yang bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan.

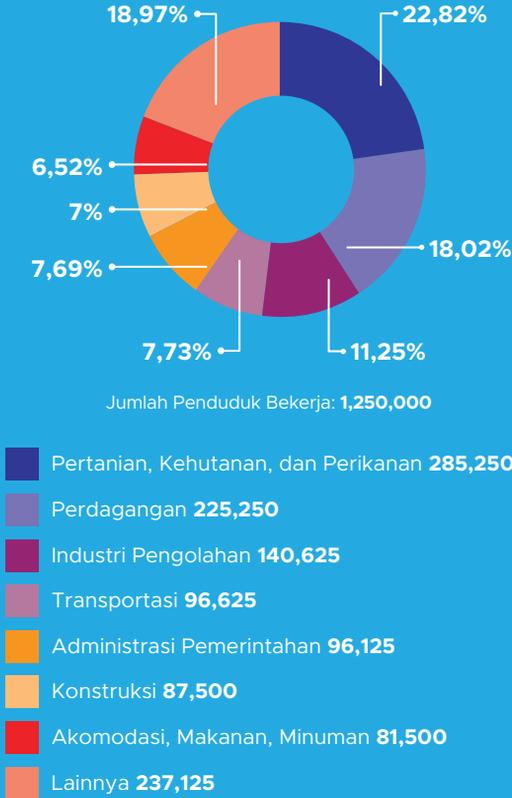
Sejumlah sarana dan prasarana juga dianggap perlu ditingkatkan untuk memberikan pengalaman maksimal kepada para pelancong. Untuk itu semua, masyarakat tentu tidak dapat bergerak sendiri. Arah dari pemerintah daerah perihal industri pariwisata Sulawesi Utara di masa depan perlu segera digariskan dengan jelas. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang mendukung ke arah itu dapat segera dilaksanakan.

## Di Laut Layar Berkembang

Hal lain yang menarik dari sektor pertanian adalah subsektor perikanan, yang menyumbang Rp 13,2 triliun pada PDRB tahun 2023. Hal ini dimungkinkan karena Sulawesi Utara memiliki pantai yang panjang—berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi di sebelah barat, serta Laut Sulawesi di sebelah utara. Selain itu, provinsi ini memiliki banyak pulau, yang berjajar ke utara hingga berbatasan de-

## PENYERAPAN TENAGA KERJA

Penyerapan tenaga kerja tertinggi terdapat di sektor pertanian, disusul perdagangan dan jasa pengolahan.



**SUMBER:** BPS

ngan Filipina.

Konsentrasi tangkapan ikan terbesar di Sulawesi Utara terdapat di Bitung, yang berada di ujung timur. Perikanan di Bitung menyumbang hampir sepertiga

dari tangkapan ikan seluruh Sulawesi Utara, yang jumlahnya sekitar 320 ribu ton per tahun.

Ada sejumlah tantangan yang dihadapi sektor ini, mengingat dari data BPS diketahui ada

penurunan dari hasil tangkapan ikan di laut sejak 2017 hingga 2020. Dalam FGD, diketahui sejumlah hal yang diperkirakan ikut berperan pada produksi sektor perikanan. Di antaranya ketidaksiapan nelayan dalam mengantisipasi regulasi baru pemerintah mengenai cara penangkapan ikan di laut. Regulasi ini tentu dibuat untuk menjaga ekosistem kelautan agar tidak terjadi *overfishing* dan kerusakan lingkungan bawah laut.

Tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatkan penangkapan di laut dangkal ke penangkapan ikan di laut lepas. Perlu diketahui, para nelayan tradisional selama ini menjalankan aktivitasnya di laut-laut sekitar pantai karena keterbatasan peralatan, teknologi, dan modal yang mereka miliki.

Untuk bisa menangkap ikan di laut lepas, perlu kapal yang lebih besar yang dilengkapi teknologi navigasi canggih, peralatan ruang penyimpanan beku, serta alat pembuatan es. Sebab, dibutuhkan waktu melaut yang lama dalam penangkapan ikan di perairan dalam.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut selama ini tidak dapat dipenuhi nelayan tradisional sehingga kesempatan menangkap ikan di laut lepas justru dimanfaatkan

nelayan dari negara lain, seperti Filipina dan Taiwan. Mereka memiliki peralatan lebih lengkap dan modal lebih besar untuk melakukan hal tersebut.

Kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya industri pengolahan hasil laut di Sulawesi Utara. Saat ini, industri pengolahan hasil laut masih terkonsentrasi di Bitung. Itu pun tidak cukup besar. Pabrik pengolahan hasil laut ini diperlukan sebagai hilir dari industri perikanan. Sebab, tanpa hal itu, hasil perikanan akan kerap *oversupply*.

Tantangan ini bisa dijawab dengan inovasi, antara lain, membuat sejumlah *smart fishery village* atau desa nelayan cerdas dengan memasukkan teknologi yang tepat guna dan terjangkau. Sejumlah peralatan sederhana dapat dimanfaatkan para nelayan untuk menyimpan ikan lebih lama. Peralatan seperti alat pembuat es dengan listrik dari *solar panel* adalah salah satunya. Selain harganya terjangkau, peralatan ini mudah diinstal di perahu nelayan tradisional.

Teknologi juga bisa dipakai dalam industri pengolahan ikan. Misalnya, dengan alat pengering yang terjangkau, kelebihan ikan tangkap dapat diolah menjadi makanan yang terkemas. Contoh lain adalah alat pengkristal garam un-

tuk memenuhi kebutuhan nelayan dan masyarakat.

### Di Bumi Emas Ditambang

Kekayaan Sulawesi Utara tidak hanya ada di lautan dan di atas bumi. Di dalamnya pun ada kekayaan tak ternilai berupa emas. Saat ini, setidaknya ada lima perusahaan yang mengan-tongi kontrak karya penambang-an emas. Selain kelimanya, ada 13 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Dari data ESDM Sulawesi Utara, diketahui bahwa ke-13 perusahaan itu mengelola hampir 19 ribu hektare area yang tersebar di empat kabu-paten, yakni Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Minahasa Selatan.

Setiap kegiatan ekonomi tentu memberikan dampak pada penghasilan daerah. Dalam PDRB, sektor pertambangan ini menyumb-ang lebih dari Rp 8 triliun. Meski memberikan kontribusi pada pen-dapatan daerah, sebenarnya pen-dapatan di sektor pertambangan masih kalah dari sektor-sektor lain, seperti pertanian dan indus-tri pengolahan. Namun tren pen-dapatannya meningkat dari tahun ke tahun.

Ada tantangan yang menge-muka dari industri ini, yakni ten-

tang dampak penambangan pada lingkungan sekitar. Sebagaimana diketahui, aktivitas penambangan, sedikit-banyak, akan memberikan dampak pada lingkungan sekitar. Hal ini tentu harus dimitigasi agar dampak itu bisa ditekan hingga seminimal mungkin.

Berdasarkan pengalaman dari sejumlah daerah lain di In-donesia, aktivitas tambang tidak hanya berdampak pada keasrian alam, tapi juga pada aktivitas ekonomi dan dunia usaha lainnya. Sektor pertanian dan perikanan, juga pariwisata, adalah sektor yang kerap terkena dampak lang-sung dari aktivitas tambang di sekitar tempat-tempat usaha ter-sebut.

Untuk mencegah terjadinya hal itu di Sulawesi Utara, para pe-mangku kepentingan tampaknya perlu menyusun skala prioritas dalam perkembangan ekonomi di sana. Dalam artian, sektor perta-nian, perkebunan, dan perikanan, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian rakyat Sulawesi Utara, tentu menjadi prioritas utama saat berbenturan dengan kepentingan dari industri pertambangan. Tanpa penyusun-an skala prioritas yang baik, di-kawatirkan pertambangan akan mengganggu dunia usaha lain yang lebih besar kontribusinya pada perekonomian.

## ANGKATAN KERJA DAN PETA MASA DEPAN

Roda perekonomian Sulawesi Utara saat ini digerakkan 1,25 juta pekerja dari 1,33 juta orang angkatan kerja (BPS, 2023). Ada sekitar 81 ribu orang yang menganggur, berkurang 922 orang dibanding tahun sebelumnya. Kebanyakan dari pekerja (39 persen) adalah buruh atau karyawan, disusul mereka yang memiliki usaha sendiri (31 persen).

Tiga sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian (22,8 persen), perdagangan (18 persen), dan industri pengolahan (11,25 persen). Meski sektor pertanian saat ini menyerap tenaga kerja terbesar, progres penambahan pekerjaanya termasuk lambat dibanding sektor-sektor lain, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini.

Anak-anak muda yang merasa sudah berpendidikan tinggi enggan menginjakkan kaki ke kebun dan sawah karena menganggap petani bukanlah pekerjaan yang bergengsi. Tersendatnya regenerasi pekerja di bidang pertanian dikhawatirkan akan berdampak pada produktivitas sektor ini di masa depan.

Hal yang mirip terjadi di sektor perikanan. Peluang kerja di sektor ini adalah 145 persen. Artinya, ada 45 persen peluang yang belum dimanfaatkan. Salah satu penyebabnya adalah migrasi para calon nelayan ke tempat lain. Anak-anak muda yang mendapat pendidikan vokasi di bidang perikanan lebih tertarik bekerja di kapal-kapal nelayan asing setelah lulus. Itu karena selain gajinya lebih tinggi, kemampuan teknis mereka lebih dapat diterapkan di kapal-kapal ikan besar, seperti kapal milik Taiwan, Suriname, Filipina, dan Jepang.

Namun ada pula yang setelah lulus memilih bekerja di luar disiplin ilmu perikanan yang mereka pelajari sebelumnya. Hal-hal inilah yang membuat ada *gap* antara kebutuhan tenaga kerja industri perikanan yang tinggi dan ketersediaan tenaga kerja yang lebih rendah.

Tantangan lain yang dijumpai dalam dunia kerja adalah hal yang terkait dengan budaya. Dalam masyarakat Minahasa, ada budaya *mapalus*, yang bermakna gotong-royong atau saling mendukung satu sama lain. Namun,



*Panen hasil pertanian berupa padi di Minahasa, Sulawesi Utara. Dok TEMPO/  
KTR/Ronny Adolof Buol*

belakangan, nilai yang luhur ini kerap disalahartikan, sehingga seolah-olah masyarakat berkewajiban menanggung beban mereka yang belum beruntung mendapat pekerjaan. Hal inilah yang dite-ngarai membuat banyak orang tak cukup termotivasi untuk mencari pekerjaan. Toh, tanpa mereka be-kerja, makan sudah terjamin dengan adanya *baku panggil makan*.

Ditinjau dari *driver* sosial, yaitu memilih-milih pekerjaan, pada 2025 (rencana jangka pen-dek) perlu dilakukan transforma-si kurikulum dengan menguatkan *soft skill*, sehingga dapat tercipta lulusan vokasi yang memiliki daya tahan, resiliensi, dan berbagai kompetensi *soft skill* yang akan menjadi bekal bagi calon tenaga kerja vokasi saat akan terjun ke industri. Agar hal ini bisa terwu-jud, perlu dilakukan integrasi yang kokoh antarkomponen sehing-ga tercipta rancangan kurikulum yang kokoh dan relevan dengan kebutuhan industri.

Sejalan dengan hal itu, da-lam rencana jangka pendek eko-nomi, perlu dibuka program studi yang sesuai dengan arah investasi di Sulawesi Utara (sesuai dengan sektor unggulan daerah) agar lu-lusan yang dihasilkan mampu mengisi berbagai lapangan pe-kerjaan yang tersedia di industri,

terlebih dalam berbagai sektor unggulan daerah.

Pembukaan program stu-di baru perlu dibarengi dengan ketersediaan sumber daya yang memiliki kompetensi yang relevan pula. Karena itu, pada 2025 perlu dilakukan pemutakhiran guru dan dosen yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perun-dang-undangan dan mempunyai kompetensi spesifik untuk menun-jang arah investasi daerah sesuai dengan arah RPJMD, yaitu perta-nian, perikanan, pariwisata, dan jasa.

Di luar soal budaya, hal yang tampaknya perlu diperhatikan adalah sertifikasi dan peningkatan kemampuan teknis angkatan ker-ja. Namun, untuk mempertajam fokus dari sertifikasi dan pening-katan kompetensi—termasuk di lembaga pendidikan vokasi—perlu adanya arah pembangunan eko-nomi yang jelas. Dengan adanya peta jalan pembangunan ekonomi dan investasi, arah sertifikasi dan kompetensi teknis pun akan lebih mudah dan jelas.

Ketidaksiapan dalam meng-hadapi arah investasi ini sudah terlihat dari sektor jasa yang kini banyak diisi pekerja dari luar Su-lawesi Utara. Hal ini terjadi karena pergerakan sektor jasa yang cepat tapi tidak diimbangi ketersediaan

tenaga kerja yang terampil di bidang itu.

Sebenarnya ada langkah menarik untuk mengatasi hal ini yang sudah dilakukan, yaitu menjalankan program magang di Jepang. Magang ini ternyata cukup efektif untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas calon tenaga kerja hingga mereka siap ditempatkan di industri. Yang perlu ditingkatkan adalah kuantitas peserta magang agar program ini dapat menyentuh lebih banyak calon tenaga kerja.

Untuk jangka menengah, yaitu pada periode 2026-2028 dengan konteks sosial (memilih-milih pekerjaan), *link and match* dan proses integrasi antara pendidikan tinggi vokasi dan industri perlu terus dilakukan. Sinergi yang dihasilkan diharapkan dapat membawa relevansi antara *supply* dan *demand* ketenagakerjaan, yaitu lulusan yang dihasilkan mampu memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Rencana jangka panjang yang akan berjalan pada 2029 akan berfokus pada menurunnya angka pengangguran, khususnya pengangguran vokasi di Sulawesi Utara. Dari sudut pandang *driver* sosial, yaitu memilih-milih pekerjaan, diharapkan terjadi sinergi yang kokoh antara kebutuhan

tenaga kerja dalam industri dan ketersediaan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi industri.

Dalam fase ini, pembukaan lapangan kerja yang lebih bervariasi perlu ditingkatkan, secara spesifik pada sektor unggulan daerah, sehingga tenaga kerja yang tersedia yang sudah memiliki berbagai keterampilan yang mumpuni mendapatkan pilihan karier profesional yang lebih luas. Dengan demikian, isu memilih-milih pekerjaan akan berkurang dan daya serap lulusan vokasi akan meningkat. Pembukaan lapangan kerja yang bervariasi perlu ditunjang dengan adanya pemetaan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam upaya mengoptimalkan terserapnya tenaga kerja yang tersedia yang sudah memiliki kompetensi yang relevan dengan kualifikasi industri.

Dari segi ekonomi (arah investasi sesuai dengan RPJMD), pada 2029, capaian yang dituju adalah terjadinya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, khususnya dalam sektor unggulan daerah. Strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan dan mengoptimalkan hilirisasi berbagai produk dari sektor unggulan daerah, khususnya sektor perikanan dan pertanian.

## KLUSTER-KLUSTER EKONOMI

Perekonomian Sulawesi Utara didominasi pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang diklusterisasi menurut wilayah sektor-sektor prioritas pada pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan Kluster Wilayah Bolaang Mongondow Raya, Kluster Wilayah Minahasa Bagian Tengah, Kluster Wilayah Bagian Utara seperti Manado, Bitung, dan Minahasa Utara, serta Kluster Wilayah Kepulauan Sangihe dan Talaud. Berikut ini peta pengembangan industri di daerah sesuai dengan potensi di kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara.

1. Kluster Bolaang Mongondow Raya  
Wilayah ini merupakan lumbung padi. Hal ini menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pengembangan industri pangan. Di daerah ini, produksi padi, jagung, cengkih, daging, dan telur mendominasi hasil produksi industri pangan.
2. Kluster Minahasa Bagian Tengah  
Area ini terdiri atas Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan, yang terkenal sebagai sentra pengembangan industri kelapa. Produksi kelapa di wilayah ini mencapai 51.798 ton per tahun, dengan target seba-

gai produk olahan kelapa.

3. Kluster Minahasa Induk dan Tomohon  
Ini merupakan sentra industri kerajinan, mebel dengan komoditas unggulan rumah panggung, serta daerah ekowisata.
4. Kluster Manado, Minahasa Utara, dan Bitung  
Ini adalah pusat pengembangan industri perikanan karena potensi besarnya dengan hasil 13.998 ton per tahun, dengan nilai investasi Rp 257 juta per tahun, sementara industri kimia juga menjadi pusat perkembangannya, seperti industri bahan bangunan, industri logam, dan industri elektronik.
5. Kluster Kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan daerah potensi perikanan terbesar di Sulawesi Utara. Kluster ini memiliki wilayah yang lebih dari 90 persennya merupakan lautan. Selain sumber daya perikanan, sumber daya perkebunan yang cukup besar ada di wilayah ini, yang komoditasnya antara lain pala, kelapa, dan cengkih.

Adapun gambaran inovasi yang dihasilkan berdasarkan sektor-sektor unggulan daerah masih didominasi sektor nonprioritas, yaitu sebesar 69 persen, sedang-

**Klaster Kawasan Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, Tenggara, Induk & Tomohon)**

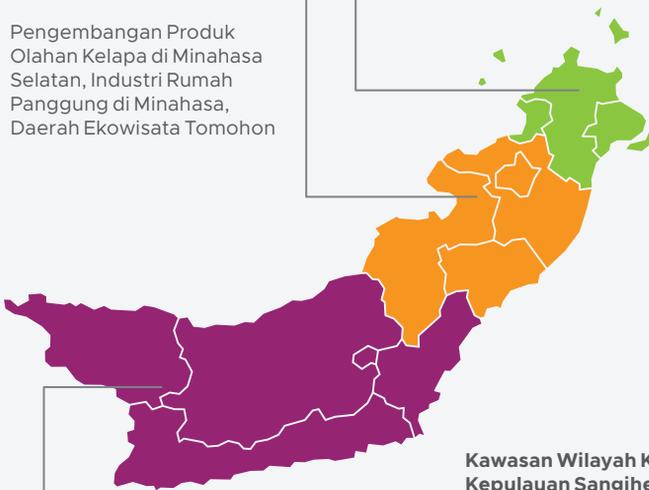
- Pusat Pengembangan Industri Kelapa
- Industri Kerajinan dan Meubel
- Sektor Pariwisata
- Sektor Pertambangan

Pengembangan Produk Olahan Kelapa di Minahasa Selatan, Industri Rumah Panggung di Minahasa, Daerah Ekowisata Tomohon

**Klaster Kawasan Wilayah Bagian Utara Mencakup Manado-Minahasa Utara-Kota Bitung**

- Pusat Pengembangan Industri Kimia
- Pusat Pengembangan Industri Perikanan Bitung
- Sektor Perdagangan dan Jasa

Industri kawasan KEK Bitung, Pariwisata KEK Likupang, Pembangkit listrik geothermal, air dll, UMKM, Distributor, Hotel, Developer, dan sektor Jasa



**Klaster Kawasan Wilayah Bolaang Mongondow Raya**

- Pusat Pengembangan Industri Pangan
- Sektor Perikanan
- Sektor Pariwisata
- Sektor Pertambangan

Kawasan Industri Mongondow (KIMONG)

**Kawasan Wilayah Klaster Kepulauan Sangihe & Talaud**

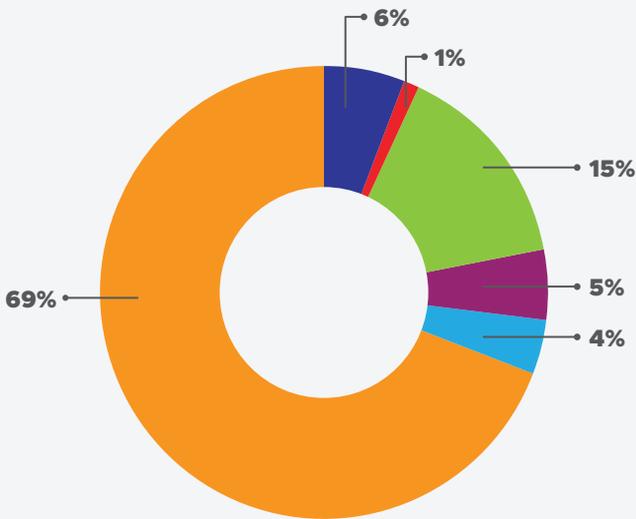
- Pusat Pengembangan Industri Perikanan
- Pusat Pengembangan Industri Pala
- Sektor Pariwisata

Sentra Kelautan & Perikanan, Pertanian dan Pariwisata (SKPT) Dhago Kepulauan Sangihe, SKPT Salibabu Talaud, Industri Pala di Kepulauan Sangihe

kan untuk yang prioritas masih tersebar dan belum banyak, yang jika dibandingkan hanya sebesar 31 persen. Sektor prioritas yang dimaksud adalah sektor-sektor yang dianggap sebagai acuan Pe-

merintah Provinsi Sulawesi Utara untuk pengembangan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan sektor

**GRAFIK JUMLAH INOVASI BERDASARKAN SEKTOR PRIORITAS**

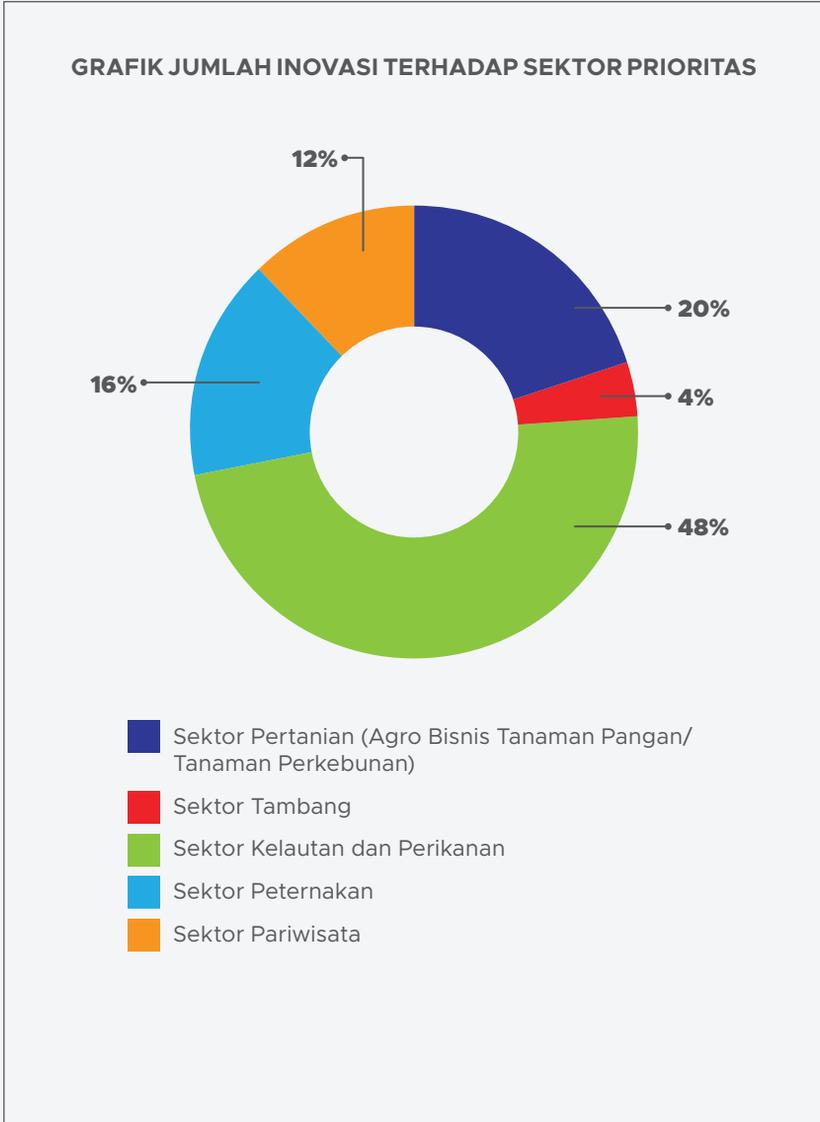


- Sektor Pertanian (Agro Bisnis Tanaman Pangan/Tanaman Perkebunan)
- Sektor Tambang
- Sektor Kelautan dan Perikanan
- Sektor Peternakan
- Sektor Pariwisata
- Non-Prioritas

jasa.

Di samping itu, proporsi inovasi sektor prioritas menunjukkan sebanyak 48 persen inovasi dibuat untuk potensi atau sektor kelautan dan perikanan, 20 persen untuk

inovasi yang dikembangkan pada sektor pertanian, yang terdiri atas agrobisnis tanaman pangan dan tanaman perkebunan, sedangkan 16 persen untuk sektor peternakan dan 12 persen untuk sektor pariwisata.





KOLAKA  
UTARA

KOLAKA  
TIMUR

KOLAKA

BOMBANA

KONAWA  
UTARA

KONAWA

KONAWA  
SELATAN

KENDARI

KEPULAUAN  
KONAWA

BUTON  
UTARA

MUNA  
BARAT

MUNA

BUTON  
TENGGARA

BAU BAU

BUTON  
SELATAN

WAKATOBI



# PROVINSI SULAWESI TENGGARA: **MENGEREK NEGERI ANGGREK**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT, DAN SULAWESI TENGGARA:**

**Ketua:** *Eng. Baso Nasrullah (Politeknik Negeri Ujung Pandang)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Ujung Pandang: *Abdul Kadir Muhammad, Zulvyah Faisal, Mahyati, I Masita, Arman, Amrullah, Ismail Anas*
2. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan: *Muh. Ali Arsyad, Luqman Saleh*
3. Politeknik Bombana: *Asrianti, Ikbal*
4. Politeknik Bosowa: *Dewi Andriani, Edy Hidayat, Isminarti*
5. Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin: *Ida Leida Maria, Zainuddin*

*Provinsi ini ikut menumpang kenaikan permintaan dunia untuk nikel. Tapi potensi di sektor-sektor lain sebetulnya juga besar, sebagian memerlukan upaya untuk menghindarkannya dari dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.*

Di Kabupaten Konawe, satu dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, beroperasi sekitar 50 perusahaan tambang nikel. Itu di satu kabupaten saja—yang luas wilayahnya seperenam luas Jawa Barat. Tapi, di provinsi berjulukan Wonua Sorume atau Negeri Anggrek<sup>1</sup> ini, nikel hanya salah satu kandungan bumi yang diekstraksi dan sejauh ini ikut menopang perekonomiannya.

Jumlah perusahaan pertambangan di seluruh Sulawesi Tenggara, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, mencapai 189. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di hampir semua wilayah, mengambil nikel, feronikel, aspal, emas, tembaga, pasir besi, dan lain-lain. Di seluruh Sulawesi, untuk sektor pertambangan, Sulawesi Tenggara merupakan raksasa.

Berkat eksploitasi kandungan alam itu—hasil yang terbesar, selain nikel, adalah feronikel dan aspal—peran sektor pertambangan

dalam struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi Tenggara bisa mencapai 21 persen pada 2023<sup>2</sup>. Angka ini hanya berselisih 0,31 persen dibanding sektor pertanian (perkebunan termasuk di dalamnya), yang menempati urutan teratas karena pada dasarnya porsi sektor ini memang lebih besar dibanding sektor pertambangan dan pariwisata. Dengan makin besarnya permintaan nikel, seiring dengan terus bertambahnya tingkat manufaktur kendaraan listrik di tataran global dan domestik, kontribusi hasil penambangannya pun bakal terus meningkat. Nikel adalah satu dari beberapa komponen mineral penting<sup>3</sup> (*critical minerals*) untuk menghasilkan baterai, yang menjadi tenaga bagi kendaraan listrik.

Profil sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara itu tergantung dari hasil penelitian berkenaan dengan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengem-

---

<sup>1</sup> Sorume adalah anggrek khas Kabupaten Kolaka Timur, lazim dijadikan bahan baku anyaman.

<sup>2</sup> Data BPS Triwulan III 2023.

<sup>3</sup> Mineral ini dianggap esensial bagi teknologi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.



*Pengolahan bijih nikel. TEMPO/M. Taufan Rengganis*

bangun Inovasi Berbasis Potensi Daerah. Pelaksana penelitian, satu konsorsium yang terdiri atas empat perguruan tinggi vokasi dari tiga daerah di Sulawesi bagian selatan, menempatkan sektor itu dalam daftar sektor yang dapat diunggulkan Sulawesi Tenggara dalam lima tahun ke depan.

Tim peneliti mengidentifikasi sektor-sektor unggulan—sebuah potensi ekonomi untuk meningkatkan pembangunan—tersebut me-

lalui proses horizon scanning atau upaya mengenali sinyal-sinyal awal perubahan. Proses yang merupakan bagian dari tahapan dalam riset untuk meninjau masa depan (*foresight*) ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengolah data, hasil penelitian yang lalu, artikel media massa, serta diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Untuk data,

di samping menelaah data ekonomi yang terkait dengan pertumbuhan, pengeluaran pemerintah, dan produk domestik bruto, tim mencermati data perkembangan ketenagakerjaan menurut sektor atau lapangan usaha.

Melalui proses itu, didapat sektor-sektor yang merupakan potensi unggulan untuk Sulawesi Tenggara. Selain pada sektor pertambangan (dan energi jika mengikuti pembagian lapangan usaha yang digunakan BPS), provinsi berpenduduk 2,75 juta orang ini bisa menumpukan perekonomiannya selama lima tahun ke depan pada sektor perikanan dan kelautan, perkebunan, pertambangan, serta pariwisata.

Perihal sektor pertambangan, tidak hanya didapat fakta yang menjanjikan bahwa ia masih bisa diandalkan untuk mengerek level perekonomian Sulawesi Tenggara, tapi ada juga pandangan masyarakat yang mengunggulkan pertambangan dan fakta bahwa banyak yang hanya ingin bekerja di perusahaan tambang. Namun ada hal lain yang dipandang sebagai kendala dan masalah serius.

Kendala yang memerlukan kajian strategis sungguh-sungguh adalah minimnya industri pengolahan mineral hasil pertambangan. Saat ini, kebanyakan mineral yang diambil dari bumi Sulawesi Tenggara tidak diolah atau dimur-

nikan di fasilitas-fasilitas lokal. Padahal industri pengolahan mineral (*smelter*) memiliki potensi pemasukan yang besar untuk kas daerah—pos pendapatan asli daerah.

Adapun masalah seriusnya, yang terungkap jelas dalam FGD, adalah dampak negatif sektor pertambangan terhadap kelestarian lingkungan. Intinya, berdasarkan fenomena yang terjadi, potensi boleh besar, tapi ancaman kerusakan yang diakibatkannya juga tak kalah besarnya. Kerusakan itu tidak hanya timbul dari pembukaan lahan, yakni turunnya produktivitas lahan, erosi dan sedimentasi, serta terganggunya flora dan fauna, tapi juga karena pembuangan limbah. Dan masyarakat malah sudah merasakannya.

Contoh mengenai hal yang bagaimanapun menjadi tantangan itu, di antaranya, adalah apa yang terjadi di pulau-pulau yang warungnya, sebagai nelayan, mengandalkan hasil laut, sementara di tempat itu beroperasi kegiatan pertambangan. Banyak dari kegiatan ini yang mengabaikan praktik pengelolaan limbah yang baik. Dampak yang dirasakan nelayan: hasil tangkapan ikan berkurang, yang menyebabkan menciutnya penghasilan.

Kekhawatiran terhadap dampak sektor pertambangan terhadap lingkungan jelas tidak bisa

dinafikan. Dengan perairan yang luasnya tujuh persen dari total luas wilayah serta panjang garis pantai 1.740 kilometer, potensi sektor perikanan dan kelautan masih akan relevan. Nilainya besar. Porsinya dalam PDRB saat ini mencapai sebelas persen. Di samping ikan, yang bermacam-macam jenisnya, hasil dari sektor ini adalah udang dan rumput laut. Pasarnya bukan hanya domestik, melainkan juga internasional.

Ada potensi lain terkait dengan kebaharian, yakni pariwisata. Di Sulawesi Tenggara terdapat sejumlah pantai yang indah, terumbu karang, dan ekosistem laut lainnya. Taman Nasional Wakatobi adalah daya tarik paling populer, khususnya di kalangan wisatawan dari luar Sulawesi Tenggara, termasuk dari mancanegara. Ditetapkan sebagai cagar biosfer UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada 2013, taman nasional ini merupakan tempat konservasi 90 persen biota laut di dunia. Gugusan karangnya—ada 25, dengan 90 lebih spesies ikan dan setidaknya tiga spesies penyu—serta perairan yang jernih menjadi magnet bagi penyelam di seluruh dunia.

Selain Wakatobi, beberapa daya tarik wisata bahari Sulawesi Tenggara ini bisa pula disebut: Pulau Bokori, Pantai Sagori, Danau Biru Kolaka, Pantai Nirwana, Pan-

tai Kamali, dan Pulau Muna.

Berdasarkan data BPS, postur pergerakan wisatawan domestik di Sulawesi Tenggara didominasi perjalanan wisatawan dari luar provinsi, yakni 5,66 juta perjalanan. Perjalanan dalam provinsi sebanyak 3,57 juta trip. Angka ini menunjukkan lebih banyak orang dari luar provinsi yang berkunjung ke Sulawesi Tenggara ketimbang orang Sulawesi Tenggara yang melakukan perjalanan di dalam daerah. Berbagai daya tarik tersebut tentu saja menjadi tujuan.

Agar semua potensi perairan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga mendatangkan wisatawan lebih banyak, demi pengembangan ekonomi di masa depan, perlu ada upaya serius untuk menanggulangi ancaman terhadap lingkungan yang timbul dari kegiatan pertambangan. Ini tantangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Sektor yang pada tahun-tahun mendatang juga masih berpotensi mendukung perekonomian Sulawesi Tenggara adalah perkebunan. Ada lahan seluas 6.580 kilometer persegi yang tersedia dan dapat dimanfaatkan. Jenis komoditas yang sejauh ini telah dihasilkan meliputi, antara lain, karet, kakao, sawit, kopi, cokelat, dan tebu. Perkebunan kakao merupakan yang terbesar, dengan



*Tarian tradisional Wakatobi. TEMPO/Nita Dian*

memanfaatkan lahan atau luas tanam 238 ribu hektare dan memanen hingga 110.770 ton<sup>4</sup> pada 2021.

Peluang yang masih terbuka tidak hanya berguna untuk meningkatkan kontribusi produksi berbagai komoditas tersebut, tapi juga demi menggarap pengembangan pariwisata yang terkait dengan alam di daratan. Ada kegiatan-kegiatan usaha lain yang dapat mendukung hal ini. Kegiatan-kegiatan itu memanfaatkan budaya dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Tenggara. Dalam

upaya pengembangan pariwisata mutakhir inilah, khususnya yang menjadikan daya tarik budaya sebagai magnet, masuk industri atau bisnis kreatif.

Di Sulawesi Tenggara, upaya mengembangkan bisnis penunjang pariwisata itu masih menghadapi kendala. Dari aspek pemasaran, ikhtiar untuk mengenalkan potensi itu kepada masyarakat luas melalui sarana *digital marketing* masih minim. Yang luas digunakan belum beranjak jauh dari teknik konvensional “dari mulut ke mulut”. Hal ini jelas membatasi jangkauan

<sup>4</sup> Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka 2022.

penyebaran informasi; masyarakat dari luar Sulawesi Tenggara jadi tidak dapat mengetahui potensi yang ada di provinsi ini.

Teknik yang luas digunakan dalam *e-commerce*—praktik jual-beli melalui media elektronik—itu pula yang di Sulawesi Tenggara belum menjadi kelaziman di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini, ditambah minimnya inovasi, misalnya berkenaan dengan kemasan, merupakan faktor penghambat perkembangan UMKM.

Mengingat potensi sektor tersebut untuk menumbuhkan makin banyak wirausaha, fokus terhadap upaya mengatasi hambatan yang ada patut menjadi prioritas. Makin banyak wirausaha, bertambah pula kontribusi sektor itu terhadap perekonomian. Tapi, untuk memastikan pertambahan jumlah itu disertai kapasitas yang mendukung, perlu langkah-langkah yang memungkinkan hal tersebut direalisasi. Penyiapan sumber daya manusia yang dapat diandalkan adalah keharusan.

Di situ, pemerintah daerah memegang peran: membukakan jalan, mendengarkan pendapat, dan memberikan kesempatan berkolaborasi kepada lembaga yang memang bekerja di bidang itu. Misalnya perguruan tinggi vokasi, yang keberadaannya secara umum masih di luar “radar” pemerintah

daerah. Perlu juga mendorong badan riset daerah agar lebih aktif mempromosikan inovasi dan teknologi yang ada. Program One Agency One Innovation dari pusat, misalnya, bisa diadopsi lebih dari sekadar kewajiban bagi lembaga dan instansi pemerintah.

Untuk menghindari ketidak-konsistenan terkait dengan pergantian pejabat atau perubahan angin politik, langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu sebaiknya dilandasi peraturan daerah yang jelas. Apalagi kalau peraturan itu merupakan turunan dari peraturan di atasnya. Bukan tidak mungkin peraturan daerah semacam ini diabaikan, tapi sekurang-kurangnya ada pegangan secara legal, semacam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang hampir pasti ditaati, untuk meminta siapa pun pejabatnya menjalankan regulasi yang masih hidup.

Adanya potensi saja jelas bukan jaminan bahwa suatu daerah bakal makin maju, baik secara ekonomi maupun aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat. Di Negeri Anggrek juga berlaku hal ini: kerja nyata semua pihaklah, dengan melibatkan setiap pemangku kepentingan, untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, yang memungkinkan potensi itu benar-benar berguna.

## DEMI MENAIKKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Jika hanya dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia, Sulawesi Tenggara sebetulnya memperlihatkan kenaikan angka—dari 71,66 pada 2019 menjadi 72,23 pada 2022. Tapi, sebenarnya, di samping levelnya masih di bawah rata-rata nasional, hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan gambaran yang indah terkait dengan balans antara keluaran institusi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi—yang ini pun bersifat fluktuatif. Ada ketidakseimbangan; ada kesempatan yang tidak memadai bagi lulusan diploma dan sekolah menengah kejuruan.

Temuan dalam penelitian ini menggarisbawahi beberapa hal. Mula-mula perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Penting pula ikhtiar untuk meningkatkan produktivitas sektor unggulan dan konektivitas antarwilayah serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Selain itu, tidak boleh dabaikan perlunya analisis tren perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas hidup. Di samping identifikasi sektor-sektor unggulan ser-

ta kesempatan kerja bagi lulusan diploma dan sekolah menengah kejuruan, hal ini merupakan pijakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan bagi upaya peningkatan IPM.

Masih dominannya sektor pertanian di Sulawesi Tenggara, termasuk dalam mengkomodasi tenaga kerja, merupakan temuan yang menonjol. Masalahnya, selain komoditas yang dihasilkan sangat bergantung pada cuaca, tren jumlah pekerja yang diserapnya di berbagai jabatan sangat fluktuatif. Pengangguran lulusan diploma dan sekolah menengah kejuruan terjadi karena ketidaksesuaian pendidikan dan kebutuhan.

Menimbang hal-hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan. Tapi penting diingat bahwa hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Penyesuaian itu meliputi kurikulum dan pemilihan program vokasi yang relevan.

Agar perekonomian memiliki daya yang lebih baik dalam menyerap tenaga kerja, perlu ada pengembangan sektor-sektor lain di luar pertanian. Diversifikasi lapangan kerja menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan.

Inflasi, yang sejauh ini ikut



*Pengolahan bijih nikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dok TEMPO/STR/M. Taufan Rengganis*

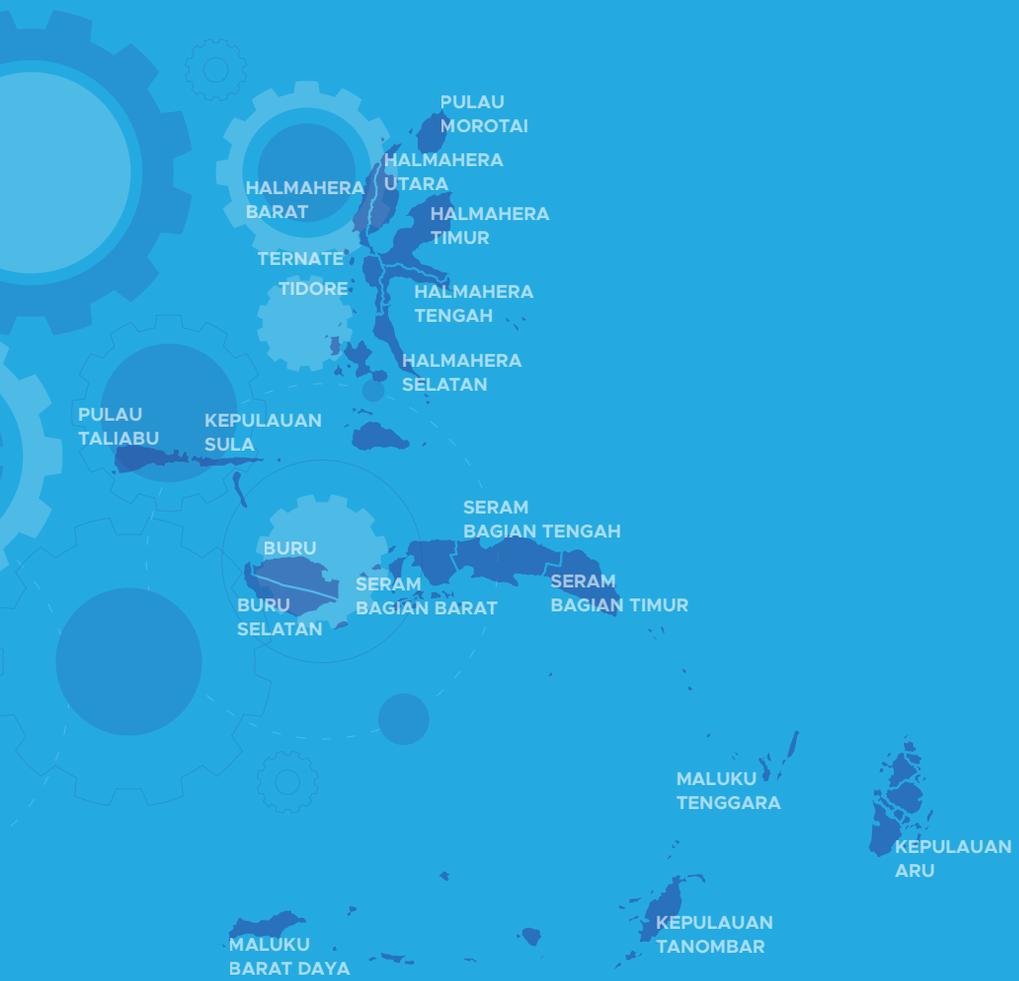
menghambat, harus dikendalikan. Perlu upaya untuk menjaga stabilitas pasokan makanan serta pengelolaan permintaan pada saat perayaan hari raya. Stabilitas di bidang keamanan juga penting sebagai jaminan bagi kemudahan berinvestasi.

Berkaitan dengan IPM, upaya peningkatannya mengharuskan ada level pendidikan dan kesehatan yang lebih baik di semua kabupaten/kota. Sektor-sektor ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan, seperti pariwisata, pertanian, dan industri pengolahan, harus dikembangkan. Laju pertumbuhan penduduk pun perlu dikendalikan melalui program keluarga berencana.

Tidak kalah mendesaknya adalah peningkatan infrastruktur dasar. Bersamaan dengan itu,

kolaborasi harus terus didorong di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Begitu pula kerja sama pemerintah dan industri. Semua itu penting untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan dan mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan.

Semua langkah tersebut merupakan keniscayaan agar Sulawesi Tenggara dapat mencapai kondisi tenaga kerja yang lebih berkualitas, kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Implementasinya diharapkan dapat mendekatkan IPM Sulawesi Tenggara ke rata-rata nasional.



HALMAHERA  
BARAT

PULAU  
MOROTAI

HALMAHERA  
UTARA

HALMAHERA  
TIMUR

TERNATE

TIDORE

HALMAHERA  
TENGAH

HALMAHERA  
SELATAN

PULAU  
TALIABU

KEPULAUAN  
SULA

SERAM  
BAGIAN TENGAH

BURU

BURU  
SELATAN

SERAM  
BAGIAN BARAT

SERAM  
BAGIAN TIMUR

MALUKU  
TENGGARA

KEPULAUAN  
ARU

MALUKU  
BARAT DAYA

KEPULAUAN  
TANOMBAR



PROVINSI MALUKU:  
**MENGUAK**  
**PERUBAHAN DI BUMI**  
**SERIBU PULAU**

**TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH MALUKU:**

**Ketua:** *Lenora Leuhery (Politeknik Negeri Ambon)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Ambon: *Fauzia Tutupoho, Roy Alan Wattimena, Margie Civitaria Siahay, August J. Ricolat Ufie, Nurjia Salasa, Vino Cornelis Muall*
2. Politeknik Perikanan Negeri Tual: *Usman Madubun, Ismael Marasabessy, Rahmat Abdullah, Syahibul Kahfi Hamid*

*Semula perhatian tertuju pada lapangan usaha perikanan dan pariwisata untuk mendorong ekonomi Provinsi Maluku. Lalu sektor perkebunan diyakini juga bisa berperan besar.*

Dengan wilayah yang lebih dari 90 persen berupa perairan dan lautan, sangat jamak jika andalan ekonomi Provinsi Maluku adalah bidang perikanan. Asumsi tersebut sepenuhnya benar. Faktanya, bersama lapangan usaha kehutanan dan pertanian, subsektor perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku.

Tapi tunggu dulu. Provinsi berjulukan Bumi Seribu Pulau ini—seluruhnya terdapat 1.340 pulau kecil dan 4 pulau besar—diam-diam ternyata menyimpan potensi lain yang tak kalah *manise* jika digarap serius. Orang mungkin akan menebak potensi lain itu adalah pariwisata, mengingat tanah ini kaya akan warisan budaya dan alam nan molek. Pariwisata memang juga menjadi andalan untuk memetik cuan, tapi hal ini sudah menjadi rahasia umum. Maka bukan itu yang dimaksudkan.

Jadi apa? Di luar dua unggulan itu, sebenarnya ada subsektor perkebunan yang juga siap mendorong ekonomi Maluku. Tapi bidang perkebunan ini tengah me-

nunggu sentuhan kebijakan dan perhatian lebih lagi agar bisa melaju lebih cepat.

Lahan perkebunan yang demikian luas memang sudah dinamai komoditas menjanjikan, tapi hasil produksinya masih belum dinaikkelasakan. Komoditas unggulan ini, kecuali cengkih, masih dijual apa adanya begitu saja tanpa ada pengolahan pascapanen. Jika semua pemangku kepentingan mulai mengembangkan produk turunannya, kisah selanjutnya akan makin manis.

Bidang perkebunan menyeruak dalam perbincangan saat tim periset dari konsorsium perguruan tinggi vokasi di Maluku menggelar diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD) bersama pemangku kepentingan untuk menggali potensi daerah. Semula wacana diskusi berfokus pada sektor perikanan dan pariwisata, tapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku mengungkapkan besarnya potensi lapangan usaha perkebunan. Umpan lambung ini ditangkap dengan baik. Konsorsium me-

No.	Gugus Pulau	Cakupan Wilayah
1.	Gugus Pulau I	meliputi wilayah Pulau Buru;
2.	Gugus Pulau II	meliputi Wilayah Seram Barat;
3.	Gugus Pulau III	meliputi Wilayah Seram Utara;
4.	Gugus Pulau IV	meliputi Wilayah Seram Timur;
5.	Gugus Pulau V	meliputi Wilayah Seram Selatan;
6.	Gugus Pulau VI	meliputi Wilayah Kepulauan Banda, P.Teon, P.Nila dan P.Serua;
7.	Gugus Pulau VII	meliputi Wilayah Pulau Ambon dan PP. Lease;
8.	Gugus Pulau VIII	meliputi Wilayah Kepulauan Kei;
9.	Gugus Pulau IX	meliputi Wilayah Kepulauan Aru;
10.	Gugus Pulau X	meliputi Wilayah Kepulauan Tanimbar;
11.	Gugus Pulau XI	meliputi Wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa, Lakor dan Damer;
12.	Gugus Pulau XII	meliputi Wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetar.

Tabel 21. Daftar Gugusan Pulau untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah Provinsi Maluku

**SUMBER:** BPS

respons dengan melakukan riset mendalam soal itu.

Bidang perkebunan kini ibaratnya jadi “adik bungsu” yang selayaknya mulai diperhatikan. Soalnya, dalam rencana pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019, perkebunan tidak atau belum menjadi prioritas. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa prioritas pembangunan nasional 2015-2019 untuk wilayah Maluku, yang diarahkan sebagai produsen makanan laut dan lum-bung ikan nasional, adalah per-

cepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan dan pariwisata bahari. Catat, hanya dua hal ditekankan, yakni perikanan dan pariwisata bahari.

Maka, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku, ditekankan bahwa salah satu arah perencanaan hingga 2024 adalah peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis, dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi dan investasi serta pariwisata.

No.	Capaian	2021	2023
1.	Produk Domestik Bruto (dalam Miliar)	48.893,68	58.489,79
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,63	5,21
3.	Inflansi Kota Ambon (%)	4,05	2,77
4.	Ekspor (dalam US\$)	56.602,13	83.610,21
5.	Impor(dalam US\$)	151.527,58	303.251,15
6.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.862.626	1.920.462

Tabel 22. Capaian Provinsi Maluku sepanjang 2021-2023

SUMBER: BPS

Selama ini, berdasarkan RP-JMD 2019-2024, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku antara lain tertuang dalam poin-poin isu strategis sebagai berikut.

- Sumberdaya manusia unggul dan kompetitif;
- Kemiskinan dan pengangguran;
- Investasi pengembangan pariwisata dan budaya daerah.

Sedangkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah, pemerintah memakai pendekatan wilayah yang didasari konsep gugus pulau. Maklum, inilah wilayah seribu nusa.

Ke-12 gugusan tersebut dapat dilihat pada tabel 21.

Hasilnya? Pada 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku merilis capaian pemerintah sepanjang 2021-2023. Angka-angka penting yang layak disimak terdapat pada

tabel 22.

Sumbangan bidang perikanan (bersama pertanian dan kehutanan) tercatat paling besar sehingga membuat angka-angka di atas terlihat indah. Kiranya, cukup layak tiga jagoan ekonomi Maluku, yakni perikanan, pariwisata, dan perkebunan, ditelaah ringkas satu demi satu di sini, guna melihat posturnya secara lengkap.

## Perikanan dan Sejumlah Catatan

Pada 2022, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbangkan 23,56 persen perekonomian Maluku. Dari angka itu, subsektor perikanan memberikan saham 13,3 persen—sebuah kontribusi yang cukup berarti.

Ada faktor alamiah yang memungkinkan capaian di bidang perikanan tersebut, yakni luasnya area perairan di sana. Data menunjukkan, dari seluruh wilayah



*Petani cengkeh. Dok Tempo/Aris Andiranto*

administratif Provinsi Maluku seluas 712.479,65 kilometer persegi, sekitar 92,4 persennya (658.294,69 kilometer persegi) merupakan lautan.

Selain itu, secara geografis, Maluku berada di pusat sabuk segitiga emas terumbu karang dunia (*coral triangle*) sehingga kaya akan sumber daya ikan. Selain memiliki potensi perikanan tangkap, perairan Provinsi Maluku dan sekitarnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk pengembangan perikanan budi daya, sesuai dengan lingkungan strategis dan potensi enam sumber daya lahan yang

tersedia. Di sektor ini sekarang terdapat 33 industri skala besar yang beroperasi memanfaatkan anugerah kekayaan perikanan.

Ada tiga aspek yang bisa digarap dari potensi perikanan ini, yakni penangkapan, budi daya, dan pengolahan. Hanya, sayangnya, ketiga aspek itu belum berkembang bersama-sama. Sisi penangkapan sejauh ini yang menjadi juaranya.

Para periset konsorsium meyakini angka ikan tangkap sebenarnya jauh lebih besar daripada data resmi pemerintah. Sebab, banyak usaha penangkapan ikan

dalam skala kecil yang tak tercatat di BPS. Lembaga statistik tersebut memang hanya mencatat penangkapan ikan dengan kategori tertentu.

Penangkapan ikan skala kecil ini biasanya dilakukan dengan alat tangkap sederhana dan terbatas. Para pelaku tidak memiliki alat tangkap dengan *gross tone* yang besar karena tak memiliki modal yang cukup. Hanya, “pemain” di lahan ini sangat banyak dan mereka melakukan pembongkaran hasil tangkapan di pasar-pasar tradisional atau modern.

Selain itu, banyak kasus penangkapan ikan di Maluku tidak melewati jalur yang semestinya, sehingga juga tak tercatat. Misalnya, ada perusahaan perikanan yang tak memiliki sarana darat. Perusahaan semacam ini beroperasi di lautan, lalu melakukan *loading* ikan dari kapal tangkap ke kapal ekspor. Praktis, modus seperti ini tak tercatat oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kasus lain adalah seperti yang terjadi di Kepulauan Kei, Tual, dan Maluku Tenggara. Di kawasan itu, komoditas yang cukup besar adalah telur ikan terbang. Produk ini dijual ke pasar Jepang dengan harga yang mahal. Tapi, diketahui, kebanyakan yang melakukan penangkapan bukanlah warga Maluku, melainkan dari daerah

lain. “Mereka menggunakan perahu-perahu kayu, datang ke sini, dan mencari telur ikan terbang. Dari proses penangkapan sampai dengan dibawa keluar itu kebanyakan tidak tercatat,” ujar salah satu peneliti dari konsorsium.

Praktik lain adalah penjualan ikan kerapu dan lain-lain di tengah laut. Modusnya, setelah ditangkap, ikan ditampung dulu di dalam keramba di tengah laut. Kemudian kapal dari luar datang mendekat dan di sana terjadi transaksi sehingga tak tercatat oleh Dinas PTSP. “Akibatnya, Provinsi Maluku juga tak mendapatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari situ,” kata peneliti tersebut.

Seandainya praktik-praktik kurang manis itu bisa diperbaiki, sudah pasti sumbangan terhadap ekonomi daerah kian besar. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada 2023, berkat ekspor di bidang perikanan ini, Maluku mencatatkan devisa sebesar US\$ 32.049.301. Sedangkan total berat bersih tangkapan adalah 7.132.605 kilogram. Ekspor ini didominasi komoditas ikan beku, ikan hidup, dan udang beku.

Meski tak seserius kegiatan tangkap ikan, masalah juga menimpa di sisi budi daya perikanan. Potensi di sisi ini sangatlah besar karena lahan yang tersedia juga amat luas, yakni mencapai 495.300 hektare. Hanya, dari me-

limpahnya lahan tersebut, pemanfaatannya baru 4 persen.

Kepada media nasional, Kepala Bidang Budi Daya Pengolahan Pemasaran Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Karolis Iwamony mengatakan, untuk kegiatan budi daya perikanan, pemerintah telah menetapkan lima prioritas pengembangan. Lokasi pengembangan tersebut adalah wilayah Maluku Tengah dengan budi daya kepiting, Kota Tual untuk budi daya teripang, dan Kabupaten Maluku Tenggara menjadi kampung budi daya rumput laut.

Di luar ketiga area itu, pemerintah menetapkan Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru, serta Kabupaten Buru Selatan untuk pengembangan rumput laut. Pemerintah juga mengembangkan potensi pembudi daya skala kecil, seperti di wilayah Kota Ambon.

BPS Maluku mencatat nilai tukar pembudi daya ikan (NTPi) meningkat positif beberapa waktu terakhir. Pada 2019, nilai NTPi berada di angka 108,2, lalu turun akibat pandemi Covid-19 menjadi 90,14 (2020). Setelah itu, kondisi terus membaik dan NTPi melejit berturut-turut menjadi 97,63 (2021), 109,19 (2022), dan 116 pada akhir 2023.

Sementara itu, di kegiatan pengolahan, selama ini pengusaha banyak menasar komoditas ikan kering, ikan asin, dan ikan asap.

Data 2019 menunjukkan jumlah unit pengolahan ikan di Maluku mencapai 1.184 untuk skala mikro-kecil dan 20 untuk menengah-besar.

## **Wisata dan Akses Kepulauan**

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tak bisa menyembunyikan kekagumannya saat berkunjung ke Pantai Ngurbloat, Desa Wisata Ngilngof, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Oktober 2021. Pasir yang terhampar sepanjang pantai begitu halus hingga sangat mirip tepung. “Pantai Ngilngof memiliki kehalusan pasir yang terbaik di dunia,” kata Sandiaga.

Kunjungan Sandiaga ke Maluku itu adalah ikhtiar pemerintah untuk mendorong kemajuan pariwisata di sana. Pemerintah, kata dia, akan membantu promosi desa wisata itu agar dikenal lebih luas oleh wisatawan dalam dan luar negeri.

Desa wisata (deswita) memang akan dijadikan salah satu ujung tombak untuk menggairahkan pariwisata Maluku. Alasan lain adalah petualangan bawah laut yang menjanjikan panorama menakjubkan. Lalu ada kekayaan historis, keindahan alam, serta keunikan lokal yang menjadi modal

menarik minat turis.

Keputusan menjadikan pariwisata sebagai pendongkrak ekonomi adalah pilihan jitu. Provinsi ini memang menyimpan harta wisata yang berlimpah. Obyek dan daya tarik wisata budaya tersebut tersebar di 12 gugus pulau. Jika dipetakan, kekhasan setiap gugus antara lain sebagai berikut.

- Kepulauan Banda - potensi bahari dan peninggalan sejarah;
- Maluku Tengah - Pantai Ora dan Sawai;
- Seram Bagian Barat - Danau Sole;
- Seram Timur di Pulau Koon;
- Kepulauan Kei - Pantai Ngurbloat dan Pulau Bair;

Mengembangkan deswita dinilai pilihan paling tepat dan rasional saat ini. Kondisi geografis Maluku yang berupa kepulauan menjadi persoalan tersendiri bagi wisatawan. Perjalanan antarpulau memerlukan waktu lama jika ditempuh lewat jalan laut. Sedangkan jika menggunakan transportasi udara, pelancong harus merogoh kantong lebih dalam.

Desa wisata menjadi solusi karena skala industrinya yang masih kecil dan tak membutuhkan area luas, Biasanya di sekitar deswita juga tumbuh banyak *homestay* yang jauh dari keramaian. Deswita di Maluku kebanyakan berada di pesisir, sehingga pantai dan lautan menjadi menu utama

kegiatan pengunjung.

Di seluruh provinsi saat ini tercatat ada sekitar 240 deswita dengan beberapa kategori. Pemerintah menyusun klasifikasi ini berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yakni mandiri, maju, berkembang, dan rintisan. Desa Wisata Ngilngof yang dikunjungi Sandiaga Uno itu masuk level "maju". Desa ini pernah memenangi penghargaan di tingkat ASEAN.

Ratusan deswita itu tersebar di sebelas kabupaten/kota. Karena kebanyakan berada di pesisir, hamper 95 persen menjadikan pantai sebagai *core product*-nya. Keseragaman ini dinilai bisa menjadi kontraproduktif karena pelancong tak punya banyak pilihan.

Akibatnya, setelah mengunjungi sebuah deswita, mereka tak punya minat menjajal deswita lain karena akan mendapatkan hal yang kurang-lebih sama. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah para pemangku kepentingan untuk mencari jalan keluarnya. Deswita mesti terus berkembang untuk menjaga denyut nadi pariwisata Maluku.

Cabang wisata lain yang sedang digeber adalah tamasya ke bawah laut. Maluku memang memiliki panorama di bawah permukaan air yang memesona. Banyak sekali terumbu karang dan titik lain yang belum disentuh, yang punya potensi cukup besar untuk



Bunga (fuli) dan biji buah pala di Maluku. Dok TEMPO/STR/Iqbal Lubis

dikembangkan.

...

Fokus pada pengembangan materi wisata tersebut sebaiknya diimbangi pula dengan ikhtiar mencari jalan keluar atas mahalnnya biaya transportasi kepulauan. Kendala biaya ini tak dialami saat wisatawan berada di Maluku, tapi pelancong dari luar daerah perlu menabung lama untuk menebus tiket pesawat ke Maluku. Kadang, dari beberapa tempat, biaya penerbangannya masih lebih mahal ketimbang menuju Jawa atau Singapura.

Karena kondisi tersebut, muncul gagasan bahwa wisata ke Maluku sebaiknya menyasar orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi, jadi *special interest*

*tourism* untuk mereka yang punya banyak uang. Konsep wisata semacam ini memang harus bersiap bahwa tak akan banyak pelancong datang, tapi saat mereka muncul bakal terjadi pengeluaran tinggi. Tentu cara ini butuh promosi tertentu juga dari para pemilik kepentingan.

...

Riset yang dihasilkan konsorsium menemukan berbagai isu strategis yang patut diperhatikan. Temuan isu ini amat berkaitan dengan inovasi pengembangan pariwisata.

a. Tingkat kunjungan wisatawan yang rendah dapat menjadi masalah serius bagi destinasi pariwisata. Sebab, hal itu akan berdampak pada pendapatan

daerah. Ujungnya, kemampuan pemerintah untuk berinvestasi juga berkurang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya potensi daya tarik wisata di berbagai daerah di Provinsi Maluku yang belum tersentuh pengembangan.

- b. Kemampuan desa wisata untuk menciptakan diversifikasi produk pariwisata dan atraksi wisata kurang beragam. Kebanyakan masih berkuat pada atraksi wisata alam, budaya, dan sejarah. Hal ini diyakini kurang menarik minat wisatawan. Namun, disadari, keseragaman itu disebabkan oleh kurangnya permodalan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia kepariwisataan.
- c. Biaya akses yang mahal untuk berwisata di Maluku bisa menjadi kendala bagi banyak wisatawan.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (media sosial, YouTube, dan lain-lain) dalam mempromosikan potensi dan daya tarik wisata masih kurang. Memang biaya produksi konten multimedia tidak kecil, bergantung pada kualitas dan kompleksitasnya. Pemanfaatan teknologi ini memerlukan peralatan cukup mahal, terutama untuk infrastruktur teknologi seperti komputer spesifikasi tinggi. Peralatan fotografi dan

videografi juga tidak murah. Produksi digital membutuhkan kamera, lensa, tripod, dan peralatan pencahayaan untuk konten visual berkualitas tinggi.

## **Perkebunan**

Sektor perkebunan muncul dalam perbincangan setelah dipresentasikan oleh Kepala Bappeda Maluku dalam FGD. Disebutkan, ada tiga komoditas yang tengah dikembangkan pemerintah, yakni kelapa, cengkih, dan pala. Masing-masing dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah di Provinsi Maluku.

Kelapa dikembangkan di setiap kabupaten karena secara alamiah pohon ini tumbuh di dataran pantai. Namun produksi kelapa terbesar ada di Kabupaten Maluku Tengah karena secara geografis wilayahnya paling luas di Provinsi Maluku. Cengkih banyak tumbuh di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah, sedangkan pala juga di Maluku Tengah.

Luas lahan panen kelapa pada 2023 mencapai 115.140 hektare lebih dan jumlah produksinya di angka 109.615,29 ton. Pengolahan pascapanen baru sampai menjadi bahan setengah jadi, misalnya kopra. Sejauh ini, belum ada yang mengolah kelapa menjadi produk turunan.

Tentu kondisi tersebut kurang

nyaman untuk menjawab keperluan penyerapan tenaga kerja. Sebenarnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa *sat-set* bergerak cepat menangkap peluang emas ini. UMKM bisa berperan sebagai tempat produksi, misalnya membuat *coconut oil*, sabun, dan juga *cream*.

Untuk komoditas cengkih, Maluku saat ini memiliki lahan panen seluas 45.087 hektare dan tahun lalu produksinya mencapai 22.016 ton. Berbeda dengan kelapa, warga sudah mengolah cengkih menjadi produk turunan, misalnya minyak asiri. Proses pengolahan ini masih dilakukan industri rumah tangga dan UMKM.

Selain itu, dari tanaman cengkih, warga berkreasi membuat hiasan, misalnya miniatur perahu. Hanya, produk ini baru bisa dipasarkan secara lokal dan kebanyakan pembelinya turis musiman.

Guna lebih mengoptimalkan komoditas ini, pemerintah akan membangun sebuah pusat sains dan teknologi pencengkih di Kota Ambon. Beberapa kabupaten ditunjuk untuk mendukung program ini, antara lain Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Maluku Tengah.

Sementara itu, untuk pala, tersedia lahan panen seluas 36.735 hektare lebih dengan produksi mencapai 6.048 ton (2023). Komoditas ini dimanfaatkan biji-

nya untuk diekspor karena belakngan harganya menggiurkan. Biji pala sudah menembus pasar Eropa, antara lain ke Belanda.

Selain biji pala, seharusnya dagingnya bisa dimanfaatkan, misalnya diolah menjadi manisan. Tapi peluang ini belum tersentuh tangan-tangan kreatif untuk memulainya.

Di luar tiga komoditas unggulan itu, ada satu tanaman yang patut diperhatikan, yakni kayu putih. Tanaman yang tumbuh sendiri ini diyakini menyimpan potensi besar untuk ikut berperan dalam ekonomi daerah.

Tanaman ini secara tradisional banyak tumbuh di Kabupaten Buru, di Pulau Buru. Namun belakngan kayu putih juga ditemukan di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Ambon.

Kebanyakan yang terjun ke bidang ini adalah kelompok usaha, selain perseorangan. Maklum, untuk mengolah bahan ini, dibutuhkan modal cukup besar.

• • •

Pekerjaan rumah untuk meningkatkan performa tiga sektor andalan provinsi ini tidaklah banyak, tidak sampai “seribu”. Tapi tetap dituntut perhatian dan komitmen beribu kali lipat dari pemerintah dan *stakeholder* untuk mengatasinya. Itu hal yang mutlak jika menginginkan kawasan ini makin elok dan manise.

## PETA JALAN MENJAWAB TANTANGAN

Provinsi Maluku, yang berupa kepulauan, mempunyai tantangan tersendiri dalam pembangunan daerahnya. Kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Maluku memiliki karakteristik dan potensi yang mirip. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi pun hampir sama.

Salah satu permasalahan tersebut adalah problem kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Untuk itu, diperlukan inovasi yang sesuai dengan potensi wilayah setiap kabupaten/kota. Secara umum, saat ini, perkembangan industri yang begitu cepat belum bisa diikuti peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Kondisi ini berdampak pada keadaan ekonomi dan keterserapan tenaga kerja lokal.

Menurut data RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2018-2023, jumlah penduduk miskin di Maluku pada Maret 2019 sebanyak 317,69 ribu jiwa (17,69 persen). Sedangkan tingkat pengangguran terbuka merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia pada Agustus 2018. Kondisi demikian berpengaruh pada kesiapan tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan industri.

Sampai saat ini, di Provinsi

Maluku baru terdapat dua lembaga pendidikan vokasi, yakni Politeknik Negeri Ambon dan Politeknik Perikanan Negeri Tual, yang berfokus pada penyiapan lulusan. Sayangnya, belum ada data resmi mengenai jumlah lulusan yang sudah bekerja, kesesuaian pekerjaan, dan perolehan besaran gaji yang diterima. Padahal kedua pendidikan tinggi vokasi itu sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan DUDI sesuai dengan kompetensinya.

Saat ini, kesenjangan jumlah lulusan politeknik dengan kebutuhan DUDI, termasuk UMKM, masih tinggi. Sebagian besar lulusan masih berorientasi menjadi pegawai negeri. Berbagai program unggulan yang direncanakan, seharusnya ditunjang SDM lulusan pendidikan vokasi yang mumpuni. Tujuannya agar bisa menjembatani pemenuhan kebutuhan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan kebutuhan DUDI.

Salah satu program unggulan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 adalah Maluku Sejahtera. Tema-tema yang diusung melalui program ini akan dilaksanakan dengan mengembangkan ekonomi lokal melalui penciptaan

Saat ini, kesenjangan jumlah lulusan politeknik dengan kebutuhan DUDI, termasuk UMKM, masih tinggi.

Sebagian besar lulusan masih berorientasi menjadi pegawai negeri. Berbagai program pemerintah, termasuk program unggulan yang direncanakan, seharusnya ditunjang SDM lulusan pendidikan vokasi yang mumpuni.

gerakan ekonomi kreatif, peningkatan nilai tambah produk lokal, pembangunan jaringan distribusi dan pemasaran, serta pengelolaan sumber daya alam strategis lainnya.

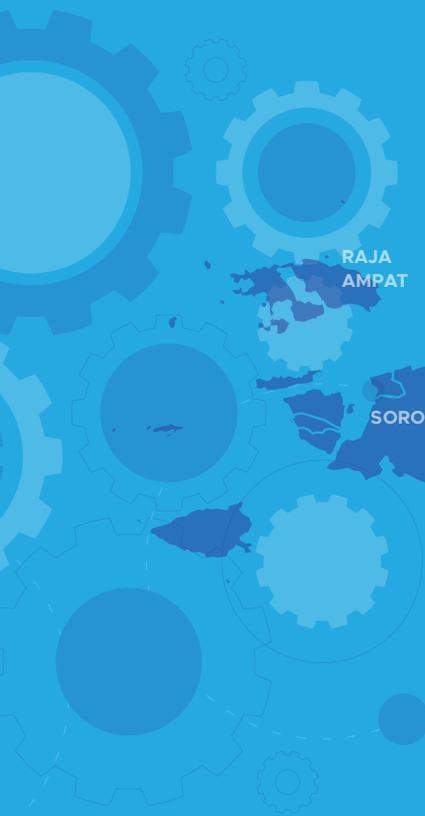
Rencana aksi implementasi yang telah diatur dan akan dilakukan adalah Satu Desa Satu Produk, gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah, serta peningkatan daya saing produk olahan sumber daya alam. Rencana aksi ini tentu membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan agar tingkat keberhasilannya tinggi.

Untuk memperkuat ekosistem kemitraan antara DUDI dan pendidikan vokasi, dilakukan

*grand design* riset pengembangan inovasi di daerah/wilayah yang mengacu pada potensi dan keunggulan serta agenda prioritas pembangunan daerah. Metodologi yang dipakai adalah *foresight and system dynamics*.

Setelah semua tahapan dilalui, ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. *Drivers of change* yang teridentifikasi adalah *political will* dan kualitas SDM.
2. Prioritas program pada *scenario planning* yang disusun di antaranya penyediaan beasiswa perdesaan, Satu Desa Satu Produk, Satu Desa Satu Industri, dan penyediaan rantai pasok produk unggulan daerah.
3. Orientasi kebijakan pada rencana penguatan ekosistem yang terkait dengan *political will* adalah penyesuaian *stakeholder* dengan pemerintah terpilih, percepatan pembangunan dan perekonomian daerah, serta optimalisasi kemitraan Provinsi Maluku.
4. Orientasi kebijakan pada rencana penguatan ekosistem yang terkait dengan kualitas SDM adalah kurikulum pendidikan vokasi berbasis potensi daerah Maluku, sinergi lembaga pendidikan vokasi dan desa, serta industri desa komoditas ekspor.





# PROVINSI PAPUA BARAT: **MAMA BUMI 4.0**

## **TIM KERJA PENERIMA PROGRAM WILAYAH PAPUA BARAT:**

**Ketua:** *Syukron Anas (Politeknik Negeri Fakfak)*

**Anggota:**

1. Politeknik Negeri Fakfak: *Aqilah Attamimi, Dessy Eka Kuliahsari, Muhammad Nur, Muh. Subhan, Zharin Fahra Syahdinar, Nurul Husnah*
2. Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari: *Triman Tapi, Bangkit Lutfiaji Syaefullah*
3. Pendidikan Vokasi Universitas Negeri Papua: *Obadja Andris Fenetiruma, Dedi I. Inan*
4. Politeknik Lengguru Kaimana: *Gustaf Doland Wewra, Herningsih*

*Revolusi Industri 4.0 bertemu dengan budaya peramu di Papua Barat. Berharap tetap memuliakan Mama Bumi.*

Siapa tak ingin berinvestasi di sini. Gunung-gunungnya kaya bahan tambang. Bukit dan lembahnya rapat oleh pohon bernilai tinggi, merbau namanya, yang kayunya menjadi lantai rumah orang-orang berpunya di seluruh dunia.

Tanahnya telah menumbuhkan pohon cokelat paling enak di bumi dan pohon pala yang buahnya lonjong dan—mungkin karena itu—efeknya lebih menenangkan dibanding pala Maluku. Lalu, di dahan-dahan pohon, di perbatasan rawa-rawa dan hutan lebat, burung-burung surga bermain setiap pagi dan senja.

Sementara itu, di laut, cerita bisa kita mulai dari pantainya atau dari lautnya, dari permukaan atau dari dasarnya. Di sini ada pantai dengan pasir berwarna *pink*, di Pulau Aiduma. Di lepas pantai, ada puluhan hiu paus raksasa untuk teman berenang.

Ada pula Teluk Triton, yang menjadi bagian dari segitiga karang dunia. Demikian beragamnya spesies di hamparan perairan ini, sehingga Conservation International memaklumatkannya sebagai kerajaan ikan terpadat di bumi.

Dan senja di sini, *Kawan*, sulit mencari bandingannya. Cahaya matahari yang memantul di permukaan laut membentuk pelangi, tanpa perlu turun hujan. Lalu pelangi itu masuk ke rumah-rumah.

Perkenalkan: Papua Barat—itu sudah namanya.

Semula, sampai 2022, sebelum Tanah Papua dibagi menjadi enam provinsi, wilayahnya mencakup pula Papua Barat Daya. Kini, Papua Barat baru seperti memotong Tanah Papua menjadi dua bagian, timur dan barat, dari utara ke selatan. Wilayah paling utara adalah Kota Manokwari dan Kabupaten Manokwari. Di sebelahnya Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, dan paling selatan Kaimana, yang keindahannya saat senja ditulis Alfian dalam lagu *Senja di Kaimana*, yang sangat populer pada 1960-an.

Provinsi seluas 64.134,66 kilometer persegi ini dihuni 565,8 ribu jiwa per 2023 atau per kilometer persegi hanya ditinggali sembilan jiwa. Mereka penduduk asli dan ada pula pendatang.



*Aktifitas mahasiswa Politeknik Pengembangan Pertanian Manokwari, Papua.  
Humas Polbangtan Manokwari*

Penduduk asli menganggap tanah mereka adalah ibu, “Mama Bumi”, karena memberikan kehidupan, seperti ibu memberikan susu dan madu. Apa pun kebutuhan mereka, Mama Bumi sudah menyediakannya. Tinggal ambil, hanya perlu meramunya. Sampai suatu ketika, modernisasi yang membawa pula kapitalisme, membuat kebutuhan kian beragam dan untuk mencukupinya perlu alat tukar uang.

Budaya meramu tertatih-tatih mengikuti laju modernisasi. Ketika Revolusi Industri 1.0 mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, budaya Papua masih peramu, selevel di bawah budaya agraris. Ketika Revolusi Industri 2.0 datang dan mesin-mesin industri kian efisien, budaya di Papua masih meramu. Demikian pula ketika Revolusi Industri 3.0 datang, berupa otomatisasi proses produksi yang didorong teknologi komputer dan robot, orang Papua kebanyakan masih sebagai peramu. Hingga sekarang, di era Revolusi Industri 4.0, ketika orang-orang berbicara tentang kecerdasan buatan (AI), robotika, Internet of Things (IoT), pencetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya, sebagian orang Papua masih bergantung pada pemberian langsung Mama Bumi.

Papua Barat juga tetap terasa jauh, ketika 78,28 juta perjalanan di Indonesia telah dilakukan dengan pesawat setiap tahun. Biaya penerbangan dari Jakarta ke Kaimana, Papua Barat, lebih mahal daripada penerbangan dari Jakarta ke Helsinki, Finlandia, di Benua Eropa sana. Biaya pesawat dari Jakarta ke Kaimana sekitar US\$ 630, sedangkan ke Helsinki US\$ 363–618. Ini bukan karena jarak Jakarta–Kaimana lebih jauh, karena hanya sekitar 3.011 kilometer. Jarak Jakarta–Helsinki malah tiga kali lipatnya.

Namun Papua Barat bukan tak tumbuh. Dalam lima tahun terakhir, provinsi ini mengalami transformasi ekonomi yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan PDB regionalnya sekitar 5 persen per tahun, di atas pertumbuhan nasional (3,69 persen) pada 2021. Pertumbuhan ini terutama didorong ekspansi di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan.

Kabupaten seperti Manokwari dan Teluk Bintuni perlahan-lahan menjadi pusat kegiatan ekonomi, terutama dalam pengembangan agrobisnis dan industri ekstraktif. Sementara itu, sektor pariwisata di Kaimana dan Manokwari Selatan menunjukkan potensi yang luar biasa, didukung keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang

tinggi.

Berkat penciptaan lapangan kerja baru dan efektivitas program penyiapan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, angka pengangguran di Papua Barat menurun dari 9 persen ke 7 persen dalam lima tahun terakhir. Kabupaten seperti Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama telah mengalami peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja berkat investasi di sektor pertanian dan wisata alam.

Investasi meningkat signifikan, berhasil menarik investor domestik dan asing, terutama di sektor pariwisata, energi terbarukan, dan agrobisnis. Kebijakan insentif fiskal dan kemudahan perizinan menjadi faktor penting dalam menarik investasi ini, dengan Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni menonjol sebagai daerah investasi utama.

Ekspor Papua Barat juga bertumbuh, khususnya untuk komoditas seperti emas, minyak kelapa sawit, dan hasil laut. Impor, terutama terdiri atas mesin dan peralatan, juga meningkat, menandakan upaya mendukung ekspansi industri lokal dan pembangunan infrastruktur.

Indeks pembangunan manusia di Papua Barat menunjukkan peningkatan, dengan perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan

standar hidup. Penyebabnya adalah peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil, seperti Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama.

Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya ketidakmerataan pembangunan antar-kabupaten, ketergantungan pada sektor-sektor ekstraktif, dan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Pemerataan pembangunan menjadi tantangan besar di Papua Barat karena kondisi geografisnya yang unik, rumit, dan keras, yang mencerminkan kompleksitas aspek ekonomi, sosial, budaya, dan geografis. Misalnya, Manokwari terletak di kepala burung Pulau Papua dengan variasi geografis dari pantai hingga pegunungan. Kabupaten Pegunungan Arfak, seperti namanya, melulu berupa pegunungan dan merupakan bagian dari Pegunungan Arfak.

Sementara itu, Kabupaten Fakfak, yang terletak di bagian barat daya Papua Barat, memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang Laut Seram dan Teluk Berau. Kondisi geografisnya yang beragam mencakup pantai, bukit, dan area hutan.

Kaimana, yang terletak di

pantai barat Teluk Triton, memiliki perairan biru dan hutan mangrove. Di sisi lain, Kabupaten Manokwari Selatan memiliki kondisi geografis yang beragam dengan pantai, dataran rendah, dan pegunungan.

Karena itu, infrastruktur dan aksesibilitas menjadi kunci pemerataan pembangunan serta pengembangan ekonomi dan sosial. Investasi dalam infrastruktur dapat membuka peluang baru dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Namun hal ini memerlukan komitmen dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan.

Tantangan lain adalah ketergantungan ekonomi Papua Barat pada sektor sumber daya alam, termasuk pertambangan, perikanan, dan kehutanan, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Fluktuasi ini memiliki dampak signifikan tidak saja terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi juga terhadap lapangan kerja. Soalnya, sektor sumber daya alam menjadi penyedia pekerjaan utama di Papua Barat.

Dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, Papua Barat sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk pengembangan eko-

nomi yang berkelanjutan, tahan gejolak, dan memuliakan Mama Bumi. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan peran aktif dan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan, dari pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, lembaga pendidikan, hingga organisasi non-pemerintah (NGO).

Masyarakat lokal memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi ini, melalui partisipasi aktif mereka dalam ekonomi lokal, pelestarian budaya dan lingkungan, serta melalui inisiatif kewirausahaan. Mereka juga merupakan sumber pengetahuan lokal yang vital untuk pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan pariwisata berkelanjutan ini. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan dan akses ke sumber daya ekonomi menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan.

Yang juga menjadi modal lokal adalah ketahanan dan adaptabilitas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua Barat. Mereka telah menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan sosial, termasuk perubahan iklim, bencana alam, serta konflik sosial, dan berhasil bertahan serta beradaptasi dengan menggunakan pengetahuan



*Pengajaran di ruang mini konveksi, SMK Pusat Keunggulan (PK), Fakfak, Papua Barat, April 2023. Dok Tempo*

lokal dan keterampilan tradisional mereka.

Setiap wilayah di Papua Barat juga punya keistimewaan sendiri-sendiri, yang bisa menjadi modal besar untuk pertumbuhan berkelanjutan. Manokwari Selatan dikenal dengan produksi kakao premiumnya. Biji kakao dari Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, telah mendapat pengakuan internasional karena kualitas premium dan cita rasanya yang unik. Baru-baru ini, kakao Ransiki berhasil meraih penghargaan bergengsi dan terhormat di industri kakao, 2023 Cacao of Excellence Gold Award.

Fakfak bahkan sudah punya komoditas unggulan sebelum Be-

landa datang. Pala namanya, yang dirawat warga seperti membesarkan anak sendiri. Berbentuk lonjong dengan aroma lebih lembut tapi lebih membuat rileks ketimbang pala dari Maluku, pala Fakfak sayangnya kehilangan nama begitu tiba di pasar tujuan. Di dapur-dapur, semua pala dianggap sebagai pala Maluku.

Adapun Kabupaten Teluk Wondama memiliki garis pantai yang panjang dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Letak geografisnya mencakup wilayah pantai dan hutan mangrove. Di sinilah Taman Nasional Teluk Cenderawasih berada. Tetangganya di barat, Kabupaten Teluk Bintuni, tak kalah kaya dengan bentangan

lahan gambut hingga pesisir.

Demi pembangunan yang berkelanjutan di wilayah-wilayah ini, pendidikan menjadi sangat penting. Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan akan menghasilkan lulusan yang siap memenuhi tuntutan pasar kerja lokal, mendorong inovasi dan kewirausahaan, serta memanfaatkan sumber daya Mama Bumi secara lestari.

Kajian yang dibuat untuk laporan ini menunjukkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada berbagai jenjang pendidikan di Papua Barat menunjukkan adanya peningkatan. Di Manokwari, APK dan APM pada semua jenjang pendidikan terus meningkat. Di Fakfak, APK dan APM relatif tinggi pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, tapi perlu ada peningkatan pada jenjang pendidikan lebih tinggi untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil yang dapat mendukung sektor ekonomi utama, seperti perikanan dan pariwisata.

Kaimana menunjukkan potensi besar dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan konservasi alam. Peningkatan APK di perguruan tinggi di Kaimana menunjukkan adanya kesadaran akan penting-

nya pendidikan tinggi dalam pengembangan profesional dan kewirausahaan.

Dengan fokus pada pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, Manokwari Selatan memerlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memastikan masyarakat lokal dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.

Sementara itu, Pegunungan Arfak, dengan tantangan geografisnya, membutuhkan strategi khusus dalam meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, khususnya untuk mendukung sektor pertanian dan kehutanan berkelanjutan.

Adapun Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur pendidikan yang lebih baik serta program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal, termasuk sektor perikanan, kelautan, dan energi.

Namun kajian ini juga menunjukkan terdapat gap signifikan antara jumlah lulusan pendidikan vokasi dan keahlian yang dibutuhkan pasar kerja di Papua Barat. Diperkirakan, hanya sekitar 40 persen kebutuhan tenaga kerja khusus yang bisa dipenuhi lulus-

an sekolah vokasi saat ini, yang menandakan perlunya investasi yang lebih besar dalam pendidikan vokasi, termasuk kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, peningkatan kapasitas pengajar, dan infrastruktur pendidikan. Investasi dalam pendidikan dengan fokus pada keahlian yang dibutuhkan pasar kerja merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.

Itu merupakan kebutuhan yang mendesak, karena kajian ini juga menemukan persentase kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor kritis menunjukkan tren peningkatan. Misalnya, di sektor teknologi informasi, diperkirakan akan ada peningkatan permintaan sebesar 25 persen dalam lima tahun ke depan. Sementara itu, sektor kesehatan dan pertanian berkelanjutan diperkirakan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja masing-masing sebesar 30 persen dan 20 persen.

Tantangan lain adalah adanya migrasi internal dan urbanisasi yang menciptakan peta baru tenaga kerja, baik dalam hal mobilitas pekerja maupun tekanan pada infrastruktur perkotaan. Kondisi ini juga dapat memengaruhi distribusi pendapatan dan standar hidup di berbagai wilayah.

Yang juga perlu diperhati-

kan benar mencakup aspek-aspek sosial, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, karena berdampak langsung pada produktivitas dan partisipasi tenaga kerja. Program-program pengembangan sosial dan kesejahteraan dapat membantu meningkatkan kondisi hidup pekerja.

Sebagian besar tenaga kerja di Papua Barat terlibat dalam sektor informal, yakni perdagangan tradisional, pertanian kecil, dan pekerjaan rumah tangga. Karena itu, perlu ada pemahaman terhadap karakteristik sektor informal untuk memberikan wawasan tentang dinamika ketenagakerjaan di tingkat mikro. Aspek budaya dan isu seperti keberlanjutan lingkungan, hak asasi manusia, dan partisipasi gender juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk kondisi kerja dan pengembangan ekonomi di Papua Barat.

Dengan strategi yang tepat, Papua Barat dapat mengatasi tantangan pembangunan dan memanfaatkan potensinya yang unik untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan itu tadi—memuliakan Mama Bumi. Maka kita akan melihat masyarakat Papua Barat memasuki era Industri 4.0 dengan caranya sendiri, era Mama Bumi 4.0.

## PENDIDIKAN VOKASI UNTUK MEMULIAKAN MAMA BUMI 4.0

Papua Barat memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkat kekayaan alam dan budayanya yang luar biasa. Potensi itu kian bernilai di era Industri 4.0 yang lebih efisien dan, seharusnya, lebih berkelanjutan. Namun pemanfaatan potensi tersebut menghadapi tantangan berupa ketidakersediaan tenaga kerja, ketidakmerataan pembangunan, ketergantungan pada sektor ekstraktif (terutama pertambangan dan kehutanan), serta kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Pemetaan dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja oleh konsorsium perguruan tinggi vokasi (PTV) di provinsi dengan tujuh kabupaten/kota ini menemukan sejumlah isu utama. Isu tersebut di antaranya kesenjangan antara lulusan pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja. Ditemukan hanya sekitar 40 persen dari kebutuhan tenaga kerja khusus yang bisa dipenuhi lulusan vokasi saat ini, yang menunjukkan perlunya peningkatan investasi dalam pendidikan vokasi.

Isu lain adalah adanya kebutuhan tenaga kerja di sektor kritis, seperti teknologi informasi, kesehatan, dan pertanian berke-

lanjutan, yang dalam lima tahun ke depan diperkirakan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja. Ada pula persoalan yang dipicu migrasi internal dan urbanisasi, karena mengubah pola mobilitas pekerja dan tekanan pada infrastruktur perkotaan serta dapat memengaruhi distribusi pendapatan dan standar hidup.

Isu-isu di atas perlu diatasi. Jika tidak, Papua Barat akan terus bergantung pada industri ekstraktif dan pembangunan sukar dibuat merata. Mama Bumi—sebutan di Papua Barat kepada tanah air—juga terancam oleh industri macam ini karena tidak ramah lingkungan dan tak berkelanjutan.

Lembaga pendidikan vokasi memiliki peran penting untuk mengatasi persoalan tersebut dan membantu masyarakat lokal memasuki era Mama Bumi 4.0. Untuk itu, kajian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

Investasi dalam pendidikan vokasi perlu ditingkatkan, dengan berfokus pada penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), peningkatan kapasitas pengajar, serta peningkatan infrastruktur pendidikan.

PTV dan sekolah menengah



*Pemilihan buah pala untuk diolah di Papua Barat. Dok TEMPO/STR/M. Iqbal Ichsan*

kejuruan berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya di sektor kritis seperti teknologi informasi, kesehatan, dan pertanian berkelanjutan.

Para pemangku kepentingan—lembaga pendidikan vokasi, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan NGO—harus

bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi syarat wajib, yang dilakukan melalui pendidikan dan penyediaan akses ke sumber daya ekonomi.

# **YANG TERLIBAT DALAM PENELITIAN INI**

## **PENGARAH:**

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, *Tatang Muttaqin*
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, *Saryadi*
3. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, *Adi Nuryanto*

## **UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA:**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Periode 2022-2024, *Kiki Yuliati*
2. Direktur Fasilitas Riset LPDP Periode 2020-2024, *Wisnu Sardjono Soenarso*
3. Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Periode 2022-2024, *Uuf Brajawidagda*

## **TIM PELAKSANA DIREKTORAT MITRAS DUDI:**

*Yoggi Herdani, Novi Zulkarnaen, Agus Susilohadi, Rizal Aziz Muslim, Carolina, Agni Sakti Pribadi, Dela Fahriana Havityaningtyas, Ilham Basra, Isabel Sibarani, Roosida Taufani, Sjaeful Irwan, Akbar Agam Parmato, Anneu Dwi Muliani, Asha Eilena Khairunisa, Diah Ayu Eka Prasetyanti, Eko Supriyanto, Fajar Cahyono, Herry Sucipto, Iradhatie Wurinanda, M. Iqbal Tawakal, Misno Riyanto, Nuansa Fajar Ramadhan, Oma, Panji Akbar, Pribudhi, Sandika Laesa, Rivi Pratama, Uswatun Hasanah, Vida Megistra*

## **TIM PELAKSANA LPDP:**

*Dhani Setyawan, Purwana, Fahdiansyah Putra, Najib Husein, Budi Irawan, Bunga Fajar, Prihantini*

## **TIM PAKAR:**

*Adil Basuki Ahza, Alan F. Koropitan, Bambang Warsuta, Dewi Liliانا, Dharma Ariyani, Febrina Siahaan, Heddy Rohandi Agah, Heru Pranoto, Lilik Sudiadjeng, Luthfi Adam, Otto Purnawarman, Rifelly Dewi Astuti, Theresia Sembiring, Widita Kustrini*

Buku ini mencoba memetakan peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi, dengan mempelajari berbagai potensi, termasuk potensi Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini akan melahirkan perencanaan lulusan pendidikan vokasi dalam jumlah dan jenis jurusan serta kompetensi yang diperlukan di berbagai wilayah.

**Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D**  
**Rektor Universitas Yarsi**

---

Hasil Ekosistem Kemitraan (Ekosmira) tahap pertama yang ditulis kembali oleh TEMPO Institute ini bukan hanya memberikan deskripsi yang lebih jelas tentang aspirasi dan kebutuhan lapangan kerja di setiap wilayah kajian, tetapi juga menyadarkan para pihak dalam ekosistem Pendidikan Vokasi bahwa kita perlu meluaskan cakrawala pandang.

Bagi saya, Ekosmira memberi nyawa pada *link and match* Pendidikan Vokasi.

**Kiki Yuliati**  
**Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Periode 2022 – 2024**

---

Buku ini akan menjadi suplemen utama bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam membangun dan mengembangkan ekosistem kemitraan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang handal dan kompeten di dunia kerja.

**Dra. Sri Wahyuni, M.P.P. (Sekda Provinsi Kalimantan Timur)**

---

Kadin NTT mengapresiasi hadirnya Program Penguatan Ekosistem Kemitraan di NTT. Kiranya dengan program yang tertulis dalam buku ini, dapat mengangkat potensi di NTT, sehingga NTT bisa keluar dari daerah 3T dan menjadi daerah maju.

**Bobby Lianto, M.M., MBA.**  
**Ketua Kadin Nusa Tenggara Timur**

